



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA -

NOMOR 44 TAHUN 2025 -

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

#### Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026;
- b. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
- c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.

#### Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

#### Pasal 5

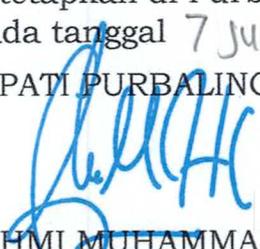
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Juli 2025  
BUPATI PURBALINGGA,

  
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDG's) serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk memberi panduan dalam pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. **Secara substansial**, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah; rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan; serta prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;
4. **Secara faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

2. Pendekatan Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat;
3. Pendekatan Politis, yaitu dilaksanakan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional serta pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Sedangkan secara substansif, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan :

1. Holistik-Tematik, yaitu proses dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor yang meliputi potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif, yaitu proses yang dilaksanakan dengan menyatukan wewenang dan sumber pendanaan dari seluruh pihak kedalam satu proses terpadu dengan fokus yang jelas;
3. Spasial, yaitu proses perencanaan dan pengendalian berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. Secara lebih rinci, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- 1). Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2). Penyusunan Rancangan Awal;
- 3). Penyusunan Rancangan;
- 4). Forum Perangkat Daerah;
- 5). Pelaksanaan Musrenbang;
- 6). Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 7). Penetapan.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

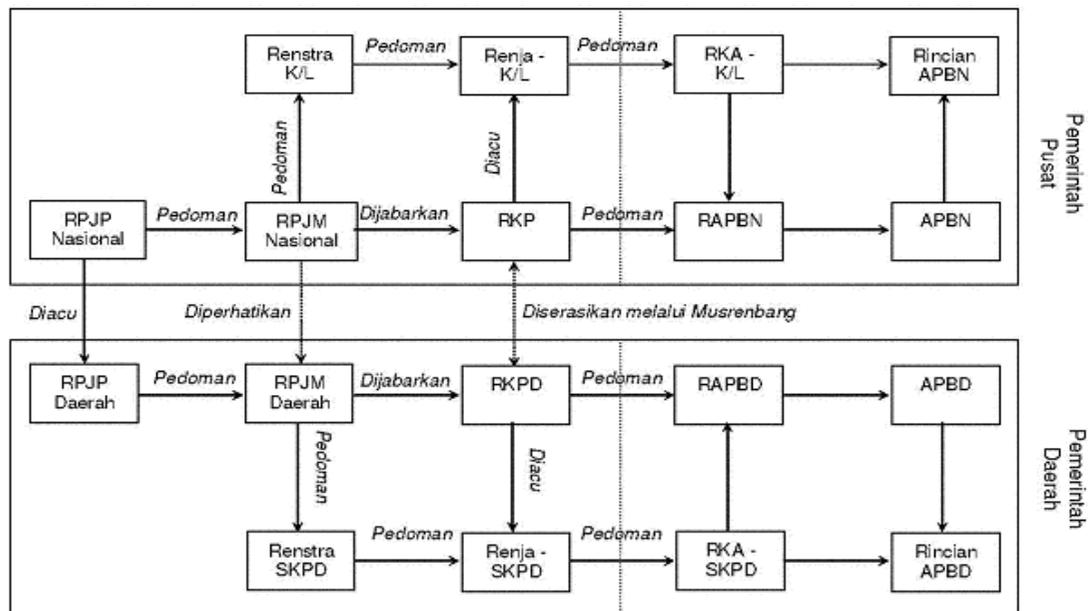
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406-Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar dokumen Perencanaan**

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan penelaahan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan di wilayah yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi sebagai bagian analisis dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian dapat diwujudkan keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung prioritas

pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang mengacu pada arah pembangunan tahap 1 RPJPN Tahun 2025 – 2045. Disamping itu, dokumen RKPD juga diselaraskan dengan Standar Pelayanan Minimum dan SDGs. Target kinerja yang terdapat dalam SPM dan SDG's sebagian telah masuk dalam RKPD tahun 2026 dan sebagian lain masuk dalam dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah tahun 2026.



Gambar 1.1.  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2026;
2. Menjabarkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
3. Mewujudkan sinergitas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menyediakan tolok ukur dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menggunakan indikator dan target kinerja mulai dari program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan pembangunan;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

## 1.5. Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan penyusunan RKPD; serta sistematika RKPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat tentang kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2024 mulai dari evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sampai dengan evaluasi pelaksanaan indikator kinerja program RKPD; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah sampai tahun 2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2026. Proyeksi keuangan daerah tahun 2026 antara lain mencakup tantangan serta prospek perekonomian daerah; sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2026; arah kebijakan/proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah sampai dengan uraian kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini secara eksplisit memuat rencana program prioritas daerah tahun 2026 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2026.

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah yang didalamnya juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2026.

### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

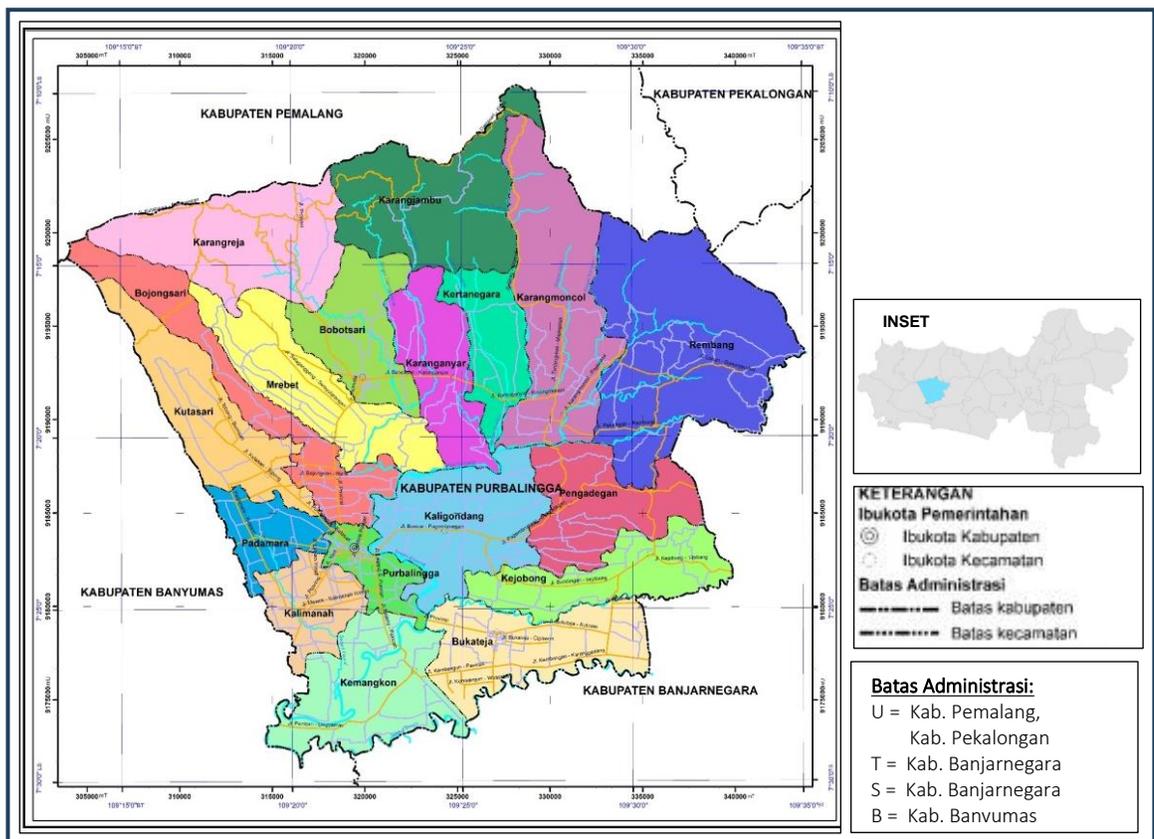
### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Aspek Geografi

##### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Purbalingga berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat dan terletak antara 109° 11" BT - 109° 35" BT dan 7° 10" LS - 7° 29" LS". Secara administrasi, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terbagi menjadi 224 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu kurang lebih 80.576 Ha atau sekitar 2,35 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas administrasi Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 1.     Peta Administratif Kabupaten Purbalingga**

##### B. Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Karakteristik morfologi wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl  
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.

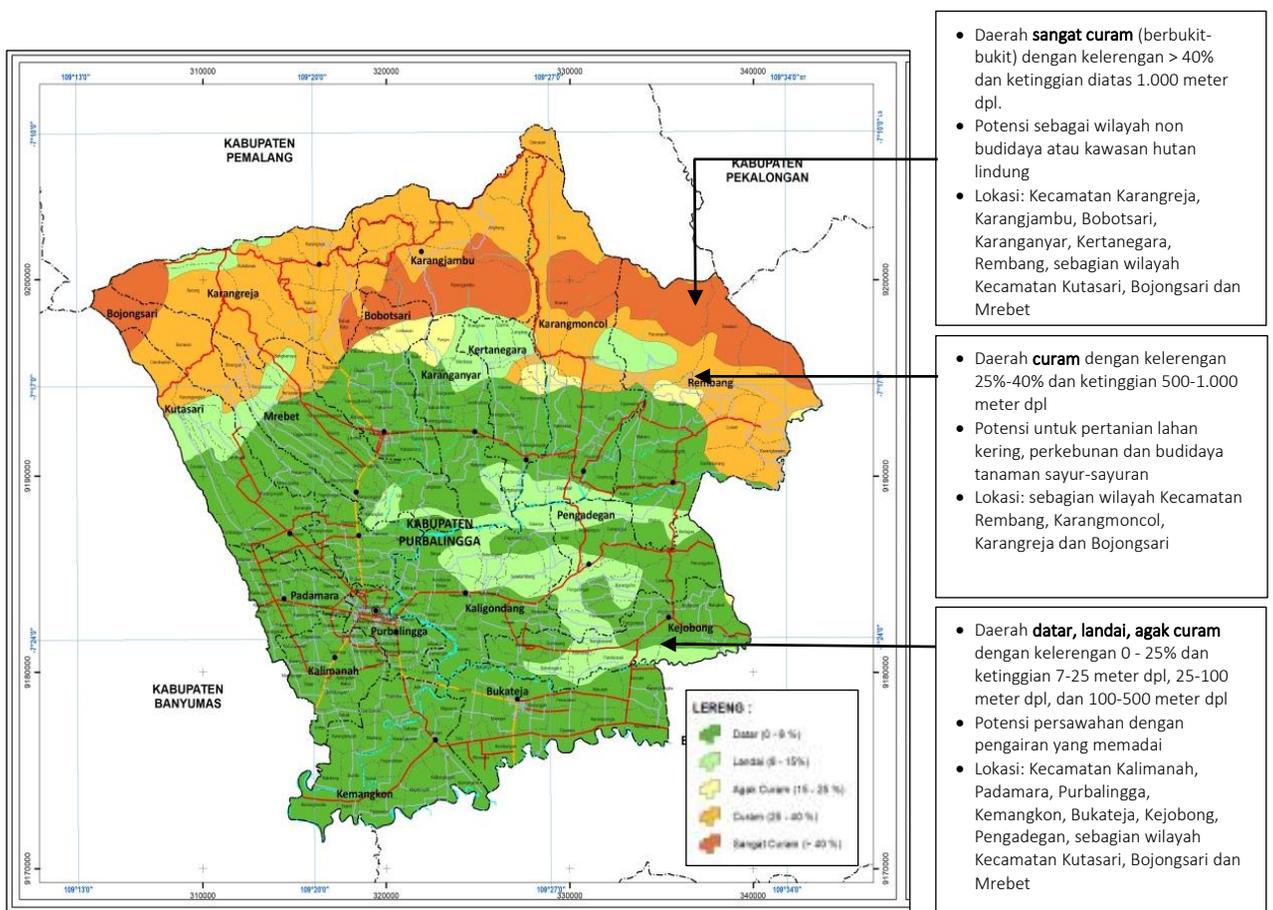
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl  
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl  
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl  
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl  
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Sedangkan dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

### C. Kondisi Geologi

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi litologi batuan yang terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah

#### D. Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Purbalingga dan penyebarannya:

##### 1. Tanah Alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klwing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

##### 2. Tanah Latosol

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi:

- Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan negosol coklat
- Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik
- Tanah latosol merah kuning, dan
- Tanah Latosol coklat tua

##### 3. Tanah Andosol

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Terdapat disekitar puncak Gunung Slamet.

##### 4. Tanah Gromosol

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.

##### 5. Tanah Regosol

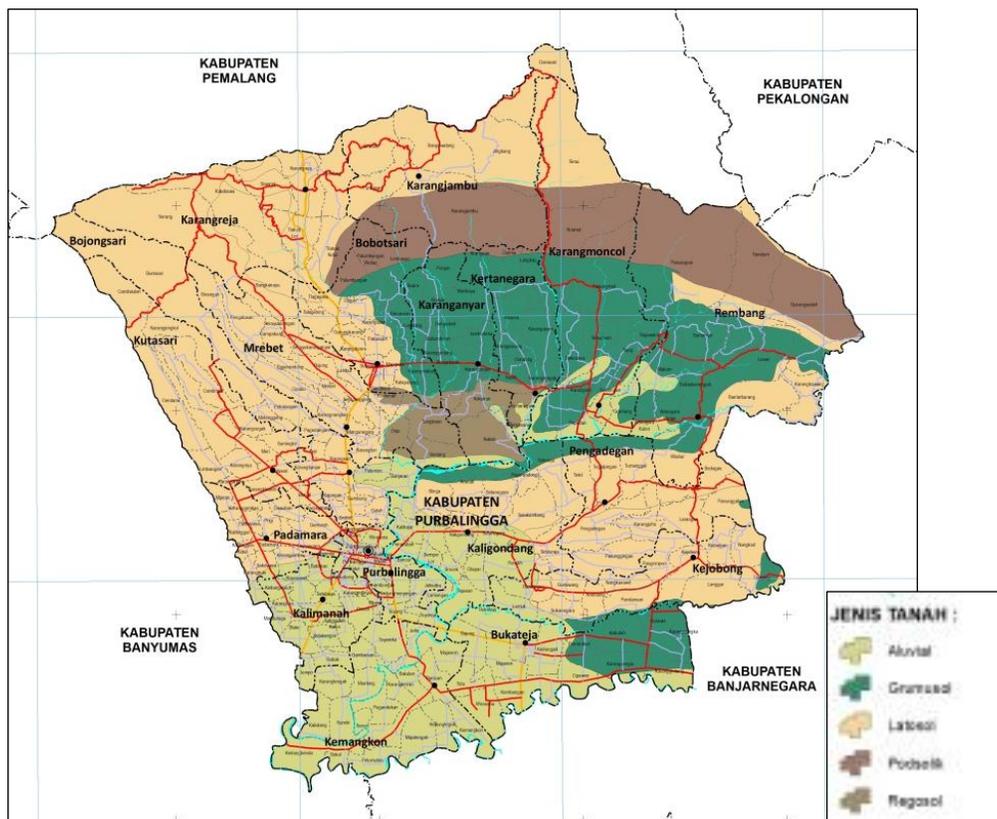
Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian.

Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
I	Alluvial, tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/ Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	Sedang/ Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/ Kurang Peka	-
IV	Andosol, laterit, grumosol, podosol, podsolic.	Sangat Tinggi/ Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol, litosol, organosol, renzina.	Amat Sangat Tinggi/ Sangat peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

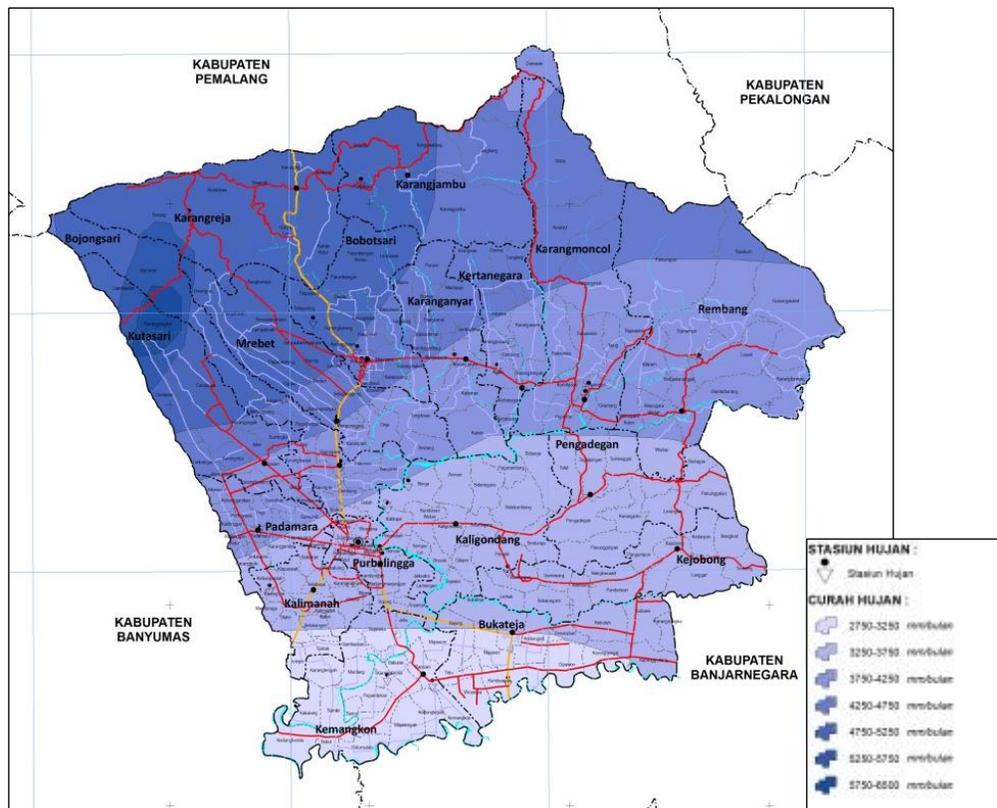
Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

#### E. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Kabupaten Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 dimana lima hingga sepuluh bulan secara berurutan adalah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.

#### F. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya. Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 4. Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Tungtung Gunung, Sungai Gemuruh, Sungai Laban, Sungai Kajar, Sungai Kuning, Sungai Lembereng, Sungai Wotan, Sungai Tlahap, Sungai Gintung, Sungai Soso, Sungai Tambra, Sungai Lebak, Sungai Muli.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

## G. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Luas penggunaan lahan sawah mencapai 18.730,60 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Purbalingga mencapai 39.529,10 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Sedangkan luas bukan lahan pertanian mencapai 19.504,30 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Penggunaan lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga berupa tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, tambak/kolam/ empang serta jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya. Luas lahan jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya mencapai 24,29% atau seluas 19.504,30 ha. Sebesar 50,83% penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa lahan pertanian bukan sawah, dan 24,88% berupa lahan pertanian sawah

Tabel II.2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Kecamatan	Pertanian		Bukan Lahan Pertanian	Jumlah
		Lahan Sawah	Bukan Sawah		
1	Kemangkon	2.318,8	474,4	2.053,4	4.846,60
2	Bukateja	1.767,7	862,3	1.865,9	4.495,90
3	Kejobong	333,8	1.808,1	1.871,7	4.013,60
4	Pengadegan	30,8	2.572,4	1.521,5	4.124,70
5	Kaligondang	1.005,1	3.004,1	1.134,9	5.144,10
6	Purbalingga	558,8	66,5	940,6	1.565,90
7	Kalimanah	1.343,4	3,6	976,6	2.323,60
8	Padamara	1.015,1	102,7	672,4	1.790,20
9	Kutasari	800,6	1.836,7	1.143,5	3.780,80
10	Bojongsari	972,9	2.549,8	976,5	4.499,20
11	Mrebet	1.159	2.014,4	1.969,2	5.142,60
12	Bobotsari	1.015,8	1.801,9	736	3.553,70
13	Karangreja	307,4	5.259,5	633,8	6.200,70
14	Karangjambu	648,1	3.563,5	683	4.894,60
15	Karanganyar	1.098,5	1.479,2	943,8	3.521,50
16	Kertanegara	956,9	1.928,4	715,8	3.601,10
17	Karangmoncol	1.392,2	4.745,8	1.059,4	7.197,40
18	Rembang	880,1	8.030,6	968,6	9.879,30
	<b>Jumlah</b>	<b>17.605</b>	<b>42.103,9</b>	<b>20.866,6</b>	<b>80.575,50</b>

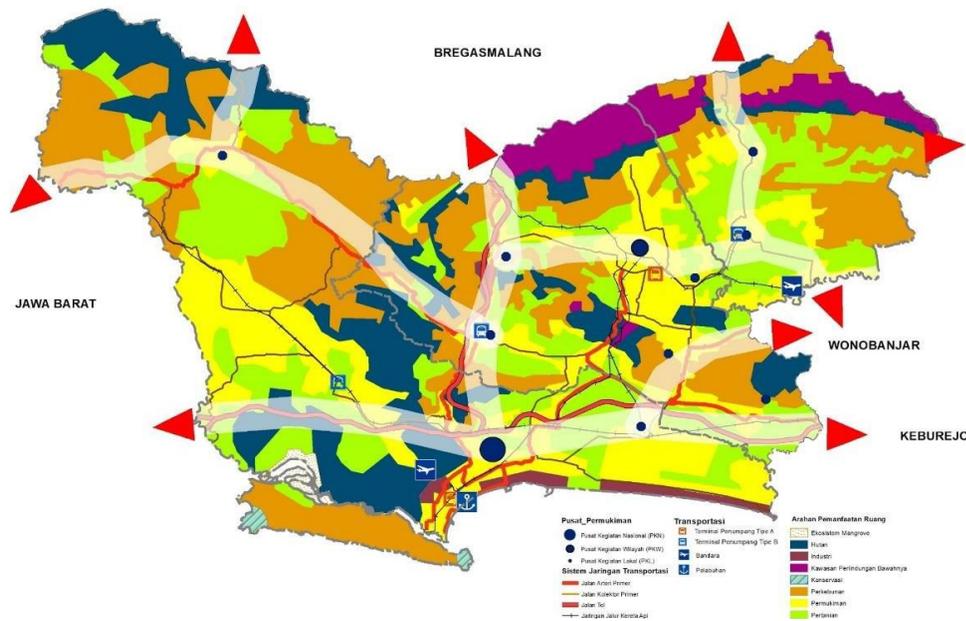
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2025

## H. Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, membagi Wilayah Pengembangan (WP) menjadi 10 WP dan Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian WP Cibalingmas (Cilacap – Purbalingga - Banyumas). WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap–Purwokerto-

Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas.

Untuk meningkatkan pergerakan distribusi WP Cibalingmas maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain adalah industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.



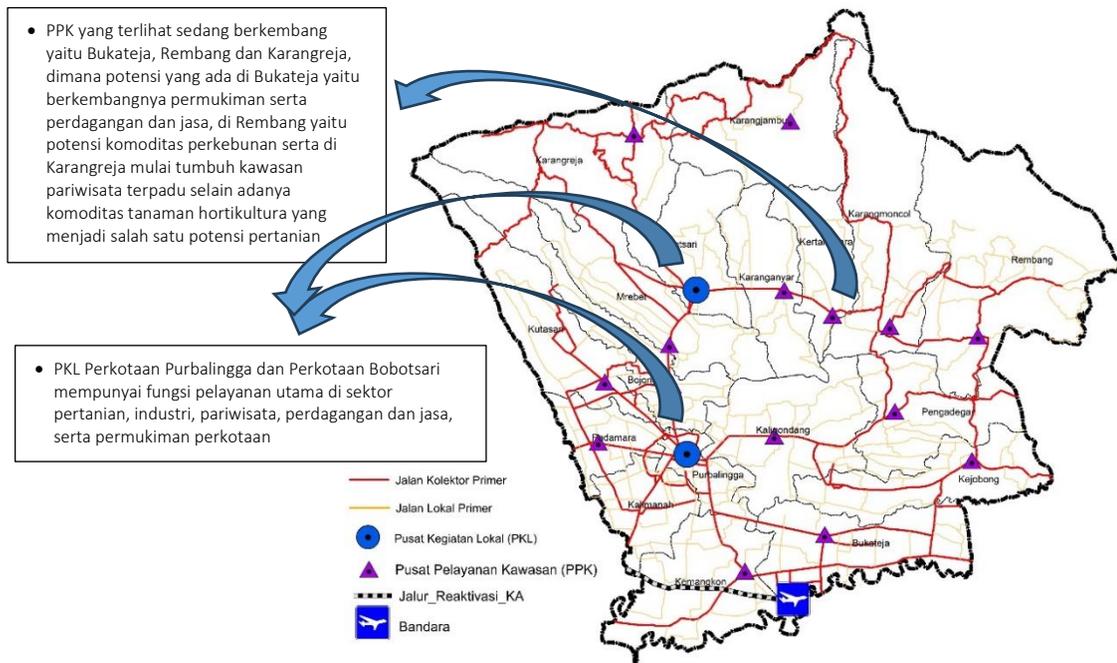
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2024 - 2044

Gambar 2. 6. Arah Pengembangan Wilayah WP Cibalingmas

Berdasarkan RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah. Struktur perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari dengan skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional kabupaten. Fungsi pelayanan utama pada PKL Purbalingga dan Bobotsari yaitu di sektor: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. Dalam sistem wilayah, pusat perkotaan Purbalingga (PKL Purbalingga) didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

PKL Purbalingga dan PKL Bobotsari didukung oleh PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan, dan Karangjambu yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dalam sistem wilayah, PPK Bukateja, Rembang, dan Karangreja didorong pertumbuhannya agar dapat berkembang menuju Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Sementara itu PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Beberapa desa yang menjadi PPL yaitu: PPL Kutawis Kecamatan Bukateja, PPL Makam Kecamatan Rembang, PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja, PPL Purbayasa Kecamatan Padamara, PPL Picung Kecamatan Kertanegara, PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan dan PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 7. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten Purbalingga**

Peruntukan lahan yang terdapat pada RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 berupa rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya  
 Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha meliputi Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Rembang. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.
- (2) Kawasan perlindungan setempat  
 Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tunggunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Gringsing, dan

Sungai Muli. Sedangkan untuk Rencana pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan local berada di Petilasan Ardi Lawet yang berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning yang berada di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk didalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 Ha. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.

(4) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana banjir. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut.

Kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah/longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Beberapa diantaranya desa-desa di Kecamatan Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet.

Sedangkan kawasan rawan bencana gunungapi di Kabupaten Purbalingga sebagian wilayah kabupaten termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa - desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan rawan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu, kawasan rawan bencana banjir meliputi sebagian Kecamatan Kemangkon; sebagian Kecamatan Bukateja; sebagian Kecamatan Kaligondang; sebagian Kecamatan Purbalingga; sebagian Kecamatan Kutasari; sebagian Kecamatan Bobotsari; sebagian Kecamatan Karanganyar; sebagian Kecamatan Karangmoncol; sebagian Kecamatan Rembang; sebagian Kecamatan Karangjambu; dan sebagian Kecamatan Kertanegara.

(5) Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Purbalingga seluas 66.617 Ha terdiri atas:

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 Ha meliputi: Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 Ha dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas  $\pm$  15.694 Ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas  $\pm$  6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Luas kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.453 Ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (agroforestri) seluas  $\pm$  17.564 Ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

(3) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; dan Kecamatan Padamara.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

(5) Kawasan peruntukan industri

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 Ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkong, Kutasari, Padamara dan

Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi :

- Pariwisata alam meliputi :
  - a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
  - b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;
  - c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
  - d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
  - e. Leren View di Kecamatan Karangreja;
  - f. Klawing Riverside di Kecamatan Purbalingga;
  - g. Sirau The Lost Paradise di Kecamatan Karangmoncol; dan
  - h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata budaya meliputi :
  - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
  - b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga;
  - c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
  - d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
  - e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
  - f. pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata buatan meliputi :
  - a. Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
  - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan Bojongsari;
  - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
  - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
  - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari;
  - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
  - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
  - h. Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
  - i. Pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

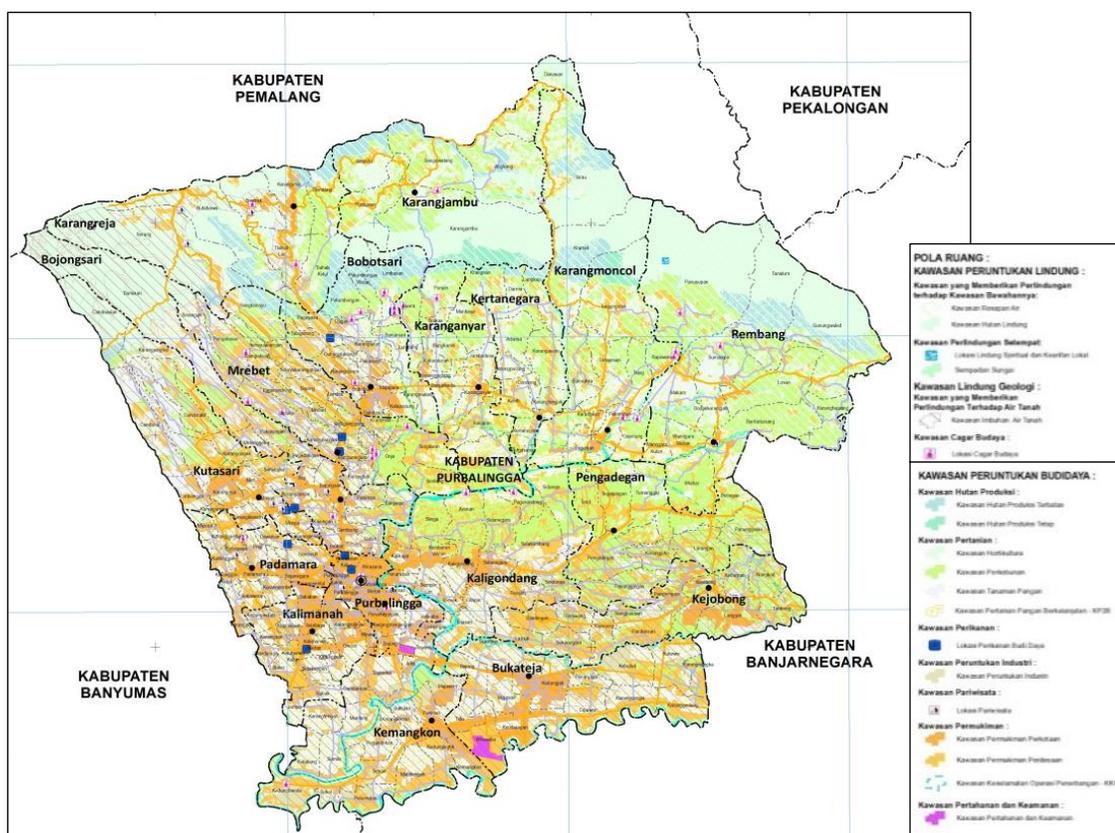
(7) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 Ha. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 Ha yang juga tersebar di seluruh kecamatan.

(8) Kawasan pertahanan dan keamanan

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 Ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- Komando Distrik Militer (Kodim 0702/Purbalingga) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Batalyon Infanteri (Yonif 406/Candra Kusuma) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;
- Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari;
- Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.



Sumber : RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 8. Peta Pola Ruang Kabupaten Purbalingga

### 2.1.1.2 Aspek Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan proyeksi dengan metode matematik geometrik dari data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 1.047.755 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Bukateja sebanyak 82.544 jiwa diikuti oleh Kecamatan Mrebet dengan penduduk sebanyak 82.368

jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Karangjambu dengan penduduk sebanyak 29.719 jiwa.

**Tabel II.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	63.622	64.420	65.402	66.096	67.845
2.	Bukateja	78.114	78.950	80.006	80.709	82.544
3.	Kejobong	50.738	51.308	52.023	52.507	53.758
4.	Pengadegan	65.548	41.382	41.833	42.095	42.839
5.	Kaligondang	57.580	66.194	67.024	67.556	68.975
6.	Purbalingga	57.667	57.395	57.364	57.071	56.773
7.	Kalimanah	65.235	58.160	58.813	59.203	60.291
8.	Padamara	77.869	47.060	47.721	48.169	49.326
9.	Kutasari	53.319	65.971	66.894	67.519	69.134
10.	Bojongsari	46.640	63.534	64.147	64.470	65.449
11.	Mrebet	40.091	78.718	79.789	80.505	82.368
12.	Bobotsari	58.543	53.665	54.158	54.406	55.181
13.	Karangreja	67.917	47.133	47.758	48.171	49.253
14.	Karangjambu	63.095	28.388	28.778	29.040	29.719
15.	Karanganyar	46.533	40.449	40.919	41.206	41.995
16.	Kertanegara	41.046	37.408	37.997	38.419	39.475
17.	Karangmoncol	28.078	59.078	59.777	60.209	61.387
18.	Rembang	36.926	68.581	69.437	69.982	71.443
<b>Jumlah</b>		<b>998.561</b>	<b>1.007.794</b>	<b>1.019.840</b>	<b>1.027.333</b>	<b>1.047.755</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Begitu pula dengan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, berdasarkan data dari sistem administrasi kependudukan juga menunjukkan tren yang selalu naik. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mrebet dan Bukateja. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Karangjambu.

**Tabel II.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Data Dindikcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	64.574	65.191	66.137	66.523	67.101
2.	Bukateja	79.441	80.154	81.233	82.057	82.710
3.	Kejobong	51.873	52.503	53.388	53.900	54.528
4.	Pengadegan	41.668	42.029	38.685	43.214	43.822
5.	Kaligondang	66.870	67.460	42.758	69.083	69.845
6.	Purbalingga	58.371	58.529	68.344	59.144	59.678
7.	Kalimanah	56.834	57.427	58.704	58.625	59.231
8.	Padamara	45.637	46.002	42.584	47.201	47.786
9.	Kutasari	65.762	66.821	57.964	69.417	70.300
10.	Bojongsari	63.409	64.189	29.144	65.964	66.790

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
11.	Mrebet	78.855	80.011	46.676	82.544	83.367
12.	Bobotsari	54.725	54.977	68.365	55.722	56.119
13.	Karangreja	46.470	47.228	65.251	48.748	49.383
14.	Karangjambu	28.333	28.712	60.702	29.411	29.767
15.	Karanganyar	41.596	41.931	81.649	43.071	43.406
16.	Kertanegara	38.010	39.447	70.947	39.104	39.588
17.	Karangmoncol	59.369	60.064	55.345	61.142	61.896
18.	Rembang	69.628	70.245	48.083	71.604	72.433
<b>Jumlah</b>		<b>1.011.425</b>	<b>1.021.920</b>	<b>1.035.959</b>	<b>1.046.474</b>	<b>1.057.750</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

## B. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga juga semakin meningkat. Dengan luas wilayah 805,76 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 naik menjadi 1.288 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat di Kabupaten Purbalingga adalah Kecamatan Purbalingga sebesar 3.635 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Padamara sebesar 2.724 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu yang hanya dihuni oleh 600 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel II.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kemangkon	48,46	1.410	1.329	1.350	1.364	1.382
2.	Bukateja	44,96	1.842	1.756	1.779	1.795	1.816
3.	Kejobong	40,14	1.269	1.278	1.296	1.308	1.324
4.	Pengadegan	41,25	983	1.003	1.014	1.020	1.030
5.	Kaligondang	51,44	1.297	1.287	1.303	1.313	1.327
6.	Purbalingga	15,66	3.912	3.665	3.663	3.644	3.635
7.	Kalimanah	23,24	2.562	2.503	2.531	2.547	2.571
8.	Padamara	17,90	2.694	2.629	2.666	2.691	2.724
9.	Kutasari	37,81	1.233	1.745	1.769	1.786	1.807
10.	Bojongsari	44,99	2.157	1.412	1.426	1.433	1.444
11.	Mrebet	51,43	1.626	1.531	1.551	1.565	1.584
12.	Bobotsari	35,53	1.652	1.510	1.524	1.531	1.542
13.	Karangreja	62,01	626	760	770	777	786
14.	Karangjambu	48,95	609	580	588	593	600
15.	Karanganyar	35,21	1.312	1.149	1.162	1.170	1.182
16.	Kertanegara	36,01	971	1.039	1.055	1.067	1.082
17.	Karangmoncol	71,98	971	821	830	836	845
18.	Rembang	98,79	742	694	703	708	716
<b>Jumlah</b>		<b>805,76</b>	<b>1.284</b>	<b>1.251</b>	<b>1.266</b>	<b>1.275</b>	<b>1.288</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

### C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,03 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kertanegara dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen diikuti oleh Kecamatan Kemangkong sebesar 1,38 persen. Kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan positif kecuali Kecamatan Purbalingga dengan laju -0,3 persen.

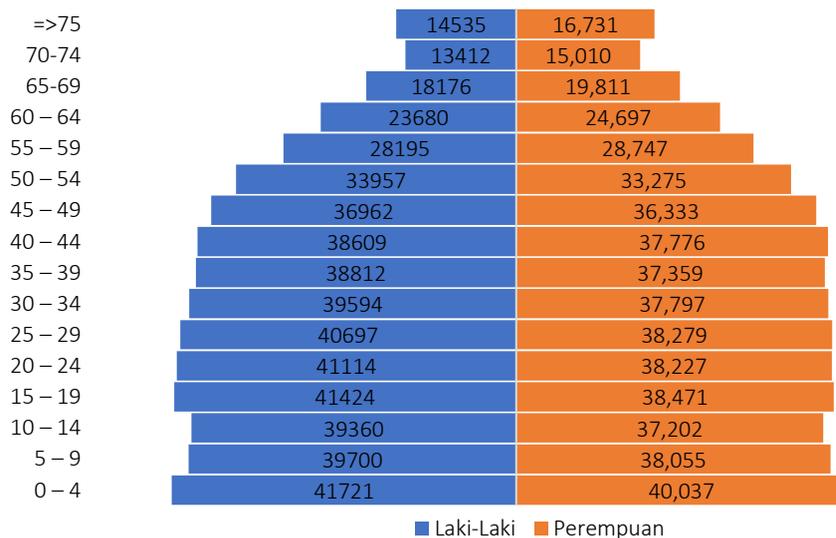


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

### D. Komposisi Penduduk

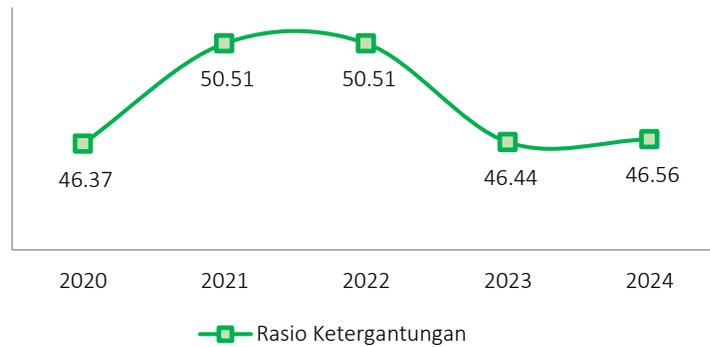
Dilihat dari komposisi penduduk, pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Purbalingga dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang mencapai 102,4 persen yang menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki. Sedangkan dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 untuk kelompok umur 15-64 lebih dominan dibanding kelompok usia lainnya. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan kelompok usia produktif/kerja sehingga Kabupaten Purbalingga mempunyai persediaan penduduk atau tenaga yang siap untuk digunakan. Dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebesar 46,56 persen, yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung beban sekitar 46 penduduk non produktif.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 10. Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan yang artinya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

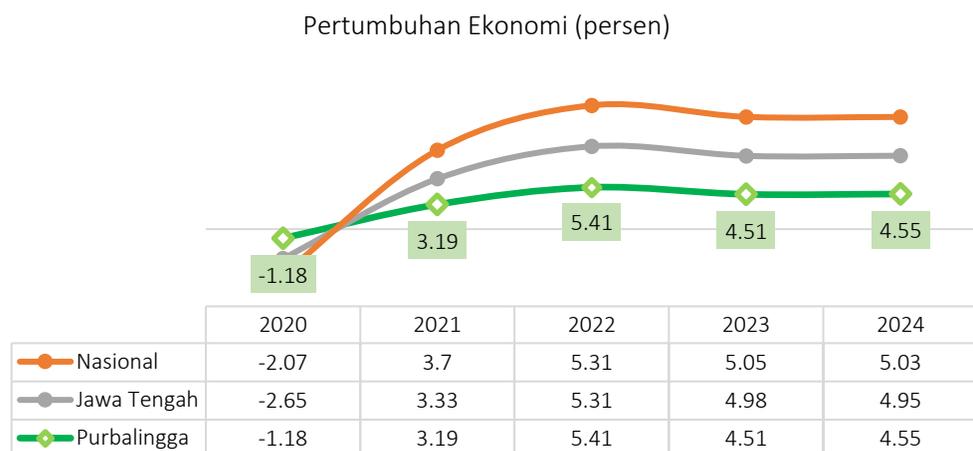
**Gambar 2. 11. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Purbalingga mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,18 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan dengan mencapai angka 3,19 persen, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 5,41 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami sedikit penurunan menjadi 4,51 persen. Meskipun demikian, di tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan ke 4,55 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

**Gambar 2. 12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dalam kurun waktu 2020-2024. Diawali dari tahun 2020 dengan kontraksi sebesar -1,18 karena dampak pandemi Covid-19, mempengaruhi perkembangan beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Purbalingga khususnya sektor industri (-0,24%), akomodasi (-1,81%), konstruksi (-2,91%), perdagangan (-4,08%) dan transportasi (-30,09). Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19 dan di tahun 2022 tumbuh positif ke angka 5,41. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam pemulihan kinerja ekonomi pasca covid-19. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali turun di angka 4,51, dengan penurunan signifikan pada sektor pertanian (1,04%) sedangkan sektor industri naik (5,1%). Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 4,55 dan sektor pertanian juga mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen. Namun sektor industri pengolahan turun menjadi 4,25 persen. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha seperti pada tabel berikut.

**Tabel II.6. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (persen)**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	1,2	4,28	1,04	1,86
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,71	4,64	-3,23	1,05	3,08
C.	Industri Pengolahan	-0,24	3,8	3,76	5,1	4,25
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,24	5,98	4,03	5,28	9,46
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,81	4,39	0,94	4,92	5,83
F.	Konstruksi	-2,91	6,95	1,42	5,43	10,84
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,08	5,68	3,91	5,37	5,35
H.	Transportasi dan Pergudangan	-29,78	2,69	71,89	6,93	4,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,81	4,44	12,58	13,52	3,77
J.	Informasi dan Komunikasi	10,11	5,76	2,52	10,03	6,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,62	2,24	0,74	2,41	0,65
L.	Real Estate	-0,01	2,21	2,71	6,72	4,99
M.N.	Jasa Perusahaan	-2,83	3,05	5,5	7,23	7,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,23	-0,38	1,4	4,61	11,02
P.	Jasa Pendidikan	-0,22	0,21	2,22	5,94	7,10
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,15	0,21	2,24	5,57	5,42
R.S.T.U.	Jasa lainnya	-6,16	0,67	11,63	6,86	4,41
<b>PDRB (ADHK)</b>		<b>-1,18</b>	<b>3,19</b>	<b>5,41</b>	<b>4,51</b>	<b>4,55</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

### 2.1.1.2 PDRB

Struktur ekonomi adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Apabila dilihat dari struktur ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi pergeseran kontribusi lapangan usaha yaitu dari pertanian ke industri pengolahan. Kondisi tersebut semakin terlihat pasca pandemi covid 19 dimana persentase industri pengolahan pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan sebesar 28,07 % sedangkan persentase pertanian

mengalami penurunan sebesar 26,51 %. Di tahun 2024, industri pengolahan kembali bertahan di angka 28,27% dan pertanian di bawahnya yaitu di angka 25,28%. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %.

Tiga besar sektor yang menunjukkan kontribusi tertinggi berdasarkan PDRB ADHB selain pertanian dan industri yaitu perdagangan. Sektor perdagangan mengalami kenaikan dan cenderung stabil karena adanya upaya-upaya yang mendorong perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sektor-sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa sektor tersebut cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19.

**Tabel II.7. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (persen)**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,04	26,51	26,21	25,60	25,28
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,55	4,57	4,13	3,93	3,77
C.	Industri Pengolahan	27,59	28,07	27,82	28,29	28,27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	6,10	6,38	6,25	6,34	6,68
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,36	12,58	12,56	12,6	12,65
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,28	2,28	3,79	4,05	3,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	2,38	2,54	2,66	2,62
J.	Informasi dan Komunikasi	2,04	2,06	1,94	1,99	2,00
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,26	2,26	2,18	2,11
L.	Real Estate	1,06	1,04	1,00	0,99	0,99
M.N.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,64	2,47	2,35	2,33	2,48
P.	Jasa Pendidikan	6,29	6,05	5,74	5,64	5,70
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,15	1,09	1,08	1,09
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1,90	1,84	1,96	1,99	2,00
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 25.081,59 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 33.357,33 milyar pada tahun 2024. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.781,61	6.997,82	7.569,77	7.994,83	8.433,03
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.141,34	1.205,93	1.190,90	1.226,14	1.258,70
C.	Industri Pengolahan	6.919,91	7.408,95	8.018,18	8.832,36	9.430,94
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,88	13,58	14,23	15,15	16,77
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,59	27,15	28,17	29,99	34,01
F.	Konstruksi	1.529,49	1.683,03	1.801,32	1.979,67	2.228,69

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.099,09	3.320,85	3.620,50	3934,08	4.218,88
H.	Transportasi dan Pergudangan	569,38	601,23	1.093,23	1.263,22	1.332,58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	591,09	628,74	731,58	829,56	873,13
J.	Informasi dan Komunikasi	512,57	543,69	558,81	619,95	665,72
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	561,97	597,64	652,77	680,40	705,34
L.	Real Estate	265,69	274,25	286,92	309,83	330,62
M.N.	Jasa Perusahaan	50,42	52,66	57,89	64,15	70,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	662,60	653,00	677,61	726,10	827,18
P.	Jasa Pendidikan	1.577,35	1.595,66	1.654,74	1.759,79	1.902,08
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	302,95	304,82	313,64	338,25	362,40
R.S.T.U.	Jasa lainnya	477,66	484,80	565,57	621,05	667,22
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>25.081,59</b>	<b>26.393,81</b>	<b>28.820,82</b>	<b>31.224,55</b>	<b>33.357,33</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Sedangkan PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 17.731,44 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 20.422,61 milyar pada tahun 2024.

**Tabel II.9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.405,20	4.458,13	4.649,11	4.697,49	4.785,07
B.	Pertambangan dan Penggalian	709,83	742,76	718,75	726,29	748,64
C.	Industri Pengolahan	4.565,71	4.745,58	4.923,99	5.175,34	5.395,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,19	11,86	12,34	12,99	14,22
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,92	22,88	23,09	24,23	25,64
F.	Konstruksi	1.076,08	1.150,83	1.167,12	1.230,55	1.363,95
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.328,01	2.460,15	2.556,26	2.693,50	2.837,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	459,29	473,71	814,26	870,68	909,13
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	459,35	479,73	540,09	613,11	636,20
J.	Informasi dan Komunikasi	529,11	559,58	573,70	631,25	673,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	382,04	390,61	393,48	402,97	405,60
L.	Real Estate	217,36	222,17	228,20	243,53	255,70
M.N.	Jasa Perusahaan	33,72	34,74	36,66	39,31	42,24
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	449,83	448,12	454,41	475,38	527,76
P.	Jasa Pendidikan	950,80	952,76	973,92	1.031,77	1.105,04
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209,37	209,62	214,32	226,25	238,51
R.S.T.U.	Jasa lainnya	365,76	368,21	411,02	439,28	458,59
<b>PDRB (ADHK)</b>		<b>17.174,55</b>	<b>17.731,44</b>	<b>18.690,73</b>	<b>19.533,86</b>	<b>20.422,61</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

### 2.1.2.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Dalam kurun waktu 2020-2024, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 25.081.000 kemudian meningkat mencapai Rp 35.057.000 di tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Purbalingga juga cenderung naik dari Rp 18.221.000 kemudian meningkat mencapai Rp 19.014.000 miliar di tahun 2024. Walaupun mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

**Tabel II.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2020 - 2024**

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.081	26.190	28.260	30.309	32.090
- ADHK Tahun 2010	18.221	17.594	18.327	19.014	19.680
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB (Persen)	-6,37	4,42	7,90	7,25	5,88
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	-2,2	-3,44	4,17	3,75	3,50

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB (ADHB) menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mencapai Rp. 33.357,33 miliar yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor yang ditunjukkan pada jenis pengeluaran ekspor barang dan jasa. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

**Tabel II.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.828,88	18.530,02	20.271,87	22.166,47	23.961,84
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	393,52	410,00	456,45	505,26	588,33
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.696,23	1.745,42	1.765,29	1.842,42	1.892,95
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.124,22	5.480,25	5.836,78	6.180,38	6.796,51

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Perubahan Inventori	855,86	806,93	880,70	1.036,88	860,19
6.	Ekspor Barang dan Jasa	- 817,12	-578,82	-387,47	-506,87	-741,49
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>25.081,59</b>	<b>26.393,81</b>	<b>28.820,82</b>	<b>31.224,55</b>	<b>33.357,33</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Selain dinilai ADHB, Nilai PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Nilai PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Selama kurun waktu 2019–2023, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat perbedaan nilai PDRB ADHB menurut pengeluaran dengan PDRB ADHK menurut pengeluaran, dimana nilai PDRB ADHB menurut pengeluaran lebih besar dari nilai PDRB ADHK menurut pengeluaran. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

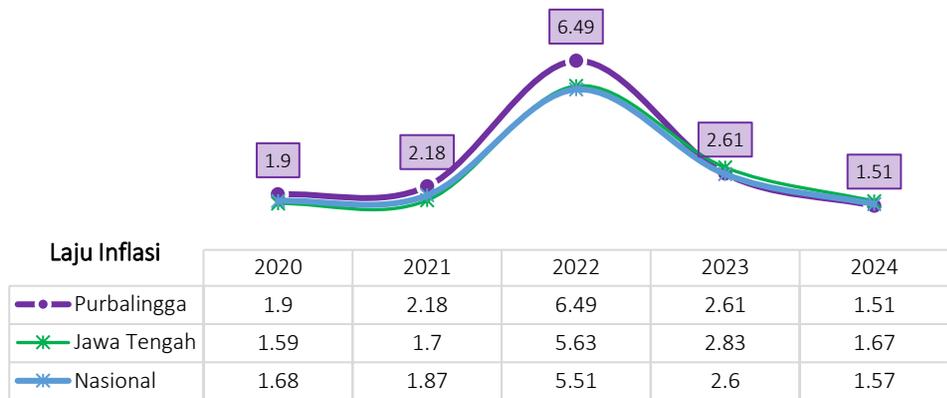
**Tabel II.12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.380,51	12.587,73	13.277,29	13.951,30	14.635,85
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246,41	249,37	262,70	282,27	321,42
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.049,71	1.057,70	1.058,85	1.067,74	1.094,78
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.364,21	3.578,70	3.658,63	3.804,29	4.048,49
5.	Perubahan Inventori	1.181,49	849,21	1.052,08	1.207,21	964,73
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.047,78	-591,28	-618,91	-778,95	-642,66
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>17.174,55</b>	<b>17.731,44</b>	<b>18.690,73</b>	<b>19.533,86</b>	<b>20.422,61</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

#### 2.1.2.4 Laju Inflasi

Inflasi pada tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 1,51 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,61. Bila dilihat dari perkembangannya, setiap tahunnya inflasi mengalami tren perubahan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 inflasi berada di 1,9 namun kemudian naik menjadi 2,18 di tahun 2021 dan naik signifikan lagi di tahun 2022 menjadi 6,49. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Selanjutnya inflasi dapat turun di tahun 2023 menjadi 2,61 dan Kembali turun di tahun 2024 menjadi 1,51. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Purwokerto termasuk Kabupaten Purbalingga antara lain yaitu beras, rokok kretek, rokok filter, cabai merah, tarif kereta api, dan cabai rawit. Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Untuk tahun 2024, laju inflasi di Kabupaten Purbalingga masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



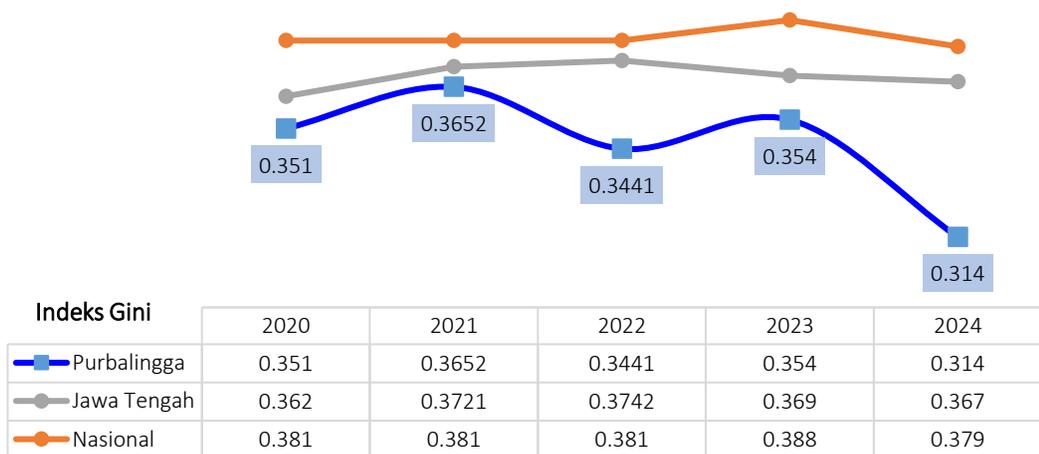
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 13. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

### 2.1.2.5 Indeks Gini

Indeks gini pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 berarti ketimpangan sempurna terjadi. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, indeks gini di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, indeks gini berada pada angka 0,351 kemudian naik menjadi 0,3652 di tahun 2021 dan turun menjadi 0,3441 di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 naik menjadi 0,354 dan di tahun 2024 menurun menjadi 0,314. Penurunan tersebut kondisi bagus karena menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil.

Indeks gini di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori ketimpangan sedang dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan berada pada level moderat. Apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks gini di Kabupaten Purbalingga lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 0,367 dan nasional yang sebesar 0,379. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dan nasional mempunyai ketimpangan pendapatannya lebih besar.



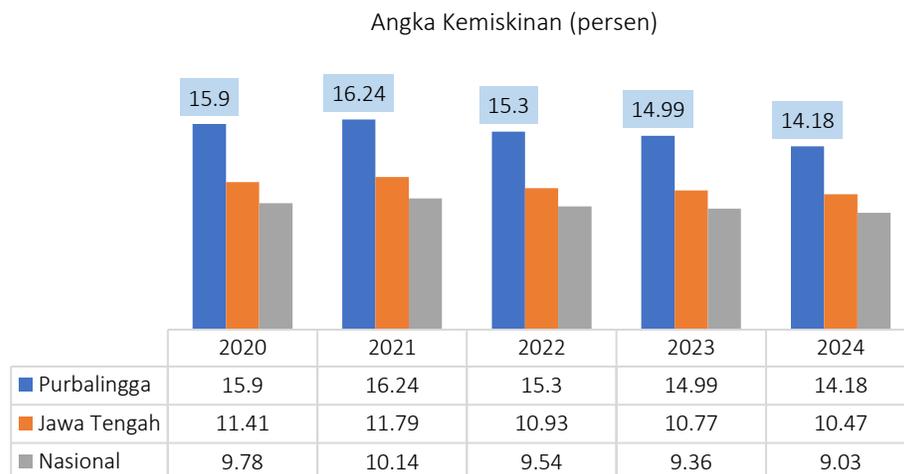
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 14. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

### 2.1.2.6 Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari 15,9 persen menjadi 16,24 persen. Kemudian perlahan turun di tahun 2022, 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai 14,18 persen.

Angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi di tahun 2021 dengan 16,24 persen, dengan salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Terbukti dengan landainya angka penderita Covid-19 serta tidak adanya pembatasan aktifitas sosial, perekonomian daerah kembali menggeliat ditandai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 menjadi 15,3 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan yang cukup baik sebagai upaya penanggulangan dampak Covid 19. Kemudian angka kemiskinan terus turun menjadi 14,99 di tahun 2023 dan turun kembali menjadi 14,18 di tahun 2024. Angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah masih lebih rendah. Namun angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut sudah keluar dari lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yang terdiri dari Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, dan Banjarnegara.



*Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025*

**Gambar 2. 15. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Untuk melihat komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada penjelasan berikut.

#### 1. Garis Kemiskinan

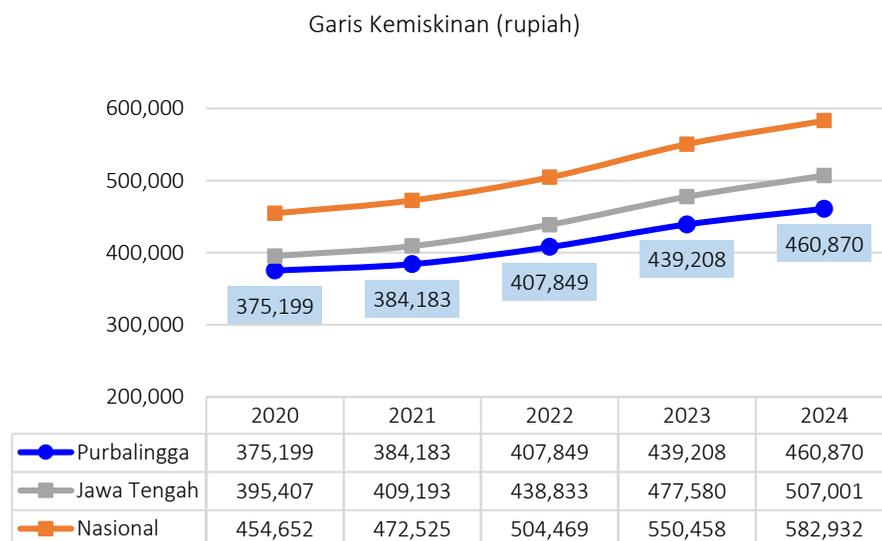
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 460.870 perkapita perbulan, yang artinya jika seorang penduduk dalam sebulan pengeluarannya kurang dari garis tersebut maka akan dikategorikan miskin. Angka tersebut naik sebesar Rp 21.662 dari tahun 2023 yang sebesar Rp 439.208 perkapita perbulan.

## 2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp. 460.870 perkapita perbulan. Dalam kurun 5 tahun terakhir ketika terjadi pandemi Covid-19, secara signifikan menyebabkan peningkatan penduduk miskin dari 149,5 (ribu orang) di tahun 2020 menjadi 153,08 (ribu orang) di tahun 2021. Pasca pandemi Covid-19 seiring dengan menurunnya angka kemiskinan makro Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk miskin juga semakin menurun menjadi 145,33 (ribu orang) di tahun 2022, kemudian menurun lagi di tahun 2023 menjadi 143,41 (ribu orang) dan kembali menurun menjadi 136,7 (ribu orang) pada tahun 2024.



*Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025*

**Gambar 2. 16. Garis Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

**Tabel II.13. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>							
a.	Kab. Purbalingga	(ribu) orang	149,48	153,08	145,33	143,41	136,72
b.	Jawa Tengah	(ribu) orang	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	3.396,34
c.	Nasional	(ribu) orang	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

*Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025*

## 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dimensi lain dari kemiskinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan

(*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan dan terjadinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

**Tabel II.14. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>						
a.	Kab. Purbalingga	persen	2,32	2,10	2,08	2,52	2,1
b.	Jawa Tengah	persen	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64
c.	Nasional	persen	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46
2.	<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>						
a.	Kab. Purbalingga	persen	0,43	0,41	0,48	0,58	0,50
b.	Jawa Tengah	persen	0,34	0,45	0,42	0,41	0,37
c.	Nasional	persen	0,38	0,42	0,39	0,38	0,35

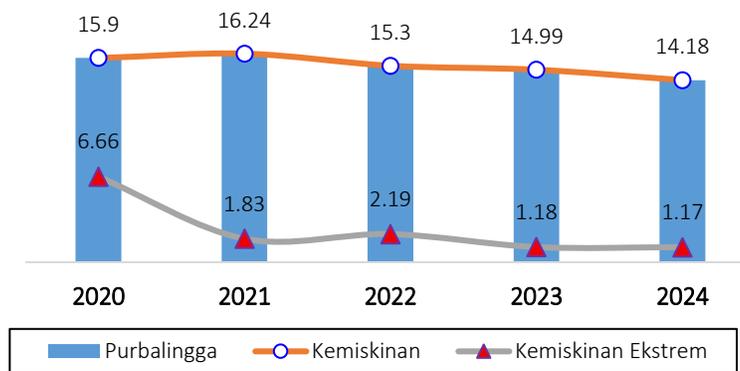
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 2.1.2.7 Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Lebih lanjut, seseorang dikategorikan miskin ekstem apabila biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yakni setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ini ditentukan menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan data dari BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya dibawah Rp. 11.732,-/kapita/hari atau sebesar Rp. 351.957,-/kapita/bulan (BPS, 2023).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga secara umum dari periode 2020 s.d 2024 mengalami penurunan baik secara persentase yakni dari 6,6 persen di tahun 2020 menjadi 1,17 persen di tahun 2024. Secara rinci persentase kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

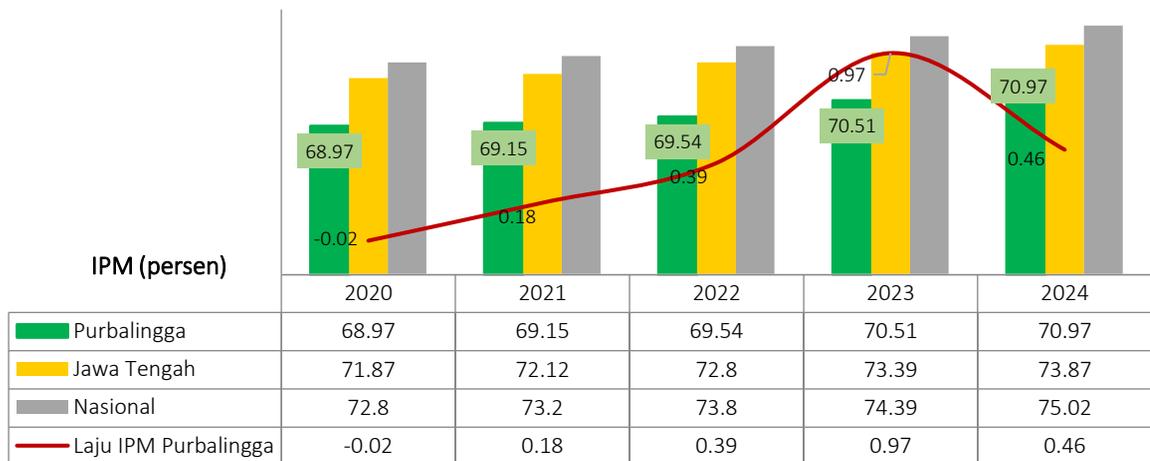
**Gambar 2. 17. Perbandingan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Secara lokus kemiskinan ekstrem, pada tahun 2022 terdapat 62 desa prioritas penanggulangan kemiskinan (desa merah) di Kabupaten Purbalingga. Penentuan tersebut didasarkan hasil pemetaan kuadran antara Indeks Desa Membangun dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Kemudian pada tahun 2023, turun menjadi 38 desa miskin ekstrem yang memerlukan pendampingan dalam upaya mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem. Penentuan tersebut mendasarkan pada pemetaan kuadran Indeks Kesulitan Geografi dengan jumlah warga desil 1 pada desa tersebut. Terdapat 8 sektor intervensi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga terdiri dari: RTLH, air bersih, listrik, sanitasi /jamban, disabilitas, keluarga beresiko stunting, Anak Tidak Sekolah, tidak bekerja/pengangguran.

#### 2.1.2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita (PPP) yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 68,97 persen di tahun 2020 kemudian naik menjadi 69,15 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 masih berada di angka 69,54 persen dan kemudian beranjak ke angka 70,51 di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 70,97 di tahun 2024. Pada dasarnya nilai IPM mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhannya kecil. Walaupun demikian, kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

**Gambar 2. 18. IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

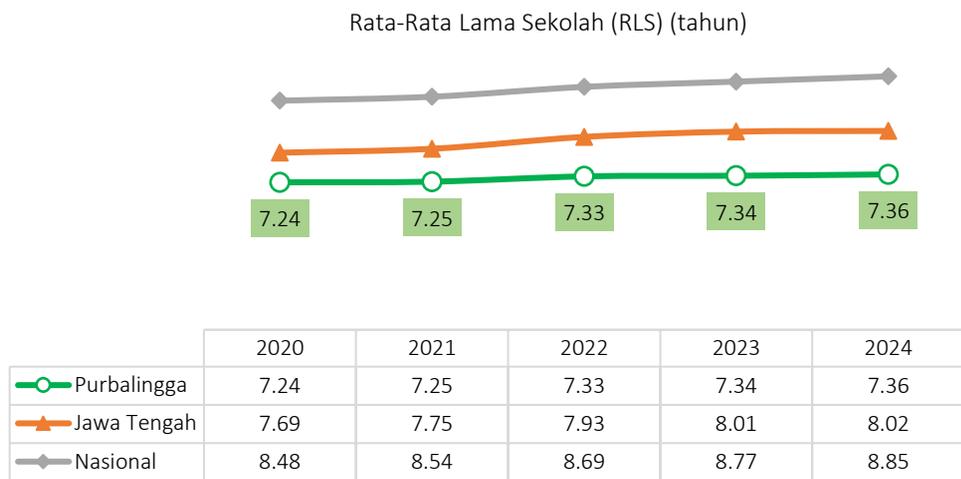
Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**1. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Kemudian apabila partisipasi sekolah seseorang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun. Sedangkan untuk yang mempunyai ijazah SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun.

RLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kondisi yang baik walaupun dengan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020 RLS berada pada angka 7,24 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 7,36 tahun. Nilai RLS tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 8,85 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 tahun.



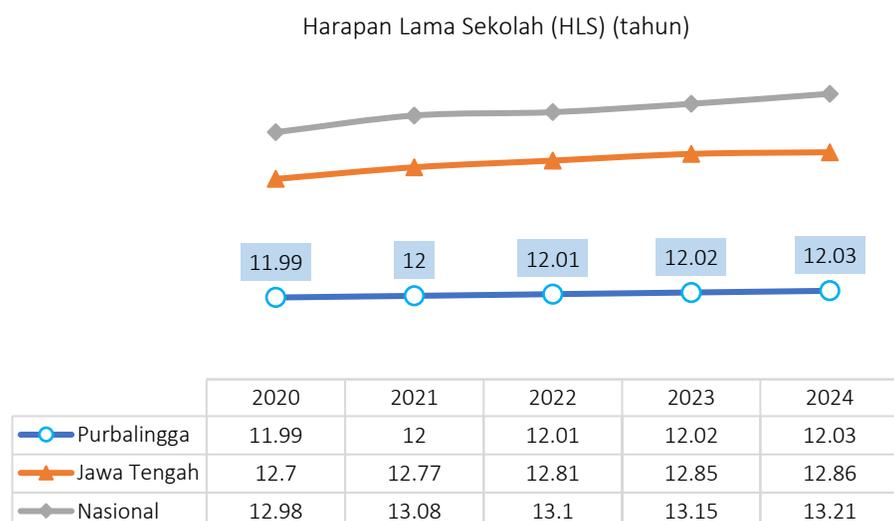
*Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025*

**Gambar 2. 19. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dan mulai dihitung pada anak usia 7 tahun mengikuti kebijakan program wajib belajar.

HLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Sama halnya dengan nilai RLS, walaupun mengalami peningkatan namun dengan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya. Pada tahun 2020 HLS berada pada angka 11,99 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 12,03 tahun. Nilai HLS tersebut menunjukkan bahwa harapan anak usia 7 tahun di Kabupaten Purbalingga saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, HLS Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 13,21 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 12,86 tahun.



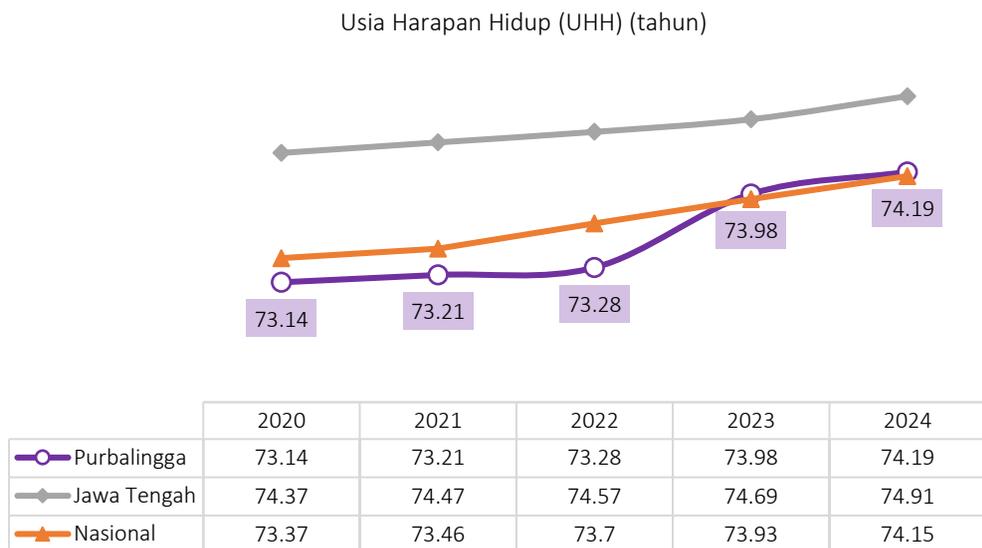
*Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025*

**Gambar 2. 20. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

### 3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup tinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, asupan gizi yang baik dan perilaku bersih dan sehat. Kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada bayi dan ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai UHH. Hal tersebut dikarenakan semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan, maka diharapkan taraf kesehatan akan semakin baik dan harapan hidup panjang dan sehat akan lebih terwujud.

UHH di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 – 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 UHH berada pada angka 73,14 tahun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi 74,19 tahun. Nilai UHH tersebut menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Purbalingga tahun 2024 hampir mendekati angka nasional yaitu 74,15 tahun dan Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,91 tahun.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

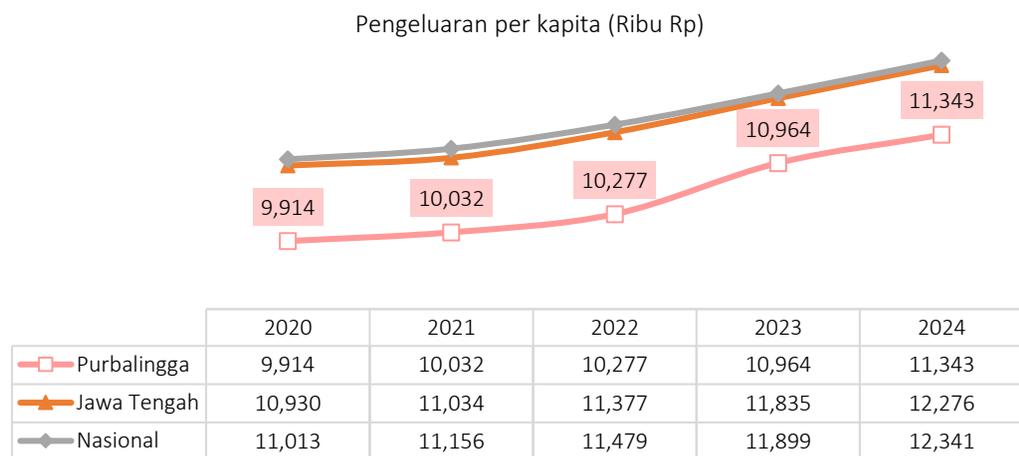
**Gambar 2. 21. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

### 4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita sebesar Rp. 9.914.000, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2024

sebesar Rp. 11.343.000. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Purbalingga terus membaik. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah nilai nasional yang mencapai Rp. 12.276.000 dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 12.341.000.



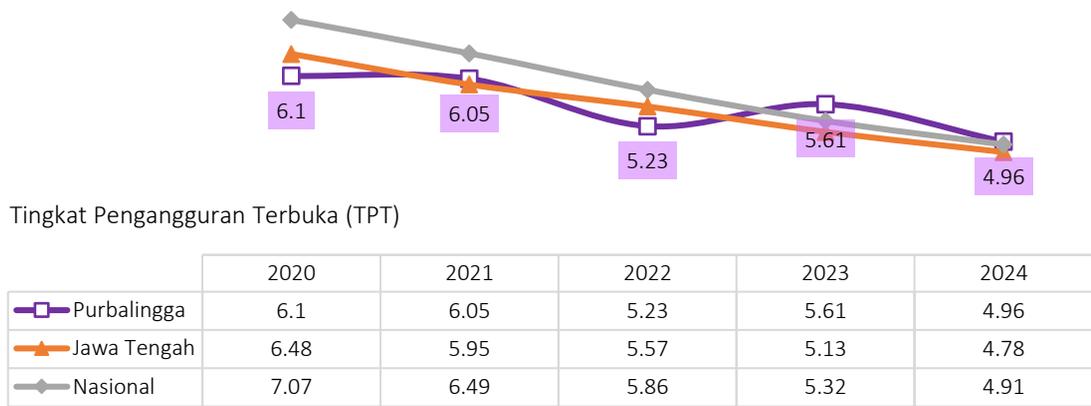
*Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025*

**Gambar 2. 22. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

#### 2.1.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan sebagai acuan pemerintah dalam upaya pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan perekonomian. Perkembangan TPT dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir capaian TPT Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi. Saat pandemi covid-19 yaitu di tahun 2020 TPT berada pada angka 6,1 persen, kemudian semakin menurun di tahun 2021 menjadi 6,05 dan tahun 2022 menjadi 5,23. Namun, pasca pandemi covid-19, TPT malah mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 5,61. Hal tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga yang diakibatkan oleh sejumlah pemutusan hubungan kerja pada beberapa perusahaan yang mengalami kendala karena berkurangnya ekspor ke luar negeri akibat kondisi ekonomi global yang bergejolak. Di tahun 2024, TPT kembali turun di angka 4,96 persen.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,91 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,78 persen.



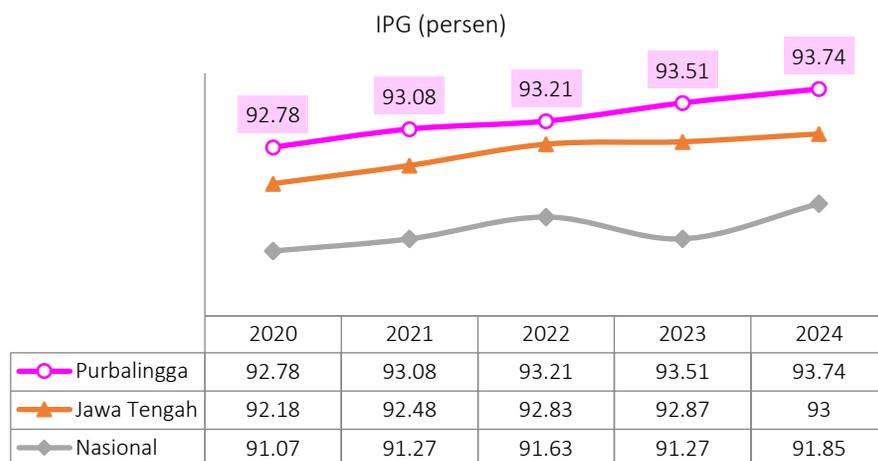
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Gambar 2. 23. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

#### 2.1.2.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Untuk mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Selama lima tahun terakhir capaian IPG Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG berada pada angka 92,78 persen kemudian naik menjadi 93,08 di tahun 2021, 93,21 di tahun 2022, 93,61 di tahun 2023 dan 93,74 di tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IPG Kabupaten Purbalingga tahun 2024 lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 91,85 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 93 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga sudah di atas rata-rata capaian nasional dan provinsi.



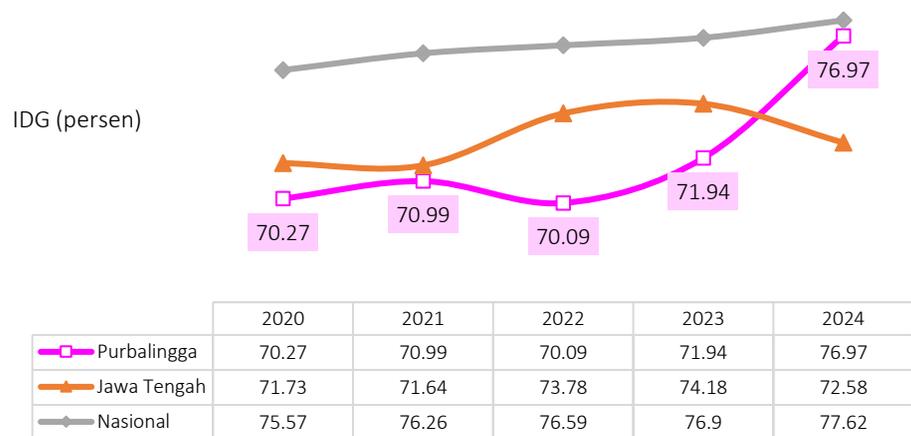
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

Gambar 2. 24. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

### 2.1.2.11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi.

Selama lima tahun terakhir capaian IDG Kabupaten Purbalingga cenderung stagnan yaitu berada di angka 70 persen. Namun di tahun 2024 terjadi kenaikan yang signifikan seiring dengan bertambahnya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan di Kabupaten Purbalingga dalam kesetaraan peran gender yaitu dalam peran legislatif di pemerintahan dan tenaga profesional Perempuan lainnya. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 77,62 persen dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 72,58 persen.



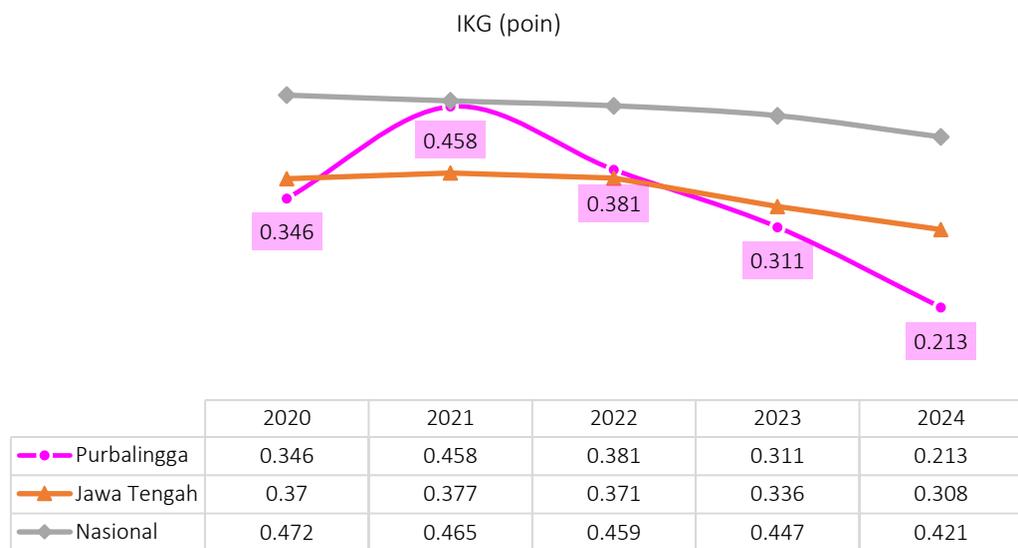
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

**Gambar 2. 25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

### 2.1.2.12 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 0,346 di tahun 2020 menjadi 0,213 di tahun 2024. Capaian IKG di Kabupaten Purbalingga tersebut masih di lebih baik dibandingkan dengan Nasional (0,421) dan Provinsi Jawa Tengah (0,308).

Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang baik karena tingkat ketimpangan gender semakin rendah, dimana dilihat dari indikatornya terdapat peningkatan capaian pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh adanya kesadaran perempuan untuk melahirkan hidup di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 26. IKG Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1) Capaian Rapor Pendidikan

Pada tahun 2022 Kemendikburistek meluncurkan platform Rapor Pendidikan Indonesia sebagai tema peluncuran episode ke sembilan belas program Merdeka Belajar. Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Peluncuran platform Rapor Pendidikan didasari oleh Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Rapor pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output). Rapor pendidikan juga dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing dengan data yang objektif dan tersaji secara terintegrasi.

Capaian rapor pendidikan Kabupaten Purbalingga yang ditunjukkan oleh capaian SPM pada rapor pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yaitu dari 67,18 di tahun 2023 menjadi 84,04 di tahun 2024. Di dalam rapor pendidikan terdapat beberapa indikator yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang dibagi pada jenjang SD dan SMP. Hasil rapor pendidikan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dari angka literasi dan numerasinya sebagai berikut:

**Tabel II.15. Capaian Rapor Pendidikan dan Angka Literasi Numerasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No.	Capaian Rapor Pendidikan	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Capaian SPM pada Rapor Pendidikan	persen	82,27	84,04
2	Angka Literasi			
	Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	64,06	68,77
	Literasi Membaca SMP/Sederajat	persen	76,54	77,92
3	Angka Numerasi			
	Numerasi SD/Sederajat	persen	50,28	57,68
	Numerasi SMP/Sederajat	persen	65,62	67,15

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2025

Dari skor literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Untuk skor literasi SD belum mencapai kompetensi minimum, karena masih dibawah 75 persen sehingga menunjukkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi, serta kemampuan berinteraksi dengan teknologi dan media digital masih kurang.

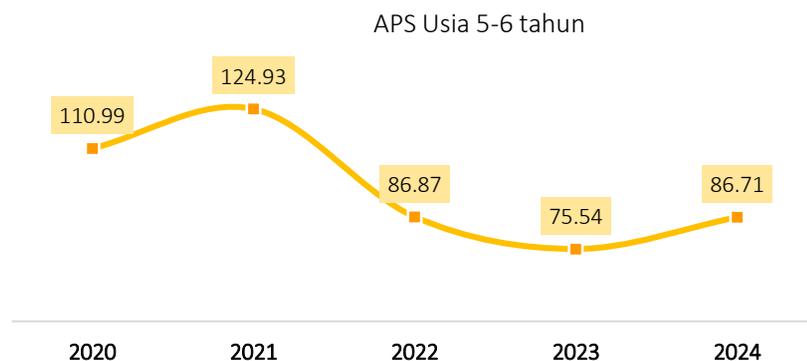
Sedangkan untuk skor numerasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk dapat mempersiapkan numerasi pada pendidikan menengah ke atas. Walaupun mengalami kenaikan tetapi skor literasi tersebut juga belum mencapai kompetensi minimum, karena masih dibawah 75% sehingga menunjukkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan angka, simbol, dan konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari masih kurang.

## 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun

Salah satu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yaitu pelayanan dasar pendidikan PAUD/Pendidikan Pra Sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun di Kabupaten Purbalingga mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2024, APS usia 5-6 tahun yaitu sebesar 86,71 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 13,29 persen penduduk usia PAUD (5-6 tahun) di Kabupaten Purbalingga yang belum memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 5-6 tahun. Kemampuan tersebut diartikan kemampuan dalam hal kepeminatan maupun kemampuan finansial. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian lagi ke depannya karena

pada jenjang PAUD menjadi tahap awal pendidikan anak yang dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.



Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 27. APS Usia 5 – 6 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

### 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), perlu peningkatan akses pemerataan dan mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Untuk menilai partisipasi pendidikan tersebut dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada fasilitas pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.16. APS Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	APS Usia 7-12 Tahun	persen	98,4	98,97	98,26
2	APS Usia 13-15 Tahun	persen	84,95	86,71	88,15

Sumber : Rapor Pendidikan Kab. Purbalingga, 2023-2025

Berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Purbalingga, tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia 7-12 tahun dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan capaian yang baik yaitu di atas 90 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan dengan sangat baik. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 tahun dalam kurun waktu 3 tahun juga selalu meningkat walaupun capaiannya masih di bawah 90 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang belum tertampung di

sekolah yang tersedia atau ada penduduk usia sekolah bersekolah di luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Disamping itu juga masih ada anak usia 13-15 yang putus sekolah.

#### 4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan

Partisipasi pendidikan dapat dilaksanakan pada tiga jalur yaitu jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan terutama dalam keluarga. Pendidikan Non Formal (PNF) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dilihat dari angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan di Kabupaten Purbalingga masih tergolong kecil. Dari tahun 2022 APS berada di angka 10,76 persen dan kemudian meningkat menjadi 22,06 persen di tahun 2024.

**Tabel II.17. APS Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	APS Kesetaraan	persen	10,76	18,88	22,06

Apabila dilihat dari jumlah PKBM di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif stabil dimana saat ini terdapat sejumlah 17 unit. Masih ada 1 PKBM yang belum terakreditasi di tahun 2024. PKBM yang belum terakreditasi akan berpengaruh pada kemampuan untuk mengeluarkan ijazah karena belum diakui. Apabila dilihat dari Jumlah peserta didik PKBM, terus mengalami kenaikan dengan mayoritas peserta didik ada pada pembelajaran Kejar Paket C setara SMA. Pendidikan Non Formal merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depannya, karena menjadi salah satu penopang pendidikan di Kabupaten Purbalingga untuk dapat memwadhahi penduduk yang tidak dapat bersekolah di sekolah formal.

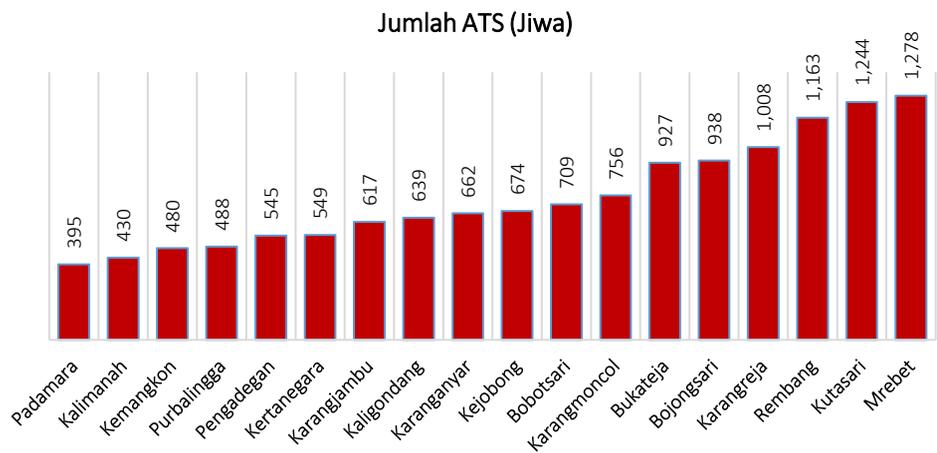
**Tabel II.18. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	unit	18	18	18	17	17
2	Jumlah PKBM terakreditasi	unit	5	5	6	7	16
3	Persentase PKBM terakreditasi	persen	27,78	27,78	33,33	41,18	94,12
4	Jumlah Warga Belajar PKBM	orang					
	Paket A	orang	80	56	38	238	363
	Paket B	orang	753	661	356	416	1.032
	Paket C	orang	2.363	2.183	3.337	3.198	3.317

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 5) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pada tahun 2024, Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi dengan jumlah total 13.502 jiwa. ATS tersebut terbagi menjadi Anak yang belum pernah bersekolah, Anal putus sekolah (SD, SMP, SMA) dan Anak lulus tidak melanjutkan. Sebaran ATS paling banyak di Kecamatan Rembang, Kutasari dan Mrebet. Beberapa data mengenai ATS di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.



Jumlah Anak BPB (Belum Pernah Bersekolah)	Jumlah Anak Putus Sekolah				Jumlah Anak LTM (Lulus Tidak Melanjutkan)	Jumlah Total ATS
	SD	SMP	SMA	Total		
4.031	596	1.544	1.007	3.147	6.324	13.502

Sumber : Dashboard ATS Pusdatin Kemendikdasmen, 2025

**Gambar 2. 28. Jumlah Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

## 6) Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan meliputi :

1. Pelayanan Dasar Pendidikan PAUD
2. Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar
3. Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah
4. Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan

Keempat indikator SPM Bidang Pendidikan tersebut pada tahun 2024 belum dapat tercapai. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu karena ketersediaan sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum memenuhi standar kebutuhan sehingga peserta didik mengalami penurunan/kurang minat untuk bersekolah di sekolah tersebut.

**Tabel II.19. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024**

No.	Indikator SPM (Permendikbud No.32 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	104,50	164,71	86,87	59,58	59,52
2	Pendidikan pada Sekolah Dasar	persen	107,45	100,03	92,01	90,95	91,1

No.	Indikator SPM (Permendikbud No.32 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	persen	113,60	115,33	72,73	77,32	79,68
4	Pendidikan pada Kesetaraan	persen	100	100	100	10,76	18,88

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

## B. Kesehatan

### 1) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Keluarga Pra Sehat apabila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat apabila nilai IKS < 0,5. IKS di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meningkat dari angka 0,16 di tahun 2020 menjadi 0,17 di tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 0,22 di tahun 2022 menjadi 0,44 di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 0,62. Nilai IKS Kabupaten Purbalingga menunjukkan perkembangan positif yakni tergolong wilayah dengan status keluarga pra sehat.

Dari 12 indikator IKS, yang perlu diperhatikan adalah bayi mendapat ASI eksklusif dan anggota keluarga tidak ada yang merokok. Diharapkan ke depannya semakin banyak keluarga yang memiliki standar kesehatan yang optimal, karena semakin meningkatnya IKS menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Tabel II.20. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Keluarga Sehat	
		Nilai	Kategori
1	2020	0,16	Keluarga Tidak Sehat
2	2021	0,17	Keluarga Tidak Sehat
3	2022	0,22	Keluarga Tidak Sehat
4	2023	0,44	Keluarga Tidak Sehat
5	2024	0,62	Keluarga Pra Sehat

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 2) Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Terdapat 2 data yang digunakan dalam menilai prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga yaitu data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berdasarkan data EPPGBM, angka prevalensi stunting mengalami penurunan dari 16,93 di tahun 2020 menjadi 11,34 di tahun 2024. Sedangkan berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting mengalami

kenaikan dari 16,8 di tahun 2021 menjadi 26,3 di tahun 2022. Kemudian menurun menjadi 26 di tahun 2023 dan 22,3 di tahun 2024.

Pada dasarnya, penyebab terjadinya stunting sangat kompleks. Penyebab yang sering terjadi yaitu adanya malnutrisi pada ibu dan anak. Hal lain yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat. Diperlukan adanya intervensi lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa. Secara rinci jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.21. Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita	balita	69.462	69.462	70.294	68.195	63382
2	Jumlah balita gizi buruk	balita	85	95	144	153	237
3	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,12	0,14	0,20	0,23	0,4
4	Jumlah balita gizi kurang	balita	4.049	4.049	3.509	3.551	2732
5	Persentase balita gizi kurang	balita	5,6	5,5	5,9	5,8	4,5

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

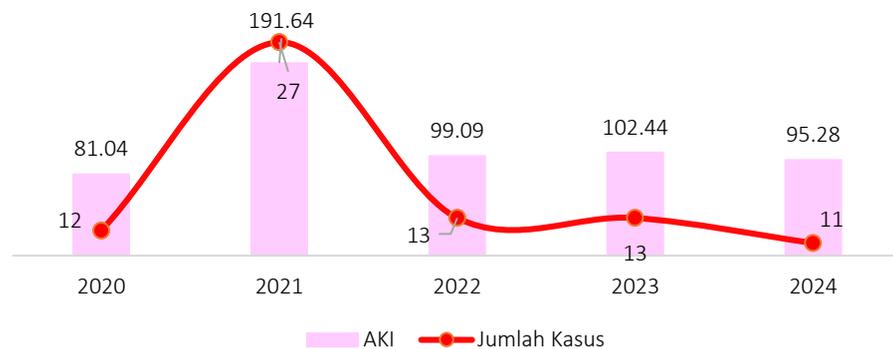
**Gambar 2. 29. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

### 3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI bukan hanya merupakan indikator kesehatan dan status gizi ibu, tetapi dapat juga menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingkat efektifitas pengelolaan program kesehatan serta mencerminkan risiko yang dihadapi selama kehamilan dan persalinan.

AKI Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari angka 81,04 dengan 12 kasus,

kemudian di tahun 2021 menjadi 191,64 dengan 27 kasus. Jika dilihat dari penyebabnya, kasus terbanyak kematian ibu adalah akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Pada Tahun 2020 Covid-19 jadi menyumbang penyebab 2 kasus kematian ibu, termasuk penyakit degeneratif jantung kembali menjadi penyebab kematian ibu sebanyak 3 kasus setelah sebelumnya nir kasus di tahun 2020. Penyebab lainnya masih didominasi oleh perdarahan dan eklamsi, walaupun tren kedua penyebab tersebut mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2023 AKI mengalami kenaikan menjadi 102,44 dengan 13 kasus, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 95,28 dengan 11 kasus.



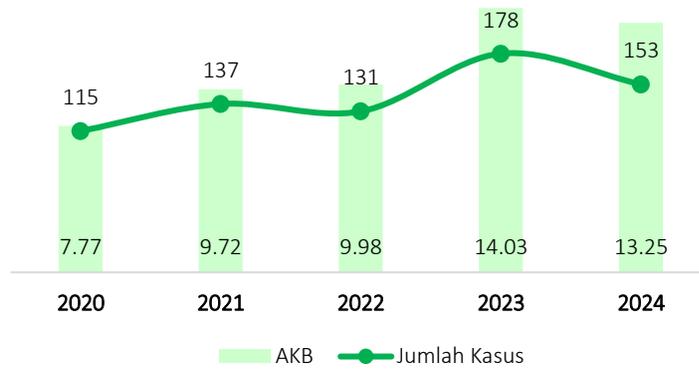
Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 30. AKI Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

#### 4) Angka Kematian Bayi (AKBA) dan Angka Kematian Balita (AKABA)

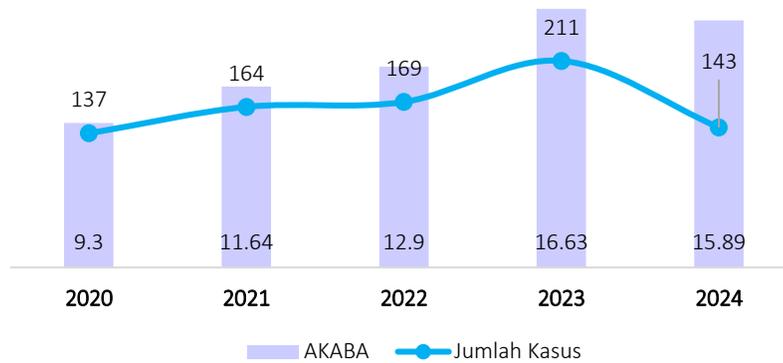
Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung berdasarkan banyaknya kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 adalah sebesar 7,77 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 14,03 per 1.000 kelahiran hidup dengan 178 jumlah kasus kematian bayi, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan 153 kasus kematian bayi. Kematian bayi dilatar belakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran premature, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil.

Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) adalah banyaknya kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal. AKABA di Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dimana pada tahun 2020 sebesar 9,30 per 1.000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2023 naik menjadi 16,63 per 1.000 kelahiran hidup dengan 211 jumlah kasus kematian balita, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 15,89 per 1.000 kelahiran hidup dengan 143 kasus kematian bayi.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 31. AKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



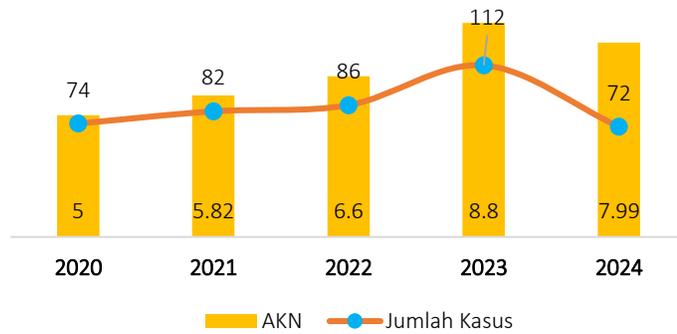
Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 32. AKABA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

### 5) Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

AKN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 s.d tahun 2023 mengalami kenaikan dari 5,00 menjadi 8,8 dengan 112 kasus. Meningkatnya AKN dapat diakibatkan oleh kelainan perinatal kehamilan berisiko tinggi seperti asfiksia, kelahiran bayi dengan BBLR, dan trauma kelahiran. Derajat kesehatan neonatal itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan ibu selama kehamilan, pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Namun, pada tahun 2024, AKN mengalami penurunan menjadi 7,99 dengan 72 kasus.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 33. AKN Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

#### 6) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dengan jumlah perkiraan insiden tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, *treatment coverage* TB berada pada angka 75,80 %. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 58,21 % dan 43,83 %. Tahun 2023 *treatment coverage* TB kembali naik pada angka 78,70 %, dan kembali meningkat di tahun 2024 mencapai 91,32%. Angka tersebut telah mencapai target nasional yang sebesar 70 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purbalingga semakin baik. *Treatment coverage* TB tersebut menunjukkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dari perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang terjadi.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dengan jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 *treatment success rate* TB berada pada angka 88,43 % berangsur-angsur naik menjadi 91,17 % di tahun 2023. Namun, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,92 % seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati. *Treatment Success Rate* TB pada dasarnya menunjukkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dari jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutus penularan TBC di masyarakat.

**Tabel II.22. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Kasus TB	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Seluruh Kasus Terduga Tuberkulosis	kasus	1.004	987	1.784	2.363	2.812
2	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati	kasus	1.366	1.049	1.038	1.925	2.616
3	Jumlah Perkiraan Insiden Tuberkulosis	kasus	1.802	1.802	2.369	2.446	2.389
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>Treatment Coverage</i> )	%	75,80	58,21	43,82	78,70	91,32
5	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Sembuh dan Menyelesaikan Pengobatan	kasus	1.208	913	929	1.755	2.172
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Treatment Success Rate</i> )	%	88,43	87,04	89,50	91,17	90,92

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 7) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima JKN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2018, persentase kepesertaan JKN mencapai 93,02% kemudian meningkat menjadi 100,46%. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh program JKN pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.040.705 jiwa sehingga persentasenya mencapai 100,46%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan.

**Tabel II.23. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Kepesertaan JKN	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	jiwa	857.351	869.258	989.221	1.040.705	1.053.425
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	85,9	86,3	98,2	100,46	100,66

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2019-2024

### 8) Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga baik berupa rumah sakit maupun puskesmas tidak mengalami penambahan yang signifikan. Dilihat dari sebarannya, jumlah puskesmas sudah tersedia di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Namun untuk sebaran rumah sakit (baik negeri maupun swasta) masih terpusat di kawasan perkotaan Purbalingga. Secara rinci ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.24. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	unit	22	22	22	22	22
2	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	unit	11	11	11	11	11
3	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	unit	11	11	11	11	11
4	Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin	unit	16	16	16	16	16
5	Jumlah Puskesmas Poned	unit	5	5	5	5	5
6	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	22	22	22	22	22
7	Jumlah Puskesmas Pembantu	unit	48	48	48	48	48
8	Jumlah RS (Total)	unit	6	7	8	8	9
9	Jumlah RS Umum	unit	5	6	7	7	7
	a. Jumlah RS Umum Milik Daerah	unit	2	2	2	2	2
	b. Jumlah RS Umum Milik Swasta	unit	3	4	5	5	5
12	Jumlah RS Khusus (Milik Swasta)	unit	1	1	1	1	2
13	Jumlah RS Tipe C	unit	1	1	1	1	2
14	Jumlah RS Tipe D	unit	5	5	6	6	7
15	Jumlah RS Ponek	unit	1	2	2	2	2
16	Jumlah RS Terakreditasi	unit	3	3	3	3	2

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

Dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, rasio Puskesmas dengan penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin kecil. Dengan demikian, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk.

**Tabel II.25. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2020	22	1.011.425	2,18
2021	22	1.021.920	2,15
2022	22	1.035.959	2,12
2023	22	1.027.333	2,14
2024	22	1.046.474	2,1

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 9) Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga secara umum berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan

pelayanan kesehatan masyarakat. Secara rinci capaian ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.26. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum	orang	156	194	203	217	219
2	Rasio Dokter Umum	per 100.000 penduduk	15,60	19,25	20,10	21,12	21,06
3	Jumlah Dokter Spesialis	orang	95	101	108	115	122
4	Rasio Dokter Spesialis	per 100.000 penduduk	9,50	10,02	10,70	11,19	11,73
5	Jumlah Dokter Gigi	orang	50	39	42,00	54	56
6	Rasio Dokter Gigi	per 100.000 penduduk	5	3,87	3,84	4,67	5,38
7	Jumlah Perawat	orang	1.056	1.243	1.374	1.350	1511
8	Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	105,60	123,30	136,30	131,41	145,27
9	Jumlah Bidan	orang	604	712	738	730	784
10	Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	60,40	70,65	73,20	71,06	75,38
11	Jumlah Tenaga Farmasi	orang	157	386	374	341	365
12	Rasio Tenaga Farmasi	per 100.000 penduduk	15,60	38,30	37,10	33,19	35,09
13	Jumlah Tenaga Gizi	orang	56	59	59	57	59
14	Tenaga Gizi	per 100.000 penduduk	5,60	5,85	5,90	5,55	5,67

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 - 2025

#### 10) Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan (SPM)

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan indikator SPM berdasarkan Permenkes No.4 Tahun 20019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi: Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, ODGJ berat, tuberkulosisi dan HIV yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel II.27. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator SPM (Permenkes No.4 Tahun 2019)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	95,57	61,30	79,48	87,04	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	persen	99,88	99,73	99,44	99,6	100
3	Pelayanan untuk bayi baru lahir	persen	99,95	87,54	97,30	98,61	100
4	Pelayanan kesehatan balita	persen	81,04	86,94	94,41	96,7	100
5	Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	persen	93,45	64,99	98,89	100	100
6	Pelayanan orang usia 15 - 59	persen	31,47	24,08	66,35	105,22	100
7	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	persen	60,14	70,19	83,04	89,21	100

No	Indikator SPM (Permenkes No.4 Tahun 2019)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	persen	11,12	10,00	42,06	69,78	100
9	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	persen	100,00	107,00	134,79	109,27	100
10	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	persen	73,50	78,11	89,91	100,64	100
11	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	persen	39,76	57,09	111,64	110,89	100
12	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	persen	80,79	86,10	100,34	102,24	100

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

## C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1) Indeks Jalan Mantap

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga sesuai kewenangannya pada dasarnya terdiri dari ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/193 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga dimana panjang jalan sebelumnya yaitu 888.087 km kemudian bertambah lagi menjadi 952.602 km. Penambahan tersebut terjadi dikarenakan adanya penambahan beberapa ruas jalan antar desa yang alih status menjadi jalan kabupaten. Disamping itu ada pula beberapa ruas jalan kabupaten yang beralih status menjadi jalan provinsi. Jaringan jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu sepanjang 39,02 km yang merupakan penghubung antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pematang.

Dilihat dari kondisinya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan baik, sedang dan rusak berat terlihat fluktuatif. Sedangkan kondisi jalan rusak semakin meningkat. Selengkapannya kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.28. Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi baik	m	593.877	625.166	566.679	443.981	370.456
2	Kondisi sedang	m	103.243	163.167	191.728	306.940	280.942
3	Kondisi rusak	m	83.673	43.015	64.704	52.410	207.914
4	Kondisi rusak berat	m	107.294	56.739	64.977	149.271	93.290
<b>Total Panjang Jalan</b>		m	888.080	888.080	888.080	952.602	952.602

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Dari kenaikan dan penurunan kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga tersebut, dapat diketahui perkembangan persentase panjang jalan kondisi permukaan jalan mantap (kondisi jalan baik dan sedang). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan mantap cenderung menurun. Hal tersebut

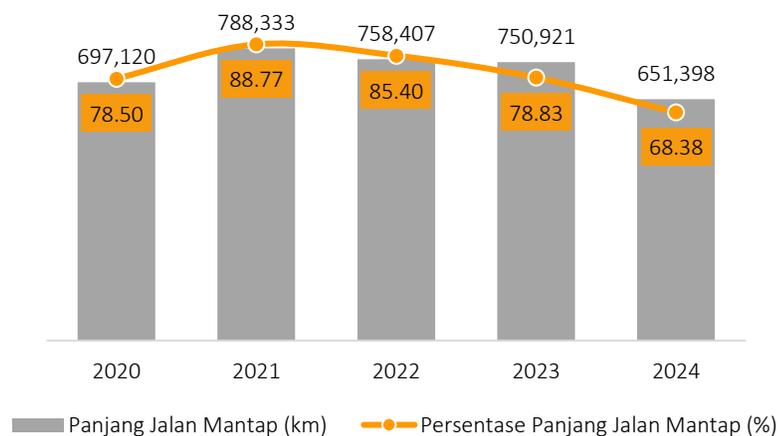
disebabkan karena penanganan jalan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Penanganan pemeliharaan rutin jalan tidak dapat memantapkan atau mempertahankan kondisi jalan karena sifatnya hanya tambal sulam. Penanganan jalan tersebut pun dilakukan sesuai dengan prioritas anggaran yang ada.

Dari keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut, sebagian besar perkerasan berupa aspal. Secara rinci yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.29. Jenis Perkerasan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang jalan Aspal (Asphalt Congreed (AC), Asphalt Treated Base (ATB), Hot Rolled Sheet (HRS))	m	780.793	820.338	858.764	905.308	903.508
2	Panjang jalan Perkerasan Rigid/Beton	m	0	17.160	0,00	31.944	31.499
3	Panjang jalan Lapis Penetrasi/ Latahir/ Makadam	m	0	17.622	0,00	0	0
4	Panjang jalan Telford/ Kerikil/ Urpil	m	107.294	31.967	28.323	8.350	10.595
5	Panjang jalan Tanah/ Belum Tembus	m	0	1.000	1.000	7.000	7.000

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025



Sumber: DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

**Gambar 2. 34. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Sedangkan untuk kondisi jembatan yang merupakan bagian dari jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga mengalami penambahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun dilihat dari kondisinya hanya sekitar 68 persen dalam kondisi baik di tahun 2024. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan semakin banyak jembatan yang kondisinya semakin menurun.

Tabel II.30. Kondisi Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jembatan	buah	379	379	379	517	545
2	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	buah	342	356	356	486	370
3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	90,24	93,93	93,93	94	68

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

## 2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, terdapat 5 aspek dalam menilai kinerja sistem irigasi yaitu: 1. Aspek Kondisi Prasarana Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A (bobot maksimal 10).

Kondisi indeks kinerja sistem irigasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu sebesar 72,5 %. Kinerja tersebut didukung dengan adanya prasarana fisik yaitu bangunan irigasi berupa bendung yang sampai dengan saat ini mencapai 207 unit maupun Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha. Disamping bangunan irigasi juga terdapat saluran irigasi berupa jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis. Secara rinci penilaian kinerja system irigasi Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.31. Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Nama Jenis Indikator Kinerja	Bobot Indikator	Penilaian	Nilai Kinerja
A.	<b>PRASARANA FISIK</b>	<b>45%</b>		<b>34,45%</b>
1	Bangunan utama	13%	80	10,40%
2	Saluran pembawa	10%	80	8,00%
3	Bangunan pada saluran pembawa	9%	75	6,75%
4	Saluran pembuang dan bangunannya	4%	70	2,80%
5	Jalan masuk/inspeksi	4%	75	3,00%
6	Kantor, perumahan, dan Gudang	5%	70	3,50%
B.	<b>PRODUKTIVITAS TANAM</b>	<b>15%</b>		<b>11,50%</b>
1	Pemenuhan kebutuhan air (faktor K)	9%	80	7,20%
2	Realisasi luas tanam	4%	70	2,80%
3	Produktivitas padi	2%	75	1,50%
C.	<b>SARANA PENUNJANG</b>	<b>10%</b>		<b>8,00%</b>
1	Peralatan O&P	4%	80	3,20%
2	Transportasi	2%	80	1,60%
3	Alat-alat kantor Ranting/Pengamat/UPTD	2%	80	1,60%
4	Alat komunikasi	2%	80	1,60%
D.	<b>ORGANISASI PERSONALIA</b>	<b>15%</b>		<b>10,50%</b>
1	Organisasi O&P telah disusun dengan batasan-batasan tanggungjawab dan tugas yang jelas	5%	70	3,50%
2	Personalia	10%	70	7,00%
E.	<b>DOKUMENTASI</b>	<b>5%</b>		<b>3,50%</b>
1	Buku data Daerah Irigasi (DI)	3%	70	2,10%

No.	Nama Jenis Indikator Kinerja	Bobot Indikator	Penilaian	Nilai Kinerja	
	2	Peta/Skema jaringan irigasi dan gambar-gambar	2%	70	1,40%
F.		<b>PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A)</b>	<b>10%</b>		<b>4,55%</b>
	1	GP3A/IP3A sudah berbadan hukum	1,5%	70	1,05%
	2	Kondisi kelembagaan GP3A/IP3A	0,5%	70	0,35%
	3	Rapat P3A/GP3A/IP3A dengan Ranting /Pengamat/UPTD	2,0%	50	1,00%
	4	GP3A/IP3A aktif mengikuti survei/penelusuran jaringan	1,0%	45	0,45%
	5	Partisipasi anggota GP3A/IP3A dalam Perbaikan jaringan dan penanganan bencana alam	2,0%	50	1,00%
	6	luran GP3A/IP3A untuk partisipasi perbaikan jaringan utama	2,0%	0	0,00%
	7	Partisipasi GP3A/IP3A dalam Perencanaan Tata Tanam dan Pengalokasikan Air	1,0%	70	0,70%
		<b>JUMLAH NILAI KINERJA (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>100%</b>		<b>72,50%</b>

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2025

### 3) Kondisi Jaringan Irigasi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya cukup berlimpah baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Kondisi jaringan irigasi baik teknis maupun non teknis di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Sedangkan dilihat dari kondisinya, sebagian besar jaringan irigasi mempunyai kondisi yang baik walaupun masih ada beberapa kondisi jaringan irigasi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel II.32. Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis	m	158.065	158.084	158.124	158.161	268.652
	Kondisi Baik	m	66.723	66.732	66.748	66.761	137.313
	Kondisi Sedang	m	24.826	24.829	24.835	24.844	55.848
	Kondisi Rusak Ringan	m	8.275	8.276	8.278	8.281	39.352
	Kondisi Rusak Berat	m	58.240	58.247	58.262	58.275	36.140
2	Panjang Jaringan Irigasi Teknis	m	175.000	175.189	175.489	175.552	175.112
a	Panjang Jaringan Irigasi Teknis (Irigasi Primer)	m	6.276	6.276	6.276	6.276	6.882
	Kondisi Baik	m	4.393	4.393	4.393	4.393	5.162
	Kondisi Sedang	m	628	628	628	628	1.376
	Kondisi Rusak Ringan	m	628	628	628	628	628
	Kondisi Rusak Berat	m	628	628	628	628	344
b	Panjang Jaringan Irigasi Teknis (Irigasi Sekunder)	m	333.273	333.273	333.273	333.273	326.391
	Kondisi Baik	m	153.306	159.971	159.971	159.971	175.915
	Kondisi Sedang	m	106.647	103.315	103.315	103.315	65.489

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kondisi Rusak Ringan	m	333.327	333.327	33.327	33.327	47.682
	Kondisi Rusak Berat	m	36.660	36.660	36.660	36.660	37.305

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Jumlah bendung di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini mencapai 207 unit. Sedangkan jumlah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga yaitu berjumlah 255 DI dengan luas daerah irigasi yaitu 19.159 Ha. Dari luasan daerah irigasi tersebut, yang mampu terlayani jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.33. Persentase Luas Oncoran Air Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Kondisi Irigasi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Daerah Irigasi	ha	19.158	19.159	19.159	19.159	19.159
2	Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi	ha	12.644	14.368	14.560	13.794	13.949
3	Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani Jaringan Irigasi/ Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	persen	66	74,99	76	72	73

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

#### 4) Kondisi Bangunan Gedung

Kualitas bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak yang merupakan penggabungan antara persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik dan penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dilihat dari kondisi bangunan gedung pemerintah yang ada di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan bangunan gedung pemerintah yang kondisinya baik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.34. Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Kondisi Bangunan Gedung	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bangunan pemerintah keseluruhan	unit	66	66	66	149	149
	a. Badan/Dinas	unit	29	29	29	64	64
	b. Kecamatan	unit	18	18	18	61	61
	c. Kelurahan	unit	15	15	15	17	17
	d. Rumah Dinas	unit	4	4	4	7	7
2	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	unit	28	33	33	76	78
3	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	persen	50	50	50	51,01	52,35

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

Sedangkan untuk penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada persentase penyelesaian perizinan PBG sesuai dengan jumlah permohonan yang ada. Pada dasarnya untuk mendukung penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga, telah tersusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.35. Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024**

No.	Penyelesaian PBG	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah PBG yang terbit	permohonan	243	119	508
2	Jumlah Permohonan PBG (kumulatif)	permohonan			1.328
3	Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	persen			38,25

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2023 – 2025

#### 5) Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan sertifikasi SDM jasa konstruksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar mampu menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas dan memenuhi standar, serta meningkatkan daya saing SDM konstruksi. Terdapat kurang lebih 120 perusahaan jasa konstruksi yang minimal mempunyai 2 anggota tersertifikasi jalan dan irigasi. Beberapa pelatihan tenaga terampil konstruksi telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Beberapa kondisi terkait dengan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.36. Kondisi Pengelolaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jumlah anggota jasa konstruksi yang tersertifikasi	anggota	0	40	0	38	35
2	Jumlah anggota jasa konstruksi	anggota	240	240	240	240	240
3	Persentase SDM Jasa Konstruksi Tersertifikasi	persen	0	16,67	0	15,83	14,58

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

#### 6) Kondisi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan. Di dalam RTRW, ditetapkan memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) di Kabupaten Purbalingga yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Pada kedua PKL tersebut telah tersusun RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga yang kemudian ditetapkan menjadi Perbup Purbalingga Nomor 46 Tahun 2021 serta RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang kemudian ditetapkan menjadi Perbup Purbalingga Nomor 70 Tahun 2023.

Sementara itu, dalam kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purbalingga yang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan.

Apabila dilihat dari aspeknya, kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga yang kondisinya sudah baik yaitu dilihat dari: 1). Pembinaan Penataan Ruang, terutama dalam hal pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sampai dengan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat, 2). Perencanaan Tata Ruang, terutama dalam hal ketersediaan rencana tata ruang dan kelengkapan muatan rencana tata ruang, 3). Pemanfaatan Ruang, terutama dalam hal pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Sedangkan kondisi yang perlu peningkatan yaitu dilihat dari: 1). Pengaturan Penataan Ruang, terutama dalam hal penetapan peraturan terkait pemanfaatan ruang, penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait pengendalian pemanfaatan ruang serta penetapan peraturan dan/atau keputusan terkait pembinaan penataan ruang, 2). Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terutama dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Kondisi kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel II.37. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024**

No	Aspek	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Pengaturan Penataan Ruang	persen	90	69	67,92	67,92
2	Pembinaan Penataan Ruang	persen	87	97	87,78	87,78
3	Perencanaan Tata Ruang	persen	95	95	100	100
4	Pemanfaatan Ruang	persen	100	100	80,90	80,90
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persen	25	50	53,33	53,33

No	Aspek	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	79,33	82,13	77,98	77,98
	Predikat Kinerja	kategori	Sedang	Baik	Sedang	Sedang

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2022 – 2025

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut merupakan data kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir.

**Tabel II.38. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Permohonan Kesesuaian Tata Ruang	dokumen	184	424	520	523	283
2	Jumlah Rekomendasi FPRD	dokumen	162	415	4	3	4
	a. Sesuai	dokumen	142	396	3	3	4
	b. Tidak Sesuai	dokumen	20	19	1	0	0
3	Jumlah Informasi Tata Ruang (ITR)	dokumen	22	9	371	361	272
	a. Sesuai	dokumen	0	0	345	344	257
	b. Tidak Sesuai	dokumen	0	0	9	6	7
	c. Sesuai Sebagian	dokumen	0	0	17	11	8
	d. ITR WIUP	dokumen	22	9	4	6	1
4	Persentase Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	persen	87,41	92,22	92,99	95,29	94,49

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021 – 2025

## 7) Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak terus meningkat, yaitu dari 92,05 persen di tahun 2020 hingga mencapai 96,52 persen di tahun 2024. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, utamanya pada wilayah kekeringan sehingga agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju *universal access* 100-0-100. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai akses 100 persen adalah ketersediaan air baku. Secara umum semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun masih terdapat beberapa desa yang belum 100 persen cakupannya. Kendala yang dihadapi salah satunya karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM dan pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

**Tabel II.39. Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Indikator SPM	Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	227.715	230.090	234.843	237.933	239.233
2	Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	92,05	93,01	94,75	96,00	96,52

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

Sementara itu, untuk rumah tangga yang memiliki akses air minum yang terhubung dengan jaringan perpipaan PDAM, sampai dengan tahun 2024 hanya sejumlah 172.090 unit dan belum memenuhi sebagian besar kecamatan yang ada khususnya pada Ibu Kota Kecamatan (IKK). Baru 13 kecamatan yang dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM di Kabupaten Purbalingga yaitu: Purbalingga, Bobotdari, Kutasari, Kejobong, Mrebet, Rembang, Bukateja, Kemangkon, Padamara, Kalimanah, Kaligondang, Bojongsari, dan Karangreja. Dari keseluruhan rumah tangga yang memiliki akses air minum yang terhubung dengan jaringan perpipaan PDAM tersebut yang mempunyai kondisi air siap minum karena telah aman dan dilakukan pengujian hanya sebesar 34,53 persen.

**Tabel II.40. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024**

No.	Air Siap Minum Perpipaan	Satuan	2023	2024
1	Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)	unit	59.427	60.869
2	Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM	unit	172.090	173.532
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	34,53	35,08

Sumber: PDAM dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2024

#### 8) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak terus meningkat, yaitu dari 92,26 persen di tahun 2020 hingga mencapai 95,37 persen di tahun 2024. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Purbalingga memiliki akses terhadap sarana jamban baik ke sarana-sarana pribadi dan umum/komunal. Namun sistem pembuangan limbah sarana jamban masih tidak terlalu baik karena masih ada yang disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka seperti kolam ikan, lubang besar (cubluk), maupun ke sungai. Kondisi sanitasi tersebut belum menunjukkan keseluruhan akses sanitasi aman.

**Tabel II.41. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Indikator SPM	Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak	228.235	228.531	231.954	233.051	236.386
2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	92,26	93,18	93,59	94,03	95,37

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

Pada dasarnya akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Saat ini sudah terdapat SPALD-S dan SPALD-T di Kabupaten Purbalingga, namun belum terdapat IPLT untuk memwadahi pengolahan lumpur tinja saat ini, sehingga kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil yaitu sebesar 0,82 persen.

**Tabel II.42. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No.	Akses Sanitasi Aman	Satuan	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	unit	321.025	353.734
2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	unit	2.635	3584
3	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap IPLT	unit	0	0
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,82	1,01

Sumber: BPS, Dinrumkim dan Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 1) Penanganan Kawasan Kumuh

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Purbalingga No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga dengan luas total 344,28 Ha yang tersebar di 25 kawasan. Secara rinci sebarannya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel II.43. Sebaran Luas Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan (Ha)	Tingkat Kumuh
1	Kawasan Kali Gemuruh	20,30	Ringan
2	Kawasan Gringsing	26,30	Ringan
3	Kawasan Kandangampang	9,57	Ringan
4	Kawasan Wirasana	27,98	Ringan
5	Kawasan Bojong	9,53	Ringan
6	Kawasan Toyareja	16,20	Ringan
7	Kawasan Kedungmenjangan	9,63	Ringan
8	Kawasan Jatisaba	11,90	Ringan
9	Kawasan Bancar	7,07	Ringan
10	Kawasan Keramean	39,92	Ringan
11	Kawasan Babakan	11,97	Ringan

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan (Ha)	Tingkat Kumuh
12	Kawasan Selabaya	17,88	Ringan
13	Kawasan Brobot	8,00	Ringan
14	Kawasan Kaligondang	37,54	Ringan
15	Kawasan Bobotsari	2,57	Ringan
16	Kawasan Majapura	2,10	Ringan
17	Kawasan Dukuh Jawi	4,31	Ringan
18	Kawasan Karangduren	6,08	Sedang
19	Kawasan Pakuncen	5,29	Ringan
20	Kawasan Bukamaja	28,85	Sedang
21	Kawasan Kedungjati	14,65	Sedang
22	Kawasan Losari	5,12	Ringan
23	Kawasan Sumampir	10,39	Ringan, Sedang
24	Kawasan Bodas Karangjati	4,01	Ringan
	<b>Total</b>	<b>344,28</b>	

Sumber : SK Bupati Kabupaten Purbalingga No. 640/212 Tahun 2021

Penanganan kumuh dilakukan berdasarkan luasan kumuh, dimana untuk Pemerintah Pusat untuk luasan > 15 Ha dan Pemerintah Provinsi untuk luasan 10 -15 Ha. Keduanya dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan penanganan kumuh untuk Pemerintah Kabupaten untuk luasan < 10 Ha dilakukan dengan memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada. Beberapa kondisi terkait kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.44. Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

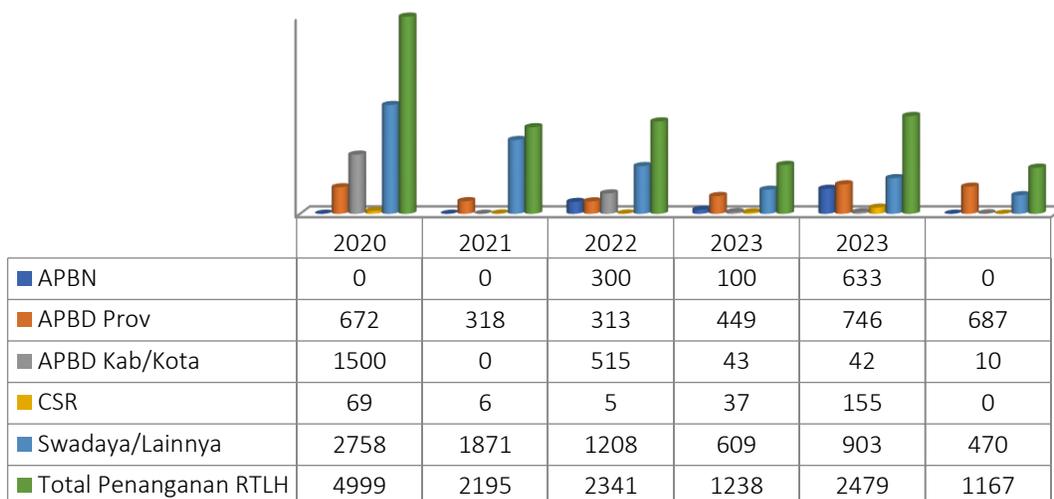
No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan BA Update Pendataan Kumuh Tahun 2024)	ha	344,28	344,28	344,28
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	ha	4,01	14,79	34,1
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tertangani	persen	1,16	4,30	9,90
4	Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh	ha	340,27	329,49	310,18
5	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	ha	7.434,57	7.434,57	7.434,57
6	Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	persen	95,42	95,57	95,83

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2020-2024

## 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat, hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dilihat dari penanganan RTLH berdasarkan

sumber pembiayaan di Kabupaten Purbalingga 5 tahun terakhir dapat dilihat dari grafik berikut.



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 35. Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

### 3) Perumahan yang sudah Diserahterimakan Aset Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)-nya

Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat backlog sebanyak 105.882 unit rumah. Kebutuhan rumah tersebut pada dasarnya dipenuhi secara swadaya maupun oleh *developer*/pengembang perumahan. Saat ini jumlah perumahan yang dikembangkan oleh *developer* di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 117 perumahan. Namun baru 77 perumahan yang sudah diserahterimakan aset prasarana sarana dan utilitas (PSU) nya. Penyerahan PSU tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan dan pemeliharaan PSU agar tidak terbengkalai setelah proses pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang selesai sepenuhnya. Penyerahan PSU tersebut akan memberi dampak positif pada nilai aset Kabupaten Purbalingga yang akan meningkat. Beberapa kondisi terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.45. Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah	unit	248.710	248.949	247.852	247.852	247.852
2	Jumlah KK	unit	336.502	338.871	342.436	349.974	353.734
3	Jumlah Backlog Rumah	unit	87.888	89.922	94.584	102.122	105.882
4	Jumlah Perumahan Developer	unit	76	75	100	114	117
5	Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU	unit	53	58	58	72	77

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun (rusun). Kabupaten Purbalingga hanya mempunyai 1 rusun yang merupakan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan daya tampung 58 unit. Secara lokasi rusunawa tersebut berada Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga.

Sedangkan untuk kondisi rumah layak huni yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat. Hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dilaksanakan pada berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.46. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Akses Hunian Layak	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah	unit	248.710	248.949	247.852	247.852	247.852
2	Jumlah Rumah Layak Huni	unit	179.106	179.345	198.936	201.419	225.757
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	persen	78,99	79,82	88,61	90,61	91,09

Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 5) Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar perumahan rakyat kabupaten/kota yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel II.47. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023**

No.	Indikator SPM (PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	unit	0	9	22	11	12
		persen	0	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	0	0	0	0	0

Sumber: BPS, Dinrumkim dan Dinkes Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### E. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 1) Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar

yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

- 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas;
- 3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran;
- 4) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.

Kondisi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.48. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No.	Indeks	Satuan	2023	2024
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	angka	67,09	67,13*
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	angka	85,81	85,85*
3	Indeks Satlinmas	angka	50	50,04*
4	Indeks Kebakaran	angka	50	50,04*

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2024-2025

## 2) Angka Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dilihat dari kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, selama kurun waktu 5 tahun beberapa pelanggaran Perda/Perkada didominasi oleh Pelanggaran Reklame, PKL Razia Anak Sekolah Miras, DBHCHT dan PGOT. Secara rinci jumlah pelanggaran tantribum yang tercatat selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.49. Jumlah Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Jenis Pelanggaran	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PGOT						
	a. Kegiatan Penjaringan PGOT	kali	40	33	21	207	74
	b. PGOT yang terjaring	orang	198	104	159	166	116
2	PKL						
	a. Kegiatan Penjaringan PKL	kali	58	58	51	207	343
	b. PKL yang terjaring	orang	211	942	357	142	52
3	RAS						
	a. Kegiatan Penjaringan RAS	kali	48	40	7	18	4
	b. RAS yang terjaring	orang	72	0	55	99	11
4	4. PSK						
	a. Kegiatan Penjaringan PSK	kali	11	0	0	0	0
	b. PSK yang terjaring	orang	11	0	0	0	0
5	5. Miras						
	a. Kegiatan Penjaringan Miras	kali	10	17	4	15	10
	b. Orang terjaring penggunaan Miras	orang	10	17	22	33	29
6	DBHCHT	kali	40	32	0	17	58

No.	Jenis Pelanggaran	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Razia Reklame						
	a. Kegiatan penertiban Reklame	kali	24	38	69	48	43
	b. Reklame yang dilakukan penertiban	buah	4.611	1.670	2.507	1.678	1.595
	1). Reklame Banner	buah	0	835	1.378	996	110
	2). Reklame Baliho	buah	4.312	536	8	21	1
	3). Reklame spanduk	buah	296	296	1.032	269	65
	4). Reklame habis masa Izin	buah	3	3	0	21	0
	5). Vendor/ Pesang Iklan	orang	0	0	89	371	273
8	Protokol Kesehatan						
	a. Kegiatan Pejaringan Pelanggar Protokol Kesehatan	kali	550	730	320	0	0
	b. Jumlah orang terjaring	orang	2.895	2.498	978	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>8.008</b>	<b>5.231</b>	<b>3.946</b>	<b>2.189</b>	<b>1.894</b>

Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dari data jumlah pelanggaran ketertiban umum di atas, angka pelanggaran per 10.000 penduduk dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan secara bertahap hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, angka pelanggaran tercatat sebesar 79,18 persen. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana angka pelanggaran trantibum menurun menjadi 17,91 persen.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 36. Angka Pelanggaran Tantribum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

### 3) Angka Kriminalitas

Sedangkan dilihat dari angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan periode penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020, angka kriminalitas mencapai 1,9 dengan 192 kasus. Kemudian, pada tahun 2021, angka tersebut menurun menjadi 1,39 dengan 142 kasus, di mana kasus kriminal yang paling dominan adalah kasus narkoba. Namun, pada tahun 2022, angka kriminalitas kembali meningkat menjadi 1,68 dengan 173 kasus. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023, di mana angka kriminalitas mencapai 1,82 dengan 189 kasus, didominasi oleh kasus pembunuhan dan pencurian. Pada tahun 2024, angka kriminalitas kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 0,77 dengan total 81 kasus.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 37. Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

#### 4) Persentase Penegakan Perda

Dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dilakukan penegakan perda dengan berpedoman pada perda dan perkada yang mengandung sanksi. Jumlah total perda dan perkada yang mengandung sanksi di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 55. Namun, dalam pelaksanaannya hanya 6 perda yang mampu ditegakkan, sehingga persentase perda yang mengandung sanksi yang ditegakkan hanya sebesar 10,91 persen. Beberapa perda tersebut yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.50. Perda dan Perkada yang Mengandung Sanksi yang Ditegakkan Satpol PP Kabupaten Purbalingga**

No	Perda	Tentang	Keterangan
1	Perda Nomor 14 Tahun 2015	Penyelenggaraan Izin Reklame	
2	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Ketertban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga	Perbup Nomor 94 Tahun 2019 Zona PKL Wilayah Kecamatan Purbalingga
3	Perda Nomor 4 Tahun 2017	Penanggulangan Penyakit Masyarakat	
4	Perda Nomor 8 Tahun 2018	Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kabupaten Purbalingga	
5	Perda Nomor 26 Tahun 2018,	Tentang penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kos di kab. Purbalingga.	
6	Perda No 16 Tahun 2020	Tentang Penanggulangan Penyakit	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 300/444 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Kabupaten Purbalingga.

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2024

#### 5) Cakupan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran

Terkait dengan penanganan kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun kurun waktu 5 tahun, jumlah kejadian kebakaran cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari 52 kejadian di tahun 2020 menurun menjadi 44 kejadian di tahun 2022.

Kemudian meningkat menjadi 89 di tahun 2023, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang tinggi menjadi 96 kejadian kebakaran.

Dari beberapa kejadian kebakaran tersebut, rata-rata pelayanan bencana kebakaran dapat tertangani, walaupun ada kejadian 24 kebakaran yang tidak terlayani tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada tahun 2024. Untuk daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 3 Pos Melayani Kebakaran (PMK) yaitu Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari dan Pos Damkar Rembang. Layanan pemadaman dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Satpol PP. Secara rinci pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

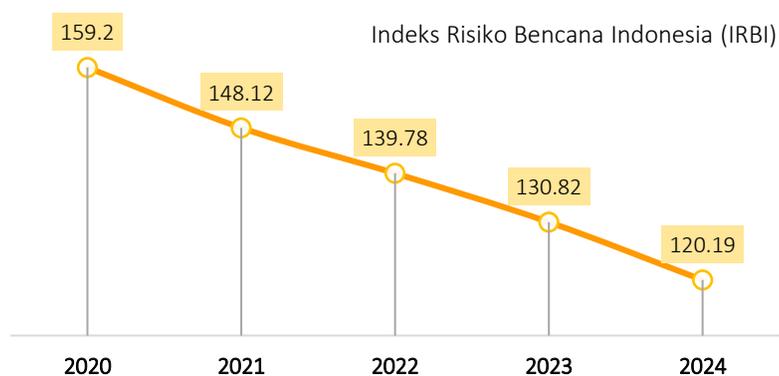
**Tabel II.51. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran	kejadian	52	55	44	89	96
2	Jumlah kejadian kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap ( <i>respon time</i> )	kejadian	22	55	43	58	72
3	Persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Tingkat waktu tanggap ( <i>respon time rate</i> ) penanganan kebakaran)	persen	42,31	100	97,73	65	75
4	Jumlah kejadian non kebakaran	kejadian	91	92	135	287	328
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran/ Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	persen	99,47	99,71	100	100	100
6	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	2	2	2	2	1
7	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	orang	2	2	2	2	1
8	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter	unit	5	5	5	5	5

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 6) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Purbalingga memperoleh skor 120,19 yang menunjukkan kategori risiko bencana sedang. Kategori risiko bencana Kabupaten Purbalingga menempati peringkat 8 di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana dengan ancaman bencana antara lain: tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas.



Sumber : BNPB, 2021-2025

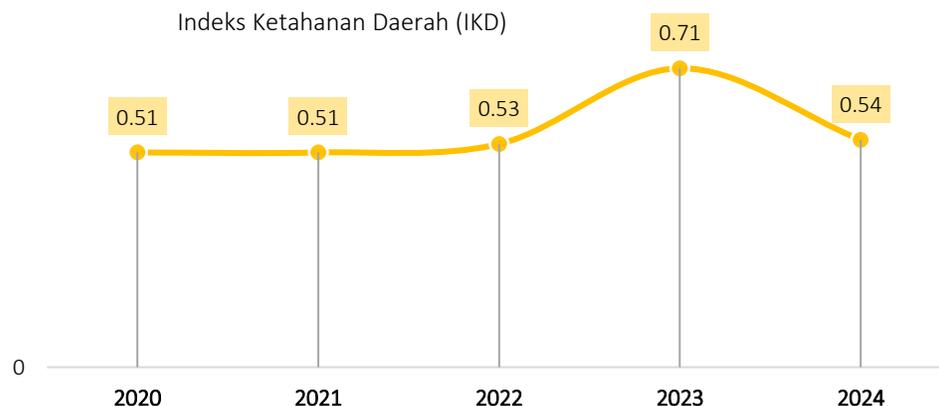
**Gambar 2. 38. Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Kerawanan bencana yang ada di Kabupaten Purbalingga didasarkan pada zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. KRB tersebut perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada. Permukiman dan sarana prasarana yang sudah terbangun pada zona risiko bencana tinggi dapat dilakukan rekayasa geoteknik untuk mengurangi tingkat kerentanan. KRB di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah
- Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet
- Kawasan rawan bencana angin topan
- Kawasan rawan bencana banjir

### 7) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Apabila dilihat dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Purbalingga, tahun 2024 berada pada angka 0,54. Penilaian IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas peanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga dimana terdapat 71 indikator ketahanan bencana yang dinilai. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan laporan kejadian bencana paling banyak adalah kebakaran, diikuti dengan angin ribut, tanah longsor dan banjir.



Sumber : BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 39. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 8) Cakupan Penanggulangan Bencana

Beberapa capaian terkait penanggulangan bencana dalam waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.52. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban bencana	korban	14.155	2.415	2.409	86.443	23.526
2	Jumlah pelayanan korban bencana	pelayanan	14.155	2.415	2.409	84.766	22.548
3	Cakupan pelayanan korban bencana	persen	100	100	100	98,06	95,84
4	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	0	0	0	2	9

Sumber: BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 9) Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Secara rinci indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.53. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Indikator SPM (Permendagri No. 114 dan No. 121 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	100	91,39	100	100
2	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100

No.	Indikator SPM (Permendagri No. 114 dan No. 121 Tahun 2018)	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	97,78	100	95,84

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2021-2025

## F. Urusan Sosial

### 1) Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri

Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah graduasi sejahtera mandiri dengan jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah total KPM yang merupakan kepesertaan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kenaikan dan penurunan. Begitu pula dengan jumlah graduasi sejahtera mandiri yang merupakan proses di mana KPM PKH dianggap telah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan sosial juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi KPM yang berubah yang tidak lagi memenuhi kriteria. Disamping itu updating data perlu dilakukan secara kontinyu dengan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pendataan lebih lanjut bagi keluarga kurang mampu yang berhak menerima santunan, untuk mendorong keberhasilan cakupan KPM graduasi sejahtera. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga dalam waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.54. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Graduasi Sejahtera Mandiri	orang	3.681	5.681	2.304	6.369	2.194
2	Jumlah Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	orang	52.744	59.108	66.008	63.781	61.806
3	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	persen	6,98	9,61	3,49	9,99	3,55

Sumber: DinsosdaldukBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 2) Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Purbalingga adalah jumlah PPKS yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 144.875 jiwa pada tahun 2024. Saat ini, Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga dengan kapasitas 11 shelter, 4 shelter untuk ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

**Tabel II.55. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	orang	17	23	NA	NA	1
2	Anak Terlantar	orang	NA	12	6	6	5
3	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMJ)	orang	NA	NA	NA	12	16
4	Anak Jalanan ( AJ )	orang	27	41	24	2	35
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	orang	834	990	990	990	679
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	orang	5	43	41	17	10
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	orang	NA	NA	NA	23	0
8	Lanjut Usia Terlantar	orang	NA	2.024	1.788	1769	767
9	Penyandang Disabilitas	orang	7.110	8.470	6.402	6037	5108
10	Tuna Susila ( TS )	orang	8	1	1	1	1
11	Gelandangan	orang	601	6	6	4	3
12	Pengemis	orang	14	41	9	9	16
13	Pemulung	orang	21	25	42	42	33
14	Kelompok Minoritas/Waria	orang	NA	NA	NA	NA	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	orang	33	127	177	28	26
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA )	orang	5	41	81	7	6
17	Korban Penyalahgunaan Napza	orang	3	79	33	21	3
18	Korban Trafficking	orang	NA	NA	NA	NA	0
19	Korban Tindak Kekerasan	orang	68	41	61	0	5
20	Pekerja Migran Bermasalah	orang	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	orang	45	59	1.504	165	550
22	Korban Bencana Sosial	orang	45	37	153	0	134
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	orang	1.519	1.416	1.317	1.316	775
24	Fakir Miskin	orang	76.590	153.100	145.330	143.410	136700
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	orang	0	18	1	1	2
Jumlah PPKS		orang	149.470	167.317	157.990	154.280	144875
Jumlah PPKS yang mendapatkan program pemerintah		orang	68.633	148.461	140.951	142.464	135.902
Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah		persen	45,92	88,73	89,22	92,34	93,81

Sumber : DinsosdaldukBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dalam upaya percepatan penanganan PPKS, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik perseorangan, keluarga, kelompok/lembaga yang dapat berperan untuk menjaga, menangani dan mencegah timbul/berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, serta terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Purbalingga PSKS yang berasal dari perseorangan seperti pekerja sosial profesional (PSP) dan pekerja sosial masyarakat (PSM) jumlahnya cukup banyak dibanding PSKS yang lain. Secara rinci jumlah PSKS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.56. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (desa/kelurahan)	unit	258	258	258	258	240
2	LKs/Orsos (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	lembaga	32	32	32	32	36
3	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	orang	717	717	717	717	478
4	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	orang	18	18	18	18	18
5	LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)	lembaga	1	1	1	1	1
6	Dunia Usaha	lembaga	84	84	0	0	61
7	Tagana (Taruna Siaga Bencana)	orang	47	49	50	50	37
8	Family Care Unit (FCU)	lembaga	N/A	N/A	0	0	0
9	Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)	orang	1	1	1	4	2
10	Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional	orang	194	194	194	194	0
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Penyuluh Sosial Fungsional	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	orang	0	0	0	0	0
14	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
15	Pelopor Perdamaian	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
16	SDM PKH (Program Keluarga Harapan)	orang	173	166	153	174	169
17	SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	orang	N/A	N/A	0	N/A	N/A
<b>Jumlah Total PSKS</b>			<b>1.441</b>	<b>1.436</b>	<b>1.424</b>	<b>1.448</b>	<b>1.046</b>

Sumber : DinsosdaldukkBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.57. Cakupan Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Indikator SPM (Permensos No. 9 Tahun 2018)	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100

No.	Indikator SPM (Permensos No. 9 Tahun 2018)	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	persen	100	100	100	100	100

Sumber: DinsosdaldukBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

##### 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (angkatan kerja yang bekerja). TPAK di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yaitu dari 69,89 persen di tahun 2020 menjadi 74,74 persen di tahun 2024 dengan perbandingan TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kenaikan TPAK di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan bahwa kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja atau penduduk usia kerja. TPAK yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan naiknya pasokan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga maka harus diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

##### 2) Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk yang bekerja cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana tahun 2020 sebesar 93,90 persen kemudian semakin naik menjadi 96,90 di tahun 2024. Rasio kesempatan kerja yang semakin meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang bekerja di Kabupaten Purbalingga, yang berarti tingkat pengangguran juga cenderung menurun. Hal tersebut ditunjukkan pula oleh angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 5,61 di tahun

2024 menjadi 4,96 persen di tahun 2024 dengan perbandingan TPT laki-laki sebesar 6,28 persen lebih besar dibanding TPT perempuan sebesar 3,10 persen.

**Tabel II.58. Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkatan Kerja	orang	500.261	503.682	538.507	583.408	598.666
	a. Laki-Laki	orang	298.683	299.139	305.217	338.572	350.451
	b. Perempuan	orang	201.578	204.543	233.290	244.836	248.215
2	Jumlah Penduduk yang Bekerja	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953
	a. Laki-Laki	orang	278.310	279.139	286.156	316.342	328.427
	b. Perempuan	orang	191.438	194.093	224.163	234.348	240.526
3	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	93,90	93,95	94,77	94,39	95,04
	a. Laki-Laki	persen	93,18	93,31	93,75	93,43	93,72
	b. Perempuan	persen	94,97	94,89	96,09	95,72	96,90

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus meningkat yaitu dari 19,82 persen di tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 85 persen di tahun 2024. Walaupun jumlah pencari kerja yang terdaftar menurun namun pencari kerja tersebut banyak yang ditempatkan. Dari sejumlah pencari kerja yang ditempatkan tersebut Sebagian besar adalah Perempuan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga banyak yang membutuhkan tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

**Tabel II.59. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari Kerja yang Terdaftar	orang	14.121	14.560	16.998	9.819	8.215
	a. Laki-Laki	orang	5.149	5.438	7.511	3.675	3.365
	b. Perempuan	orang	2.178	9.122	9.487	6.144	4.850
2	Permintaan Tenaga Kerja	orang	3.076	14.463	23.486	4.023	7.711
	a. Laki-Laki	orang	336	1.745	2.155	1.081	1.598
	b. Perempuan	orang	2.740	12.718	21.331	2.942	6.113
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	orang	2.799	6.632	6.134	2.901	6.984
	a. Laki-Laki	orang	173	520	1.444	636	1.368
	b. Perempuan	orang	2.626	6.112	4.690	2.265	5.616
4	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	19,82	45,55	36,09	30	85
	a. Laki-Laki	persen	1,23	3,57	8,50	6,48	16,65
	b. Perempuan	persen	18,60	41,98	27,59	23,07	68,36

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 2.195.571.

**Tabel II.60. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha sendiri	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	orang	98.725	96.294	101.085	118.590	143.254
3	Berusaha dibantu buruh tetap	orang	85.012	79.313	79.643	86.121	74.474
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	orang	17.041	18.144	11.272	15.156	19.536
5	Pekerja Bebas di Pertanian	orang	157.236	179.005	201.371	224.051	207.758
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	orang	55.768	23.391	23.906	10.663	22.617
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	orang	0	28.784	26.335	27.242	17.541

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama, sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir didominasi pada sektor jasa, diikuti dengan manufaktur dan pertanian. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam ketiga sektor tersebut masih didominasi oleh laki-laki.

**Tabel II.61. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian	orang	120.560	110.684	104.598	114.374	145.139
	Laki-Laki	orang	86.762	84.433	79.018	81.617	92.747
	Perempuan	orang	33.798	26.251	105.279	32.757	52.392
2	Manufaktur	orang	153.996	166.557	214.078	101.876	189.314
	Laki-Laki	orang	85.513	85.593	105.279	101.876	107.448
	Perempuan	orang	68.483	80.964	108.799	104.234	81.866
3	Jasa	orang	195.192	195.991	191.643	230.206	234.500
	Laki-Laki	orang	106.035	109.113	101.859	132.849	128.232
	Perempuan	orang	89.157	86.878	89.784	97.357	106.268
4	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	orang	469.748	473.232	510.319	550.690	568.953

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak

Pada dasarnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam kegiatan operasionalnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak di Kabupaten Purbalingga yaitu perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.62. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur dan skala upah, LKS Bipartit, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	perusahaan	401	399	402
2	Jumlah Perusahaan	perusahaan	432	432	447
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	persen	92,82	92,36	89,93

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2023-2025

**5) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah**

Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme pelayanan antar kerja lintas daerah adalah pencari kerja yang dihubungkan dengan pekerjaan di wilayah lain (Antar Kerja Lokal (AKL)/ Antar Kerja Lintas Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lintas Negara (AKAN)) melalui layanan yang disediakan oleh pemerintah. Layanan ini membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai di luar daerahnya. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.63. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah (AKL/AKAD/AKAN)	orang	251	4.023	6.984
2	Jumlah pencari kerja	orang	274	9.819	8.215
3	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah	persen	91,61	40,97	85,02

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2023-2025

**6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan kesejahteraan berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan sebagai berikut

**Tabel II.64. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	orang	39.194	43.872	47.698	44.785	38.674
2	Jumlah Tenaga Kerja	orang	49.540	53.946	59.781	52.875	43.766
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	79,12	81,33	79,79	85,71	88,37

Sumber: Dinnaker Kab. Purbalingga, 2021-2025

**B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah. Tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin.

Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Ketiga dimensi tersebut yaitu ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Sementara itu, kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 menunjukkan angka 55,52 kemudian meningkat menjadi 57,53 di tahun 2022, 60,94 di tahun 2023 63,05 tahun 2024.

**Tabel II.65. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024**

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
		Nilai	Kategori
1	2021	55,52	Berkembang
2	2022	57,53	Berkembang
3	2023	60,94	Berkembang
4	2024	63,05	Berkembang

Sumber: BKKBN, 2021-2025

Pencapaian nilai di keempat tahun tersebut berada pada kategori berkembang. Kondisi di Kabupaten Purbalingga sudah cukup bagus karena sudah berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Angka di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 58 dan nasional berada pada angka 56. Namun,

pembangunan keluarga di Kabupaten Purbalingga berada dalam tahap perkembangan dan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan keluarga merupakan unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia, oleh karena itu perlu untuk terus mendapat perhatian ke depannya agar menjadi lebih maju.

## 2) Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Masih adanya jumlah kekerasan terhadap perempuan dikarenakan realita budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga karena masih banyak yang belum terungkap dimana kekerasan bersifat *hidden crime*.

**Tabel II.66. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa	orang	14	12	18	21	18
2	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang ditindaklanjuti	orang	11	12	18	21	18
3	Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	persen	78,57	100	100	100	100
4	Total jumlah penduduk perempuan usia >18 tahun	orang			344.937	355.958	507.599
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	persen			5,22	5,9	3,55

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 3) Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (APE)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Penghargaan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu yang penting karena dapat memberikan pengakuan atas upaya dan pencapaian dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender secara efektif. Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG) disebut dengan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE). Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan peran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu, penghargaan dapat menjadi alat untuk menyebarkan praktik terbaik dan menginspirasi lembaga lain untuk mengadopsi kebijakan dan program yang lebih responsif gender.

Pada tahun 2020 dan 2022, Kabupaten Purbalingga telah berhasil meraih Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE) kategori pratama. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Penghargaan tersebut merupakan sebuah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas komitmen dan upaya nyata dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Purbalingga dalam mendorong kesetaraan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang responsif gender, termasuk integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan strategis, seperti RPJMD dan RKPD. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purbalingga untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender.

#### 4) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, negara sangat berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak, salah satunya dengan dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima 5 klaster dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian IPA di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap indeksnya. Indeks yang mengalami kenaikan adalah Hak Sipil dan Kebebasan, serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sedangkan indeks yang mengalami penurunan yaitu pada Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta Perlindungan Khusus. Secara rinci capaian IPA Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.67. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	angka	51,43	54,47	55,31
2	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	angka	82,76	74,31	73,14
3	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	angka	77,76	73,65	74,96

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
4	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	angka	20,08	25,65	23,69
5	Indeks D5 Perlindungan Khusus	angka	75,89	75,95	71,70
<b>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</b>		<b>angka</b>		<b>61,83</b>	<b>60,68</b>

Sumber : KemenPPPA, 2021-2024

### 5) Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan tinggi. Masih adanya kasus korban kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga disebabkan oleh beberapa hal baik dari faktor internal terkait dengan kondisi internal orangtua/keluarga maupun faktor eksternal terkait dengan masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau masyarakat dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Diperlukan upaya secara preventif dan represif untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Disamping itu juga diperlukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk menjalankan sosialisasi kepada khalayak umum tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

**Tabel II.68. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak	orang	44	32	22	39	49
2	Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditindaklanjuti	orang	44	32	22	39	49
3	Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	unit	26	26	26	111	111
	a. Pemerintah	unit	24	24	24	24	24
	b. Non Pemerintah	unit	1	1	1	27	27
	c. Dunia Usaha	unit	1	1	1	60	60
5	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus	orang	834	424	990	990	679
6	Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembaga	1	1	1	1	2
	a. Jumlah Lembaga Pemerintah Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembaga	1	1	1	1	1
	b. Jumlah Lembaga Swasta Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembaga	0	0	0	0	1

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 6) Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Suatu kabupaten

dikatakan layak anak atau ramah anak apabila memiliki kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga yang kuat secara fisik dan tegas dalam menjamin hak-hak anak, aturan yang jelas, kesempatan berpartisipasi untuk anak, serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang menjamin kehidupan anak sehingga anak memiliki kesempatan yang jelas untuk menjalani, mempelajari, dan menyelidiki kehidupan mereka.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Purbalingga menunjukkan kenaikan dari Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama menjadi Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan sangat penting untuk mendukung kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA) karena mereka dapat menyediakan sumber daya, keahlian, dan platform yang memperkuat implementasi program KLA. Beberapa *stakeholder* di Kabupaten Purbalingga yang terlibat antara lain:

1. Lembaga Masyarakat: Yayasan Pilar, Komisi Penanggulangan AID Daerah;
2. Dunia Usaha: PT-PT Anggota APSAI, Bank, PT Owabong, Perusda, TWP Purbasari Pancuran mas, Pos Indonesia, Bulob, Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia;
3. Media: LPPM Radio Gema Soedirman, Suara Merdeka, Radar Banyumas.

**Tabel II.69. Perkembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	predikat	Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Madya	Tingkat Madya*
2	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	374,8	580,53	531	621,35	732,65*
3	Jumlah desa/kelurahan layak anak	desa/kel	38	42	45	48	48
4	Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen	15,90	17,57	18,83	20,08	20,08
5	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)	unit	26	26	26	111	111
	d. Pemerintah	unit	24	24	24	24	24
	e. Non Pemerintah	unit	1	1	1	27	27
	f. Dunia Usaha	unit	1	1	1	60	60

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

## C. Pangan

### 1) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IKP Kabupaten Purbalingga berada pada angka 80,15 dan kemudian semakin menurun sampai dengan tahun 2023 di angka 78,05. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan namun tidak signifikan yaitu di angka 78,47. Dilihat dari komposisinya, terjadi penurunan pada aspek keterjangkauan. Hal tersebut disebabkan oleh masih besarnya penduduk di bawah garis kemiskinan, rendahnya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan > 65% terhadap total pengeluaran dan kurangnya akses listrik.

Sedangkan yang mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu aspek ketersediaan dan pemanfaatan. Pada aspek ketersediaan, faktor ketersediaan

pangan berupa rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stok beras pemerintah daerah semakin meningkat. Sedangkan pada aspek pemanfaatan terdapat kenaikan pada rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan dan angka harapan hidup pada saat lahir serta penurunan pada persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan persentase balita stunting.

**Tabel II.70. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

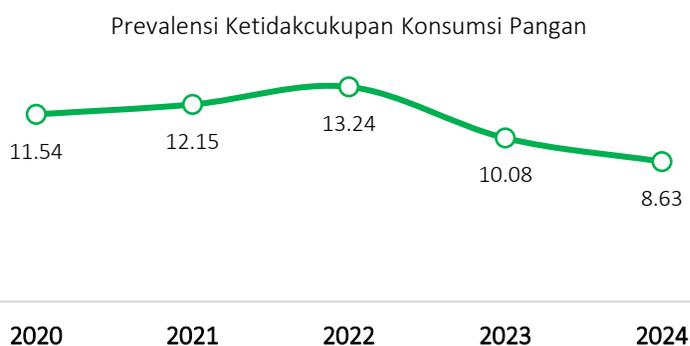
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Indeks Ketahanan Pangan (IKP)</b>	<b>angka</b>	<b>80,15</b>	<b>79,33</b>	<b>79,25</b>	<b>78,05</b>	<b>78,47</b>
	a. Aspek Ketersediaan	angka	83,63	85,43	82,80	80,96	82,12
	b. Aspek Keterjangkauan	angka	78,55	76,47	77,54	77,40	76,55
	c. Aspek Pemanfaatan	angka	78,74	76,90	77,86	76,35	77,16

Sumber : Bapanas, 2021-2025

## 2) *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

Untuk menilai ketidakcukupan konsumsi pangan, salah satu indikator yang digunakan yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kondisi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa sekitar 10,44 % total penduduk Provinsi Jawa Tengah mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan POU menurun sampai dengan -2,3 %.

Kecukupan pangan di Purbalingga mengalami perubahan yang fluktuatif. Tahapan tahun 2019 s.d. 2022 mengalami kenaikan dari 10,25 menjadi 13,34. Pertumbuhan PoU dalam 5 tahun tersebut yaitu sebesar 0,75 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 10,08 % penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.



Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2020-2024

**Gambar 2. 41. *Prevalence of Undernourishment (PoU)* Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

### 3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yaitu dari 80,30 di tahun 2020 menjadi 90,3 pada tahun 2024. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia mampu mempertahankan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik.

**Tabel II.71. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor PPH Konsumsi	angka	80,30	82,40	84,10	90,7	90,3
	a. Padi-padian	angka	25,00	25,00	23,70	24,7	24,2
	b. Umbi-umbian	angka	0,80	1,2	1,10	1,2	1
	c. Pangan Hewani	angka	17,10	16,70	18,30	19,1	19,9
	d. Minyak & lemak	angka	5,00	5,00	5,00	5	5
	e. Buah/biji berminyak	angka	0,20	0,20	0,20	0,3	0,2
	f. Kacang-kacangan	angka	5,50	6,10	6,30	8,6	8,6
	g. Gula	angka	2,00	2,10	1,80	1,9	1,5
	h. Sayur & buah	angka	24,70	26,20	27,70	30	30

Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 4) Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi tersebut dibedakan menjadi Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein. Secara rinci angka kecukupan gizi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.72. Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kecukupan Gizi (AKG)						
	a. Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	1.871	2.100	1.804	1.948	1.888
	b. Angka Konsumsi Protein	gr/kapita/hari	51,30	57,00	50,10	54	55,3

Sumber : DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

## D. Pertanian

### 1) Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanian yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat, seperti pemanfaatan

untuk beberapa sarana pendidikan maupun kesehatan. Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi tanah milik pemda dan eks bengkok yang hanya terletak di kawasan perkotaan. Secara rinci tanah milik pemda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.73. Kondisi Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda	bidang	1.846	1.871	1.870	1.912	2336
2	Luas Bidang Tanah Milik Pemda	m <sup>2</sup>	10.816.294	10.762.111	10.761.616	10.539.230	10.878.042
3	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	bidang	842	1.016	1.182	1.139	1645
4	Luas Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	m <sup>2</sup>	4.180.991	4.777.004	5.179.274	6.897.161	7.991.689
5	Persentase Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	persen	45,61	54,30	63,21	59,57	70,42
6	Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	ha	2.564.033	2.564.033	2.564.033	2.572.333	2.572.333
7	Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan	Ha	1.455.119	1.326.364	2.378.210	2.457.849	2.457.864
8	Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)	persen	56,75	51,73	92,75	95,55	95,55

Sumber : Bakeuda dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 2) Persentase Sertifikat Tanah Program PTSL

Dalam mendukung kegiatan reforma agraria, terdapat proses pensertifikatan tanah yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN yaitu salah satunya program prioritas berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan output berupa sertifikat tanah. Perkembangan jumlah sertifikat tanah program PTSL di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.74. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Sertifikat Tanah (Hak Milik) - Akumulatif	bidang	270.402	299.046	305.058	331.762	349.047
2	Jumlah Total Sertifikat Tanah	bidang	26.356	28.644	28.982	29.626	7.491
3	Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL	bidang	24.900	27.412	14.249	25.034	6.028
4	Persentase Sertifikat Tanah Program PTSL	persen	94,48	95,70	49,16	84,50	80,47

Sumber: ATR/BPN Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 3) Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan merupakan hal rutin yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi mediasi agar sengketa tanah tersebut dapat tertangani dengan baik. Jumlah kasus sengketa tanah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.75. Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

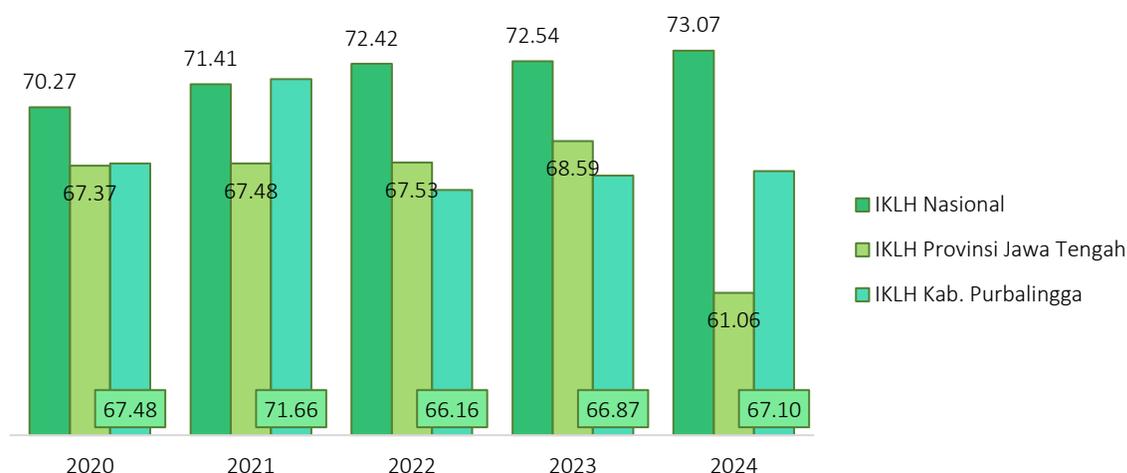
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Sengketa Tanah	kasus	5	8	8	5	5
2	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	kasus	5	8	2	2	2
3	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	kasus	0	0	6	3	3
4	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok	kasus	1	1	5	4	4
5	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai	kasus	1	1	5	4	4

Sumber: ATR/BPN dan Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021-2025

## E. Lingkungan Hidup

### 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk menilai daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga, salah satunya dapat dilihat pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan indikator meliputi: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Proporsi pembobotannya terdiri dari 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL. Dalam kurun waktu 5 tahun, IKLH Kabupaten Purbalingga termasuk fluktuatif. Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, IKLH Kabupaten Purbalingga masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional namun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 42. IKLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

Berdasarkan nilai konversi, komposit IKLH Kabupaten Purbalingga pada kualitas air berada pada kategori mutu air baik (70-90) namun masih terdapat pencemaran air yang terjadi khususnya pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia). Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter pencemaran yang melebihi baku mutu pada sungai walaupun dengan status cemar ringan. Sedangkan pada kualitas udara berada pada kategori baik (70-90). Tingkat kualitas udara tersebut tidak

berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sementara itu kualitas tutupan lahan yang merupakan tutupan vegetasi luasan hutan, semak belukar dan perkebunan berada pada kategori sedang (50-70).

**Tabel II.76. Indeks Komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	IKA	angka	43,33	54,40	55,83	56,67	55
2	IKU	angka	90,49	86,44	89,29	88,70	91,04
3	IKTL	angka	68,34	73,94	41,13	44,04	43,62
4	IKLH	angka	67,48	71,66	66,16	66,88	67,1
	IKLH (Konversi)	angka	75,14	79,80	73,67	76,70	76,88

Sumber: DLH Kab. Purbalingga dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021-2025

## 2) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan anggaran. Beberapa kondisi terkait dengan indikator IKPS pada tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- Kebijakan: Perda Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pengelolaan persampahan mencakup domain seperti Perda No 29/2021 tentang Pengelolaan sampah, Perbup No 96/2019 tentang Kebijakan Strategi Kab. Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perbup No 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dari Sumber, dan Perbup No 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam.
- Sumber daya manusia: SDM yang terlibat meliputi jumlah SDM pengelola sampah yang ada di DLH dengan total 196 orang dan jumlah sampah yang ditangani sebesar 115,43 ton/hari serta jumlah timbulan sampah per hari sebesar 513,665 ton/hari.
- Sarana dan Prasarana: Sarana Sarana Pengangkutan sampah, meliputi: Arm Roll Aktif, Dump Truck Aktif, Motor roda tiga, Mobil Pick Up sampah, Compactor truck, Dump Truck non DLH dan Mobil Pick Up non DLH dengan penanganan sampah 115,43 ton/hari. Disamping itu juga terdapat fasilitas pengolahan sampah yang dikelola pemerintah kab atau pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota meliputi: TPS3R, Biodigester, TPST, Fasilitas RDF, dll, Bank Sampah, KSM Sampah Mandiri dan Pengepul Rongsok.
- Anggaran: Proporsi dana yang dialokasikan untuk manajemen sampah dari total APBD adalah 0,25% dimana dari 2.110.403.286.000 total jumlah APBD hanya sebesar 5.628.729.000 yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

- Sosialisasi dan Pemahaman: Penilaian aspek ini berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau kampanye pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi sebanyak tiga kali.
- Acceptability dan Implementasi: Parameter ini mengukur rasio jumlah bank sampah terhadap jumlah kelurahan/desa dimana dari jumlah bank sampah unit dan bank sampah induk yang aktif dan/atau TPS3R (KSM) yang aktif pada tahun 2024 sebesar 80, rasio bank sampah dan/atau TPS3R sebesar 0,3347.

**Tabel II.77. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Komponen	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan ( <i>Governance</i> )	Kebijakan	9	10	11	15	15
	Sumberdaya Manusia	1	1	1	1	1
	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	2	2	2	2	2
	Anggaran	1	1	1	1	1
	Sosialisasi & pemahaman	1	1	3	3	3
	Acceptability & Implementasi	1	1	1	1	1
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Capaian terhadap target dan kapasitas	0,42	0,40	0,39	0,38	0,40
	Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	0,045	0,1	0,3475	0,37	0,81
	Kota Bersih	3	3	3	3	3
	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	4,33	5,44	5,58	5,67	5,50
<b>NILAI IKPS</b>		<b>22,80</b>	<b>24,94</b>	<b>28,32</b>	<b>32,42</b>	<b>32,71</b>

### 3) Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jumlah sampah terolah pada sumber sampah di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yang teridentifikasi yaitu sampah yang terolah di TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok. Jumlah sampah terolah pada fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- TPA  
Jumlah TPA di Kabupaten Purbalingga yaitu 1 unit. Jumlah sampah terolah pada TPA Kalipancur yaitu sejumlah 7 ton/hari.
- Bank Sampah  
Jumlah bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43 persen. Jumlah sampah terolah pada bank sampah yaitu sejumlah 15,05 ton/hari.
- KSM TPS 3R  
Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 17 unit. TPS3R yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Jumlah sampah terolah pada TPS3R yaitu sejumlah 10 ton/hari.
- KSM Pengelola Sampah Mandiri

Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2024 sebanyak 14 KSM. Jumlah sampah terolah pada KSM yaitu sejumlah 28 ton/hari.

e. Pengepul Rongsok

Jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga kurang lebih sebanyak 4 unit pada setiap kecamatan, sehingga estimasi jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 72 unit. Jumlah sampah terolah pada pengepul rongsok yaitu sejumlah 20.016 ton/hari.

Jumlah total sampah terolah pada seluruh fasilitas pengolahan sampah di atas yaitu sebesar 80,07 ton/hari, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah pada tahun 2024 yaitu 513,67 ton, maka persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yaitu sebesar 15,59 %.

#### 4) Cakupan Pengelolaan Sampah

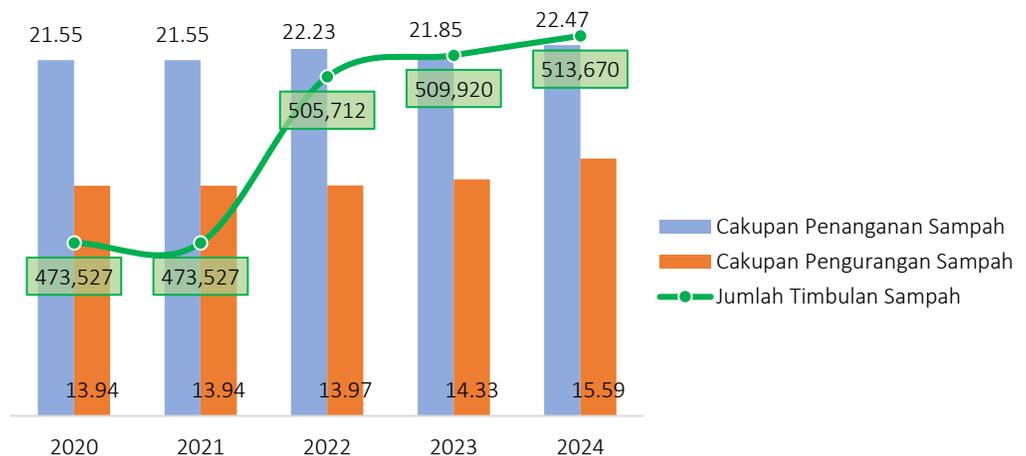
Kondisi persampahan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga, mekanismenya dimulai dari proses pemilahan sampah organik dengan anorganik, kemudian dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi 2 buah transfer depo yang berada di sekitar GOR Goentoer Darjono dan RTH Kecamatan Bobotsari, serta 22 buah pangkalan kontainer sampah. Saat ini belum ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kabupaten Purbalingga. Di dalam Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Purbalingga direncanakan minimal ada satu TPST di masing-masing area. Kabupaten Purbalingga dibagi dalam 5 area yang tiap area meliputi beberapa kecamatan.

Selain TPS, juga telah tersedia Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) untuk penanganan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Pada tahun 2022, telah terbangun TPS3R sebanyak 10 unit yang meliputi: TPS3R Kalikabong dan TPS3R Babakan Kec Kalimanah, TPS3R Jatisaba dan TPS3R Bancar Kec. Purbalingga, TPS3R Karangpule Kec. Padamara, TPS3R Sempor Lor Kec. Kaligondang, TPS3R Selaganggeng Kec. Mrebet, TPS3R Bandingan Kec. Kejobong, TPS3R Kutabawa dan TPS 3R Serang Kec. Karangreja. Kemudian pada tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 7 TPS3R yang meliputi: TPS3R Kutasari Kec. Kutasari, TPS3R Karangaren Kec. Kutasari, TPS3R Kalapacung Kec. Bobotsari, TPS3R Karangasem Kec. Kertanegara, TPS3R Pekiringan, TPS3R Tunjungmulu dan TPS3R Grantung Kec. Karangmoncol.

Sampah yang berasal dari TPS dan dari jalanan perkotaan akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu sampah dari TPS3R yang berupa sampah residu yang sudah tidak dapat dilakukan proses 3R juga akan diangkut ke TPA. TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu TPA Kalipancur yang berada di Desa Bedagas Kec. Pengadegan dengan luasan zona aktif *landfill* 1 seluas 0,8 Ha dan tersedia calon *landfill* 2 seluas 1,6 Ha. *Landfill* 1 didesain sistem *sanitary landfill*, dimana di bagian bawah dilengkapi dengan lapisan geotekstil dan geomembran, serta saluran lindi. Saluran lindi dibuat agar air lindi tidak meresap ke dalam tanah, tetapi dapat ditampung di Tempat Pengelolaan Air Lindi. Namun dalam prakteknya di TPA Kalipancur, penutupan *landfill* secara berkala dengan

lapisan tanah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya dilema TPA cepat penuh sehingga TPA terkesan seperti *open dumping*.

Dari mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan di atas, cakupan penanganan dan cakupan pengurangan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan namun dengan nilai dan laju kenaikan yang kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada.



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pengurangan Sampah	13,94	13,94	13,97	14,33	15,59
Cakupan Penanganan Sampah	21,55	21,55	22,23	21,85	22,47
Cakupan Pengelolaan Sampah	35,49	35,49	36,20	36,18	38,06

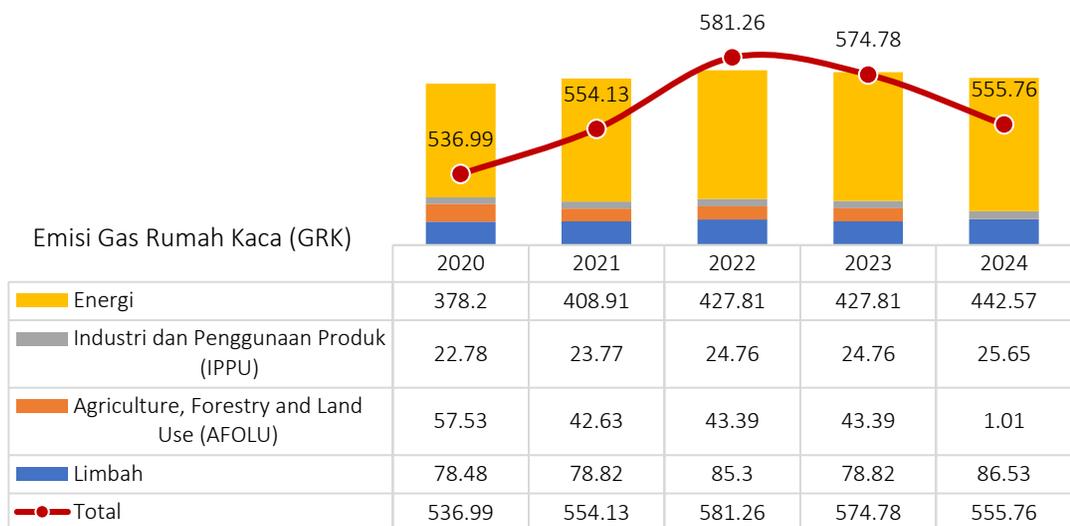
Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 43. Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

### 5) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kelompok gas dari hasil aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, penggunaan pupuk pertanian, dan lain sebagainya yang berdampak pada pemanasan global dan krisis iklim. Untuk mengukur emisi, ada dua metode, yaitu dengan aplikasi SIGNSMART (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan) sebagai monitoring, pelaporan, dan verifikasi data estimasi emisi GRK dan dengan aplikasi AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) yang merupakan wadah/ platform perekaman aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi, dimana AKSARA bertujuan sebagai bagian dari inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk mengurangi emisi GRK sejalan dengan pembangunan berkelanjutan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi tren kenaikan dan penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Purbalingga. Naik turunnya emisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: peningkatan pada sektor Limbah, Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) dan Energi, serta penurunan pada sektor *Agriculture, Forestry and Land Use* (AFOLU). Berdasarkan data dari SIGNSMART, emisi dan serapan GRK Kabupaten Purbalingga tahun yaitu sebagai berikut.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 44. Emisi dan Serapan GRK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Kemudian berdasarkan perhitungan dari laporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK pada aplikasi AKSARA, total aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) perubahan iklim yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 yaitu sebanyak 19 kegiatan dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 448.472,8 ton CO<sub>2</sub>eq. Sedangkan pada tahun 2024 total potensi penurunan emisi kumulatif sebanyak 448.568,91 ton CO<sub>2</sub>eq. Potensi penurunan emisi kumulatif ini memberikan kontribusi sebesar 3,63 % pada capaian Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat kecenderungan yang berubah dari banyaknya kontribusi sektor-sektor terkait dalam rangka upaya penurunan emisi. Pada tahun 2019, sektor transportasi memberikan kontribusi paling banyak dalam upaya penurunan emisi yaitu dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian diikuti oleh sektor hutan dan lahan yang ditopang dari kegiatan pembangunan dan pengembangan taman tematik serta penanaman tanaman hijau. Selain itu didukung sektor energi yang berasal dari pembangunan biogas ternak sapi. Kemudian tahun 2020, penurunan emisi 100% ditopang sektor transportasi sebesar 3.620,00 tonCO<sub>2</sub>eq melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor. Kemudian di tahun 2023 sektor pertanian 100% berkontribusi dalam penurunan emisi. Adapun kegiatan pertanian yang memberikan kontribusi pada potensi penurunan emisi kumulatif antara lain kegiatan pertanian cerdas iklim dan *Scaling Up Climate Smart Agriculture (CSA) SIMURP* berupa pemupukan berimbang, irigasi intermitten, dan Penggunaan Pupuk Organik. Selain itu, ada juga kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati serta pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.

## 6) Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area

memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU tersebut secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Proporsi RTH Perkotaan tersebut terdiri dari 20 persen merupakan RTH public dan 10 persen merupakan RTH Privat.

Kondisi eksisting RTH Publik di Kabupaten Purbalingga terdiri dari: Taman Kota, Lapangan, Hutan Kota, Makam dan Sempadan. Beberapa RTH Publik yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Purbalingga secara rinci yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.78. Kondisi RTH Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Jenis RTH	Luasan (Ha)	Ket
1	Taman Kota	5,44	SK Bupati Tahun 2011, 2022, 2024
2	Hutan Kota	8,41	SK Bupati Tahun 2011, 2017
3	Lapangan	23,27	Pendataan Tahun 2018
4	Makam	18,06	
5	Sempadan	592,2	

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2024

Kondisi pengelolaan RTH di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.79. Kondisi RTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah RTH Perkotaan (Publik)	unit	20	19	19	19	20
2	Luas RTH Perkotaan (Publik)	ha	154,38	154,38	255,90	255,90	256,20
3	Jumlah RTH yang dikelola Pemerintah (DLH)	unit	18	18	19	19	20
4	Luas RTH dikelola Pemerintah (DLH)	ha	13,28	13,28	13,58	13,58	13,88
5	Persentase Luas RTH Perkotaan	persen	5,52	5,52	4,29	4,29	4,30

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021-2025

## F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1) Dokumen Pendaftaran Penduduk

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari kepemilikan KTP, kepemilikan KK dan kepemilikan KIA.

#### a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) hampir selalu menjadi persyaratan publik di Kabupaten Purbalingga, sehingga saat ini semua penduduk diwajibkan memiliki KTP-el. Dalam kurun waktu 5 tahun

persentase kepemilikan KTP-el mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.

**Tabel II.80. Kepemilikan KTP-Elektronik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wajib KTP-el	orang	751.043	749.474	776.170	789.498	786.694
2	Jumlah Kepemilikan KTP-el	orang	751.042	747.680	753.823	768.910	782.800
3	Persentase Kepemilikan KTP-el	persen	100	99,76	97,12	97,39	99,51

Sumber : Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

**b. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK juga mengalami kenaikan dan penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.

**Tabel II.81. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KK	KK	346.109	342.436	348.009	353.734	360.279
2	Jumlah Kepemilikan KK	KK	342.598	340.017	348.009	353.734	358.273
3	Persentase Kepemilikan KK	persen	98,99	99,29	100	100	99,44

Sumber : Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

**c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Fungsi dari KIA adalah memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.

**Tabel II.82. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak (Usia <17 tahun) range dari DKB adanya 15 - 19	orang	260.382	272.446	274.190	283.003	271.048
2	Jumlah Kepemilikan KIA	orang	89.396	124.805	119.119	134.897	168.739
3	Persentase Kepemilikan KIA	persen	34,33	45,81	43,44	47,67	62,25

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 2) Dokumen Pencatatan Sipil

Dokumen pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak. Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusanya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis. Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.83. Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

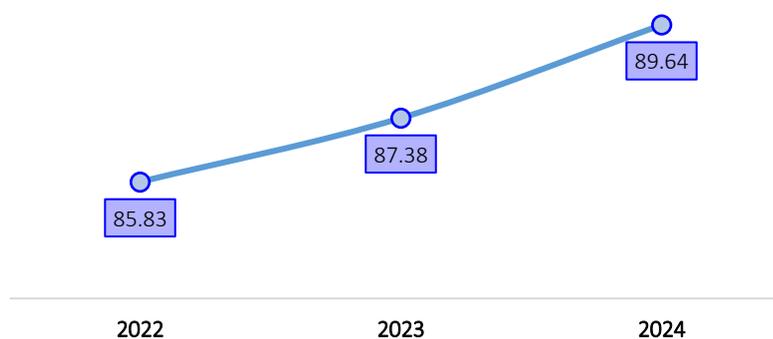
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (Usia 0 - 17)	orang	299.522	296.362	275.931	283.003	281.583
2	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Usia 0 - 17)	orang	270.591	262.952	266.001	274.804	275.495
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-17)	persen	90,34	88,73	96,40	97,10	97,84
4	Jumlah Akta Kematian yang diminta	orang	5.202	4.473	7.323	7.003	5.782
5	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	orang	5.202	4.473	7.323	7.003	5.782
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
7	Jumlah Akta Perkawinan yang diminta	orang	37	56	39	30	26
8	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	orang	37	56	39	30	26
9	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
10	Jumlah Akta Perceraian yang diminta	orang	5	9	8	6	5
11	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	orang	5	9	8	6	5

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
13	Jumlah Akta Pengangkatan Anak yang diminta	orang	11	26	18	11	19
14	Jumlah Akta Pengangkatan Anak yang diterbitkan	orang	11	26	18	11	19
15	Persentase Akta Pengangkatan Anak yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100
16	Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diminta	orang	11	18	12	19	26
17	Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan	orang	11	18	12	19	26
18	Persentase Akta Pengesahan Anak yang Diterbitkan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kemudahan pelayanan juga terdapat pada pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Beberapa kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan pada nilai IKM terhadap 11 unsur penilaian yang meliputi: biaya/tarif, integritas, kompetensi pelaksana, penanganan, pengaduan, saran dan masukan, perilaku pelaksana, persyaratan, produk layanan, prosedur, sarana dan prasarana, transparan dan waktu pelayanan. Secara rinci IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2023-2025

Gambar 2. 45. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

### 4) Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Pada dasarnya data kependudukan yang akurat dan terpadu menjadi dasar penting untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dengan pemanfaatan data kependudukan, OPD dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas kepada masyarakat. OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian

kerjasama (PKS) memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Dengan adanya PKS, OPD dapat mengakses data kependudukan yang akurat dan terpadu untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, dan penegakan hukum.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.84. Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	11	16	18
2	Jumlah OPD yg melakukan perjanjian kerjasama	OPD	11	16	18
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	100	100	100

Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2023-2025

Secara rinci beberapa OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kabupaten Purbalingga meliputi:

- Tahun 2022: Dinkes, Dinsos, DPMPTSP, DPUPR, Dinkominfo, Bappelitbangda, Dinperindag, Dinnaker, BKPPD, Dinperindag, DinkopUKM
- Tahun 2023: RSUD, Pemdes Karangbawang, Pemdes Dagan, Pemdes Karanganyar, Dinkominfo, Dinkes, DPUPR, DPMPTSP, Dinsos Dalduk, Bappelitbangda, BKPPD, Dinaker, Dinperindag, Dinkop & UKM, Dinas Pertanian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Tahun 2024: Dinnaker, Dindikbud, DinkopUKM, Dinperindag, Dinperindag, Dinperindag, BKPSDM, Bappelitbangda, DinsosdaldukKBP3A, DPMPTSP, Dinkominfo, Dinkes, DPUPR, Dinrumkim, Dinarpus, Dinporapar, Bakesbangpol, Bakeuda, RSUD Goeteng

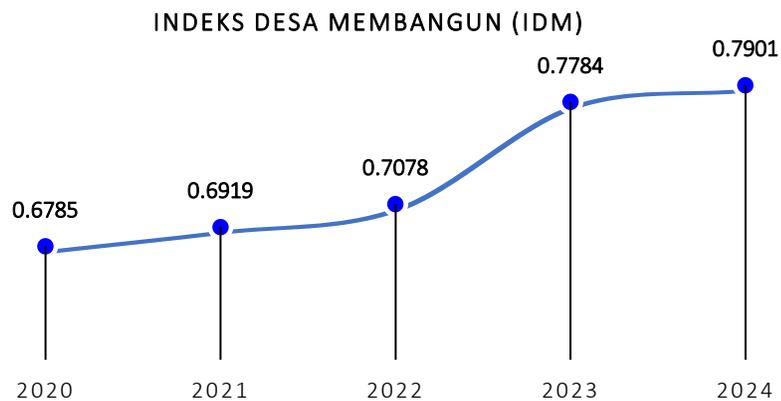
## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 1) Indeks Desa Membangun (IDM)

Pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks komposit yang dibentuk dalam menghitung IDM

berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga selalu naik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana dari tahun 2020 mempunyai angka sebesar 0,6785 kemudian naik di angka 0,7901 pada tahun 2024.



Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 46. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Untuk selanjutnya pada perencanaan tahun 2025-2029 capaian pembangunan desa akan diukur menggunakan Indeks Desa (ID). Indeks Desa telah ditetapkan sebagai indikator tunggal pembangunan desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 sebagai salah satu alat ukur dari 45 Indikator Utama Nasional, yaitu Persentase Desa Mandiri, dimana:

- a. Sumber Data : berasal dari pengumpulan data primer oleh Kepala Desa (atau yang ditugaskan) dengan didampingi Pendamping Lokal Desa.
- b. Verifikasi data : dilakukan secara berjenjang di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi oleh OPD didampingi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), sehingga lebih menjamin kualitas data.
- c. Dimensi dan Indikator : terdapat 6 Dimesi yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

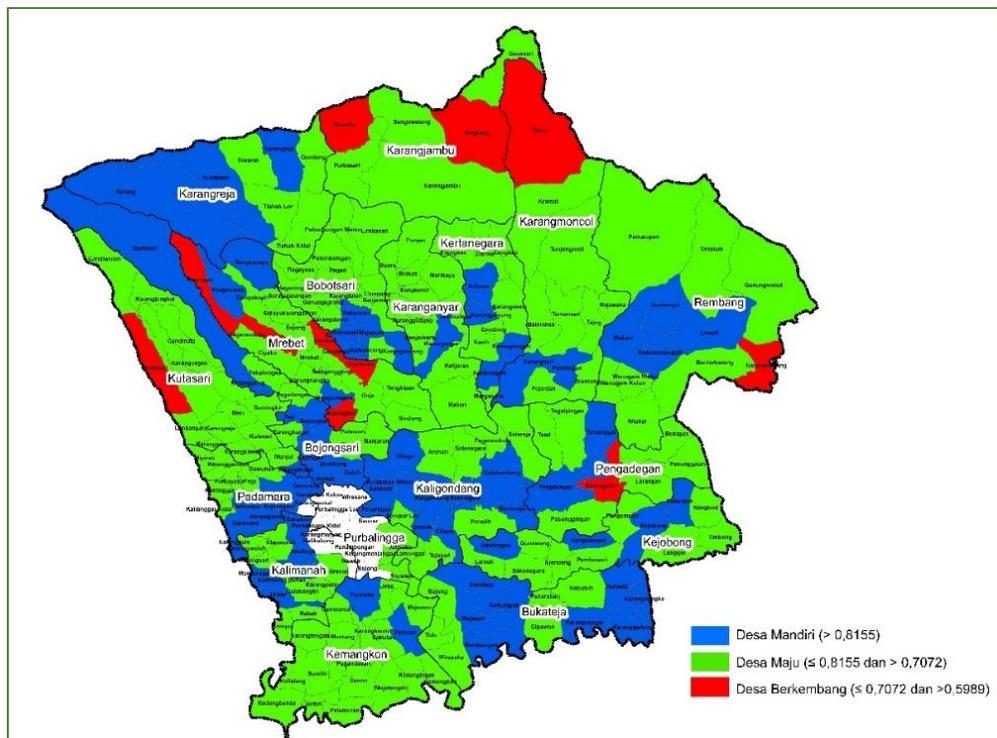
## 2) Perkembangan Status Desa

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, desa mandiri semakin meningkat yaitu dari 2 desa di tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 69 desa di tahun 2024. Begitu pula dengan desa maju yang meningkat dari 51 desa di tahun 2020 menjadi 144 desa di tahun 2024. Sementara itu desa berkembang semakin menurun karena sudah naik menjadi desa maju. Begitu pula desa tertinggal juga semakin habis yang semula ada 9 desa kemudian sudah naik semua menjadi desa berkembang dan maju. Secara rinci perkembangan jumlah status desa di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil IDM yang bersumber dari Kementerian Desa PDTT dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.85. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Status Desa	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	desa	2	4	6	49	69
2	Maju	desa	51	65	81	151	144
3	Berkembang	desa	162	153	137	24	11
4	Tertinggal	desa	9	2	0	0	0

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025



Sumber: Kemendes PDTT diolah, 2025

Gambar 2. 47. Peta Status Desa Berdasarkan IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

### 3) Perkembangan BUMDes

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, telah berkembang beberapa BUMDesa yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan pelayanan umum. Perkembangan BUMDes dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin meningkat statusnya menjadi BUMDes pemula dan berkembang, dengan rincian berikut.

Tabel II.86. Jumlah BUMDesa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMDesa	unit	158	202	218	218	223
2	Pekembangan BUMDes						
	BUMDes Perintis	unit	58	98	67	67	19
	BUMDes Pemula	unit	47	75	109	109	128
	BUMDes Berkembang	unit	51	25	35	35	71
	BUMDes Maju	unit	2	4	7	7	5

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Untuk meningkatkan perkembangan kawasan desa, telah dilakukan beberapa kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Daftar kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan desa yang sudah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.87. Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No	Program Kerjasama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan Seroja (Agrobisnis dan Pariwisata)	desa	4	4	4	4	4
2	Kawasan Agrobisnis, Usaha Tani, dan Wisata Tani	desa	4	4	4	4	4
3	Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera	desa	13	15	15	15	15
4	Kawasan Perdesaan	desa	3	3	3	3	4
5	Mata Air	desa	0	0	0	1	2
6	Jumlah desa yg melakukan kerjasama aktif	desa	75	75	75	84	88
7	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif	persen	33,48	33,48	33,48	37,50	39,29

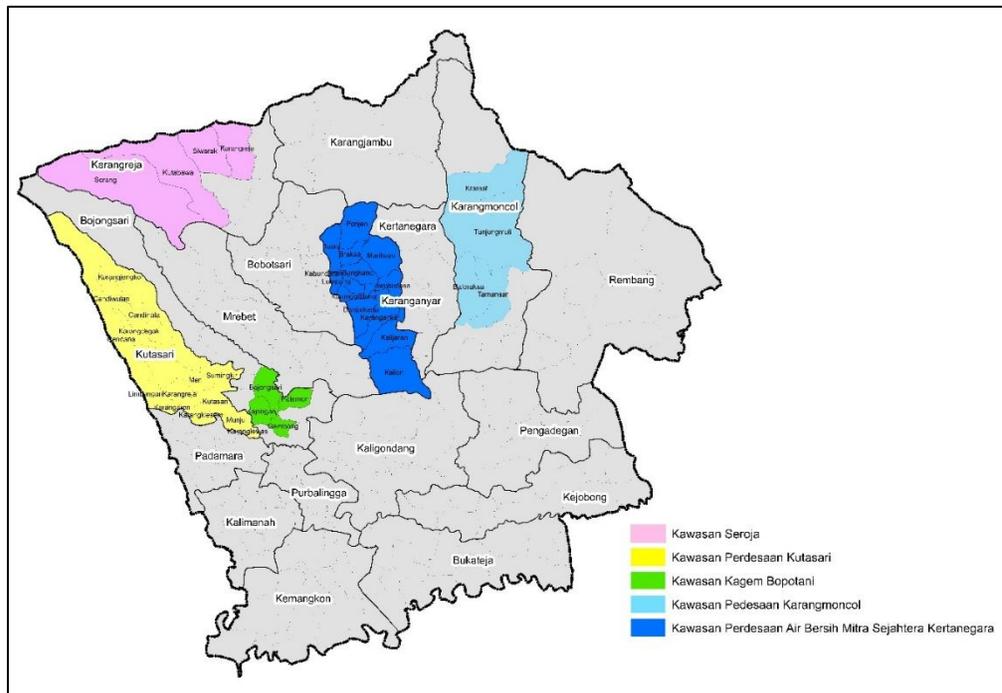
Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancangan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan. Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan ini diawali dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung dalam satu kawasan perdesaan.

Dalam fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa, yang saat ini sudah terbentuk mencakup 4 wilayah kawasan sebagai berikut:

1. **Kawasan Seroja**, merupakan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa. Potensi yang dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata. Pengembangan dilakukan di tahun 2020 dengan mengoptimalkan dan memetakan potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga memunculkan daya tarik kawasan yang semakin kuat. Disamping itu terdapat fasilitasi bantuan kawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021.

2. **Kawasan Kagem Bopotani**, merupakan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari. Potensi yang dikembangkan adalah agrobisnis, usaha tani, dan wisata tani. Pengembangan di tahun 2020 adalah dengan dibangunnya objek wisata tani Lembah Silangit di Desa Patemon yaitu terbangunnya embung seluas 3 Ha yang menampung dan pengembangan berbagai jenis ikan, serta pengembangan embrio wisata mina padi di Desa Gembong.
3. **Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera**, yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Karanganyar, meliputi 13 desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Kaliori, Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, Desa Banjarkerta, Desa Brakas, Desa Bungkanel, Desa Ponjen, dan Desa Karanggedang. Perkembangan pembangunan kawasan perdesaan di tahun 2020 mulai terbangunnya jalur pipanisasi dari sumber air di Sungai Royom desa Ponjen dengan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00,- dan di tahun 2021 mendapatkan bantuan dari Kegiatan TMMD reguler sebesar Rp 1.500.000.000,00,-.
4. **Kawasan Perdesaan Kutasari**, meliputi 14 Desa yang ada di wilayah kecamatan Kutasari yaitu desa Candinata, Desa Candiwulan, Desa Cendana, Desa Karangaren, Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol, Desa Karangluwas, Desa Karangklesem, Desa Karangreja, Desa Kutasari, Desa Limbangan, Desa Meri, Desa Munjul, dan Desa Sumingkir. Adapun untuk kawasan perdesaan Kutasari bergerak dalam bidang agribisnis, wisata dan pendidikan. Perkembangan dilakukan di tahun 2019 yaitu dengan pengembangan wisata trabas dan *off road* di Desa Cendana dan Desa Karangjengkol.
5. **Kawasan Perdesaan Karangmoncol**, merupakan kawasan perdesaan baru yang diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya air di Desa Tunjungmuli untuk mencukupi kebutuhan air baku di 2 kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Kertanegara. Desa yang terlayani meliputi Desa Tunjungmuli, Desa Baleraksa, Desa kramat, dan Desa Tamansari. Untuk Kecamatan Kertanegara sumber air baku berasal dari teping Desa Baleraksa yang disalurkan kepada seluruh desa di Kecamatan Kertanegara.
6. **Kawasan Air Bersih**, di Kecamatan Kertanegara (Desa Langkap) dan Kecamatan Pengadegan (Desa Panunggalan, Desa Larangan, Desa Bedagas, Desa Karangjoho, dan desa Tumanggal), yang merupakan pengembangan di tahun 2020 dengan penggalan potensi air bersih.



Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga diolah, 2025

Gambar 2. 48. Peta Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan fokus pada aspek kependudukan. IPBK terdiri dari lima dimensi, yaitu partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. Setiap dimensi menunjukkan aspek penting dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir IPBK Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 57 di tahun 2021 menjadi 58,4 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin fokus pada kepentingan dan kesejahteraan penduduk, serta menunjukkan bahwa proses pembangunan menjadi lebih berwawasan kependudukan. Secara rinci IPBK Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.88. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Nilai IPBK
1	2021	57
2	2022	56,1
3	2023	58,1
4	2024	58,4

Sumber: DinsosdaldukBP3A Kab. Purbalingga, 2022-2025

## 2) Total Fertility Rate (TFR)

TFR (*Total Fertility Rate*) atau Rata-Rata Angka Kelahiran Total adalah indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya, dengan asumsi bahwa pola kelahiran wanita tersebut tetap konsisten. TFR digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi dan memahami tren fertilitas di suatu wilayah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, TFR di Kabupaten Purbalingga cenderung stagnan di angka 2. Dalam hal ini angka TFR Kabupaten Purbalingga yang berada pada angka 2,1 menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan di Kabupaten Purbalingga akan melahirkan 2,1 anak selama masa suburnya.



*Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021-2025*

**Gambar 2. 49. TFR atau Rata-Rata Angka Kelahiran Total di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 3) Persentase Peserta KB MKJP

Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi tanpa hamil. Peserta KB aktif juga disebut sebagai akseptor aktif. Beberapa kondisi terkait dengan peserta KB aktif di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.89. Peserta KB MKJP di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	orang	190.278	190.262	180.923	165.932	169.130
2	Peserta KB Aktif	orang	149.727	147.577	137.947	117.633	119.021
3	Persentase KB Aktif	persen	78,69	77,57	76,25	70,89	70,37
4	Peserta KB :	orang	148.847	146.577	137.940	117.133	118.955
	1. IUD	orang	14.988	15.641	16.171	14.958	16390
	2. MOW	orang	10.380	9.377	8.913	6.704	6255
	3. MOP	orang	1.640	1.415	1.231	665	525
	4. Susuk/Implan	orang	19.956	25.267	19.552	15.640	18105
	5. Suntik	orang	80.032	75.423	71.930	64.377	61101
	6. Obat/Pil KB	orang	17.882	15.615	15.936	12.331	13052
	7. Kondom	orang	3.969	3.839	4.207	2.458	3527
5	Jumlah Total Peserta KB MKJP	orang	46.964	51.700	45.867	37.967	41275
6	Persentase Peserta KB MKJP	persen	31,37	35,03	33,25	32,31	34,67

*Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025*

#### 4) *Unmet Need* KB

*Unmet need* KB adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. *Unmet need* KB dapat diartikan sebagai persentase pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Tingginya angka *unmet need* berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut, maka kebutuhan KB khususnya pemenuhan alat kontrasepsi harus terpenuhi. Di samping itu, optimalisasi KB melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB mutlak diperlukan. *Unmet need* KB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin menurun, secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel II.90. *Unmet need* KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang tidak KB	orang	41.431	42.685	42.653	18.199	38.933
2	<i>Unmet Need</i> KB	persen	9,93	10,33	9,60	10,25	7,60
3	Jumlah PUS yang melepas KB	orang	14.823	11.496	22.375	25.786	25.786
4	<i>Drop Out</i> KB	persen	9,90	7,79	16,22	21,64	0,004

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021-2025

### I. Perhubungan

#### 1) Rasio Konektivitas Angkutan Jalan

Sistem transportasi di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Untuk menunjang kegiatan transportasi darat, terdapat beberapa terminal yang terdiri dari: 1 terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari yang dikelola Pemerintah Pusat, 1 terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga yang dikelola Pemerintah Provinsi, dan 4 terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga meliputi: Terminal Bukateja, Kejobong, Penaruban, dan Jompo.

Terdapat pula sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Saat ini, Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan komersil dan feeder umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Sementara itu, moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga saat ini terdiri dari: mikro bus, angkotan kota, angkutan desa dan taksi. Bahkan saat ini juga telah didukung dengan keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) Purwokerto-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai

dengan Bukateja dengan shelter yang terpusat pada konektivitas Terminal Jompo, Terminal Purbalingga dan Terminal Bukateja.

Keberadaan moda transportasi berupa angkutan kota dan angkutan desa, sangat mempengaruhi rasio konektivitas jalan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rasio konektivitas jalan di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari 90 menjadi 70,73. Hal tersebut diakibatkan berkurangnya trayek angkot dan angkudes. Jumlah trayek angkot semakin menurun dari 14 trayek menjadi 12 trayek. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kebutuhan penumpang yang melewati jalur trayek tersebut, sehingga trayek tersebut menjadi non aktif. Sedangkan jumlah trayek angkudes juga semakin menurun dari 22 trayek menjadi 19 trayek. Hal tersebut dikarenakan banyak armada yang tidak layak beroperasi dan perlu peremajaan. Berkurangnya minat masyarakat terhadap angkot dan angkudes perlu diantisipasi dengan penyediaan angkutan umum massal yang lebih nyaman dan terjangkau, agar dapat bisa merubah mindset masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.



*Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025*

**Gambar 2. 50. Rasio Konektivitas Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 2) Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Kondisi Baik

Selain didukung dengan keberadaan moda transportasi, sistem jaringan transportasi di Kabupaten Purbalingga juga didukung dengan fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang pada jaringan jalan. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan terutama pada rambu jalan yang terpasang di jaringan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari keseluruhan fasilitas kelengkapan jalan tersebut, pada tahun 2023 terhitung sebanyak 145 ruas jalan di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan. Apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh ruas jalan yang ada yaitu sejumlah 466 ruas, maka persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan yaitu sebesar 31,12 persen. Persentase tersebut tergolong kecil, sehingga diperlukan perhatian ke depannya untuk pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan pada setiap ruas jalannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**Tabel II.91. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Sarana Perhubungan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)	unit	118	132	139	189	189
2	Rambu Jalan	unit	977	1.087	1.220	1.432	1.432
3	Guardrail	m2	3.632	3.632	3.668	4.684	4.684
4	Paku Marka	unit	759	759	759	1.219	1.219
5	Traffic Cone	unit	100	231	274	100	100
6	Marka jalan	m2	0	0	0	556.472	556.592
7	CCTV	unit	0	0	0	1	1
8	Jumlah sarpras perhubungan kondisi baik	unit	559	690	825	825	825
9	Persentase sarpras perhubungan kondisi baik	persen	64,48	66,03	72,82	72,82	72,82

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Kabupaten Purbalingga. Data kecelakaan lalu lintas di Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 579 kejadian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 660 kejadian. Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Kabupaten Purbalingga berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Purbalingga – Bobotsari, Ruas Jalan Bobotsari – Pemalang, Purbalingga – Sokaraja dan Purbalingga – Klampok.

**Tabel II.92. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Laka Lantas	kejadian	439	443	690	660	555
2.	Jumlah Meninggal	jiwa	77	56	105	63	65
3.	Jumlah Luka Berat	orang	0	0	0	0	1
4.	Jumlah Luka Ringan	orang	495	508	843	782	645
5.	Kerugian Materiil	Rp. (000,-)	239.100	187.500	352.400	434.400	348.400
6.	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	angka	439	443	690	660	555

Sumber: Polres dan Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

## J. Komunikasi dan Informasi

### 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE atau *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 3,04 di tahun 2020 meningkat menjadi 3,93 di tahun 2024 dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2024 kenaikan terjadi pada

domain Kebijakan SPBE dan Layanan SPBE. Sedangkan pada domain Tata Kelola dan Manajemen SPBE terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kelemahan pada Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perubahan. Kondisi saat ini yang terjadi, penerapan dan proses penerapan kompetensi SDM hanya terjadi pada sebagian kompetensi SDM SPBE saja. Disamping itu penerapan manajemen SPBE juga belum dilakukan pada semua unit kerja dan belum sesuai dengan pedoman.

**Tabel II.93. Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2020	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021	2022	2023	2024
1	<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>2,88</b>	<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>1,90</b>	<b>3,2</b>	<b>4,00</b>	<b>4,40</b>
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,71	Kebijakan Internal terkait SPBE	1,90	3,2	4,00	4,40
	Kebijakan Layanan SPBE	3,00					
2	<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,43</b>	<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>1,90</b>	<b>2,8</b>	<b>3,80</b>	<b>3,70</b>
	Kelembagaan	1,5	Perencanaan Strategis SPBE	1,50	2,5	3,75	3,25
	Strategi dan Perencanaan	3,00	TIK	2,00	2,75	3,25	4,50
	TIK	2,67	Penyelenggaraan SPBE	2,50	3,5	5,00	3,00
3	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,39</b>	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>2,89</b>	<b>3,63</b>	<b>4,07</b>	<b>4,35</b>
	Administrasi Pemerintahan	3,43	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60	3,5	3,90	4,80
	Pelayanan Publik	3,33	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33	3,83	4,33	3,67
			<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1,18</b>	<b>2,64</b>	<b>3,09</b>	<b>2,73</b>
			Penerapan Manajemen SPBE	1	2,88	3,25	2,75
			Audit TIK	1,67	2	2,67	2,67
<b>NILAI INDEKS SPBE</b>		<b>3,04</b>	<b>NILAI INDEKS SPBE</b>	<b>2,23</b>	<b>3,2</b>	<b>3,83</b>	<b>3,93</b>
<b>PREDIKAT SPBE</b>		<b>BAIK</b>	<b>PREDIKAT SPBE</b>	<b>CUKUP</b>	<b>BAIK</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dilihat dari hal ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sampai dengan tahun 2024 jumlah lembaga pemerintahan yang memiliki website sebanyak 1 website Pemerintah Daerah, 29 website OPD (15 yang aktif), 18 website Kecamatan (5 yang aktif), 15 website Kelurahan, 22 website Puskesmas (10 yang aktif) dan 32 website desa. *Updating* pada website tersebut dilakukan setiap hari kerja. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 43 unit. Beberapa kondisi terkait Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.94. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center	OPD	85	85	85	85	323
2	Jumlah OPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK	OPD	296	133	14	24	26
3	Jumlah Server Milik Kabupaten Purbalingga	unit	10	12	12	4	16
4	Jumlah Kapasitas Bandwidth yang Tersedia	Mbps	275	360	560	500	680
5	Jumlah Sub Domain (Purbalinggakab)	sub domain	85	85	85	84	350
6	Jumlah Sub Domain Yang Aktif	sub domain	79	75	47	41	210

Sumber : Dinhub Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta.

PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sedangkan PPID Pelaksana merupakan Pejabat Pengelola Informasi pada OPD yang terdiri dari 47 PPID Pelaksana (27 OPD, 2 RSUD dan 18 Kecamatan) dan 224 PPID Desa. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan total nilai 96,19 (informatif).

Selama tahun 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pelaksana menerima 18 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (1 badan), ASN (2 orang), Perusahaan (1 badan), dan mahasiswa (8 orang). PPID Kabupaten Purbalingga mengabulkan 6 permohonan informasi publik atau 33,3 persen dari permohonan informasi publik yang telah diterima.

Beberapa kondisi terkait informasi publik di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.95. Ketersediaan terkait Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan	konten	415	420	2.352	1.898	1.912
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	angka	93,50	83,05	N/A	92,95	96,19
3	Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik	predikat	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
4	Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi	unit	25	25	25	21	21
5	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan	unit	89	89	89	89	65

Sumber : Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

## K. Koperasi dan UKM

### 1) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari angka 0,758% pada tahun 2022 kemudian turun menjadi 0,702 di tahun 2023, dan naik lagi menjadi 0,761 di tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat.

**Tabel II.96. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Volume Usaha Koperasi	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Volume Usaha Koperasi	rupiah	218.476.485.476	219.276.867.277	253.969.000.000
2	PDRB ADHB	rupiah	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,758	0,702	0,761

Sumber: DinkopUKM dan BPS Kab. Purbalingga, 2023-2025 (diolah)

### 2) Persentase Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari 246 unit di tahun 2020 menjadi 278 unit di tahun 2024. Dari jumlah koperasi tersebut

yang aktif di tahun 2024 yaitu 166 unit dan koperasi sehat sejumlah 107 unit. Beberapa kondisi terkait perkoperasian di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.97. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	unit	246	246	263	277	278
2	Jumlah Koperasi Aktif	unit	178	178	151	163	166
3	Persentase Koperasi Aktif	persen	72,36	72,36	57,41	58,84	59,71
4	Jumlah Koperasi Sehat	unit	136	135	98	105	107
5	Persentase Koperasi Sehat	%	76,40	75,84	64,90	64,42	64,46
6	Jumlah Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	unit	8	8	10	11	12
7	Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	persen	4,49	4,49	6,62	6,75	7,23

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah penduduk yang bekerja dalam hal berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar di Kabupaten Purbalingga semakin menurun, sedangkan angkatan kerja semakin meningkat. Oleh karena itu, rasio kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dari angka 4,22% pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 2,60 di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengusaha yang berusaha dibantu buruh semakin menurun sehingga penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha juga semakin kecil.

**Tabel II.98. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Kewirausahaan Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar)	orang	17.041	18.144	11.272	15.156	19.536
2	Jumlah Angkatan Kerja	orang	500.261	503.682	538.507	583.408	598.666
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,41	3,60	2,09	2,60	3,26

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

#### 4) Jumlah UMKM Naik Kelas

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kenaikan dan penurunan. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000. Beberapa kondisi terkait UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.99. Kondisi UMKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

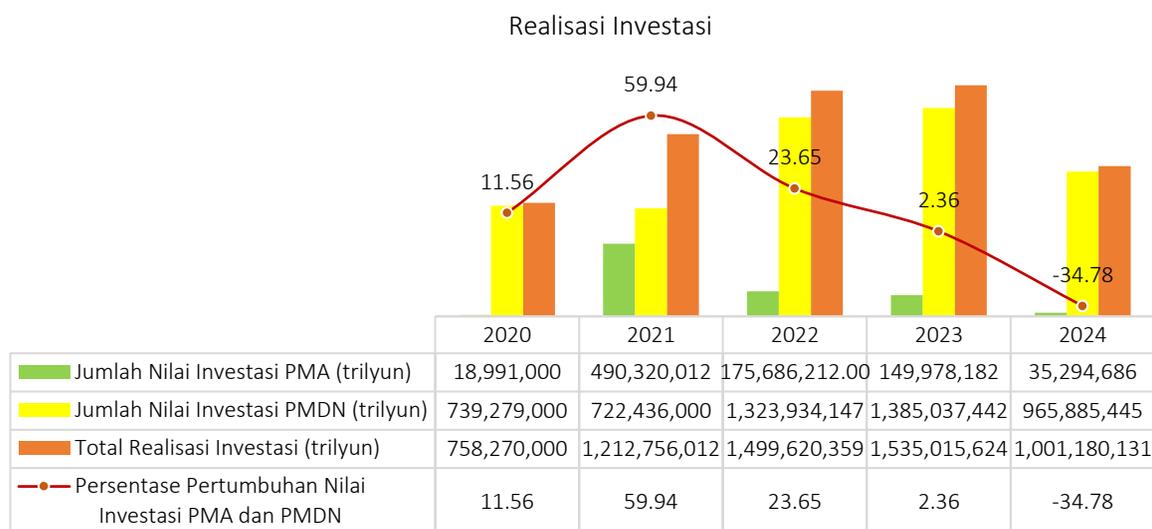
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM	unit	96.780	97.537	97.537	98.247	65.606
2	Jumlah UMKM Bersertifikat/Berijin	unit	1.800	2.873	2.948	3.063	3.195
3	Jumlah UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha)	unit	24	24	31	36	27
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	255	300	350	1.356	1.466
5	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	213	295	4.310	1.611	1.911
6	Jumlah Paguyuban UMKM Difasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	unit	35	40	44	46	50
7	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	pelaku	561	561	592	1.270	1.418
8	Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM	orang	193.560	195.074	195.074	196.494	196.818

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

##### 1) Realisasi Investasi

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi investasi mengalami kenaikan hingga Rp 1.535.015.624.405, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1.001.180.131.135. Penurunan investasi terjadi dikarenakan pengaruh situasi ekonomi global yang juga mempengaruhi ketertarikan minat investasi dari luar daerah maupun luar negeri yang datang ke Kabupaten Purbalingga, karena sebagian besar produk yang dihasilkan adalah barang tersier sehingga menjadi kurang prioritas. Minat investasi yang masuk juga tidak meningkat karena kawasan peruntukan industri yang kurang menarik bagi investor baru dan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang belum memadai untuk bongkar muat barang.



*Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021-2025*

**Gambar 2. 51. Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 2) Peningkatan Investasi

Pertumbuhan jumlah perusahaan baik PMA maupun PMDN dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun di tahun 2024, jumlah perusahaan PMA dan PMDN menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Begitu pula dengan jumlah tenaga kerja yang berkurang dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah ekspor dan minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri, sehingga ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi lagi. Beberapa kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.100. Kondisi Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan PMA	unit	24	28	28	29	26
2	Jumlah perusahaan PMDN	unit	3.100	3.288	9.302	14.066	14.097
3	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN	unit	3.124	3.316	9.330	14.095	14.123
4	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA	orang	0	1.579	8.367	13.428	11.823
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN	orang	11.644	15.299	21.566	36.661	32.583
6	Skor Iklim Usaha	poin	N/A	78,30	92,90	91,35	93
7	Jumlah kepeminatan Investasi	investor	N/A	2	2	3	3

*Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021-2025*

## 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan

Dilihat dari perizinannya, indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu mengalami kenaikan dari tahun

2020 sebesar 82,50 menjadi 95,209 di tahun 2024.. Kondisi terkait pelayanan perizinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.101. Kondisi Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	poin	82,50	87,08	96,04	86,62	95,209
2	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	poin	NA	3,9	4,51	4,51	4,5
3	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani di PTSP	hari	50	50	50	29	114

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Pengurangan barang modal di sisi lain mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PMTB di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.102. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	PTMB	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB ADHB)	miliar rupiah	3.372,54	3.578,70	3.658,63	3.804,29	4.048,49
2	PDRB ADHB	miliar rupiah	25.081,59	26.393,81	28.820,82	31.224,55	33.357,33
3	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persen	13,45	13,56	12,69	12,18	12,14

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019-2024 (diolah)

### M. Kepemudaan dan Olah Raga

#### 1) Partisipasi Pemuda

Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga salah satunya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan prestasi pemuda yang didukung oleh organisasi pemuda, olahraga dan penyediaan sarana prasarana

olahraga. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 24 organisasi menjadi 26 organisasi. Dari keseluruhan organisasi tersebut 14 yang aktif. Pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, menemukan solusi inovatif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui karya dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi terkait kepemudaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.103. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	24	24	24	26	26
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	13	12	12	14	19
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persen	54,17	50	50	54	73
4	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi	organisasi	17	7	13	14	15
5	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor	orang	0	24	12	18	32
7	Jumlah Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	orang	14	24	16	18	22

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 2) Jumlah Prestasi Olahraga

Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga, antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoer Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga *indoor*. Faktor sarana dan prasarana olahraga akan sangat mempengaruhi prestasi olahraga yang akan diraih. Kabupaten Purbalingga memiliki 275 lapangan sepak bola atau bisa dikatakan hampir di setiap desa di Kabupaten Purbalingga memiliki lapangan sepakbola. Selain lapangan sepakbola juga terdapat 216 lapangan bola voli, 41 lapangan bola basket, 32 lapangan tennis, 21 lapangan futsal, 30 lapangan bulu tangkis, 30 gedung olahraga, dan 2 kolam renang. Dilihat dari jumlah prestasi olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan baik tingkat provinsi maupun nasional.

**Tabel II.104. Fasilitas Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kompetisi olahraga	kali	13	14	15	21	15
2	Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga	orang	323	323	349	441	360

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi	prestasi	14	52	86	171	120

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

## N. Statistik

### 1) Persentase Ketersediaan Data Sektoral

Statistik memiliki peranan untuk menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Sesuai dengan amanat dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kabupaten Purbalingga telah menyusun Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga. Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 555/247 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022.

Tahapan penyelenggaraan Satu Data Purbalingga diawali dengan proses perencanaan data, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Pelaksanaan pengumpulan dan pemeriksaan data juga disesuaikan dengan prinsip SDI (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) dengan penyeragaman elemen data antara tingkat pusat dan provinsi agar pembangunan basis data semakin berkualitas. Sedangkan untuk penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data yaitu Open Data Purbalingga ([data.purbalinggakab.go.id](http://data.purbalinggakab.go.id)) yang merupakan platform penyebarluasan data yang telah terintegrasi dengan SDI Bappenas.

Selain data statistik, dalam Satu Data Purbalingga juga telah dikembangkan data geospasial yang diawali dengan ditetapkannya Perbup Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Beberapa kondisi terkait ketersediaan data sektoral di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.105. Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Data yang Terupload	dataset	3.480	3.539	4.414	5.800	7.959
2	Jumlah Data yang Seharusnya Terupload	dataset	4.000	5.000	5.000	5.800	7.959
3	Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga	persen	87,00	70,78	94,00	100	100

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 2,06 dengan predikat Cukup. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,81 dengan predikat Baik. Hasil dari EPSS tersebut digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara

berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Secara rinci hasil EPPS Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

**Tabel II.106. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

Domain/Aspek/Indikator			Tahun	
			2023	2024
<b>NILAI INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)</b>			<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
<b>1</b>	<b>Prinsip SDI</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	101	Standar Data Statistik	2,00	3,00
	102	Metadata Statistik	2,00	3,00
	103	Interoperabilitas Data	2,00	3,00
	104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	2,00	3,00
<b>2</b>	<b>Kualitas Data</b>		<b>1,82</b>	<b>2,79</b>
	201	Relevansi	1,00	3,00
	202	Akurasi	2,00	3,00
	203	Aktualitas & Ketepatan Waktu	1,50	3,00
	204	Aksesibilitas	2,66	3,00
	205	Keterbandingan & Konsistensi	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>Proses Bisnis Statistik</b>		<b>2,32</b>	<b>2,36</b>
	301	Perencanaan Data	2,33	1,66
	302	Pengumpulan Data	2,00	3,00
	303	Pemeriksaan Data	2,00	3,00
	304	Penyebarluasan Data	3,00	2,00
<b>4</b>	<b>Kelembagaan</b>		<b>2,33</b>	<b>3,00</b>
	401	Profesionalitas	2,00	2,75
	402	SDM yang Memadai dan Kapabel	2,50	3,00
	403	Pengorganisasian Statistik	2,50	3,25
<b>5</b>	<b>Statistik Nasional</b>		<b>1,89</b>	<b>2,89</b>
	501	Pemanfaatan Data Statistik	2,67	3,00
	502	Pengelolaan Kegiatan Statistik	1,00	3,00
	503	Penguatan SSN Berkelanjutan	1,99	2,66

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2023-2025

## O. Persandian

### 1) Indeks Keamanan Informasi

Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik dimana informasi pemerintah daerah melalui santel tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait. Disamping itu dalam pengamanan informasi yang dilakukan *assessment* aplikasi oleh BSSN juga semakin meningkat.

**Tabel II.107. Kondisi Persandian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Informasi	informasi	338	871	973	1001	751
2	Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	informasi	338	871	973	1001	751
3	Persentase Jumlah Informasi yang	persen	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi						
4	Jumlah Total Aplikasi	aplikasi	7	7	7	24	26
5	Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	aplikasi	0	0	0	3	7
6	Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	persen	0	0	0	12,50	26,92

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021-2025

Dalam upaya keamanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga, dilakukan pemenuhan standar keamanan informasi melalui audit keamanan data ISO 27001. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO/IEC 27001 untuk keperluan standarisasi pusat data/data center. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat yaitu dari 208 di tahun 2022 menjadi 356 di tahun 2023 (penilaian mandiri). Kemudian di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 376 (verifikasi BSSN) dengan perkembangan signifikan pada aspek tata kelola dan pengelolaan asset. Secara rinci perkembangan Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.108. Indeks Keamanan Informasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Indeks KAMI	2022	2023	2024
1	<b>Indeks KAMI</b>	<b>208</b>	<b>356</b>	<b>376</b>
	Tata kelola	44	82	86
	Pengelolaan Risiko	27	45	33
	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	40	84	60
	Pengelolaan Aset	52	77	117
	Teknologi dan Keamanan Informasi	45	68	80
	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	33	35	16
	Pengamanan Layanan Infrastruktur	33	60	17
	Perlindungan Data Pribadi	33	44	31

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2023-2025

## P. Kebudayaan

### 1) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya banyak terdapat di Kabupaten Purbalingga. Beberapa jenis Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Objek Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati Purbalingga, yang meliputi: SK Bupati Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Kemudian SK tersebut diperbaharui ke dalam SK Bupati Nomor 432/209 Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi SK Bupati Nomor 432/107 Tahun 2022.

Jumlah cagar budaya yang dicatatkan di Kabupaten Purbalingga baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya maupun situs cagar budaya mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari keseluruhan jumlah cagar budaya yang dicatatkan tersebut, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga semakin meningkat walaupun secara kuantitas jumlahnya kecil yaitu dari 41 unit di tahun 2020 menjadi 58 unit di tahun 2024 yang sebagian besar merupakan benda cagar budaya. Benda cagar budaya tersebut perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Sementara itu untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purbalingga termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kebudayaan Daerah Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/400 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya seperti perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi yang muncul dalam bentuk seni tari, seni wayang, seni lukis, nyanyian tradisional dan seni kontemporer serta modern.

Pada PPKD Kabupaten Purbalingga tercantum 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi: manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Sampai dengan tahun 2024 dari 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut, sudah 7 objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan atau dikembangkan. Masih terdapat 3 objek pemajuan kebudayaan lagi yang belum dilestarikan atau dikembangkan, yaitu: teknologi tradisional, olahraga tradisional dan manuskrip. Ketiga pemajuan kebudayaan tersebut perlu dilestarikan lagi melalui kerja bersama masyarakat, pelaku kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dan dicatatkan tersebut, persentase yang dilestarikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 15,28 persen di tahun 2020 naik menjadi 20 persen di tahun 2024.

**Tabel II.109. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Jenis Cagar Budaya	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Cagar Budaya yang dicatatkan	unit	295	291	290	308	308
	a. Jumlah Benda Cagar Budaya	unit	227	225	225	226	226
	b. Jumlah Bangunan Cagar Budaya	unit	36	36	36	48	49
	c. Jumlah Struktur Cagar Budaya	unit	6	7	7	12	12
	d. Jumlah Situs Cagar Budaya	unit	26	23	22	22	22
2	Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan	unit	41	51	58	58	58
3	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	6	6	6	7	7

No.	Jenis Cagar Budaya	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	5	5	5	5	5
5	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dicatatkan	unit	301	297	296	315	315
6	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	unit	46	56	63	58	58
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	15,28	18,86	21,28	20	20

Sumber: Dindikbud Kab.Purbalingga, 2021-2025

## 2) Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga yaitu Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Museum Tempat Lahir (MTL) Jenderal Soedirman dan Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan). Masing-masing tempat bersejarah tersebut mempunyai karakteristik tersendiri.

Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja atau disingkat dengan Museum Soegarda merupakan museum pertama yang didirikan di Kabupaten Purbalingga. Museum tersebut terletak di kompleks Pendopo Dipokusumo yang memiliki ribuan koleksi sejarah terutama benda peninggalan masa prasejarah. Keberadaan museum tersebut sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat dalam mengenalkan sejarah terutama seluk-beluk kisah Kabupaten Purbalingga. Di dalam museum menampilkan koleksi benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang menggambarkan pilar kesuksesan hidup seseorang yang juga menjadi filosofi dalam kehidupan seseorang. Pilar-pilar tersebut terdiri dari kukila, senjata, turangga (kendaraan), wanita (busana dan perhiasan), dan griya (perlengkapan rumah). Terdapat pula koleksi Wayang Suket Mbah Gepuk yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional tahun 2020.

MTL Jenderal Soedirman merupakan tempat lahir Jenderal Soedirman yang didirikan untuk mengenang perjuangan Jenderal Soedirman di tempat kelahirannya. Bangunan di kompleks monumen ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rumah kelahiran dan perpustakaan. Petilasan Ardilawet merupakan salah satu wisata sejarah yang terletak di Desa Wisata Panusupan, Kecamatan Rembang yang juga tempat beradanya petilasan Pangeran Wali Syekh Djambu Karang Putra Prabu Brawijaya, Rja Pajajaran yang semasa mudanya bernama Adipati Mendang (Raden Mundingwangi). Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengunjung di tempat bersejarah semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.110. Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja	orang	2.860	5.653	8.830	10.370

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Pengunjung MTL Jenderal Soedirman	orang	5.930	1.7356	12.177	9.443
3	Jumlah Pengunjung Petilasan Ardilawet (Desa Wisata Panusupan)	orang	239	1.594	3.425	4.402
4	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	9.029	24.603	24.432	12.244

Sumber: Dindikbud dan Dinporapar Kab.Purbalingga, 2022-2025

### 3) Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif

Kabupaten Purbalingga mempunyai bermacam-macam kebudayaan yang beragam mulai dari cagar budaya, kesenian, tradisi, maupun kearifan lokal. Kebudayaan yang beragam ini harus dilestarikan karena merupakan identitas kolektif atau jatidiri masyarakat. Kebudayaan tersebut juga dapat menjadi potensi untuk mendukung sektor pariwisata dengan pemanfaatan kebudayaan.

Beberapa kelompok kesenian yang terdiri atas seni pertunjukan rakyat di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi begalan, angguk, aplang atau dames, calung, ebeg atau kuda lumping, lengger dan slawatan. Dari kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian diperoleh persentase sebesar 11,66 persen. Angka tersebut menunjukkan belum semua kelompok kesenian yang tercatat aktif mengadakan pertunjukan kesenian. Hal tersebut sangat berkaitan dengan beberapa faktor seperti: jumlah pelaku seni yang terbatas, kondisi peralatan dan perlengkapan yang masih terbatas serta kondisi keuangan yang belum mendukung. Beberapa kondisi kesenian di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.111. Kondisi Kesenian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sanggar Kesenian	sanggar	10	11	12	12	18
2	Jumlah Panggung Kesenian	unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah Pagelaran/Pameran Seni Budaya (Festival Seni dan Budaya)	kali	41	5	18	38	34
4	Jumlah SDM Kesenian	orang	12	13	13	17	17
5	Jumlah Kelompok Seni Rupa	kelompok	1	3	5	5	5
6	Jumlah Kelompok Seni Tari/Gerak	kelompok	185	204	244	285	311
7	Jumlah Pagelaran/Pameran Seni Budaya	kelompok	41	5	9	38	34

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 4) Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010) dan Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup No.430/400 Tahun 2018 yang Dilestarikan atau Dikembangkan

Objek Pemajuan Kebudayaan Lestari, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, meliputi sepuluh jenis, yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Cagar Budaya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2010, merupakan salah satu aspek penting dalam pemajuan kebudayaan, namun tidak secara eksplisit termasuk dalam 10 objek tersebut.

Corak utama budaya yang berkembang di Kabupaten Purbalingga adalah budaya Jawa dan sub kultur Banyumas. Purbalingga memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya, diantaranya perpaduan budaya Jawa-Arab, Jawa-Cina, Banyumas-Sunda, budaya klasik dan budaya modern dalam berbagai bentuk ekspresi.

Objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir teridentifikasi sebanyak 8 objek, yang meliputi: 1. Manuskrip jenisnya : Babad, 2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda, 3. Teknologi Tradisional: Teknologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah, Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021, 4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media, 5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan, 6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok, 7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran, 8. Cagar Budaya jenisnya : Benda, Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur.

Sedangkan untuk Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dibina dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebanyak 7 obyek yaitu : 1. Manuskrip jenisnya : Babad, 2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda, 3. Teknologi Tradisional : Teknologi pembuatan warangka/maranggi di Kecamatan Kalimanah Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021, 4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media., 5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan, 6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok, dan 7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran.

Berikut ini disajikan persentase objek pemajuan kebudayaan lestari dan obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

**Tabel II.112. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Lestari dan Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010) yang dilestarikan/dikembangkan	buah	7	8	8
2	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	buah	11	11	11

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
3	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	persen	64	72,73	72,73
4	Jumlah Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dilestarikan/dikembangkan	buah	6	7	7
5	Jumlah Total Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	buah	10	10	10
6	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang Dilestarikan atau Dikembangkan	persen	60	70	70

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2023-2025

## Q. Perpustakaan

### 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, guna mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM fokus pada pemerataan infrastruktur perpustakaan, koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta layanan perpustakaan. Unsur pengukuran dalam IPLM terdiri atas: 1. Pemerataan layanan perpustakaan, 2. Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), 3. Ketercukupan koleksi, 4. Ketercukupan tenaga perpustakaan, 5. Tingkat kunjungan masyarakat/hari, 6. Anggota perpustakaan dan 7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, IPLM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 7,9 di tahun 2021 dengan predikat rendah menjadi 13 di tahun 2024 dengan predikat kategori sedang.

Sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) digunakan untuk mengukur seberapa besar masyarakat terbiasa atau berperilaku dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai media secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, TGM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 53,60 persen di tahun 2021 menjadi 62,66 persen. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah: Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Kenaikan IPLM dan TGM di Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan peningkatan kebiasaan masyarakat Purbalingga dalam membaca dan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan program pembudayaan literasi di daerah dan meningkatkan kualitas perpustakaan dan fasilitas baca.

Tabel II.113. IPLM dan TGM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	angka	7,90	7,41	12,02	13
2	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	angka	53,60	53,60	56,62	62,66

Sumber: Dinarpus Kab.Purbalingga, 2021-2025

## 2) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca perlu dikembangkan.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Perpustakaan tersebut terdiri dari Perpustakaan umum, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), Perpustakaan Pondok Pesantren, Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Khusus dan Layanan Perpustakaan Keliling.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan semakin meningkat dari 0,03 di tahun 2020 menjadi 0,11. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya minat kunjungan ke perpustakaan sebagai bagian dari budaya membaca masyarakat Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.114. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	orang	33.782	35.198	37.284	68.748	118.181
2	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga	orang	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333	1.047.755
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	angka	0,03	0,03	0,04	0,07	0,11

Sumber: *Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025*

## 3) Rasio Perpustakaan

Salah satu unsur yang memiliki peran krusial dalam mendukung proses pembelajaran dan minat baca masyarakat terutama di kalangan pelajar adalah perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya sekadar menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan yang mampu merangsang minat baca siswa. Minat baca yang baik pada tingkat ini memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan literasi dan pembelajaran sepanjang siswa. Rasio perpustakaan aktif di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dari 1,11 menjadi 1,58 per 10.000 penduduk. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah perpustakaan aktif. Beberapa kondisi terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.115. Rasio Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Perpustakaan	unit	722	735	793	793	795
2	Jumlah Perpustakaan Aktif	unit	112	129	133	148	159
3	Jumlah Perpustakaan Aktif (yang sudah sertifikasi)	unit	44	44	44	35	35
4	Persentase perpustakaan aktif	persen	15,51	17,55	16,77	18,66	20,00
5	Rasio perpustakaan aktif	per 10.000	1,11	1,26	1,29	1,47	1,58
6	Jumlah koleksi perpustakaan Kabupaten	eksemplar	374.100	396.445	409.224	425.157	481.246
7	Jumlah judul buku perpustakaan	judul	292.575	297.337	306.918	318.868	360.934
8	Jumlah koleksi ebook	judul	1.410	1.499	1.613	1.822	2.028

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025

## R. Kearsipan

### 1) Indeks Kearsipan

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Indeks Kearsipan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 87, namun kemudian turun di tahun 2021 sebesar 66,97. Di tahun 2022 kembali naik di angka 68,62 dan kembali naik 84,09 di tahun 2023 dan mencapai 85,23 di tahun 2024. Indeks kearsipan pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga kearsipan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan pencapaian di tahun 2024 sebesar 85,23, Indeks Kearsipan di Kabupaten Purbalingga masuk dalam kategori A. Beberapa kondisi terkait dengan urusan kearsipan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.116. Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kearsipan	angka	87	66,97	68,62	84,09	85,23
2	Pengawasan Arsip Internal	angka	-	62,82	58,87	79,78	88,28
		kategori	-	Baik	Cukup	Sangat Baik	Memuaskan
3	Pengawasan Arsip Eksternal	angka	87	66,64	66,64	86,97	83,19
		kategori	Memuaskan	Baik	Baik	Memuaskan	Memuaskan
4	Jumlah Objek Pembinaan Kearsipan	unit	629	74	156	197	287
5	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	-	45,45	45,45	59,09	59,09
6	Jumlah Arsip yang Telah Didokumentasikan	dokumen	91.528	5.556	15.000	17.929	10.877

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### A. Perikanan

##### 1) Produksi Perikanan

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi besar untuk pengembangan perikanan. Kondisi perikanan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan pada sungai dimana jenis ikan yang tertangkap biasanya terdiri dari ikan baung, keting, lele, lukas, mujair, nila, nilem, seren, tawe dan udang tawar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan namun dengan laju yang kecil.

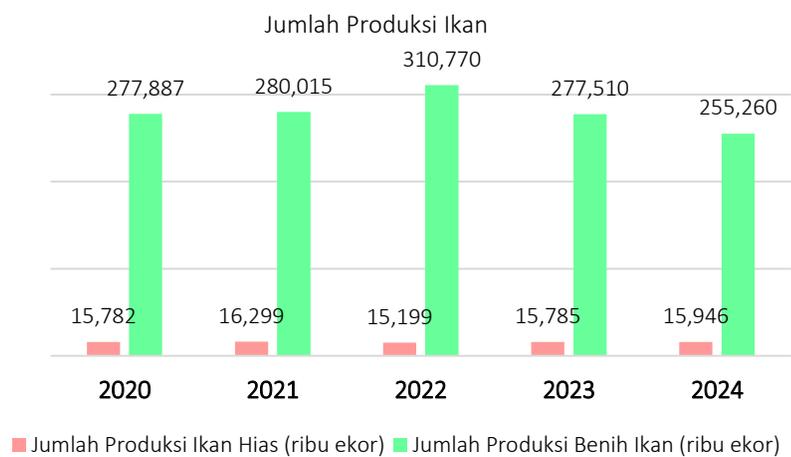
Sedangkan untuk perikanan budidaya, saat ini terdapat 261 kelompok pembudidaya ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dibudidayakan terdiri dari ikan bawal, gurami, lele, mas/karper, nila, nilem, patin dan tawes. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan budidaya mengalami penurunan namun dengan laju yang kecil. Produksi yang menurun tersebut juga mempengaruhi penurunan nilai produksi budidaya ikan air tawar. Kendala terbesar yang dihadapi petani ikan adalah perubahan iklim, pengadaan bibit dan harga pakan yang terus melambung tinggi.

Disamping ikan tangkap dan ikan budidaya, di Kabupaten Purbalingga juga sedang dikembangkan ikan hias. Budidaya ikan hias memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Jenis ikan hias yang dibudidayakan terdiri dari Black Ghost, Cherry Shrimp, Corybronze, Cupang Siamese, Gupy, Rasbora Galaxy, Koi, Lou Han, Manfish, Mas Koki, Platy Ekor Pedang, Platy Selatan, Neon Tetra dan Udang Karang. Peluang budidaya ikan hias di Kabupaten Purbalingga karena adanya permintaan pasar yang tinggi dan nilai produksinya juga tinggi. Namun kendala yang dihadapi dalam pengembangan budidaya ikan hias yaitu pemasarannya belum merambah pasar lokal dan masih mengandalkan pengepul.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 52. Jumlah Produksi Ikan Tangkap, Ikan Budidaya dan Olahan Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 53. Jumlah Produksi Ikan Hias dan Benih Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Sedangkan untuk produksi benih ikan dan olahan ikan, secara kuantitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada produksi benih ikan nilai produksinya mengalami peningkatan, namun pada nilai produksi olahan ikan mengalami penurunan. Beberapa jenis olahan ikan terdiri dari pindang tongkol, serundeng ikan nila, keripik nila, macaroni patin dan abon ikan lele yang merupakan hasil produksi dari para pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Purbalingga.

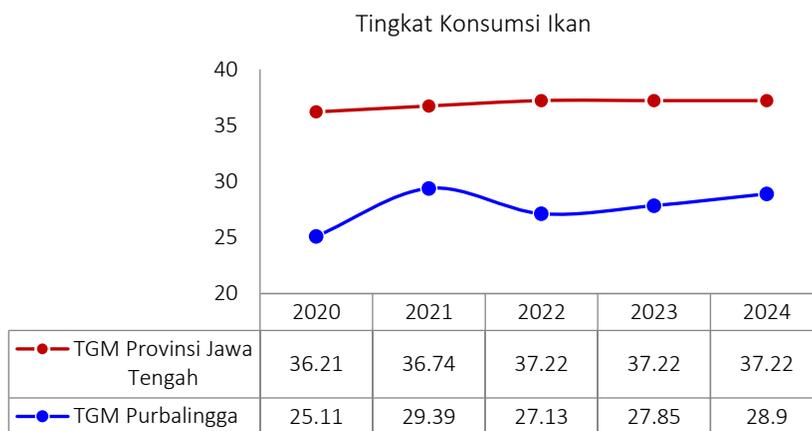
**Tabel II.117. Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	rupiah	6.848.176.280	6.631.476.169	7.958.225.250	7.962.900.000	8.604.168.169
2	Nilai Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	rupiah	126.340.136.000	141.629.502.000	136.646.340.000	134.869.160.000	72.607.250.000
3	Nilai Produksi Ikan Hias	rupiah	33.555.200.000	34.213.928.500	38.100.774.000	41.236.780.000	42.954.075.000
4	Nilai Produksi Usaha Pembenihan	rupiah	69.299.500	55.370.000	883.032	61.755.100	95.139.500
5	Nilai Produksi Olahan Ikan	rupiah	49.632.000.000	51.747.000.000	113.609.484.358	123.058.024.000	82.873.000.000

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025

## 2) Tingkat Konsumsi Ikan

Dalam pengembangan produksi perikanan, selain manfaat ekonomi yang didapatkan, juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Konsumsi ikan juga bertujuan untuk mencegah *stunting*, karena ikan merupakan protein hewani yang memiliki gizi baik karena mengandung omega-3 yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu 25,11 di tahun 2020 kemudian merangkak naik di angka 28,9 di tahun 2024. Angka tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan Tingkat konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 37,22 di tahun 2024.



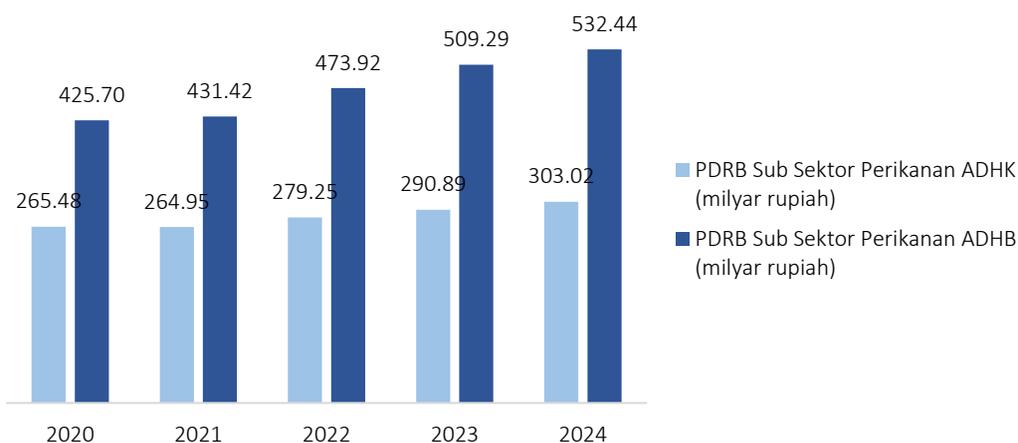
*Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021-2025*

**Gambar 2. 54. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga dikarenakan ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Disamping itu juga dikarenakan masih rendahnya daya beli masyarakat baik karena faktor ekonomi ataupun karakter masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi ikan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi gerakan makan ikan yang masif agar angka konsumsi ikan semakin meningkat. Upaya juga dilakukan untuk membuat hasil olahan ikan lebih variatif sehingga bisa meningkatkan minat makan ikan.

### 3) PDRB Sub Sektor Perikanan

PDRB Sub Sektor Perikanan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di sektor perikanan dalam satu tahun. PDRB ini mencakup hasil tangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan jasa perikanan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kontribusi sub sektor perikanan cenderung stabil pada angka 1,60 % namun dengan laju pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sub Sektor Perikanan ADHK (milyar rupiah)	265,48	264,95	279,25	290,89	303,02
PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB (milyar rupiah)	425,70	431,42	473,92	509,29	532,44
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan (PDRB) (%)	1,93	-0,20	5,39	4,17	4,17
Kontribusi Sub Sektor Perikanan (PDRB ADHB) (%)	1,70	1,63	1,64	1,63	1,60

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 55. PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## B. Pariwisata

### 1) Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

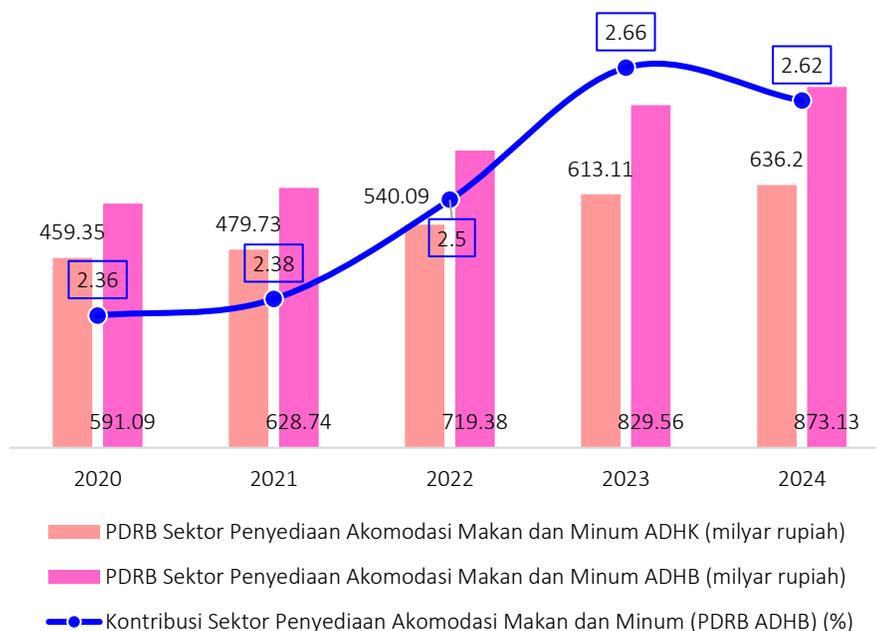
PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum berkontribusi dalam aktivitas terkait pariwisata, baik itu dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan maupun penyediaan jasa makan dan minum. Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Pengembangan kawasan wisata tersebut akan sangat berpengaruh terhadap PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum.

Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 2,66 persen menjadi 2,62 persen, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung meningkat, Pasca pandemi covid-19, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mulai merangkak naik dimana pada tahun 2020 berada pada angka 2,36 persen kemudian meningkat menjadi 2,62 persen di tahun 2024.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dikembangkan dalam skala regional yaitu dengan pengembangan kawasan wisata regional terintegrasi antara 5 Kabupaten dalam wilayah Sabuk Gunung Slamet dengan menghubungkan beberapa kawasan wisata:

- 1) Baturaden, Kabupaten Banyumas;
- 2) Serang, Kabupaten Purbalingga;
- 3) Pulosari, Kabupaten Pemalang;
- 4) Guci, Kabupaten Tegal; dan
- 5) Sirampog, Kabupaten Brebes.

Potensi pengembangan tersebut akan dapat terwujud didukung dengan kerjasama antar wilayah dan dukungan dari Provinsi Jawa Tengah untuk penyediaan koridor transportasi wisata Sabuk Gunung Slamet.

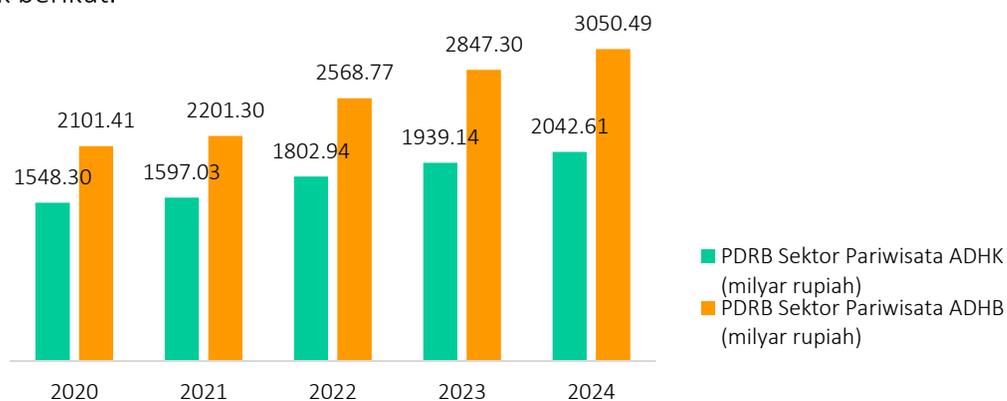


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 56. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

## 2) PDRB Sektor Pariwisata

Pada dasarnya sektor pariwisata yang dihitung dalam PDRB meliputi lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencakup hotel, restoran, dan daya tarik wisata. PDRB pariwisata menjadi indikator penting untuk mengetahui dampak sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca covid-19, kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga juga semakin meningkat walaupun dengan laju yang fluktuatif. Peningkatan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya pula jumlah pengunjung wisata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara rinci PDRB sektor pariwisata dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Pariwisata ADHK (milyar rupiah)	1548,30	1597,03	1802,94	1939,14	2042,61
PDRB Sektor Pariwisata ADHB (milyar rupiah)	2101,41	2201,30	2568,77	2847,30	3050,49
Pertumbuhan Sektor Pariwisata (PDRB) (%)	-5,54	3,15	12,89	7,55	5,34
Kontribusi Sektor Pariwisata (PDRB ADHB) (%)	8,38	8,34	8,91	9,12	9,14

Sumber: BPS Prov. Jateng dan Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 57. PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

### 3) Jumlah Kunjungan Wisata

Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan yang dapat dikunjungi karena memiliki keindahan alam dan panorama; kebudayaan yang diminati oleh wisatawan; serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Potensi pariwisata tersebut ke depannya dapat dikembangkan menjadi pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) untuk mencapai tujuan berwisata. Beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- Pariwisata alam yang terdiri dari: Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja; Goa Lawa (Golaga) di Kecamatan Karangreja; Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang; Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga; Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga; Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten; serta Desa Wisata yang berbasis budaya.
- Pariwisata buatan yang terdiri dari: Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari; Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) di Kecamatan Bojongsari; Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara; Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari; Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari; Purbalingga *City Park* (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga.

Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga baik domestik maupun mancanegara, selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pasca pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021, jumlah pengunjung masih mengalami penurunan. Tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata yaitu sebanyak 1.387.912 orang di tahun 2020 menurun menjadi 1.068.495 orang. Kemudian pada tahun 2022, jumlah pengunjung wisata kembali meningkat menjadi 2.344.279, di tahun 2023 meningkat menjadi 2.593.507, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 2.876.575 orang. Penurunan dan kenaikan jumlah kunjungan wisata tersebut secara otomatis mempengaruhi pendapatan dari obyek wisata yang juga mengalami kenaikan dan penurunan. Beberapa kondisi terkait dengan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.118. Kondisi Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.387.912	1.068.495	2.344.279	2.593.507	2.876.575
2	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	orang	1.387.862	1.068.495	2.344.273	2.593.497	2.876.550
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	50	0	6	10	25

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan dari Obyek Wisata	rupiah	15.958.823.805	11.179.948.019	34.377.747.202	37.397.577.888	35.331.004.000
5	Total Jumlah Obyek Wisata	Objek	20	20	67	38	40
6	Jumlah Desa Wisata	desa	29	25	24	28	28
7	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara	hari	0	0	0	1,92	4,19
8	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan Domestik/ Nusantara	har	1,38	1,28	1,31	1,30	1,30
9	Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	persen	21,84	21,17	28,53	31,58	24,97
10	Jumlah Rumah Makan/Restoran		75	75	75	137	137

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Pembinaan ini penting dalam rangka untuk mengupayakan agar para pelaku ekraf dapat berkreasi dan mengekspresikan hasil karyanya melalui berbagai media. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melakukan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif yaitu dengan memberikan ruang dan tempat, agar para pelaku ekraf dapat tetap eksis seperti ruang kreasi yang ada di Taman Kota Usman Janatin Kabupaten Purbalingga.

Berpedoman pada Perda Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif berupa pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif baik bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga maupun program dari Kemenparekraf. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 11 sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel II.119. Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Sub Sektor Ekonomi kreatif	Jumlah	Sebaran	Nama Komunitas
1	Aplikasi	1	Kecamatan Purbalingga	Non Komunitas
2	Arsitektur	4	Kecamatan Padamara (2), Karangmoncol (1), Kertanegara (1)	Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jateng
3	Desain Produk	2	Kecamatan, Kemangkon	Non Komunitas
4	Fotografi	27	Kecamatan Kemangkon (1), Kertanegara (3), Purbalingga (1), Karangmoncol 91), Kalimanah (1), Padamara (1), Rembang (1), Bobotsari (3), Mrebet (2), Kutasari (4), Kejobong (1), Kaligondang (2)	Ventovi
5	Musik	27	Kecamatan Kemangkon (2), Purbalingga (7), Bukateja (1), Kalimanah (2), Padamara (1), Kutasari (1), Bojongsari (4), Mrebet (1), Bobotsari (1), Karanganyar (1), Karangmoncol (3), Rembang (2)	Non Komunitas USC PAPPRI

No	Sub Sektor Ekonomi kreatif	Jumlah	Sebaran	Nama Komunitas
6	Kuliner	6	Kecamatan Bojongsari 91), Karangreja (1), Rembang (4)	Non Komunitas Ruang Kopi
7	Kriya	18	Kecamatan Kemangkon (2), Bukateja (1), Kaligondang (1), Purbalingga (5), Kalimanah (1), Kutasari (1), Bojongsari (2), Mrebet (1)	Non Komunitas PARAS Perwira Craft
8	Fesyen	86	Kecamatan Kemangkon (1), Bukateja (3), Kaligondang (1), Purbalingga (3), Kalimanah (2), Bojongsari (6), Mrebet (1), Bobotsari (1), Karangreja (12), Karanganyar (1), Rembang (1)	Agdega, Ecolingga, FPBP
9	Film, Animasi dan Video	25	Kecamatan Kemangkon (2), Bukateja (2), Kejobong (3), Pengadegan (4), Purbalingga (3), Padamara (2), Kutasari (1), Bobotsari (1), Rembang (1)	CLC Content Creator
10	Seni Pertunjukan	97	Kecamatan Bukateja (2), Kejobong (24), Kaligondang (2), Purbalingga (1), Kalimanah (10), Padamara (1), Kutasari (1), Bojongsari (3), Mrebet (24), Bobotsari (7), Karangreja (12), Karangjambu (4), Rembang (1)	Non Komunitas Dresnala Katasapa Paku Beling
11	Seni Rupa	26	Kecamatan Kemangkon (2), Pengadegan (1), Kaligondang (2), Purbalingga (4), Kalimanah (3), Bojongsari (2), Mrebet (3), Bobotsari (3), Karangreja (12), Karanganyar (1), Karangmoncol (3)	Non Komunitas Manah Hati Wong Art Blarak

Sumber: Laporan Akhir Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Purbalingga, 2022

## C. Pertanian

### 1) Rasio PDRB Sektor Pertanian

Sub sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian) juga memberikan kontribusi besar dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua setelah lapangan usaha industri pengolahan. Walaupun memberikan kontribusi besar, namun rasio PDRB sub sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor pertanian sebesar 24,81 persen turun menjadi 24,37 persen di tahun 2021, 24,14 persen di tahun 2022, 23,50 persen di tahun 2023 dan 23,23 persen di tahun 2024.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

### Rasio PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

## 2) Produktivitas Pertanian

Apabila dilihat dari komoditas pertaniannya, produksi pertanian dibedakan menjadi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi pertanian pangan mengalami kenaikan dan penurunan. Potensi pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu dan kedelai. Penurunan terjadi karena angka produktivitas menurun yang disebabkan karena adanya penurunan luas lahan sawah, serangan WBC (Wereng Batang Coklat), serta serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) seperti tikus. Sedangkan potensi pertanian hortikultura komoditas utama yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi ubi kayu, kentang dan kobis. Kemudian untuk perkebunan potensinya berupa buah-buahan seperti duku, nanas dan kelapa. Untuk potensi peternakan yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Secara rinci perkembangan jumlah dan nilai produksi pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.120. Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	ton	189.156,64	179.003,25	201.237,00	159.679,19	160.167,32
2	Produksi Jagung	ton	69.029,42	42.373,40	36.868,00	40.933,15	48.200,84
3	Produksi Kedelai	ton	175,08	614,91	277,00	213,14	301,98
6	Produksi Buah-Buahan	ton	295.492,90	378.056,70	392.748,00	315.953,00	175.156
7	Produksi Sayuran	ton	238.040,90	309.001,70	307.627,00	242.742,00	121.534
8	Produksi Kelapa Deres	ton	55.600,94	55.623,17	28.287,63	56.202,36	
9	Produksi Kopi	ton	55.600,94	55.623,17	56.223,75	56.202,36	56.327,08
10	Produksi Teh	ton	292,00	290,99	204,56	212,40	222,044
11	Produksi Lada	ton	16,19	16,03	6,89	16,62	16,62445
12	Produksi Kakao	ton	189,37	185,38	182,73	199,05	218,19
13	Produksi Daging Sapi	kg	932.920,00	885.250,00	222.750,00	1.001.011,20	1,684,158.38
14	Produksi Daging Kambing	ton	59.956.493.381,00	47.447.236.574,00	23.756.627.700,00	48.067.721.850,00	59,703,793,224.21
15	Produksi Daging Ayam	ton	94,83	91,67	45,79	89,38	87.40
16	Produksi Daging Itik	ton	60,28	44,79	20,94	35,59	30,09
17	Produksi Susu Sapi	liter	344.963	99.541	51.420	110.048,00	121,938.57
18	Produksi Telur Ayam	Kg	14.266.640	13.981.974	5.236.489	9.775.674	10,742,076.58
19	Produksi Telur Itik	kg	1.078.498	857.514	345.911	583.839	641,371.51

Sumber: *Dinperta Kab. Purbalingga, 2021-2025*

**Tabel II.121. Nilai Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	rupiah	1.011.988.024.000	962.142.468.750	1.067.159.811.000	1.071.287.685.710	1.147.598.837.769
2	Produksi Jagung	rupiah	286.472.093.000	206.570.325.000	165.647.924.000	214.039.441.350	249.439.349.588
3	Produksi Kedelai	rupiah	1.479.426.000	5.257.480.500	1.709.644.000	2.131.400.000	3.243.206.130
6	Produksi Buah-Buahan	rupiah	787.898.537.100,00	942.160.746.010,00	935.354.173.769,00	815.814.377.411	493.221.012.032

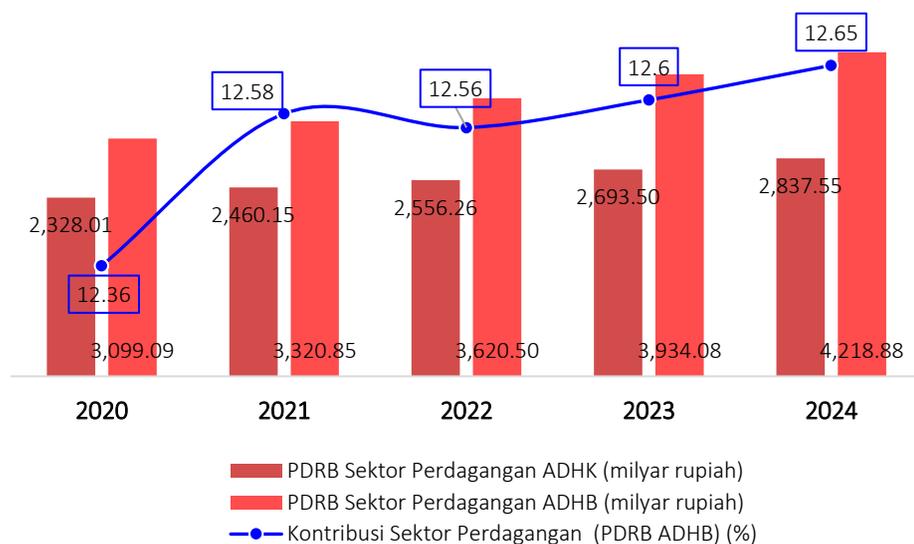
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Produksi Sayuran	rupiah	274.984.237.445,00	334.118.619.252,00	369.915.877.107,00	395.891.720.852	412.879.680.571
8	Produksi Kelapa Deres	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	844.906.250,55
9	Produksi Kopi	rupiah	5.957.913.725	8.147.756.680	6.341.360.000	0,00	13.740.189,023
10	Produksi Teh	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Produksi Lada	rupiah	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539.130,30
12	Produksi Kakao	rupiah	0,00	55.934.284	28.575.290	16.128.000	0,00
13	Produksi Daging Sapi	rupiah	110.415.178.496	106.874.220.544	28.943.563.264	130.131.456.000	218,940,589,400
14	Produksi Daging Kambing	rupiah	3.503.791.791,00	4.436.680.806,00	2.668.246.000,00	6.171.071.200,00	33,066,658,716.58
15	Produksi Daging Ayam	rupiah	197.606.931.299,00	184.066.076.333,00	92.880.105.193,00	183.530.085.580,00	181,714,630,460.00
16	Produksi Daging Itik	rupiah	3.982.860.000,00	3.941.810.000,00	2.060.550.000,00	4.022.016.300,00	3,932,912,700.00
17	Produksi Susu Sapi	rupiah	3.488.265.856,00	1.082.209.752,00	615.857.340,00	1.320.579.517,00	1,463,262,820.62
18	Produksi Telur Ayam	rupiah	410.348.405.727,00	366.904.542.982,00	151.698.176.068,00	428.995.226.204	321,805,816,285.98
19	Produksi Telur Itik	rupiah	31.461.930.885,00	26.040.987.429,00	10.841.875.435,00	18.974.759.209	20,844,574,029.19

Sumber: Dinperta Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### D. Perdagangan

##### 1) Rasio PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi besar dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga. Sektor perdagangan menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan dan stabil. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor perdagangan yaitu sebesar 12,36 persen kemudian meningkat menjadi 12,65 persen di tahun 2024.



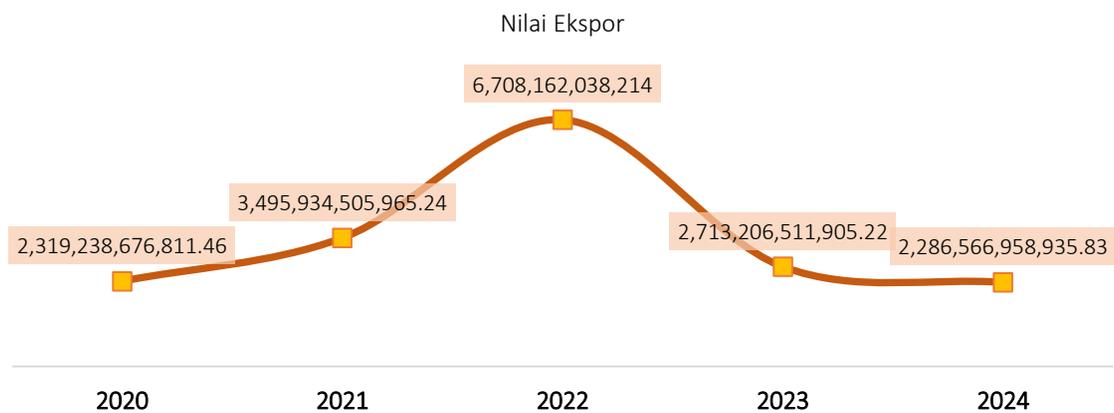
Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

Gambar 2. 58. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

## 2) Nilai Ekspor

Berkaitan dengan kondisi sarana sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga, jumlah pasar tradisional yang merupakan pasar rakyat, terdiri dari 21 unit pasar, dimana dari 21 unit pasar tersebut sampai dengan tahun 2024 baru 9 unit pasar yang layak usaha, terdiri dari: Pasar Segamas, Hartono, Panican, Tobong, Bobotsari, Cipaku, Kertanegara, Bukateja, dan Sinduraja.

Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung fluktuatif dari Rp 2.319.238.676.811,46,- pada tahun 2020 kemudian naik menjadi Rp 3.495.934.505.965,24,- dan puncak kenaikan Rp 6.708.162.038.214,- pada tahun 2022. Namun di tahun 2023 kembali turun menjadi Rp 2.713.206.511.905,22-. Di tahun 2024 juga kembali turun menjadi 2,286,566,958,935.83. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.



Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 59. Perkembangan Nilai Ekspor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Terkait dengan Peningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di Kabupaten Purbalingga, telah diatur dalam Perbup Nomor 256 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan ini mewajibkan setiap perangkat daerah dan penyedia barang/jasa untuk mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Diharapkan dengan mengikuti aturan tersebut, dapat menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing. Beberapa kondisi terkait dengan perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122. Kondisi Urusan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor	rupiah	2.319.238.676.811,46	3.495.934.505.965,24	6.708.162.038.214	2.713.206.511.905,22	2.286.566.958.935,83
2	Impor	rupiah	514.785.323.011,19	703.560.038.389,15	9.977.431.329.189,58	551.862.789.603,22	410.895.458.892,46
3	Surplus/ Defisit Neraca Perdagangan	rupiah	1.804.453.353.800,27	2.792.374.467.576,09	-3.269.269.290.976,02	2.161.343.722.302,00	1.875.671.500.043,37
4	Jumlah eksportir	perusahaan	29	29	31	36	38
5	Jenis Barang yang diekspor	produk	121	121	5	5	1
6	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)	jenis	5	2	16	7	26
7	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	unit	11.911	5.237	17.779	15.724	22.632

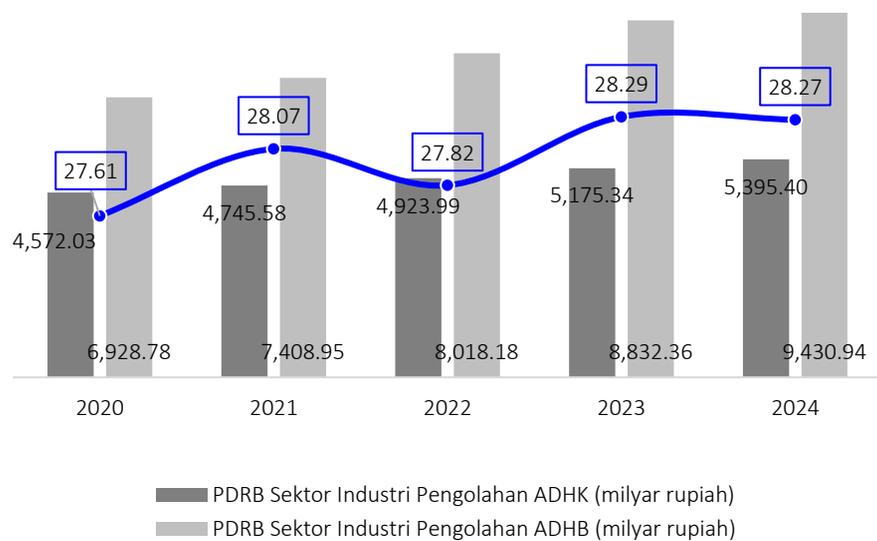
Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

## E. Perindustrian

### 1) Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi dalam distribusi persentase PDRB Kabupaten Purbalingga. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor industri pengolahan yaitu sebesar 27,61 persen kemudian meningkat menjadi 28,07 persen di tahun 2021. Namun kemudian di tahun 2022 turun menjadi 27,82 persen dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 28,29 persen. Di tahun 2024 cenderung stabil di angka 28,27 persen.

Walaupun bukan merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan memberikan share yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Beberapa produk unggulan industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga baik skala besar maupun kecil di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya gula kelapa, knalpot dan komponen otomotif, kerajinan sapu glagah, kerajinan tempurung kelapa dan glugu, rambut palsu dan bulu mata palsu, gerabah, kayu lapis, batik dan makanan olahan. Pemasaran industri tersebut sampai ke seluruh Indonesia bahkan dipasarkan ke luar negeri baik secara *online* maupun *offline*.



Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 60. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Terdapat beberapa kluster industri di Kabupaten Purbalingga dengan produk unggulannya meliputi: knalpot, batik, sapu glagah dan olahan pangan. Knalpot menjadi salah satu produk yang dihasilkan kluster logam, mesin dan tekstil. Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga diawali dengan industri logam dari bahan seng dan drum untuk pembuatan peralatan rumah tangga yang berlokasi di Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor. Kemudian mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga dengan memproduksi knalpot sepeda motor dan mobil. Beberapa kondisi terkait dengan urusan perindustrian yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.123. Kondisi Urusan Perindustrian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Industri Besar	unit	32	36
2	Industri Menengah	unit	154	34
3	Industri Kecil	unit	14.401	20.888
4	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	IKM	186	70

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga, 2024-2025

## F. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga terlihat semakin menurun, dimana pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak ada pengiriman, kemudian di tahun 2022 terdapat pengiriman 2 orang. Kemudian di tahun 2023 tidak ada

transmigran yang ditempatkan karena tidak ada kuota untuk Kabupaten Purbalingga, baru di tahun 2024 ada 1 orang transmigran yang kembali ditempatkan lagi.

#### 2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### A. Perencanaan

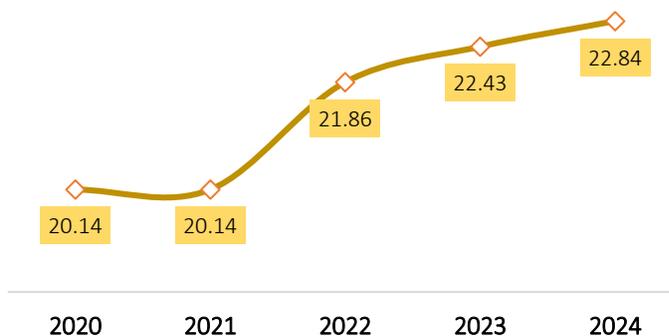
###### 1) Skor Perencanaan

Dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan implementasi *e-government* dengan menggunakan sistem informasi *e-planning* yang relevan dengan kebutuhan birokrasi dan administrasi Pemerintah Daerah. Saat ini aplikasi sistem informasi yang digunakan adalah SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dari Kemendagri yang mampu mengimplementasikan proses perencanaan mulai dari pelaksanaan musrenbangcam, penyusunan renja sampai dengan penganggaraannya. Disamping itu, juga digunakan aplikasi Krisna Selaras yang merupakan integrasi antara tiga Kementerian (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB) untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran, yang terkait dengan DAK.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) salah satu komponen yang dinilai adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 30% dari nilai total. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP Kabupaten Purbalingga selalu meningkat yaitu dari 19,15 pada tahun 2018 naik terus 22,43 pada tahun 2024.



Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 61. Skor Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perencanaan dan litbang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.124. Kondisi Urusan Perencanaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program dalam RPJMD	Program	98	98	135	135	135
2	Jumlah Program dalam RKPD	Program	95	129	133	133	133
3	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	96,94	66,67	98,02	98,74	98,74

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2021-2025

## B. Pengawasan

### 1) Indeks Integritas Nasional (IIN)

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Indeks Integritas Nasional dihitung berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK RI. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI tahun 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor 69,91. Kemudian di tahun 2024, hasil SPI untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan skor 77,18. Angka ini mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama berasal dari adanya perubahan dari sudut pandang responden Ekspert yakni sebesar peningkatan sebesar 17.4 poin.

**Tabel II.125. Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No.	Tahun	Indeks Integritas Nasional	
		Nilai	Kategori
1	2023	69,91	Rentan
2	2024	77,18	Waspada

Sumber: KPK, 2024-2025

Hasil SPI 2024 pada tingkat nasional menemukan bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu akar persoalan utama yang memicu berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lembaga publik. Terkait temuan utama pada level nasional tersebut, berikut adalah rangkuman terkait konflik kepentingan yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Temuan utama SPI 2024 menyebutkan adanya hubungan kekerabatan dan kolusi kerap mempengaruhi proses pengadaan, yang merusak prinsip keadilan, efisiensi, dan profesionalisme. Dalam konteks hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebesar 5 persen responden mengatakan percaya bahwa penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang pengadaan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses dll). Kondisi ini tetap dibanding tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif rendah.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi pegawai menyebabkan penurunan kinerja organisasi dan merusak budaya integritas. Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdapat 23 persen responden yang sering mendengar bahwa seorang pegawai di Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapat promosi/mutasi karena faktor hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/ organisasi/dst. Dibanding tahun lalu, risiko pengaruh tersebut relatif tetap. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut termasuk rendah.
- 3) Pengelolaan Anggaran: Penyelewengan dana publik seringkali terkait dengan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa sebanyak 8 persen responden meyakini, ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi. Risiko korupsi tersebut relatif meningkat dibanding tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif tinggi.
- 4) Penggunaan Fasilitas Kantor: Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi menjadi cerminan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas. Berdasarkan hasil SPI 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, menurut 5 persen responden, pegawai di pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (termasuk teman, keluarga, dll). Dibanding tahun lalu, risiko penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi cenderung tetap. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif rendah.

## **2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa fungsi pengawasan mengalami kemajuan dimana untuk level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan kemajuan dimana level kapabilitas APIP berada

pada level 3. Ketika level 3 telah dicapai berarti kemampuan APIP telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level tersebut juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik.

Sedangkan dilihat dari tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 3,0670 pada tahun 2024. Nilai tersebut naik dari nilai maturitas 2,6620 di tahun 2023.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan SPIP, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan risiko dilakukan atas risiko strategis pemerintah daerah, risiko (entitas) OPD) dan risiko operasional OPD.

Diantara 5 unsur SPIP yang terdiri dari: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan, yang menjadi kelemahan nilai SPIP di Kabupaten Purbalingga yaitu pada penilaian Unsur Kegiatan Pengendalian khususnya pada komponen pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk *Monitoring Center of Prevention* (MCP) salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal yang dimonitoring mulai *e-budgeting*, *e-planning* dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. Pencapaian nilai MCP Korsubgah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 yaitu 97,05. Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan pengawasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.126. Kondisi Urusan Pengawasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	nilai	3,0375	3,0375	2,8620	2,6620	3,0670
2	Tingkat Maturitas SPIP	tingkat	Terdefini si	Terdefin isi	Berkem bang	Berkemb ang	Terdefini si
3	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3
4	Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks)	angka	1,5	2,25	2,52	2,32	2,878
5	Nilai Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (MCP Korsupgah)	angka	73,35	84,56	96,47	95,30	97,05
6	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang diperiksa	nilai	125	84	100	110	120
7	Jumlah Temuan Hasil	laporan	303	287	633	457	415

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemeriksaan						
8	Jumlah Aduan yang masuk ke Inspektorat	laporan	10	5	5	8	5
9	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	rekomendasi	498	567	1.128	1.122	1.028
	1. Hasil Pemeriksaan APIP	rekomendasi	484	458	1.113	1.104	1.013
	2. Hasil Pemeriksaan BPK	rekomendasi	14	109	15	18	15
10	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	rekomendasi	403	475	643	992	786
	1. Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	rekomendasi	389	366	628	983	780
	2. Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	rekomendasi	14	109	15	9	6
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	%	80,32	70,02	88,48	93,44	93,73

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan sebuah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau organisasi mampu mengendalikan dan mencegah praktik korupsi di dalam lembaganya. IEPK mengukur efektivitas kebijakan, sistem, dan tindakan yang diambil untuk mengurangi tingkat korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan atau organisasi tersebut.

Nilai IEPK merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam konteks SPIP, IEPK mencerminkan sejauh mana pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi
2. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan
3. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 PE.09.03/LHP673/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 capaian nilai IEPK Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 2,910. Nilai IEPK Kabupaten Purbalingga masih pada level 2 (berkembang). Dalam kurun waktu 3 tahun IEPK Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.127. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	
		Nilai	Kategori
1	2021	2,820	Berkembang
2	2022	2,685	Berkembang
3	2023	2,685	Berkembang
4	2024	2,910	Berkembang

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2022-2025

Rincian hasil IEPK tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.128. Hasil Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Pilar dan Indikator	Bobot Unsur (%)	Skor	Nilai
<b>I</b>	<b>Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi</b>	<b>48</b>		<b>1,440</b>
1	Kebijakan Antikorupsi	9,6	3	0,288
2	Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,2	3	0,216
3	Dukungan Sumber Daya	7,2	3	0,216
4	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,4	3	0,432
5	Pembelajaran Antikorupsi	9,6	3	0,288
<b>II</b>	<b>Penerapan Strategi Pencegahan</b>	<b>36</b>		<b>0,990</b>
1	Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9	3	0,180
2	Saluran Pelaporan Internal	3,6	3	0,108
3	Kepemimpinan Etis	9	3	0,270
4	Integritas Organisasi	7,2	3	0,216
5	Iklim Etis Prinsip	7,2	3	0,216
<b>III</b>	<b>Penanganan Kejadian Korupsi</b>	<b>16</b>		<b>0,480</b>
1	Investigasi	8	3	0,240
2	Tindakan Korektif	8	3	0,240
<b>Nilai IEPK</b>				<b>2,910</b>

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga, 2022-2025

## C. Keuangan

### 1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Dimensi IPKD terdiri dari 6 yang meliputi: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IPKD Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020 berada pada angka 64,2383 dan kemudian berangsur naik di tahun 2021 menjadi 70,8583, di tahun 2022 menjadi 78,7087, di tahun 2023 menjadi 78,8505, namun di tahun 2024 turun menjadi 63,7212.

## 2) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah semakin tinggi. Semakin besar rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari 0,23 persen di tahun 2020 menjadi 0,26 persen di tahun 2024. Pada dasarnya tren pajak daerah di Kabupaten Purbalingga secara jumlah semakin meningkat, namun PDRB juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan, sehingga rasio pajak daerah terhadap PDRB persentasenya lebih kecil.

**Tabel II.129. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No	Pajak Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan Pajak Daerah	rupiah	58.829.66 9.048	61.714.01 7.788	73.252.95 2.786	79.871.25 2.230	86.005.31 1.246
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.59 0.000.000	26.393.81 0.000.000	28.820.82 0.000.000	31.224.55 0.000.000	33.357.33 0.000.000
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	%	0,23	0,23	0,25	0,26	0,26

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

## 3) Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan seluruh pendapatan daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan yang diperoleh. Pada dasarnya peningkatan rasio pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan dan mendukung pembangunan daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah semakin meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.130. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No	Pajak Daerah	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	rupiah	58.829.66 9.048	61.714.01 7.788	73.252.95 2.786	79.871.25 2.230	86.005.31 1.246
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	rupiah	1.952.749. 301.274	2.054.843. 644.547	2.022.884. 629.933	2.055.099. 281.776	2.108.226. 033.409
3	Pajak Daerah	%	3,01	3,00	3,62	3,89	4,08

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 4) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB adalah perbandingan antara total PAD yang diperoleh dengan total PDRB yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kontribusi PAD terhadap PDRB, yang dapat menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang lebih baik. Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun, namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir stabil pada angka 1,06 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.131. Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No	PAD	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD	rupiah	313.618.688.781	377.882.022.370	306.197.569.020	329.218.279.232	352.670.551.808
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,25	1,43	1,06	1,05	1,06

Sumber: Bakeuda dan BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

#### 5) Status Opini BPK

Kondisi keuangan di Kabupaten Purbalingga juga ditunjukkan pada opini laporan keuangan yang sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Ke depannya, diharapkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa kondisi terkait dengan urusan keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.132. Kondisi Urusan Keuangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	dokumen	5	5	5	5	5
3	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	dokumen	5	5	5	5	5
4	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### D. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

##### 1) Indeks Profesionalitas ASN

Kemudian dilihat dari fungsi kepegawaian sebagai penunjang urusan pemerintahan, dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur

secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Beberapa rincian dimensi profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai sebagai berikut.

**Tabel II.133. Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualifikasi	angka	13,12	12,62	21,17	21,18	21,51
2	Kompetensi	angka	30,61	18,60	20,19	22,72	28,14
3	Kinerja	angka	25,06	9,93	23,98	24,93	24,73
4	Disiplin	angka	4,99	4,99	5,00	5,00	5
5	Indeks Profesionalitas ASN	angka	73,78	46,31	70,34	73,83	79,38
6	Predikat Indeks Profesionalitas ASN	predikat	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : BKN dan BKPSDM Kab. Purbalingga, 2021-2025

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari kualifikasi yaitu baik dalam hal pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, maupun berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dalam pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya sudah berbasis elektronik. Beberapa perkembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2016 dilaksanakan persiapan aplikasi Simpeg berbasis web, kemudian di tahun 2017 dilakukan *launching* perubahan Simpeg menjadi E-Kepegawaian. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan penambahan sub menu pada E-personal, di tahun 2019 dilakukan penambahan menu biodata non PNS, Sampai dengan tahun 2023 data kepegawaian berbasis elektronik sudah dapat dipergunakan.

## 2) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Penerapan Sistem Merit ASN merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Beberapa aspek yang dinilai dalam Penerapan Sistem Merit ASN adalah perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutase, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan Kategori Baik, namun terdapat

rekomendasi pada beberapa aspek yang menjadi perhatian untuk ke depannya, yaitu pada aspek Pengembangan Karir utamanya dalam hal Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; serta Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi. Perkembangan Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga secara rinci yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.134. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Tahun	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	
		Nilai	Kategori
1	2022	0,45	Kurang
2	2023	0,63	Baik
3	2024	0,63	Baik

*Sumber: BKPSDM Kab. Purbalingga, 2023-2025*

## E. Urusan Penelitian dan Pengembangan

### 1) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan kelitbangannya seperti workshop, pendampingan metodologi dan lomba – lomba ajang kreatifitas dan inovasi (krenova) di tingkat Kabupaten Purbalingga. Selain lomba kreatifitas dan inovasi, untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Purbalingga, juga diterbitkan beberapa surat ijin/survey penelitian dari berbagai universitas yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, yang akan mengadakan penelitian di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya rekomendasi penelitian yang dilaksanakan oleh kelitbangannya tetapi juga kerjasama antar perguruan tinggi dan Pemkab seperti yang dilaksanakan belum lama ini oleh Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN (Universitas Islam Negeri) Prof. Saizu, dan ITB (Institut Teknologi dan Bisnis) Muhammadiyah.

Dalam penelitian dan pengembangan, juga dilakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD dihitung berdasarkan 4 komponen dan dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Salah satunya terdapat pilar kapabilitas inovasi yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Pilar kapabilitas inovasi menggambarkan 2 dimensi yang berupa: keanekaragaman dan kolaborasi, serta riset dan komersialisasi dengan 12 indikator di dalamnya. Indikator kapabilitas meliputi keanekaragaman tenaga kerja, pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset serta aplikasi merek dagang.

Pada dasarnya kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Hal

tersebut dikarenakan akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru. Pengukuran IDSD yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir skor IDSD di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 2,90 di tahun 2022 menjadi 3,61 di tahun 2024. Dalam pilar kapabilitas inovasi (pilar 12) juga terdapat peningkatan dari 1,06 menjadi 2,38. Skor tersebut masih dalam skala yang rendah.

**Tabel II.135. Skor IDSD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,19	2,34	3,06	2,68	4,08	2,76	2,42	2,89	3,14	1,16	5,00	1,06	<b>2,90</b>
2023	4,39	1,82	4,33	2,98	4,10	3,14	2,41	2,65	2,00	4,38	2,86	1,70	<b>3,06</b>
2024	4,83	2,78	4,49	3,33	4,04	3,68	3,26	3,19	2,22	4,40	4,71	2,38	<b>3,61</b>

Sumber: BRIN, 2023-2025

Secara rinci indikator dalam pilar Kapabilitas Inovasi untuk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang dalam indikator publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset serta indeks keunggulan lembaga riset.

**Tabel II.136. Skor Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No.	Dimensi	Indikator	Skor
1	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Keanekaragaman tenaga kerja	4,19
		Pengembangan Klaster	4,83
2	Riset	Publikasi ilmiah	2
		Aplikasi Kekayaan intelektual (KI)	1,95
		Belanja riset	0,05
		Indeks keunggulan lembaga riset	0,14
3	Komersialisasi	Aplikasi merek dagang	3,54
<b>Indeks Pilar Kapabilitas</b>			<b>2,38</b>

Sumber: BRIN, 2025

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan kelitbangan seperti workshop, pendampingan metodologi dan lomba – lomba ajang kreatifitas dan inovasi (krenova) di tingkat Kabupaten Purbalingga. Selain lomba kreatifitas dan inovasi, untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Purbalingga, juga diterbitkan beberapa surat ijin/survey penelitian dari berbagai universitas yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, yang akan mengadakan penelitian di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya rekomendasi penelitian yang dilaksanakan oleh kelitbangan tetapi juga kerjasama antar perguruan tinggi dan pemkab seperti yang dilaksanakan belum lama ini oleh Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN (Universitas Islam Negeri) Prof. Saizu, dan ITB (Institut Teknologi dan Bisnis) Muhammadiyah.

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perencanaan dan litbang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.137. Kondisi Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2023**

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Inovasi dan Invensi	inovasi	184	124	208
2	Jumlah Inovasi dan Invensi yang diterapkan	inovasi	177	121	208
3	Jumlah Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	inovasi	184	124	208
4	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	persen	96,20	97,58	100,00
5	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	persen	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2023-2025

### 2.1.3.5 Unsur Pendukung Pemerintahan

#### A. Sekretariat Daerah

##### 1) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indeks pelayanan publik diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian artspek-aspek tersebut. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, IPP di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 4,34 di tahun 2021 menjadi 4,48 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 3,95 dan naik kembali menjadi 4,44 di tahun 2024. Angka tersebut termasuk pada kategori A- (Sangat Baik).

**Tabel II.138. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024**

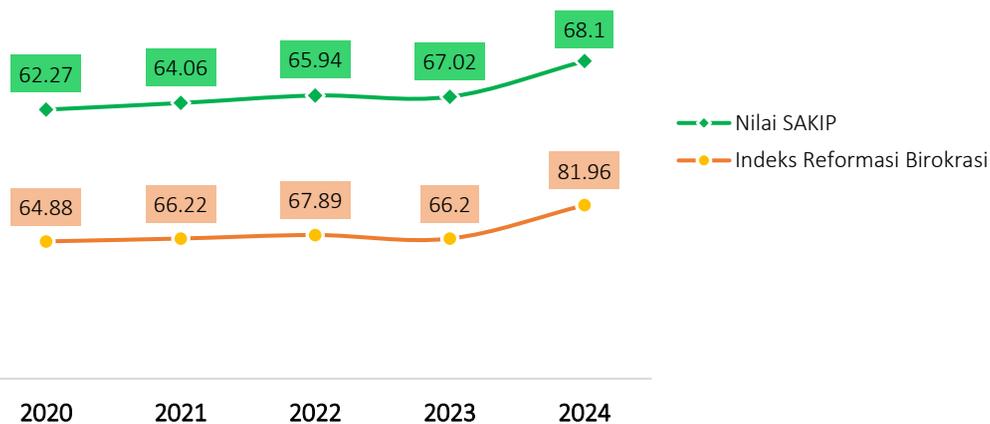
No.	Tahun	Indek Pelayanan Publik		
		Nilai	Kategori	Unit Pelayanan Publik (UPP)
1	2021	4,34	A- (Sangat Baik)	DPMPTSP (4,5), Dindukcapil (4,18)
2	2022	4,48	A- (Sangat Baik)	DPMPTSP (4,51), Dindukcapil (4,45)
3	2023	3,95	B	Kecamatan Kutasari (3,81), DinsosdaldukBP3A (3,66), RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (4,36)
4	2024	4,44	A- (Sangat Baik)	DinsosdaldukBP3A (3,94), RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata (4,60) dan Dindukcapil (4,78)

Sumber: KemenPANRB, 2022-2025

##### 2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan dapat dilihat dari indikator yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: nilai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Perkembangan nilai SAKIP dan IRB Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.



Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 62. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

Nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berada pada angka 62,27 dengan predikat B. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali naik menjadi 64,06, tahun 2022 menjadi 65,94, di tahun 2023 menjadi 67,02 dan kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 68,10. Nilai SAKIP dengan kategori B yang diperoleh Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

**Tabel II.139. Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,14	21,14	21,86	22,43	22,84
2	Pengukuran Kinerja	25	14,10	14,57	18,15	18,27	18,67
3	Pelaporan Kinerja	15	9,95	10,10	10,43	10,58	10,71
4	Evaluasi Internal	10	6,37	6,53	15,50	15,74	15,88
5	Capaian Kinerja	20	11,37	11,72	N/A	N/A	N/A
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>62,27</b>	<b>64,06</b>	<b>65,94</b>	<b>67,02</b>	<b>68,1</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025

Selanjutnya nilai IRB Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan. IRB Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berada pada angka 64,88, kemudian meningkat menjadi 66,22 pada tahun 2021, 67,89 pada tahun 2022, 66,20 pada tahun 2023, dan semakin meningkat menjadi 81,96 di tahun 2024. Tahun 2024 IRB mengalami peningkatan yang pesat, dimana nilai tersebut masuk ke dalam kategori A. Komponen penilaian IRB dalam 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.140. Rincian Komponen Penilaian IRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	RB General	62,04	73,56
2	RB Tematik	4,16	8,4

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2024-2025

### 3) Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)

Kematangan Organisasi Daerah (KOD) adalah ukuran atau tingkat keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang diukur berdasarkan pencapaian pada berbagai variabel dan indikator. Secara sederhana, KOD mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah secara efektif. Variabel yang digunakan dalam mengukur Kematangan Organisasi Daerah yaitu meliputi perencanaan pembangunan, monitoring dan pengendalian, manajemen sumber daya, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain. Berikut ini nilai Kematangan Organisasi Daerah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.141. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Kematangan Organisasi Daerah	
		Nilai	Kategori
1	2022	35,38	Sedang
2	2023	38,36	Tinggi
3	2024	38,57	Sangat Tinggi

Sumber: Setda Kab. Purbalingga, 2023-2025

### 4) Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Penilaian IRH pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 57,89 dengan kategori CC (Cukup). Kemudian

pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,14 dengan kategori AA (Istimewa). Adapun perkembangan hasil penilaian IRH dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.142. Hasil Penilaian IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No.	Penilaian	Tahun	
		2023	2024
1	Nilai Awal	49,45	85,70
2	Nilai Apresiasi	8,44	11,44
3	<b>Nilai Akhir</b>	<b>57,89</b>	<b>97,14</b>

Sumber: KemenkumHAM, 2024-2025

Dalam penilaian mandiri IRH Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 4 variabel dan 10 indikator, dengan perolehan nilai awal yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.143. Rincian Variabel dan Indikator Nilai Awal IRH Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
I	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	10,3	19,8
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundangundangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	9,6	15,6
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	3,6	3,6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	3,6	3,6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	2,4	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7	0,7	4,2
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	21,2	15,9
1	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	7	9,6	6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundangundangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	5,6	0
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundangundangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	6	9,6
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	30	6,7	30
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi	8	1,2	8

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	1,5	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	6	4	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	-	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	11,25	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	11,25	20
<b>NILAI AWAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>49,45</b>	<b>85,70</b>

Sumber: KemenkumHAM, 2024

### 5) *Return on Aset (ROA) BUMD*

*Return On Asset (ROA)* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. ROA BUMD di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 2,38 di tahun 2020 menjadi 2,86 di tahun 2024.

Perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga sejumlah 6 unit terdiri dari PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, Perumda Owabong dan Perumda Puspahastama. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ROA BUMD yang ada di Kabupaten Purbalingga yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan total aset keseluruhan BUMD menunjukkan bahwa rata-rata tingkat produktivitas perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum cenderung lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan, pariwisata dan pangan.

ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor air minum dan keuangan (bank perkreditan rakyat) menunjukkan angka yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata dan pangan. Ketika pandemi covid-19 tahun 2020, ROA perusahaan yang bergerak dalam sektor pariwisata mengalami kontraksi sampai dengan -1,15%. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan malah cenderung mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 14,24%. Namun paska pandemi covid-19 tahun 2021, perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan mengalami penurunan yang drastis. Tingkat produktivitas sektor pariwisata dan pangan sangat fluktuatif mengikuti perubahan kondisi daerah.

**Tabel II.144. *Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024***

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>PT. BPR BKK Purbalingga</b>					
	Laba Bersih (Rp)	11.748.466.803	12.073.247.420	14.006.468.006	14.487.417.098	13.790.534.688

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
	Total Aset (Rp)	415.309.142.632	429.811.020.293	450.028.130.482	451.456.889.573	465.284.577.445
	ROA BUMD (%)	2,83	2,81	3,11	3,21	2,96
2	<b>PT. BPRS Buana Mitra Perwira</b>					
	Laba Bersih (Rp)	3.410.935.639	4.417.141.065	5.428.665.576	6.252.736.395	4.929.823.828
	Total Aset (Rp)	185.464.803.368	210.963.974.291	264.771.152.154	336.709.466.946	333.646.337.022
	ROA BUMD (%)	1,84	2,09	2,05	1,86	1,48
3	<b>Perumda BPR Artha Perwira</b>					
	Laba Bersih (Rp)	4.288.780.905	4.437.706.887	5.334.290.321	4.200.542.196	2.379.725.780
	Total Aset (Rp)	106.986.989.086	125.212.090.099	137.656.426.111	148.000.113.584	143.977.106.020
	ROA BUMD (%)	4,01	3,54	3,88	2,84	1,65
4	<b>Perumda Air Minum Tirta Perwira</b>					
	Laba Bersih (Rp)	7.223.042.407	7.649.361.549	7.918.951.864	8.858.741.201	9.046.026.427
	Total Aset (Rp)	121.305.819.039	126.548.822.788	130.868.524.318	136.106.793.196	137.860.734.934
	ROA BUMD (%)	5,95	6,04	6,05	6,51	6,56
5	<b>Perumda Owabong</b>					
	Laba Bersih (Rp)	-7.657.214.189	-865.077.864	4.451.055.082	2.598.163.224	3.600.847.205
	Total Aset (Rp)	75.502.791.486	75.390.784.616	83.036.800.202	86.892.804.537	89.859.684.405
	ROA BUMD (%)	-10,14	-1,15	5,36	2,99	4,01
6	<b>Perumda Puspahastama</b>					
	Laba Bersih (Rp)	2.731.896.758	1.677.418.300	-14.600.954.806	-638.108.755	-81.006.607
	Total Aset (Rp)	7.656.532.558	11.777.153.416	5.063.764.139	4.734.601.334	4.501.234.578
	ROA BUMD (%)	35,68	14,24	-288,34	-13,48	-1,80
7	<b>Agregat laba bersih seluruh BUMD</b>					
		21.745.908.323	29.389.797.357	22.538.476.043	35.759.491.359	33.665.951.321
	<b>Agregat aset seluruh BUMD</b>					
		912.226.078.169	979.703.845.503	1.071.424.797.406	1.163.900.669.170	1.175.129.674.404
	ROA BUMD (%)	2,38	3,00	2,10	3,07	2,86

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

## 6) Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perbankan di Kabupaten Purbalingga yang meliputi: PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda BPR Artha Perwira, Bank Jateng KC Purbalingga dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Purbalingga.

Total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio total DPK terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total DPK perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB semakin menurun. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan semakin menurun dimana kondisi tahun 2024 berada pada angka 4,75%.

**Tabel II.145. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Dana Pihak Ketiga	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Dana Pihak Ketiga	rupiah	1.377.168.913.678	1.508.333.669.664	1.440.260.190.179	1.484.633.334.984	1.550.133.677.246
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	5,62	5,49	5,71	5,00	4,75

Sumber: OJK Purwokerto, Bag. Perekonomian Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025 (diolah)

### 7) Total Kredit Terhadap PDRB

Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Total kredit terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu 5 tahun, perbandingan total kredit perbankan di Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan PDRB meningkat dengan laju yang kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha usaha dalam perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Kondisi pada tahun 2024 total kredit /PDRB berada pada angka 6,13%.

**Tabel II.146. Total Kredit/PDRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Kredit	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kredit	rupiah	1.526.400.536.141	1.578.236.607.984	1.658.220.968.171	1.794.699.005.913	1.949.019.390.417
2	PDRB ADHB	rupiah	25.081.590.000.000	26.393.810.000.000	28.820.820.000.000	31.224.550.000.000	33.357.330.000.000
3	Total Kredit/PDRB	%	6,34	6,34	6,29	6,29	6,13

Sumber: OJK Purwokerto, 2023-2024 (diolah)

## B. Sekretariat Dewan

### 1) Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD adalah ukuran yang mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Indeks ini diperoleh melalui survei atau pengukuran pendapat anggota DPRD mengenai berbagai aspek pelayanan Sekretariat DPRD. Secara rinci hasil penilaian Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.147. Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024**

No.	Tahun	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	
		Nilai	Kategori
1	2022	78,81	Puas

No.	Tahun	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	
		Nilai	Kategori
2	2023	79,42	Puas
3	2024	80,03	Puas

Sumber: Setwan Kab. Purbalingga, 2023-2025

### 2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

#### 1) Angka Konflik Sosial

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka konflik sosial di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dari 0,12 per 10.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 0,01 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Potensi konflik yang masih terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu adanya penggunaan alat berat pada pertambangan galian C yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar pertambangan seperti rusaknya akses jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil tambang. Potensi konflik di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut.

Tabel II.148. Potensi Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	potensi	12	7	41	71	76
2	Jumlah Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	laporan	0	0	39	66	75
3	Persentase Potensi Konflik yang diredam tidak menjadi konflik	%	0	0	95,12	92,96	98,68
4	Jumlah Konflik Sosial	konflik	12	7	2	5	1
5	Angka Konflik Sosial	per 10.000 penduduk	0,12	0,07	0,02	0,05	0,01

Sumber : Bakesbangpol Kab. Purbalingga, 2021-2025

### 2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan dan 15 kelurahan. Untuk menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kecamatan, penilaian SAKIP Kecamatan dimulai pada tahun 2022. Pada tahun 2022 rata-rata nilai SAKIP Kecamatan berada pada angka 55,15 persen kemudian berangsur-angsur naik menjadi 64,08 persen di tahun 2024. Secara rinci hasil penilaian SAKIP yang dilaksanakan di 18 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.149. Hasil SAKIP Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Tahun			Komponen Penilaian Tahun 2024			
		2022	2023	2024	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal
1	Kecamatan Karangjambu	55,46	56,01	61,86	19,50	17,1	9,75	15,50
2	Kecamatan Bobotsari	56,66	64,56	65,76	19,50	19,50	10,50	16,25
3	Kecamatan Kalimanah	54,26	61,36	62,56	21,00	18,6	9,45	13,50

No	Kecamatan	Tahun			Komponen Penilaian Tahun 2024			
		2022	2023	2024	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal
4	Kecamatan Mrebet	54,56	62,21	60,51	19,50	16,20	9,30	15,50
5	Kecamatan Kutasari	55,76	63,96	64,86	19,50	18,60	10,50	16,25
6	Kecamatan Kaligondang	55,76	60,26	60,76	19,50	16,50	9,75	15,00
7	Kecamatan Kemangkon	57,16	62,61	65,21	20,10	18,60	9,75	16,75
8	Kecamatan Bukateja	51,26	61,71	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
9	Kecamatan Karangmoncol	55,76	60,76	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
10	Kecamatan Karanganyar	55,06	62,41	64,71	20,10	18,60	10,50	15,50
11	Kecamatan Karangreja	50,66	52,06	63,11	19,50	17,10	9,75	16,75
12	Kecamatan Padamara	57,91	65,26	66,86	21,00	18,60	9,75	17,50
13	Kecamatan Purbalingga	57,21	60,06	64,86	21,00	18,60	9,75	15,50
14	Kecamatan Kejobong	55,01	61,96	64,26	21,00	17,7	9,30	16,25
15	Kecamatan Kertanegara	55,51	61,06	63,16	21,00	18,60	9,30	14,25
16	Kecamatan Pengadegan	55,61	62,11	64,71	21,00	18,60	8,85	16,25
17	Kecamatan Rembang	57,01	61,81	63,36	19,50	18,60	9,75	15,50
18	Kecamatan Bojongsari	52,06	62,46	65,61	21,00	18,60	9,75	16,25
<b>Rata-Rata Nilai</b>		<b>55,15</b>	<b>61,26</b>	<b>64,08</b>				

Sumber : Setda Bagian Organisasi Kab. Purbalingga, 2023-2025

Disamping SAKIP, di wilayah kecamatan juga dilakukan evaluasi pelayanan publik untuk menilai efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu: kondisi fisik, proses pelayanan publik, ketersediaan SDM, ketersediaan informasi dan database, serta partisipasi pemohon. Hasil penilaian evaluasi pelayanan public kecamatan diklasifikasikan ke dalam 4 kriteria yaitu level A (Amat Baik), B (Baik), C (Cukup) sampai D (Kurang). Secara rinci hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan di 18 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.150. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024**

No	Kecamatan	Tahun			Predikat Penilaian 2024
		2022	2023	2024	
1	Kecamatan Kemangkon	3,7	3,28	2,62	C
2	Kecamatan Bukateja	4,3	3,48	4,82	A
3	Kecamatan Bobotsari	4,3	3,28	4,9	A
4	Kecamatan Bojongsari	4,1	3,43	4,88	A
5	Kecamatan Kaligondang	4,1	3,20	4,35	A
6	Kecamatan Kalimanah	3,8	3,35	4,73	A
7	Kecamatan Karanganyar	4,8	3,93	4,65	A
8	Kecamatan Karangjambu	4,2	3,23	4,55	A
9	Kecamatan Karangmoncol	4,7	3,23	4,1	A
10	Kecamatan Karangreja	4,8	3,23	4,5	A
11	Kecamatan Kejobong	4,1	3,30	4,5	A
12	Kecamatan Kertanegara	4,5	3,28	4,85	A
13	Kecamatan Kutasari	3	3,50	4,9	A
14	Kecamatan Mrebet	4,5	3,20	4,4	A
15	Kecamatan Padamara	4,3	3,30	4,65	A
16	Kecamatan Pengadegan	3,6	3,18	3,8	B
17	Kecamatan Purbalingga	3,1	3,55	5	A
18	Kecamatan Rembang	3,8	3,25	3,9	B

Sumber : Setda Bagian Pemerintahan, 2023-2025

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah lebih besar dari 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia untuk Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung stabil, dengan persentase pengeluaran pada kelompok 40 % penduduk terendah selalu lebih besar dari 17 % sehingga menunjukkan ketimpangan rendah.



*Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024*

**Gambar 2. 63. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 – 2024**

#### B. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tercatat sebesar 1.011.402 rupiah. Dilihat dari rincian pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk makanan. Namun di tahun 2022 sampai dengan 2024 terjadi pergantian dimana pengeluaran penduduk untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk

selain makanan. Pengeluaran makanan terbesar yaitu berupa makanan dan minuman, sedangkan pengeluaran bukan makanan terbesar yaitu berupa perumahan dan fasilitas rumah tangga yang saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel II.151. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

Jenis Pengeluaran	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	rupiah	430.508	429.554	456.412	520.108	553.676
Bukan Makanan	rupiah	459.326	470.547	413.194	495.726	457.726
Jumlah		889.834	900.102	869.606	1.015.834	1.011.402

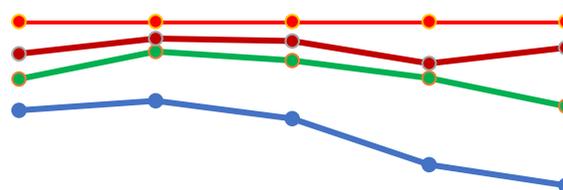
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021-2025

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### A. Jaringan Jalan

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur. Sedangkan panjang jalan dilihat dari kondisinya, dari keseluruhan panjang jalan 952.602 km sebagian besar jalan mempunyai kondisi jalan baik, namun masih ada beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang memerlukan penanganan ke depannya.

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan



	2020	2021	2022	2023	2024
<span style="color:red">●</span> Rusak Berat	107,294	56,739	64,977	149,271	93,290
<span style="color:darkred">●</span> Rusak	83,673	43,015	64,704	52,410	207,914
<span style="color:green">●</span> Sedang	103,243	163,167	191,728	306,940	280,942
<span style="color:blue">●</span> Baik	593,877	625,166	566,679	443,981	370,456

Sumber : DPUPR Kab.Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 64. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## B. Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman

Sistem jaringan transportasi udara yang ada di Kabupaten Purbalingga didukung dengan adanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon. Keberadaan Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari kabupaten sekitar seperti Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Pemalang dan Kebumen. Saat ini, Bandara JBS juga digunakan untuk penerbangan komersil dan feeder umroh. Keterpaduan antar moda dalam jaringan aksesibilitas di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif ke depannya.

Manfaat dengan keberadaan bandara JB Soedirman yaitu kemudahan transportasi melalui jalur udara. Pemanfaatan Bandara JB Soedirman juga dapat digunakan sebagai akses transportasi udara ke Ibukota Nusantara (IKN) khususnya untuk memfasilitasi wilayah barat selatan Provinsi Jawa Tengah. IKN akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga hal tersebut perlu dimanfaatkan Kabupaten Purbalingga untuk pengembangan sektor jasa transportasi dan jasa lainnya (perdagangan, wisata, pendidikan, dll) untuk menyebarkan manfaat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan transportasi dengan konektivitas yang baik untuk peningkatan arus perdagangan dan jasa.



Gambar 2. 65. Potensi Kewilayahan Kabupaten Purbalingga

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### A. Kemudahan Perizinan

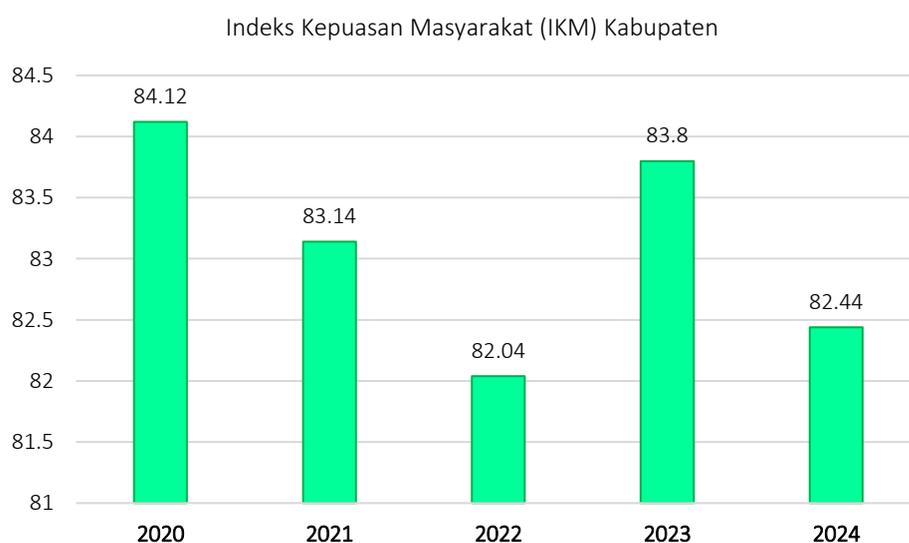
Kemudahan perizinan dalam berinvestasi di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan lama waktu perizinan investasi di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu (PTSP) melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) serta layanan perizinan secara online dalam *One Stop Service* (OSS). Perkembangan rata-rata lama waktu perizinan investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.152. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	poin	82,50	87,08	96,04	86,62	95,209
2	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	poin	NA	3,9	4,51	4,51	4,5

Sumber: DPMPTSP Kab.Purbalingga, 2021-2025

Nilai IKM Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. IKM tersebut mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di tingkat kabupaten dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



Sumber : Setda Kab. Purbalingga, 2021-2025

**Gambar 2. 66. Nilai IKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Rasio ketergantungan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yaitu sebesar 46,56 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 46 orang penduduk tidak produktif. Sedangkan untuk angka rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dan penurunan. Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2020-2024

**Gambar 2. 67. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024**

## 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mengukur kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 didasarkan pada ketercapaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 maupun RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator tahun 2024 dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut. Dari hasil capaian kinerja indikator tersebut, status capaiannya dikategorikan menjadi 3 *range* yaitu: tercapai, akan tercapai dan tidak tercapai, dengan kategori sebagai berikut:

- ◆ : **Tercapai**, capaian telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (predikat **sangat tinggi** ( $91 \leq 100$ ))
- : **Tercapai**, capaian telah memenuhi target berada pada persyaratan minimal (predikat kinerja **tinggi** ( $76 \leq 90$ ))
- ▶ : **Akan Tercapai**, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (predikat kinerja **sedang** ( $66 \leq 75$ ))
- ▼ : **Tidak Tercapai**, belum memenuhi/ masih berada di bawah persyaratan minimal (predikat kinerja **rendah** ( $51 \leq 65$ ) dan **sangat rendah** ( $\leq 50$ ))

### 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Realisasi RPJMD

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan menyusun laporan kinerja. IKU tersebut mengacu pada indikator kinerja strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah. Secara rinci capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga per misi yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.131.**  
**Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No.	Misi	IKU	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026			Koordinator Penyedia Data
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD	
1	Misi 1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	66,20	75	81,96	109,28	◆	80	102,45	◆	Sekretariat Daerah
2		Nilai SAKIP	Angka	67,02	70	68,10	97,29	◆	80	85,13	●	Sekretariat Daerah
3	Misi 2	Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,87	1,44	0,78	183,51	◆	1,36	173,32	◆	Satpol PP / Kesbangpol
4		Angka Konflik Sosial	per 10.000 penduduk	0,05	0,08	0,02	423,10	◆	0,06	317,33	◆	Kesbangpol
5		Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,82	1,47	0,77	191,96	◆	1,40	182,82	◆	Satpol PP
6	Misi 3	Angka Kemiskinan	Persen	14,99	13,5-14,5	14,18	95,20	◆	11,5-12,5	81,10	●	DKPP , Dinrumkim, DinsosdaldukKBP3A

No.	Misi	IKU	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026			Koordinator Penyedia Data
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD	
7		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	78,05	82,70	78,47	94,89	◆	84,30	93,08	◆	DKPP
8		Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	96,00	93,26	96,52	103,50	◆	94,07	102,61	◆	Dinrumkim
9		Cakupan Sanitasi Layak	Persen	94,03	92,62	95,37	102,97	◆	92,87	102,70	◆	Dinrumkim
10		Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh	Persen	99,12	99,32	98,55	99,22	◆	99,59	98,96	◆	Dinrumkim
11		Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	92,34	84,03	93,81	111,63	◆	87,50	177,60	◆	DinsosdaldukKBP3A
12	Misi 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,51	70,16	70,97	101,15	◆	70,76	100,30	◆	Dindikbud, Dinkes, DinsosdaldukKBP3A
13		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,51	93,58	93,74	99,93	◆	95	98,43	◆	Dindikbud, Dinkes, DinsosdaldukKBP3A
14		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,25	12,03	98,20	◆	12,50	96,24	◆	Dindikbud
15		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,98	73,4	74,19	101,08	◆	73,5	100,94	◆	Dinkes
16		Kabupaten Layak Anak	Nilai	621,35	660	732,65 *	111,01	◆	760	96,40	◆	DinsosdaldukKBP3A
17	Misi 5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,51	5 - 6	4,55	75,83	▶	6 - 7	65,00	▼	Bappelitbangda, BPS
18		Nilai PDRB per kapita	Rupiah /jiwa	30.390.000	28.257.647	32.090.000	113,56	◆	31.480.622	101,94	◆	Bappelitbangda, BPS
19		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,61	< 5	4,96	100,81	◆	< 5	100,81	◆	Dinnaker, BPS
20	Misi 6	Indeks Desa Membangun	Angka	0,7784	0,79	0,7901	100,01	◆	0,85	92,95	◆	Dinpermasdes
21		Persentase Desa dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju	Persen	89,29	47,32	95,09	200,95	◆	52,68	180,50	◆	Dinpermasdes
22	Misi 7	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	77,22	81,75	69,19	84,64	●	83,250	83,11	●	DPU-PR
23		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,87	67,64	67,10	99,20	◆	68,07	98,57	◆	DLH

No.	Misi	IKU	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026			Koordinator Penyedia Data
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD	
24		Indeks Jalan Mantap	Angka	78,83	83,8	68,38	81,60	●	86,7	78,87	●	DPU-PR
25		Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	75,61	97,5	70,00	71,79	▶	100	70,00	▶	DPU-PR
26		Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	Persen	72	74	73	98,65	◆	78	93,59	◆	DPU-PR
27		Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	95,29	90	94,49	104,98	◆	91,5	103,26	◆	DPU-PR

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Dari keseluruhan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga di atas, sebagian besar tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah tercapai dengan baik, dimana sebanyak 92,59 persen indikator sudah tercapai. Namun, masih ada 2 indikator tujuan dan sasaran yang perlu mendapat perhatian untuk ke depannya yaitu: Pertumbuhan Ekonomi dan Ratio Konektivitas Angkutan Jalan. Rekapitulasi capaian IKU Pemerintah Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.132.**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Capaian Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tercapai (Sangat Tinggi, $91 \leq 100$ )	23	85,19 %
2	Tercapai (Tinggi, $76 \leq 90$ )	2	7,41 %
3	Akan Tercapai (Sedang, $66 \leq 75$ )	2	7,41 %
4	Tidak Tercapai (Rendah, $51 \leq 65$ ) dan Sangat Rendah ( $\leq 50$ )	0	0 %
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>100 %</b>

### 2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Realisasi RPJMD

IKU Perangkat Daerah menjelaskan indikator yang menjadi tujuan dan sasaran dari perangkat daerah. Secara rinci capaian IKU Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

Tabel II.133.

## Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,02	12,25	12,03	98,20	◆	12,5	96,24	◆
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Dikdas (SD)	Angka	94,02	99,8	100,43	100,63	◆	99,9	100,53	◆
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Dikdas (SMP)	Angka	82,57	96,27	94,35	98,01	◆	97,27	97,00	◆
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	85,19	92	80,66	87,67	●	100	80,66	●
		Rata-rata Nilai Literasi pada Rapot Pendidikan SD	Skor	71,01	72,14	68,77	95,33	●	72,14	95,33	◆
		Rata-rata Nilai Literasi pada Rapot Pendidikan SMP	Skor	80,07	82,05	77,92	94,97	◆	82,05	94,97	◆
		Rata-rata Nilai Numerasi pada Rapot Pendidikan SD	Skor	50,53	58,03	57,68	99,40	●	58,03	99,40	◆
		Rata-rata Nilai Numerasi pada Rapot Pendidikan SMP	Skor	57,64	58,5	67,15	114,79	◆	58,5	114,79	◆
		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (UU No 5 Pasal 5 10 OPK Tahun 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010)	Persen	72,73	72,73	72,73	100	◆	81,8	88,91	●
		Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup no.430/400 Tahun 2018 yang Dilestarikan atau Dikembangkan	Persen	70	70	70	100	◆	80	87,50	●
		Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	19,14	15	18,83	94,16	◆	15	125,54	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		37	37	100	◆	37	100	◆
Nilai SAKIP Dindikbud	Indeks		73,91	71,01	74,01	104,22	◆	72,01	102,78	◆	
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,98	73,4	74,19	101,08	◆	73,5	100,94	◆
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	102,44	67,57	95,28	70,92	▶	67,57	70,92	▶
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	14,03	7,57	13,25	57,10	▼	7,43	56,08	▼

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	16,63	9,05	15,76	57,43	▼	8,92	56,58	▼
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,44	0,19	0,62	326,32	◆	0,21	295,24	◆
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5.000 penduduk		1,5	1,64	109,54	◆	1,5	109,54	◆
		Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Per 100.000 penduduk		337,9	350,51	103,73	◆	337,9	103,73	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		39	40	102,56	◆	39	102,56	◆
		Nilai SAKIP Dinkes	Indeks	73,51	73,50	73,81	100,42	◆	74,50	99,07	◆
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Jalan Mantap	Persen	78,83	83,8	68,38	81,60	●	86,7	78,87	●
		Persentase Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Persen	78,83	83,8	68,38	81,60	●	86,7	78,87	●
		Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	Persen	72	74	73	98,65	◆	78	93,59	◆
		Cakupan Daerah Irigasi yang Terlayani	Persen	72,00	74	73	98,65	◆	78	93,59	◆
		Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	51	60	52,35	87,25	●	65	80,54	●
		Persentase Peningkatan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	1	2	1,34	67,11	▶	3	44,74	▼
		Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	95,29	90	94,49	104,98	◆	91,5	103,26	◆
		Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	Persen	95,29	90	94,49	104,98	◆	91,5	103,26	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		39	38	97,44	◆	39	97,44	◆
		Nilai SAKIP DPU-PR	Indeks	71,36	71,81	73,06	101,74	◆	73,01	100,07	◆
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Cakupan Akses Air Minum Layak	Persen	96,00	93,26	96,52	103,50	◆	94,07	102,61	◆
		Persentase Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum	Persen	1,25	0,40	0,52	129,75	◆	0,40	129,75	◆
		Cakupan Sanitasi Layak	Persen	94,03	92,62	95,37	102,97	◆	92,87	102,70	◆
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga Mengakses Sanitasi	Persen	0,44	0,12	1,35	1109,56	◆	0,12	1109,56	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
		Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	99,12	99,32	99,38	100,06	◆	99,59	99,79	◆
		Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	Persen	0,15	0,13	0,26	193,10	◆	0,13	193,10	◆
		Cakupan Pemanfaatan Tanah Pemda	Persen	95,55	93,00	95,55	102,74	◆	93,55	102,14	◆
		Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu	Persen	53,85	100	100	100,00	◆	100	100,00	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		42	41	97,62	◆	42	97,62	◆
		Nilai SAKIP DINRUMKIM	Indeks	73,01	69,88	73,06	104,55	◆	70,88	103,08	◆
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Angka	17,10	21,9	3,4	633,36	◆	20,44	601,57	◆
		Angka Pelanggaran Trantibum	Per 10.000 penduduk	21,30	78,18	17,91	436,61	◆	73,69	411,56	◆
		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	65,17	43,33	75,00	173,08	◆	46,67	160,71	◆
		Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	◆	100,00	100,00	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		39	38	97,44	◆	39	97,44	◆
		Nilai SAKIP Satpol PP	Indeks	73,01	70	73,06	104,37	◆	72	101,47	◆
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	130,82	132,5	120,19	90,71	●	132,5	90,71	●
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,71	0,54	0,54	100,00	◆	0,56	96,43	◆
		Persentase Peningkatan IKD	Persen	0,18	1,89	-0,17	-9,01	▼	1,82	-9,35	▼
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		41	39	95,12	◆	41	95,12	◆
		Nilai SAKIP BPBD	Indeks	70,76	71	71,11	100,15	◆	71	100,15	◆
7	Dinas Sosial, Pengendalian	Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	92,34	84,03	93,81	111,63	◆	87,50	107,21	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
	Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	9,99	10,00	3,55	35,50	▼	10,00	35,50	▼
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,21	1,53	1,03	148,55	◆	1,51	146,61	◆
		Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,03	2,01	2,10	104,48	◆	2,01	104,48	◆
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,94	70,31	76,97	109,47	◆	70,33	109,44	◆
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Point	621,35	660	732,65 *	111,01	◆	760	96,40	◆
		Cakupan OPD yang Melaksanakan Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	86,21	55,17	100	181,25	◆	68,97	145,00	◆
		Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
		Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		40	40	100	◆	40	100	◆
		Nilai SAKIP Dinsosdaldukbpb3a	Indeks	73,01	69,92	73,06	104,49	◆	70,92	103,02	◆
8	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	94,39	95	95,04	99,52	◆	96	99,00	◆
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Orang	4023	6885	6984	91,29	◆	8320	83,94	●
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	Orang		340	1476	434,12	◆	73,47	434,12	◆
		Persentase Angka Perselisihan yang Terselesaikan	Persen		100	100	100,00	◆	94,76	100,00	◆
		Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Persen		85,3	88,37	103,59	◆	70,22	103,59	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		46	45	97,83	◆	46	97,83	◆
		Nilai SAKIP Dinnaker	Indeks	73,46	70,52	73,61	104,38	◆	71,12	103,50	◆
9		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	78,05	82,7	78,47	94,89	◆	84,3	93,08	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026			
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Skor PPH Konsumsi	Angka	90,70	88,1	90,3	102,50	◆	89,2	101,23	◆	
		PDRB sektor perikanan	Rupiah	473.920.780.000	455.000.000.000	532.440.000.000	117,02	◆	475.000.000.000	112,09	◆	
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap, Hias, Budidaya dan Pengolahan	Rupiah	306.642.970.000	311.863.013.400	355.522.255.217	114,00	◆	324.505.130.000	109,56	◆	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		38	38	100	◆	38	100	◆	
		Nilai SAKIP DKPP	Indeks		63,96	68,68	69,41	101,06	◆	70,08	99,04	◆
		10	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat Kualitas Air dan Udara	Angka	57,23	53,08	57,55	108,43	◆	53,46	107,65
		Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara	Persen	0,08	0,36	0,32	88,91	●	0,36	89,55	●	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	9,64	14,56	9,55	65,61	▼	14,61	65,39	▼	
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,29	5,682	4,296	75,60	►	5,684	75,58	►	
		Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	36,18	36,28	38,06	104,91	◆	36,48	104,33	◆	
		Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	14,33	14,33	15,59	108,79	◆	14,33	108,79	◆	
		Cakupan Penanganan Sampah	Persen	21,85	21,95	22,47	102,38	◆	22,15	101,45	◆	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		41	42	102,44	◆	41	102,44	◆	
		Nilai SAKIP DLH	Indeks	73,01	70,85	73,36	103,54	◆	71,85	102,10	◆	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	91,62	89,92	93,16	103,60	◆	93,58	99,56	◆	
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	82,65	86,35	87,10	100,88	◆	93,03	93,63	◆	
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,59	93,50	99,22	106,12	◆	94,13	105,42	◆	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		47	43	91,49	◆	47	91,49	◆	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	87,38	87,5	89,64	102,45	◆	87,5	102,45	◆	
		Nilai SAKIP DINDUKCAPIL	Indeks	72,41	70	73,36	104,80	◆	71	103,32	◆	

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan Kategori Desa Mandiri dan Maju	Persen	89,29	47,32	95,09	200,94	◆	52,68	180,51	◆
		Jumlah Desa Naik Statusnya	Angka	156	7	33	471,43	◆	7	471,43	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		39	37	94,87	◆	39	94,87	◆
		Nilai SAKIP DINPERMASDES	Indeks	74,11	67,89	74,26	109,38		67,95	109,29	◆
13	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	75,61	97,5	70,00	71,79	▶	100	70,00	▶
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	41,51	44,64	55,38	124,05	◆	46,18	119,91	◆
		Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	Persen	75,02	76,93	73,44	95,46	◆	82,01	89,55	●
		Persentase Angkutan Umum yang Aktif	Persen	70,00	71,02	52,28	73,62	▶	71,02	73,62	▶
		V/C Rasio Jalan Kabupaten	Nilai	0,31	0,31	0,45	68,89	▶	0,31	68,89	▶
		Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif	Persen	75,61	50	52,28	104,57	◆	50	104,57	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		40	39	97,50	◆	40	97,50	◆
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	Angka	85,72	86	88,91	103,38	◆	86	103,38	◆
		Nilai SAKIP DINHUB	Indeks	73,01	69,95	73,06	104,45	◆	71,15	102,68	◆
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Point	3,83	3,05	3,93	128,85	◆	3,06	98,40	◆
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	92,95	97,25	96,19	98,91	◆	97,75	166,67	◆
		Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Daerah	Persen	100	45	100	222,22	◆	60	83,28	●
		Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	55,19	65	58,29	89,68	●	70	84,68	●
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	84,68	100	84,679	84,68	●	100	102,33	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		43	44	102,33	◆	43	102,47	◆
		Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	72,76	69,22	72,16	104,25	◆	70,42	98,40	◆
15		Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas	Persen	6,75	6,50	6,63	101,88	◆	8,13	81,51	●

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Sehat	Persen	64,42	58,44	64,46	110,30	◆	60,08	107,29	◆
		Kontribusi UMKM terhadap Total PDRB	Persen	64,25	64,48	65,69	101,88	◆	64,94	101,15	◆
		Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	UKM	36	30	40	133,33	◆	34	117,65	◆
		Jumlah Wirausaha Baru	UKM		37	40	108,11		37	108,11	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		40	39	97,50	◆	40	97,50	◆
		Nilai SAKIP DINKOP UKM	Nilai	73,01	70,03	73,11	104,40	◆	70,63	103,51	◆
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	2,36	10,38	-34,78	-335,04	▼	9,79	-10,21	▼
		Nilai Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	1535,02	1000	1001,18	100,12	◆	1200	83,43	▼
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		45	44	97,78	◆	45	97,78	◆
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	Angka		96,65	95,51	98,82	◆	96,65	98,82	◆
		Nilai SAKIP DPMPSTP	Nilai	74,56	71,37	74,61	104,54	◆	71,4	104,50	◆
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	Angka	18	8	22	275,00	◆	10	220,00	◆
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	53,85	66,7	73,08	109,62	◆	75,0	97,44	◆
		Tingkat Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Atlet	441	350	360	102,86	◆	350	102,86	◆
		Persentase Pemuda Berprestasi dalam Berbagai Sektor di Tingkat Nasional dan Provinsi	Persen		69	68,75	99,64	◆	69	99,64	◆
		Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Angka	171	16	120	750,00	◆	16	750,00	◆
		Persentase Partisipasi Atlet dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Persen		30,17	30,18	100,02	◆	30,17	100,02	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
		Persentase Atlet yang Berprestasi/Mendapat Prestasi dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Persen		33,33	33,33	100,01	◆	33,33	100,01	◆
		Nilai PDRB Bidang Pariwisata	Rupiah (juta)	731.582,77	579.912,61	873.130	150,56	◆	651.589,80	134	◆
		Angka Kunjungan Wisata	Orang	2.593.497	2.350.000	2.876.550	122,41	◆	3.000.000	95,89	◆
		Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	Persen		10,9	10,91	100,13	◆	10,9	100,13	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		40	38	95,00	◆	40	95,00	◆
		Nilai SAKIP Dinporapar	Indeks	72,71	71,97	73,36	101,93	◆	72,97	100,53	◆
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Point	84,09	78	85,23	109,27	◆	80	106,54	◆
		Kenaikan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	100	65	100	153,85	◆	67	149,25	◆
		Persentase Unit Kearsipan yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen		70	70,67	100,96	◆		100,96	◆
		Indeks Pembangunan Literasi	Point	12,02	13	14,76	113,54	◆	15	98,40	◆
		Rasio Perpustakaan Aktif per 10.000 Penduduk	Persen	4,59	4,6	4,95	107,92	◆	5,61	88,30	●
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		42	41	97,62	◆	42	97,62	◆
		Nilai SAKIP DINARPUS	Indeks	73,01	68,97	73,11	106,00	◆	70,37	103,89	◆
19	Dinas Pertanian	PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Rupiah	7.197.885.000	6.988.400.790	7.747.270.000	110,86	◆	7.320.772.390	105,83	◆
		Nilai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Rupiah	3.490.087.768	2.760.655.875.000	3.522.750.475.282	127,61	◆	2.850.242.905.000	123,59	◆
		Nilai Kenaikan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	Rupiah		3.493.577.855.000	3.522.750.475.282	100,84	◆	3.493.577.855.000	100,84	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		39	38	97,44	◆	39	97,44	◆
		Nilai SAKIP DINPERTAN	Indeks	72,11	69,35	72,16	104,05	◆	69,45	103,90	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	5,10	5	4,25	85,00	●	6	70,83	▶
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Rp. (juta)	8.832.360	8.291.414	9.430.940	113,74	◆	9.272.289	101,71	◆
		Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Persen		28,49	28,27	99,23	◆	28,49	99,23	◆
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	Persen	5,37	4,5	5,35	118,89	◆	5,5	97,27	◆
		Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rp. (juta)	3.934.080	3.642.845	4.218.880	115,81	◆	4.035.362	104,55	◆
		Persentase Kenaikan Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	5,10	12,7	12,65	99,61	◆	12,7	99,61	◆
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	72,12	75	65,89	87,85	●	75	87,85	●
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		42	44	104,76	◆	42	104,76	◆
		Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	73,01	68,57	73,06	106,55	◆	69,17	105,62	◆
21	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP (KABUPATEN)	Indeks	67,02	70	68,10	97,29	◆	80	85,13	●
		Rata-rata nilai SAKIP OPD	Indeks	68,37	75	68,61	91,47	◆	80	85,76	●
		Nilai SAKIP SETDA	Indeks	74,96	75,5	75,06	99,42	◆	75,5	99,42	◆
		Rata-rata Capaian Kinerja Utama OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesra	Persen	147,78	100	93,72	93,72	◆	100	93,72	◆
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Indeks	3,1592	3,2224	3,3075	102,64	◆	3,2224	102,64	◆
		Rata-rata Capaian Kinerja Utama OPD Rumpun Ekonomi dan Pembangunan	Persen	104,76	100	105	105	◆	100	105	◆
22	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Point	79,42	78	80,03	102,60	◆	80	100,04	◆
		Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	99,17	100	99,52	99,52	◆	100	99,52	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		38	38	100	◆	38	100,00	◆
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	72,11	70	61,11	87,30	●	74	82,58	●
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor Komponen Perencanaan	Persen	22,43	23	22,84	99,30	◆	25	91,36	◆
		Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Persen	98,74	97,29	98,74	101,49	◆	99	99,41	◆
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	97,58	76,9	67	86,67	●	78,6	84,85	●
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		48	47	97,92	◆	48	97,92	◆
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	Indeks	76,31	78	76,36	97,90	◆	82	93,12	◆
24	Badan Keuangan Daerah	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Level	WTP	WTP	WTP	100	◆	WTP	100	◆
		Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
		Persentase kenaikan PAD	Persen	11,39	2	3,62	180,79	◆	2	180,79	◆
		Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		45	44	97,78	◆	45	97,78	◆
		Nilai SAKIP BAKEUDA	Indeks	76,91	71,27	76,96	107,98	◆	72,27	106,49	◆
25	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Point	73,83	80	79,38	99,23	◆	82	96,80	◆
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Point	0,63	0,42	0,63	150,00	◆	0,61	103,28	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		44	43	97,73	◆	44	97,73	◆
		Nilai SAKIP BKPSDM	Indeks	75,86	69,32	76,21	109,94	◆	70,01	108,86	◆
26		Nilai Maturitas SPIP	Skala	2,8620	3,0800	3,067	99,58	◆	3,1000	98,94	◆

No.	Perangkat Daerah	IKU OPD	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
					Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
Inspektorat Daerah		Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	93,44	86,25	93,73	108,67	◆	86,38	108,51	◆
		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,04	3,06	3	98,04	◆	3,06	98,04	◆
		Nilai IEPK	Persen	2,685	2,7	2,910	107,78	◆	2,7	107,78	◆
		Presentase Tertanganinya Pengaduan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi	Persen	100	100	100	100	◆	100	100,00	◆
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai		49	53	108,16	◆	49	108,16	◆
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Indeks	76,31	80	76,96	96,20	◆	87	88,46	●
		27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Potensi Konflik yang Diredam Tidak Menjadi Konflik	Persen	92,96	95	97,37	102,49	◆	95
Jumlah Potensi Konflik yang Dilaporkan	Potensi	71		60	76	78,95	●	30	39,47	▼	
Cakupan Pencegahan/Tangkal Dini Konflik	Persen	1,56		31,9	25,81	80,91	●	31,9	80,91	●	
Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	Persen	0		75	80,80	107,73	◆	0	0	▼	
Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	0,60		0,32	3,58	1117,97	◆	0,32	1117,97	◆	
Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	0,13		0,2	0,37	186,02	◆	0,2	186,02	◆	
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai			43	43	100	◆	43	100	◆	
Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Indeks	73,01		69	73,06	105,88	◆	72	101,47	◆	
28	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,44	88	98,31	111,72	◆	90	109,24	◆
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Angka	94,44	88	98,31	111,72	◆	90	109,24	◆	
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		Nilai		34	33	97,06	◆	34	97,06	◆	
Nilai SAKIP Kecamatan		Indeks	64,72	66-67,99	67,67	102,53	◆	>70	96,67	◆	

Dari keseluruhan 199 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah di atas, rekapitulasi capaian IKU Perangkat Daerah juga tercapai cukup baik dimana dari 199 indikator sebanyak 93,97 persen sudah tercapai. Namun, masih terdapat 6 indikator yang tidak tercapai meliputi:

- 1) Angka Kematian Bayi
- 2) Angka Kematian Balita
- 3) Persentase Peningkatan IKD (Indeks Ketahanan Daerah)
- 4) Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri
- 5) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- 6) Pertumbuhan Nilai Investasi

Secara rinci rekapitulasi capaian IKU Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.134.**

**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Capaian Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tercapai (Sangat Tinggi, $91 \leq 100$ )	173	86,93 %
2	Tercapai (Tinggi, $76 \leq 90$ )	14	7,04 %
3	Akan Tercapai (Sedang, $66 \leq 75$ )	6	3,02 %
4	Tidak Tercapai (Rendah, $51 \leq 65$ ) dan Sangat Rendah ( $\leq 50$ )	6	3,02 %
<b>Total</b>		<b>199</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil Analisis, 2024*

### 2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Program RKPD dan Realisasi RPJMD

Pada dasarnya pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga harus sesuai dan selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Untuk mengukur kinerja program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

#### 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.135.  
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>										
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	93,63	99,8	100,43	100,63	◆	99,9	100,53	◆
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	80,20	96,27	94,35	98,01	◆	97,27	97,00	◆
9	APM PAUD	persen	56,90	80	56,08	70,10	▶	84	66,77	▶
10	Presentase PKBM yang terakreditasi	persen	50	77,78	94,12	121,01	◆	100	94,12	◆
<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>										
11	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	persen	16,26	12,5	30,66	40,77	▼	8,27	26,98	▼

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2024 di atas, terdapat 3 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 9 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak SD dan SMP yang belum memenuhi ideal 1 guru untuk 20 murid. Dari 470 SD yang ada di Kabupaten Purbalingga baru 131 yang mempunyai rasio guru ideal, sedangkan dari 78 SMP baru 37 yang mempunyai rasio guru ideal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemerataan jumlah guru di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

Hal tersebut tentu saja juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ke depannya untuk dapat mencukupi tenaga pendidik yang ada pada fasilitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan indikator yang akan tercapai yaitu APM PAUD yang baru mencapai 56,43 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang berusia 1-5 tahun belum memasuki sekolah PAUD formal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepeminatan, baik dikarenakan oleh kemampuan finansial maupun kepeminatan lain terhadap lembaga pendidikan PAUD non formal. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian lagi ke depannya karena pada jenjang PAUD menjadi tahap awal pendidikan anak yang dapat memberi rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk indikator lainnya seperti Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dan Presentase PKBM yang terakreditasi walaupun telah mencapai target namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya dikarenakan ketiga indikator tersebut merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Dasar dan Kesetaraan yang harus mencapai 100 persen.

**b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Capaian kinerja program berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.136.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
7	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
8	Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan minimal madya atau sederajat	persen	87,72	52,54	93,22	177,42	◆	55,93	166,67	◆
9	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 100.000	2,16	2,25 s.d 2,30	2,12	92,18	◆	2,30 s.d 2,35	94,23	◆
10	Prevalensi stunting (data EPPGM)	persen	11,58	14	11,34	123,46	◆	13,6	119,93	◆
11	Angka morbiditas	persen	18,78	18,1	21,31	84,94	●	17,1	80,24	●
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>										
12	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	100	66,67	100	150	◆	91,67	109,09	◆
<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>										
13	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	persen	95,71	54,55	96,23	176,42	◆	64,44	149,32	◆
14	Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persen	100	36,00	100	277,78	◆	40,00	250	◆
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>										
15	Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	persen	33,47	28,03	37,66	134,33	◆	30,13	124,98	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2024 di atas, terdapat 5 program dengan 15 indikator. Status capaian dari 15 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Walaupun telah mencapai target, beberapa indikator tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dan Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang naik dari tahun ke tahun, ketersediaan 22 puskesmas saat ini yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan akan sudah mencukupi untuk melayani kesehatan penduduk di faskes tingkat 1 ke depannya. Begitu pula dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar harus dapat dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi hal yang perlu dipertahankan dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Begitu pula dengan indikator prevalensi stunting (data EPPGM), dimana penanganan penurunan angka stunting saat ini menjadi hal prioritas dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan ibu hamil dan anak. Apalagi melihat perkembangan AKI, AKB, dan AKABA di Kabupaten Purbalingga yang cenderung naik, sehingga penanganan stunting menjadi hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya.

c) **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.137.**

**Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>										
7	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	52,54	48	48,14	100,30	◆	50	96,29	◆
8	Persentase bendung kondisi baik	persen	48	48,88	47,83	97,84	◆	49,5	96,62	◆
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>										
9	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	persen	1,25	1,39	0,57	41,01	▼	1,4	40,71	▼
<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>										
10	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	persen	3,12	2,5	NA	NA	NA	2,5	NA	NA
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>										
11	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	persen	0,44	1,44	1,34	93,06	◆	1,42	94,37	◆
<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>										
12	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	angka	33	60	78	130	◆	65	120	◆
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>										
13	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	persen	0	62	NA	NA	NA	65	NA	NA

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>										
14	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen	-6,57	1,3	-10,45	-803,85	▼	1,4	-746,43	▼
<b>Program Pengembangan Jasa Kontruksi</b>										
15	Persentase jasa konstruksi yang terbina	persen	100	70	69,23	98,90	◆	72	96,15	◆
<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>										
16	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan	3	5	3	60	▼	7	42,86	▼

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DPU-PR dan Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024 di atas, terdapat 10 program dengan 16 indikator. Status capaian dari 16 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 11 indikator telah tercapai, 2 indikator yang tidak tersedia data (karena tidak dilakukan di tahun 2024) dan 3 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n, Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang serta Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang. Terkait dengan akses air minum, secara umum capaiannya sudah baik karena sudah mencapai 96,52 persen, namun dibandingkan tahun 2023 kenaikannya hanya 0,52 persen sehingga peningkatannya tidak signifikan. Ketercapaian akses air minum merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga perlu tetap membutuhkan intervensi ke depannya yang harus mencapai 100 persen.

Disamping itu untuk kondisi jalan, kinerja penambahan panjang jalan mantap semakin menurun. Selain karena adanya penambahan panjang jalan dimana sebagian besar kondisinya belum baik/sedang, ketidaktercapaian terjadi karena penanganan jalan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Penanganan pemeliharaan rutin jalan tidak dapat memantapkan atau mempertahankan kondisi jalan karena sifatnya hanya tambal sulam. Penanganan tersebut dilakukan sesuai dengan prioritas anggaran yang ada. Diharapkan ada peningkatan terhadap penanganan jalan ke depannya, karena dengan metode yang saat ini dilaksanakan yaitu dengan survey PKRMS (*Provinsial/Kabupaten Road Management System*), akan dapat mempengaruhi perhitungan kemantapan jalan ke depannya. Kemudian untuk Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang, kondisi saat ini sudah terdapat 3 kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang yaitu RTRW Kabupaten Purbalingga, RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Bobotsari. Kedua RDTR tersebut menjadi amanah dalam RTRW, sedangkan kawasan lainnya (PPK dan PPL) tidak diharuskan RDTR-nya, sehingga tidak ada peningkatan capaian lagi. Diharapkan dengan adanya review RTRW ke depannya, akan ada tambahan kawasan lain yang perlu disusun RDTR-nya, karena dinamika pembangunan berkembang sangat pesat sehingga dapat digunakan untuk mengatur pemanfaatan ruang di dalamnya.

d) **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.138.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	100
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	100
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	100
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	100
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	0	0	▼	100	0	0
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	100
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>										
7	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Kawasan Permukiman</b>										
8	Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	persen	18,40	37,31	42,41	113,67	◆	62,19	68,20	▶
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>										
9	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	98,49	98,52	98,96	100,45	◆	100,00	98,96	◆
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>										
10	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	persen	100	81,13	65,81	81,12	●	84,91	77,51	●
<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>										
11	Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 10 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan, Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Penanganan perumahan khususnya untuk rumah korban bencana merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu tetap membutuhkan intervensi ke depannya yang harus mencapai 100 persen. Sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan dan ketersediaan layak huni perlu tetap dilakukan karena masih ada kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni khususnya di pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Purbalingga. Penanganan perumahan diharapkan dapat menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat khususnya MBR, sehingga lingkungan permukiman akan lebih tertata dan image kumuh perkotaan semakin terminimalisir.

**e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 terlihat pada terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.139.**

**Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	103,02	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	50	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>										
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100	99,66	100	100,34	◆	99,64	100,36	◆
8	Persentase penegakkan perda	persen	12,73	12,96	12,73	98,18	◆	12,96	98,20	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>										
9	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	persen	80,79	54	80,55	149,16	◆	56	143,83	◆
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>										
10	Persentase penanganan kejadian kebakaran	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 di atas terdapat 4 program dengan 10 indikator. Status capaian dari 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan dan Persentase penanganan kejadian kebakaran. Pada dasarnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan bencana merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu tetap membutuhkan intervensi ke depannya yang harus mencapai 100 persen.

Penyelesaian pelanggaran K3 merupakan hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2024, pelanggaran K3 yang dapat tertangani sejumlah 1.894 kasus, dimana pelanggaran K3 yang terjadi terkait dengan: penjarangan PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar), penjarangan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, razia anak sekolah, penjarangan minuman keras, penjarangan penggunaan rokok ilegal dan razia reklame. Untuk penanganan kebakaran walaupun penanganan dapat dilaksanakan secara menyeluruh, namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu dalam hal ketersediaan SDM yang kompatibel dan memiliki sertifikasi bencana kebakaran, keterbatasan sarana prasarana penanganan kebakaran serta ketersediaan PMK (Pos Melayani Kebakaran) yang hanya berjumlah 3 pos untuk melayani bencana kebakaran di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dari beberapa kekurangan tersebut berdampak pada tingkat waktu tanggap (*respons time rate*) penanganan kebakaran juga masih rendah, sehingga saat ini penanganan kebakaran juga dibantu dengan Balakar atau masyarakat setempat agar penanganan segera dilakukan. Diharapkan ke depannya ada pemenuhan terhadap kekurangan yang ada sehingga penanganan kejadian kebakaran dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk penanggulangan kebencanaan apabila dilihat dari jumlah relawan bencana aktif, jumlah warga negara yang mendapatkan penanganan bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh informasi bencana, cukup mampu menangani kapasitas penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Purbalingga.

Namun, penanganan kebencanaan tersebut masih terdapat keterbatasan terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan penanggulangan bencana untuk mendukung tanggap bencana.

f) **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.140.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>										
7	Cakupan potensi sumber kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	63,19	59,55	65,48	109,95	◆	61,98	105,65	◆
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>										
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	persen	100	45,36	100	220,45	◆	48,47	206,31	◆
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>										
9	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	persen	98,24	87,69	97,78	111,51	◆	89,87	108,80	◆
<b>Program Penanganan Bencana</b>										
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	95,99	100	104,17	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
11	Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitasi pengelolaannya	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial dan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Pada dasarnya indikator sosial tersebut merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu tetap membutuhkan intervensi ke depannya yang harus mencapai 100 persen, khususnya untuk penanganan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Pada tahun 2024 terdapat 684 jiwa korban bencana yang tertangani secara keseluruhan.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus terus mendapatkan perhatian untuk penanganan setiap tahunnya dan menjadi pemenuhan SPM yang harus dilaksanakan. PPKS memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani rohani secara memadai dan wajar. Masih adanya sejumlah PPKS di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas, anak dan lansia masih dibutuhkan sehingga diperlukan dukungan SDM, kemampuan finansial, sarana prasarana serta kualitas pelayanan yang lebih baik ke depannya. Disamping itu, masih adanya sejumlah fakir miskin di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kemiskinan yang belum teratasi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penanganan sosial terhadap fakir miskin harus terus didorong untuk meningkatkan efektivitasnya, baik dari sisi peningkatan jumlah alokasi anggarannya dan efektivitas serta ketepatan pelaksanaannya.

## 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### a) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.141.  
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>										
7	Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>										
8	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	3,42	3,86	11,36	294,59	◆	3,86	294,37	◆
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>										
9	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah	persen	40,97	54,79	53,76	98,12	◆	63,93	84,10	●
<b>Program Hubungan Industrial</b>										
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	92,36	93,24	89,93	96,45	◆	94,17	95,50	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2024 di atas terdapat 5 program dengan 10 indikator. Status capaian dari 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 9 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dan Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah.

Pada tahun 2024, pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja yaitu sejumlah 1.476 dari total 12.990 pencari kerja. Belum semua pencari kerja mendapatkan pelatihan kerja karena pelatihan kerja tersebut diprioritaskan untuk pencari kerja yang lebih potensial terlebih dahulu sehingga kemampuannya akan dapat diterapkan dalam pekerjaannya. Sedangkan untuk pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah yaitu sejumlah 6.984 baik yang ditempatkan melalui AKL/AKAD/AKAN. Walaupun sudah mencapai target pada tahun 2024, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan ke depannya terkait dengan jumlah lowongan kerja yang perlu disediakan untuk memwadahi jumlah pencari kerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Apalagi dengan isu bonus demografi ke depannya dimana jumlah penduduk usia produktif yang akan meningkat membutuhkan ketersediaan lowongan pekerjaan yang memadai sehingga bonus demografi tidak akan menimbulkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka.

**b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.142.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>										
1	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	persen	14,05	14,08	18,33	130,18	◆	14	129,56	◆
2	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	persen	31,05	30,51	51,05	167,32	◆	30,59	166,88	◆
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>										
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	5,9	2,23	3,55	62,93	▼	1,83	51,61	▼
<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>										
4	Persentase data gender dan anak yang disediakan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>										
5	Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen	20,08	32,64	20,08	61,54	▼	35,15	57,14	▼
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>										
6	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	persen	18,58	30,53	7,22	23,64	▼	38,61	18,70	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
7	Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024 di atas terdapat 5 program dengan 7 indikator. Status capaian dari 7 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu: Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), Cakupan desa/kelurahan layak anak dan Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus. Sedangkan indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani.

Terkait dengan kekerasan terhadap Perempuan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 18 kasus. Apabila dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia >18 tahun, rasionya hanya sebesar 3,55 persen. Rasio tersebut tidak dapat mencapai target di tahun 2024 yang ditargetkan dapat turun sampai dengan 2,23 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi. Hal tersebut dikarenakan realita budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga karena masih banyak yang belum terungkap dimana kekerasan bersifat *hidden crime*.

Disamping itu kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga juga tergolong tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 49 kasus kekerasan anak yang ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu dari faktor internal terkait dengan kondisi internal orangtua/keluarga maupun faktor eksternal yaitu terkait dengan masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau masyarakat dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Diperlukan upaya secara preventif dan represif terhadap perlindungan khusus anak yang menjadi korban kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Disamping itu juga diperlukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk menjalankan sosialisasi kepada khalayak umum tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Sedangkan cakupan desa/kelurahan layak anak pada tahun 2024 terdapat 48 desa/kelurahan yang mempunyai predikat layak anak dari 239 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan yang ditargetkan yaitu meningkat sebanyak 78 desa/kelurahan. Beberapa hal yang menjadi faktor ketidaktercapaian tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan desa/kelurahan layak anak dan belum maksimalnya

petugas pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi tentang kebijakan desa layak anak. Diperlukan komitmen dan perhatian lebih ke depannya untuk dapat meningkatkan pemahaman desa/kelurahan layak anak agar predikat Kabupaten Purbalingga layak anak dapat dicapai dan diimplementasikan secara optimal.

c) **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Capaian kinerja program pada urusan pangan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.143.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pangan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	90	90	●	100	90	●
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>										
7	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	persen	54,62	55,75	55,46	99,48	◆	57,52	96,42	◆
<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>										
8	Persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	persen	41,8	95,8	93,45	97,55	◆	97,80	95,55	◆
<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>										
9	Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III)	persen	6,69	23,43	2,09	1120,00	◆	21,76	1040,13	◆
<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>										
10	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	persen	73,68	90	90,58	100,64	◆	90	100,64	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pangan tahun 2024 di atas terdapat 5 program dengan 10 indikator. Status capaian dari 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik, Persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG dan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman. Pada tahun 2024 terdapat 66 lumbung pangan dengan kondisi baik dari total 119 lumbung pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan lumbung pangan pada dasarnya diserahkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun belum semua lumbung pangan mempunyai kondisi baik dikarenakan keterbatasan sarana prasarana pendukung serta SDM yang mengelolanya. Keberadaan lumbung pangan sangat berfungsi untuk membuat ketersediaan pangan dan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana, sehingga diharapkan ke depannya dapat ditingkatkan lagi melalui pengelolaan dan fasilitas yang memadai.

Sedangkan dilihat dari Angka Ketercukupan Gizi di Kabupaten Purbalingga yang diperloeh penjumlahan dari Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 89,9 persen dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 97 persen menunjukkan AKG yang sudah tinggi. AKG menjadi hal yang harus diperhatikan terus menerus, karena kurangnya nilai AKG akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan stabilitas harga pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi bahan pangan pokok yang bermutu serta pengetahuan masyarakat mengenai gizi dengan asupan energi dan protein. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih ke depannya sebagai upaya pemenuhan konsumsi pangan sesuai dengan AKG untuk kesejahteraan hidup masyarakat ke depannya.

Terkait dengan Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman, walaupun sudah mencapai target tahun 2024 namun kondisi di lapangan masih ditemukan adanya sayuran dan buah segar yang tidak aman. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penggunaan bahan kimia pestisida sebagai alternatif dalam mengendalikan cemaran hama dan penyakit pada tanaman buah dan sayur. Padahal bahaya pestisida bagi kesehatan manusia dapat terjadi. Diperlukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat ke depannya untuk mengawal keamanan pangan di masyarakat dengan pengawasan pada residu suatu pestisida pada bahan makanan tidak boleh melebihi batas tertentu yaitu Batas Maksimum Residu (BMR).

d) **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanahan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.144.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>										
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>										
2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	persen	53,85	100	100	100	◆	100	100	▼
<b>Program Penatagunaan Tanah</b>										
3	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	persen	2,8	0,27	0,0006	0,22	▼	0,27	0,22	▼

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanahan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 3 indikator. Status capaian dari 3 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah. Terdapat penurunan pemanfaatan tanah pemda (eks bengkok) tahun 2024 yaitu sebesar 0,0006 persen dimana pada tahun sebelumnya naik 2,8 persen. Tanah yang dimanfaatkan pada tahun 2024 sebesar 2.457.849 ha dari total tanah eks bengkok sebesar 2.572.333 ha. Pada dasarnya pemanfaatan tanah pemda dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan memanfaatkan tanah Pemda dengan alasan kurang menguntungkan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya secara persuasi dan teknis untuk dapat membuka akses jalan tanah Pemda sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang memanfaatkannya.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.145.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	99,88	99,88	◆	100	99,88	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	0	0	▼	100	0	▼
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	99,2	100	99,96	99,96	◆	100	99,96	◆
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>										
7	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>										
8	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>										
9	Persentase peningkatan luas RTH	persen	0,005	1,4	0,005	0,32	▼	2	0,23	▼
<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>										
10	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	persen	69,91	79,58	100	125,66	◆	100	◆	▶
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>										
11	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	persen	100	100	150,67	150,67	◆	100	150,67	◆
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>										
12	Persentase bank sampah yang beroperasi	persen	65,28	65,71	65,28	99,34	◆	68,57	95,20	◆
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
13	Persentase sekolah adiwiyata	persen	6,59	7,26	6,21	85,52	●	8,54	72,71	▶
<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>										
14	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persen	125	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>										
15	Cakupan area pelayanan sampah	persen	55,56	66,67	55,56	83,33	●	66,67	83,33	●

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tahun 2024 di atas terdapat 10 program dengan 15 indikator. Status capaian dari 15 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 14 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Cakupan pemantauan kualitas air dan udara, Persentase peningkatan luas RTH, Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan dan Persentase bank sampah yang beroperasi.

Kualitas air, udara dan tanah merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari. Dilihat dari pemantauan kualitas air dan udara di Kabupaten Purbalingga, terdapat 4 lokasi pemantauan udara dan 12 lokasi pemantauan air. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian untuk mengantisipasi adanya pencemaran udara dan air yang dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup. Begitu pula dengan kondisi tanah, yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan RTH khususnya di kawasan perkotaan. Peningkatkan RTH di Kabupaten Purbalingga masih belum maksimal, dimana luasan RTH perkotaan saat ini hanya 256,17 ha dari total luas kawasan perkotaan 5.963,32 ha. Belum adanya upaya melibatkan stakeholder lain dan regulasi yang mendukung dalam upaya peningkatan luasan RTH. Padahal keberadaan RTH sangat penting untuk menjaga tutupan lahan agar lebih hijau dan asri.

Terkait dengan limbah B3, walaupun rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan telah dilakukan seluruhnya yaitu sejumlah 10 rekomendasi, namun pengelolaan B3 perlu lebih diperhatikan ke depannya karena pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Purbalingga masih belum terkelola dengan sempurna. Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah. Selain itu, distribusi dari pengolah limbah swasta masih belum tersebar rata. Limbah medis penting untuk dikelola karena terkait dengan dampak lingkungan, kesehatan, serta pemenuhan peraturan.

Begitu pula dengan penanganan sampah, sarana pengumpul sampah yang tersedia saat ini salah satunya bank sampah dimana terdapat 47 bank sampah yang beroperasi dari 72 total bank sampah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun secara kuantitas hanya separuh bank sampah yang aktif dari total keseluruhan bank sampah yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor internal seperti: belum jelasnya desain pengelolaan sampah maupun desain Standar Operasional Prosedur (SOP) pendirian bank sampah serta kurangnya sarana prasarana bank sampah. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena keterbatasan kompetensi pengelola bank sampah, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dan masih kurangnya partisipasi masyarakat. Diharapkan akan ada peningkatan pengelolaan ke depannya dimana semakin munculnya kesadaran pengelola bank sampah dalam memberikan edukasi persampahan bagi masyarakat.

f) **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.146.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	99,41	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	94,40	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	86,36	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	99,94	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>										
7	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	persen	97,39	99,04	99,51	100,47	◆	99,08	100,43	◆
8	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	persen	100,00	99,27	99,55	100,28	◆	99,37	100,18	◆
9	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	47,67	60	62,25	103,76	◆	80	77,82	●
<b>Program Pencatatan Sipil</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
10	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	persen	98,55	72,78	98,92	135,92	◆	72,98	135,54	◆
11	Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>										
12	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	100	42,86	100	233,33	◆	50	200	◆
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>										
13	Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	persen	100	96,70	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 di atas terdapat 5 program dengan 13 indikator. Status capaian dari 13 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 12 indikator telah tercapai dan 1 indikator yang tidak tersedia data (karena tidak dilakukan di tahun 2024). Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Cakupan kepemilikan KTP elektronik, Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA. Kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, KK maupun KIA merupakan pelayanan terhadap dokumen pendaftaran penduduk yang menjadi hal yang diprioritaskan dan menjadi hal rutin yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Tantangan ke depannya yaitu optimalisasi kualitas pelayanan dengan inovasi pelayanan dan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dari perekaman KTP-el perlu diupayakan secara massif.

g) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.147.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Penataan Desa</b>										
7	Persentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>										
8	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	persen	37,50	77,68	39,29	50,57	▼	83,04	45,16	▼
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>										
9	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan desa	persen	99,70	51,5	100	194,17	◆	58,2	171,82	◆
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>										
10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen	77,79	63,25	71,26	112,66	◆	63,44	112,33	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024 di atas terdapat 5 program dengan 10 indikator. Status capaian dari 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 9 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga). Pada tahun 2024 terdapat 88 desa yang melakukan kerjasama aktif dari 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 174 desa. Ketidaktercapaian tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal seperti keterbatasan sumber daya desa baik SDM maupun kemampuan finansial, perbedaan budaya dan adat istiadat antar desa serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar desa. Ke depannya, diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam membangun kerjasama antar desa, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan ketrampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan potensi desa secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antar desa mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa yang terlibat dengan cara mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih banyak.

**h) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.148.**

**Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>										
1	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>										
2	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen	10,25	9,39	7,61	123,34	◆	9,02	118,54	◆
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	32,33	34,38	34,76	101,12	◆	35,68	97,43	◆
<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>										
4	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	persen	7,07	10,37	9,18	88,55	●	10,41	88,18	●
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	persen	87,44	85,41	87,69	102,67	◆	88	99,65	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinsodalduk,KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 5 indikator. Status capaian dari 5 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need* KB) dan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

*Unmet need* KB adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun masih ada angka *unmet need* KB sebesar 7,61 persen yang menunjukkan masih ada sejumlah 12.869 yang belum ber-KB dari 169.130 Pasangan Usia Subur (PUS). Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi dan sosial ekonomi, kemudahan akses KB, sikap dan stigma terhadap kualitas pelayanan KB. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Diharapkan dengan berkurangnya angka *unmet need* KB di tahun selanjutnya akan dapat menurunkan angka kematian ibu dan permasalahan kesehatan perempuan lainnya. Sementara itu untuk Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), walaupun sudah mencapai target di tahun 2024, namun yang perlu diperhatikan ke depannya yaitu hanya sebesar 34,76 persen atau sekitar 41.375 peserta KB MKJP dari 119.021 peserta KB aktif yang mengikuti KB MKJP (MOP, MOW, IUD, Kondom, Implant, Suntik, dan Pil). Hal yang menyebabkan belum semuanya peserta KB aktif yang mengikuti KB MKJP salah satunya yaitu karena akses tempat pelayanan KB yang belum menjangkau ke seluruh peserta KB dan kualitas pelayanannya yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penggunaan kontrasepsi modern pada dasarnya bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera).

**i) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.149.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	99,73	100	99,9	99,9	◆	100	99,9	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	99,66	100	97,09	97,09	◆	100	97,09	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	99,1	100	96,25	96,25	◆	100	96,25	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	99,66	100	99,84	99,84	◆	100	99,84	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	98,57	100	99,41	99,41	◆	100	99,41	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	98,72	100	98,11	98,11	◆	100	98,11	◆
<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>										
7	Persentase angkutan umum yang aktif	persen	70	71,22	52,28	73,41	▶	71,42	73,21	▶
8	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	persen	75,02	78	73,44	94,15	◆	83	88,48	●

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinhub Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2024 di atas terdapat 2 program dengan 8 indikator. Status capaian dari 8 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 7 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Indikator yang akan tercapai yaitu Persentase angkutan umum yang aktif. Kondisi angkutan umum di Kabupaten Purbalingga saat ini terdapat 332 angkutan kota dan angkutan desa yang melayani trayeknya masing-masing. Namun, saat ini angkutan umum dihadapkan pada hal yaitu kurang diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan angkutan yang ada saat ini belum dapat diandalkan karena jaringan trayeknya belum optimal dalam mendukung perpindahan moda yang tinggi untuk menghantarkan mereka ke titik tujuan akhir. Disamping itu juga angkutan umum banyak yang kurang tepat waktu. Faktor kenyamanan dan kemudahan sangat perlu diperhatikan ke depannya, agar angkutan umum yang tersedia menjadi transportasi massal yang lebih diminati masyarakat di tengah-tengah semakin banyaknya transportasi *online* saat ini.

#### j) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.150.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	99,69	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	98,37	100	92,11	92,11	◆	100	92,11	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	94,09	100	95,41	95,41	◆	100	95,41	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	99,09	100	99,95	99,95	◆	100	99,95	◆
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>										
7	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	persen	100	80	100	125	◆	100	100	◆
<b>Program Aplikasi Informatika</b>										
8	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	persen	100	85	100	117,65	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi); ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2023 di atas terdapat 3 program dengan 8 indikator. Status capaian dari 8 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika, dimana 45 OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga telah mempunyai inovasi pelayanan publik menggunakan aplikasi informatika. Namun untuk keberlangsungan implementasi aplikasi informatika tersebut diperlukan komitmen agar penggunaannya dapat dirasakan kebermanfaatannya dan aplikasi tersebut tidak berhenti begitu saja.

**k) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.151.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d Akhir RPJMD (2026)	Status Capaian s.d Akhir RPJMD (2026)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	99,64	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	99,95	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	98,75	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	98,93	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>										
7	Persentase koperasi aktif	persen	58,84	75,9	59,71	78,67	●	77,6	76,95	●
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>										
8	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	persen	57,76	60	57,55	95,92	◆	68	84,64	●
<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>										
9	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	persen	34,34	60	60,38	100,63	◆	65	92,89	◆
<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>										
10	Pertumbuhan volume usaha koperasi	persen	9,82	14	14,71	122,55	◆	14	105,04	◆
<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>										
11	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	persen	2,97	2,97	2,61	104,20	◆	2,5	104,20	◆
<b>Program Pengembangan UMKM</b>										
12	Persentase UMKM yang difasilitasi	persen	1,64	4,42	4,43	100,28	◆	4,42	100,25	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DinkopUKM Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2024 di atas terdapat 7 program dengan 12 indikator. Status capaian dari 12 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Persentase koperasi aktif dan Persentase UMKM yang difasilitasi. Terkait dengan koperasi aktif yang ada di Kabupaten Purbalingga, saat ini terdapat 166 koperasi yang aktif dari 278 keseluruhan jumlah koperasi yang ada. Masih ada beberapa koperasi yang tidak aktif dikarenakan dampak pandemic covid-19 untuk koperasi masih terasa dimana terjadi penurunan asset pada beberapa koperasi sehingga mereka menjadi tidak aktif. Disamping itu terdapat peraturan baru dari pusat dimana koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun dinyatakan sebagai koperasi yang tidak aktif lagi, sehingga semakin bertambah jumlah koperasi yang tidak aktif dengan kriteria tersebut. Diperlukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut ke depannya agar keberadaan koperasi yang tidak aktif dapat ditingkatkan kembali. Karena koperasi yang sudah dibangun merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja.

Terkait dengan UMKM, Persentase UMKM yang difasilitasi saat ini terdapat 2. 907 UMKM yang difasilitasi internet dari total 65.606 UMKM di Kabupaten Purbalingga. Jumlah UMKM yang difasilitasi masih kecil jumlahnya dibanding dengan total keseluruhan UMKM. Salah satu kendalanya dikarenakan masih rendahnya tingkat literasi para pelaku UMKM dengan digitalisasi. Selain itu, untuk masuk ke digitalisasi diperlukan tools yang tentunya membutuhkan modal. Oleh karena itu diperlukan peningkatan fasilitasi terhadap UMKM dalam memasuki dunia digital, karena manfaatnya akan mempermudah dalam mendapatkan akses permodalan secara mudah dan cepat.

#### I) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.152.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>										
7	Score Iklim Usaha	point	91,35	80	93,7	117,13	◆	82	114,27	◆
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>										
8	Jumlah kepeminatan investasi	investor	3	3	3	100	◆	3	100	◆
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>										
9	Indeks pelayanan publik bidang investasi	point	4,51	4,1	4,51	110	◆	4,5	100,22	◆
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>										
10	Persentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	persen	99,12	115	98,35	85,52	●	135	72,85	▶
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>										
11	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	persen	97,78	64,52	100	155	◆	84,68	118,09	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DMPTSP Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perijinan tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Indeks pelayanan publik bidang investasi dan Jumlah kepeminatan investasi. Di tahun 2024, terdapat 3 kepeminatan investasi yaitu PT. Tempoland (pergudangan farmasi), Woosong (wig), dan Laris Group (Supermarket Jadi Baru). Walaupun terdapat sejumlah kepeminatan terhadap investasi di Kabupaten Purbalingga khususnya untuk industri pengolahan, namun permasalahan investasi sangat berkaitan erat dengan ketersediaan kawasan peruntukan industri yang ada. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung pada kawasan peruntukan industri terkadang menghambat kepeminatan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu dilihat dari Indeks pelayanan publik bidang investasi dimana hasil penilaian dari Kemenpan RB menunjukkan angka 4,51 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik bidang investasi di Kabupaten Purbalingga telah mampu memberikan pelayanan yang

memadai bagi Masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari telah tersedianya Mall Pelayanan Publik (MPP) dimana kehadiran MPP memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan kemudahan berusaha d Kabupaten Purbalingga.

**m) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.153.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>										
7	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	point	69,2	41,7	73,08	219,23	◆	41,7	175,24	◆
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>										
8	Persentase cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	persen	69,2	45,45	57,58	172,73	◆	45,45	126,68	◆
<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>										
9	Persentase kelompok pramuka aktif	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga tahun 2024 di atas terdapat 4 program dengan 9 indikator. Status capaian dari 9 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Cakupan organisasi kepemudaan yang aktif dan Persentase cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional. Terkait dengan organisasi kepemudaan yang aktif, pada tahun 2024 terdapat sekitar 19 organisasi kepemudaan yang difasilitasi dari total 26 jumlah organisasi kepemudaan. Pemuda pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Dari 19 organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Purbalingga menunjukkan partisipasi aktif para pemuda dimana pemuda merupakan usia produktif yang sangat potensial untuk dikembangkan potensinya. Ke depannya diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan aktivitas pemuda dalam organisasi kepemudaan untuk memberikan kesempatan pemuda dalam melakukan kepemimpinan individu, domestik, dan publik.

Disamping itu untuk cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional, pada tahun 2024 terdapat 19 cabor yang berprestasi di tingkat regional dan nasional dari total 33 cabor. Capaian prestasi olahraga tersebut menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan atlet di Kabupaten Purbalingga sudah baik. Walaupun sudah mencapai target pada tahun 2024, beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam melakukan fasilitasi terhadap prestasi olahraga yaitu: terbatasnya dukungan anggaran dan fasilitas olahraga bagi para atlet, kurangnya minat masyarakat terhadap cabor tertentu sehingga membuat sponsor sulit untuk terlibat dalam mendukung olahraga secara keseluruhan, serta lemahnya sistem pengembangan atlet muda. Tantangan ke depannya yaitu bagaimana dapat terus membangun dan mempertahankan prestasi olahraga dengan sumber daya manusia yang terbatas. Diperlukan beberapa strategi ke depannya untuk dapat mengelola sistem keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah.

**n) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan bidang statistik tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.154.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Statistik**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>										
1	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	persen	100	90	100	111,11	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang statistik tahun 2024 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator dimana terget indikator tersebut telah tercapai yaitu Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat 27 OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar dengan jumlah total data sejumlah 5.800. Angka tersebut menunjukkan bahwa semua OPD telah melakukan updating data untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Purbalingga. Disamping itu fungsi walidata juga terlaksana dengan baik dalam memfasilitasi kegiatan pengumpulan, pemeriksaan sampai dengan penyebaran data. Walaupun sudah mencapai target, tantangan ke depannya yang perlu menjadi perhatian yaitu konsistensi dan komitmen OPD dalam melakukan updating data agar dapat menyediakan data yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

**o) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang persandian tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.155.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Persandian**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>										
1	Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait	persen	100	100	100,81	100,81	◆	100	100,81	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang persandian tahun 2024 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator dimana terget indikator tersebut telah tercapai yaitu Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat 749 total informasi yang diterima oleh email sanapati semuanya didistribusikan ke OPD. Kegiatan tersebut merupakan hal rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka mengakomodir informasi yang diterima agar dapat tersampaikan dengan tepat guna. Sedangkan dilihat dari kondisi pengamanan informasi di Kabupaten Purbalingga, berdasarkan hasil penilaian mandiri Indeks KAMI menunjukkan Tingkat Keamanan Informasi Daerah di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 58,29 yang berarti masih diperlukan peningkatan terhadap tingkat keamanan informasi daerah.

p) **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.156.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>										
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek	8	7	7	100	◆	8	87,5	●
<b>Program Pembinaan Sejarah</b>										
2	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	persen	100	80	100	125	◆	80	125	◆
<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>										
3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarkan	persen	19,14	15	100	666,67	◆	15	666,67	◆
<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>										
4	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	persen	100	100	100	100,00	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan tahun 2024 di atas terdapat 4 program dengan 4 indikator. Status capaian dari 4 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) dan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan realisasi 7 objek yang meliputi: 1. Manuskrip jenisnya : Babad, 2. Tradisi tutur lisan Jenisnya : Cerita Rakyat, Rapalan, Nasehat Pernikahan, Mitos, Pepali, Legenda, 3. Teknologi Tradisional : 1) Tekonologi pembuatan warangka/marangi di Kecamatan Kalimanah dan 2) Teknologi pembuatan makanan tradisional berupa Nopia, sudah mendapatkan Warisan Budaya Tak Benda dari Kemendikbud Ristek di Tahun 2021, 4. Seni jenisnya : Seni Tari, Seni Teater, Seni Sastra, Seni Musik, Seni Film, Seni Rupa, Seni Media, 5. Bahasa jenisnya : Dialek Banyumasan, 6. Permainan Rakyat jenisnya : Permainan Tunggal, Permainan Berpasangan, Permainan Kelompok, 7. Adat Istiadat jenisnya : Perkawinan, Adat Kelahiran, Pembagian Hasil Panen, Upacara Peringatan Kematian, Hubungan Manusia dengan Alam, Nyadran. Walaupun sudah mencapai target pada tahun 2024, pada dasarnya objek budaya tersebut harus

senantiasa dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar tidak menghilang seiring berkembangnya zaman. Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan kebudayaan yang juga menjadi tantangan ke depannya yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan pelestarian budaya; terbatasnya tenaga ahli kebudayaan yang dapat menerjemahkan manuskrip ataupun objek pemajuan kebudayaan lainnya; kurangnya even kebudayaan yang dapat mengaktualisasi tradisi ataupun seni yang ada; serta Kurangnya dukungan penelitian dan pengembangan pengetahuan tradisional; kurangnya sarana perlengkapan pendukung yang dapat mendorong kegiatan seni; serta terbatasnya anggaran pembinaan pelaku seni sehingga diperlukan adanya kerjasama multisektoral untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Disamping itu terkait benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan juga perlu diperhatikan ke depannya. Saat ini terdapat 58 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 303 Benda Cagar Budaya (BCB) yang sudah terdata. Walaupun sudah mencapai target di tahun 2024, namun masih banyak Benda Cagar Budaya yang perlu dilestarikan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pelestarian tersebut yaitu: penetapan status kawasan cagar budaya yang belum jelas dan belum optimalnya pengelolaan kawasan cagar budaya serta terbatasnya kemampuan daerah terhadap pemeliharaan cagar budaya yang mempunyai biaya konservasi tinggi.

**q) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.157.  
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
7	Persentase perpustakaan aktif	point	4,41	3,73	7,30	195,59	◆	4,71	154,90	◆
<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno</b>										
8	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	persen	30	80	82,35	102,94	◆	100	82,35	●

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 8 indikator. Status capaian dari 8 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Persentase perpustakaan aktif. Kondisi tahun 2024 terdapat 58 perpustakaan aktif (yang sudah sertifikasi) dari total 795 perpustakaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Walaupun sudah mencapai target pada tahun 2024, namun jumlah perpustakaan aktif yang sudah sertifikasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan total perpustakaan yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi yaitu kurangnya jumlah pustakawan, minimnya anggaran yang dialokasikan di bidang perpustakaan, minimnya sarana prasarana gedung atau ruang perpustakaan, minimnya pengadaan bahan pustaka, serta minimnya minat baca masyarakat.

#### r) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan bidang kearsipan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.158.

#### Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengelolaan Arsip</b>										
1	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	persen	69,25	32,36	58,56	180,95	◆	47,89	122,27	◆
<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>										
2	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kearsipan tahun 2024 di atas terdapat 2 program dengan 2 indikator. Status capaian dari 2 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Kondisi tahun 2024 terdapat 219 objek pembinaan kearsipan dari total 374 objek pembinaan. Objek pembinaan berupa SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang terhitung merupakan jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan per tahun, sehingga jumlahnya mengikuti kemampuan anggaran yang tersedia dalam kegiatan pembinaan. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun masih terdapat permasalahan yang terkait dengan pengelolaan arsip yaitu: penyelenggaraan arsip pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan belum memadainya jumlah tenaga arsiparis di OPD sehingga kegiatan pengarsipan dokumen belum optimal.

### 3) Urusan Pemerintahan Pilihan

#### a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.159.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>										
1	Produksi perikanan tangkap	ton	249,79	275	286,96	104,35	◆	281	102,12	◆
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>										
2	Produksi perikanan budidaya	ton	6.123	6.766	6.129	90,59	●	7040	87,06	●
<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>										
3	Produksi olahan ikan	ton	2.337,08	2.241	2.364	105,50	◆	2232	105,93	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 3 indikator. Status capaian dari 3 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun ketiga indikator tersebut tetap membutuhkan intervensi ke depannya. Peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan berpengaruh positif terhadap kuantitas penangkapan ikan oleh nelayan, pengembangan perikanan budidaya oleh pembudidaya ikan maupun pengolahan terhadap ikan yang berupa pemindangan ikan laut (tuna, keranjang, presto ikan bandeng) dan abon ikan lele. Walaupun sudah mencapai target produksi di tahun 2024, beberapa permasalahan yang sering terjadi dan dapat diantisipasi ke depannya yaitu: adanya pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi ketersediaan ikan baik di laut maupun sungai, manajemen kualitas air dan tanah yang belum ditangani dengan baik yang dapat mempengaruhi pengembangbiakan dan budidaya perikanan air tawar, serta terbatasnya teknologi untuk pengolahan ikan yang dapat mempengaruhi hasil keanekaragaman hasil olahan ikan.

**b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pariwisata tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.160.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>										
1	Cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan	persen	46,978	20,59	45,71	222,04	◆	20,59	222,02	◆
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>										
2	Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka kunjungan wisatanya	persen	35,14	66,18	60	90,67	●	80,88	74,18	▶
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>										
3	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	orang	152	131	290	221,37	◆	138	210,14	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ▶ : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pariwisata tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 3 indikator. Status capaian dari 3 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun ketiga

indikator tersebut tetap membutuhkan intervensi ke depannya. Dilihat dari cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan, tahun 2024 terdapat 32 DTW yang dikembangkan dari total 70 DTW yang ada di Kabupaten Purbalingga. DTW yg dikembangkan tersebut terdiri dari: 24 desa wisata, 5 BUMD, 2 swasta (Tirta Kencana Kedungjati, Mount Slamet Serang, Desa Wisata Karangpucung). Dilihat dari jumlah total DTW hanya sebagian yang dapat dikembangkan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, kurangnya kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia sesuai bidang kerja yang akan dikembangkan dalam DTW.

Kemudian dilihat dari Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka kunjungan wisatanya dimana terdapat 42 DTW yang meningkat angka kunjungan wisatanya dari total 70 DTW yang ada di Kabupaten Purbalingga. Belum seluruhnya DTW yang meningkat angka kunjungan wisatanya, hal tersebut tidak lepas dari beberapa faktor terkait dengan kurangnya promosi dan kelengkapan sarana dan prasarana wisata, kurangnya SDM yang berkualitas untuk pendampingan masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta masih kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup di daerah wisata yang ada. Sedangkan untuk Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat, pada tahun 2024 terdapat 290 orang pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang mendapat sertifikat. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depannya agar sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih berkembang yaitu: perlunya penerapan yang aplikatif sesuai dengan pelatihan yang telah diperoleh serta komitmen dan konsistensi untuk pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal.

**c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.161.  
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanian**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>										
7	Rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	persen	36,16	41	38,43	93,72	◆	43	89,36	●
<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>										
8	Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>										
9	Prevalensi penyakit hewan	persen	18,19	19,30	17,36	111,17	◆	18,3	105,41	◆
10	Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	persen	83,53	84	86,11	102,51	◆	87	98,98	◆
<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>										
11	Persentase penanggulangan bencana pertanian	persen	61,67	64	59,86	93,53	◆	68	88,03	●
<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>										
12	Persentase kelompok tani (kategori madya dan utama)	persen	21,00	12,69	21,67	170,80	◆	16	138,82	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinperten Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 12 indikator. Status capaian dari 12 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Rata rata (persentase) ketersediaan sarana pertanian, Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan, dan Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Ketersediaan sarpras pertanian yang terdiri dari traktor, pompa air, *power thresher* dan *combine harvester*, sudah mencapai target di tahun 2024, namun tantangan ke depannya yang perlu diantisipasi yaitu tingginya harga sarana produksi pertanian yang dapat meresahkan petani. Ketidaktersediaan saprodi akan dapat menghambat kelancaran usaha tani, sehingga perlu adanya regulasi yang lebih baik agar saprodi dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Disamping itu untuk luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan, walaupun sudah mencapai tahun 2024, namun beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan pengembangan prasarana pertanian yaitu: Ketersediaan air dan infrastruktur pertanian yang belum memadai, SDM dan kelembagaan pertanian yang masih lemah serta akses petani terhadap modal dan pasar lemah. Sedangkan dilihat dari Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dimana sejumlah 4.394 sampel daging ayam dan kambing dari total 5.103 sampling di 12 pasar yang ada di Kabupaten Purbalingga berstatus Aman, Sehat, Utuh, dan

Halal. Pengendalian kesehatan hewan perlu diperhatikan ke depannya sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya penyakit hewan dan penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

d) **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.162.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	0	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>										
7	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi)	persen	100	90	100	111,11	◆	95	105,26	◆
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>										
8	Persentase pasar rakyat layak usaha	persen	43	42,86	42,86	100	◆	52	81,82	●
<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>										
9	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	persen	88,89	94,44	77,78	82,35	●	94	82,36	●
<b>Program Pengembangan Ekspor</b>										
10	Nilai Ekspor	miliar rupiah	2.713	2.278	2.286	100,35	◆	2.559	89,33	●
<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
11	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	73,75	64,84	75,43	116,33	◆	89,84	83,96	●

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting dan Nilai Ekspor. Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting perlu diperhatikan keberlanjutannya, dimana kondisi tahun 2024 terdapat 14 jenis harga bahan pokok dan penting yang stabil dari 18 jenis harga bahan pokok dan penting. Ketidakpastian harga pangan pokok dapat menyebabkan inkonsistensi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat yang lebih lanjut dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka. Stabilisasi harga sangat penting untuk memastikan setiap masyarakat khususnya masyarakat rentan agar dapat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Disamping itu, untuk nilai ekspor walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun nilai ekspor mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya penurunan permintaan dan kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor. Kondisi tersebut perlu diperhatikan ke depannya ekspor lebih meningkat lagi.

#### e) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.163.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>										
1	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	0	300	266	88,66	●	325	81,85	●
<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>										
2	Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	persen	100	87,50	100	114,28	◆	90	111,11	◆
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
3	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	139	200	216	108	◆	400	54	▼

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 3 indikator. Status capaian dari 3 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai dan ketiganya tetap membutuhkan intervensi ke depannya. Pada tahun 2024 jumlah kelompok IKM yang bersertifikat berjumlah 266 IKM. Beberapa tantangan dalam memfasilitasi sertifikasi IKM yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah yaitu keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Hal tersebut perlu terus menjadi perhatian ke depannya.

Kemudian terkait dengan usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi dimana pada tahun 2024 terdapat 2 usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi. Pada dasarnya dengan adanya ijin usaha dapat memberi beberapa manfaat yaitu: sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha (pengajuan kredit modal usaha), sebagai sarana pengembangan usaha untuk perdagangan ekspor dan impor serta sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Kemudian terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, saat ini terdapat 216 industri yang tercatat di SIINAS. Dalam upaya mendorong pengembangan industri kecil menengah, SIINas memiliki peran dan fungsi yang cukup penting bagi pelaku industri itu sendiri. Industri yang telah terintegrasi dalam database SIINas dapat dengan mudah mengakses segala informasi terkait upaya pengembangan usahanya, bahkan hingga level ekspor.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.164.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>										
1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	0	3	1	33,33	▼	3	33,33	▼

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi); ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun 2024 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator dimana indikator tersebut berstatus tidak tercapai. Pada tahun 2024, jumlah transmigran yang ditempatkan hanya terdapat 1 kuota transmigrasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Purbalingga yaitu ke Sumatra Barat (Sijunjung).

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Daerah tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.165.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	▼	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
7	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
8	Persentase Ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	88,84	100	100	100	◆	100	100	◆
9	Persentase berita yang mendapat respon publik	persen	126,74	100	100	100	◆	100	100	◆
10	Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	angka	68,37	68	69,17	101,72	◆	70	98,81	◆
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>										
11	Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan	persen	85,55	100	94,94	94,94	◆	100	94,94	◆
12	Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra	persen	103,3	100	111,69	111,69	◆	100	111,69	◆
13	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>										
14	Persentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	persen	4,26	13,91	4,62	33,21	▼	7,16	64,51	▼
15	Capaian realisasi kegiatan rumpun ekonomi dan pembangunan	persen	84,81	100	86,43	86,43	●	100	86,43	●
16	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	kriteria	8	9	9	100	◆	9	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Setda Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sekretariat daerah tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 16 indikator. Status capaian dari 16 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 14 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase kenaikan deviden dari sektor BUMD. Ketidaktercapaian kenaikan deviden dari sektor BUMD disebabkan karena terjadi

kerugian pada BUMD (Perumda Puspahastama) yang disebabkan masih tingginya kebutuhan penyertaan modal Pemkab Purbalingga kepada BUMD untuk memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan OJK. Diperlukan pemenuhan kebutuhan modal untuk Perumda Puspahastama agar dapat mengendalikan harga gabah tingkat petani serta pengendalian inflasi melalui subsidi kebutuhan pokok masyarakat/sembako.

**b) Sekretariat Dewan**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Dewan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.166.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Dewan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	99,01	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	98,68	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	81,25	81,25	●	100	81,25	●
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	99,99	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
7	Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>										
8	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	persen	98,33	100	99,04	99,042	◆	100	99,042	◆
9	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Setwan Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sekretariat dewan tahun 2024 di atas terdapat 2 program dengan 9 indikator. Status capaian dari 9 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Terdapat 2 indikator yaitu Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan dan Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan dimana Pelayanan persidangan dan perundang-undangan dihasilkan 724 pelayanan persidangan dan perundang-undangan yg difasilitasi (dokumen). Sedangkan pelayanan penganggaran dan pengawasan dihasilkan 53 pelayanan penganggaran dan pengawasan yg difasilitasi (dokumen). Pemenuhan kegiatan tersebut merupakan hal rutin setiap tahunnya dalam rangka melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Urusan Perencanaan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan perencanaan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.167.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>										
7	Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	persen	84,02	83	83,36	100,48	◆	84,2	98,98	◆
8	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
9	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
10	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	95,11	97,64	94,33	96,61	◆	98,82	95,46	◆
11	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	persen	100	95,12	100	105,13	◆	98,37	101,65	◆
12	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	persen	96,88	94,74	96,88	102,25	◆	98,25	98,60	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perencanaan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 12 indikator. Status capaian dari 12 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Tingkat keterisian data IKK, SDG's, dan indikator program dan Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan.

Keterisian data IKK, SDG's, dan indikator program merupakan data prioritas yang terdapat dalam Satu Data Purbalingga dimana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 1.504 keterisian data (statistic dan geospasial) dari 1.553 total data prioritas yang ada. Pemenuhan keterisian data tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan data sudah terlaksana dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Purbalingga. Walaupun memenuhi sejumlah keterisian data, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu konsistensi dan komitmen OPD dalam melakukan inputing data agar dapat menyediakan data yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan pada tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan terdapat ketepatan waktu penyusunan RKPD dan kesesuaian antara dokumen dengan aktivitas perencanaan baik itu Konsultasi Publik dan Musrenbang. Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan menjaga konsistensi keselarasan antara indikator kinerja RKPD dengan indikator kinerja RPJMD serta perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan agar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal.

b) Urusan Keuangan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan keuangan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.168.

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>										
7	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
8	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	angka	87,7	89	89	100	◆	91	97,80	◆
9	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	angka	100	100	100	100	◆	100	100	◆
10	Tingkat ketepatan waktu penyaluran dana transfer dan BTT	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>										
11	Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	dokumen	5	5	5	100	◆	5	100	◆
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>										
12	Persentase pertumbuhan pajak daerah	persen	9,03	4,75	7,68	161,74	◆	5	153,66	◆
13	Cakupan database wajib pajak yang valid	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Bakeuda Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan keuangan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 13 indikator. Status capaian dari 13 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Persentase pertumbuhan pajak daerah. Pertumbuhan pajak paling besar yaitu pada Pajak Penerangan Jalan / PBJT-Tenaga Listrik dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pertumbuhan pajak daerah dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

**c) Urusan Kepegawaian**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan kepegawaian tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.169.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepegawaian**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	0	0	▼	100	0	▼
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>										
7	Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan,dan sistem informasi	angka	0,17	0,11	0,17	154,55	◆	0,16	106,25	◆
8	Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi	angka	0,06	0,04	0,06	150	◆	0,06	100	◆
9	Indeks kinerja dan disiplin	angka	0,19	0,13	0,21	161,54	◆	0,18	116,67	◆
10	Indeks kompetensi	angka	0,22	0,14	0,19	135,71	◆	0,21	90,48	●

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kepegawaian tahun 2024 di atas terdapat 2 program dengan 10 indikator. Status capaian dari 10 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 9 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu keempat indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN (Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi, Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi, Indeks kinerja dan disiplin serta Indeks kompetensi). Walaupun sudah mencapai target di tahun 2024, beberapa permasalahan terkait dengan kepegawaian daerah yang mempengaruhi Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga yaitu: Belum optimalnya pengembangan kompetensi pegawai menggunakan metode klasikal maupun non-klasikal (pertukaran pegawai, magang, coaching dan mentoring); serta Belum melaksanakan talent pool bagi seluruh pegawai. Diharapkan pada tahun selanjutnya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat terurai sehingga Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan optimal.

**d) Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pendidikan dan pelatihan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.170.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>										
1	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	persen	40	80	100	125	◆	90	111,11	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pendidikan dan pelatihan tahun 2024 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator dimana status capaian dari indikator tersebut telah tercapai yaitu Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM. Walaupun telah tercapai, beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mempengaruhi Penerapan Sistem Merit ASN di Kabupaten Purbalingga yaitu:

Belum semua pegawai mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam setahun baik melalui pelaksanaan diklat maupun Bimtek/Seminar/Workshop/kursus/magang dan sejenisnya; serta Banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan.

**e) Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan penelitian dan pengembangan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.171.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>										
1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	persen	100	37,14	100	269,23	◆	40	250	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan penelitian dan pengembangan tahun 2024 di atas terdapat 1 program dan 1 indikator dimana status capaian dari indikator tersebut menunjukkan telah tercapai yaitu Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan dimana terdapat 208 inovasi dan invensi yang seluruhnya telah didesiminasikan. Tujuan dari diseminasi hasil inovasi pada dasarnya adalah untuk menunjukkan hasil inovasi yang telah dilakukan oleh pelajar, stakeholder maupun masyarakat luas. Walaupun sudah mencapai target tahun 2024, namun permasalahan yang terjadi terkait dengan inovasi di Kabupaten Purbalingga yang perlu diantisipasi yaitu: kelemahan regulasi yang mendukung pelaksanaan inovasi, keterbatasan alokasi anggaran untuk riset dan inovasi, lemahnya pendidikan dan pengetahuan yang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi inisiator dalam pelaksanaan inovasi, kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi.

f) **Urusan Pengawasan**

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pengawasan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.172.**

**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pengawasan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>										
7	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	persen	72,47	75	73,09	97,45	◆	70	104,41	◆
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>										
8	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	angka	2,52	2,25	2,878	127,91	◆	3	95,93	◆
9	Nilai MCP Korsubgah	angka	96,30	78	97,05	124,42	◆	87	111,55	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi); ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pengawasan tahun 2024 di atas terdapat 3 program dengan 9 indikator. Status capaian dari 9 indikator tersebut menunjukkan bahwa semuanya telah tercapai. Indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik. Adanya potensi kerugian daerah yang berhasil ditarik tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Namun permasalahan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pengawasan yaitu pengawasan

Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi. Padahal penggunaan teknologi informasi saat ini menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan sebagai proses digitalisasi ke depannya.

6) Unsur Pemerintahan Umum

a) Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada kesatuan bangsa dan politik tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.173.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>										
7	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10.000 penduduk	1,95	31,90	0,37	1,17	▼	31,9	1,17	▼
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>										
8	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	per 10.000 penduduk	7,01	31,90	3,58	11,21	▼	31,9	11,21	▼
<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>										
9	Persentase ormas yang terbina	persen	29,94	23,95	74,32	310,30	◆	28	265,44	◆
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>										

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
10	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	per 10.000 penduduk	2,92	31,90	25,81	80,90	●	31,9	80,91	●
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>										
11	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	71	60	76	126,67	◆	30	253,33	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi), ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 9 indikator tercapai dengan capaian sangat tinggi dan 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dan Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dimana hanya terdapat 2.674 masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan hanya bersifat formal dan belum melaksanakan secara massal di tempat tempat umum sehingga target masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu keterbatasan sumberdaya yang kompeten dalam melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan keterbatasan anggaran dalam proses pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Disamping itu untuk Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dimana hanya terdapat 1.134 masyarakat yang memperoleh pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Sama halnya dengan ketidaktercapaian pada Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, cakupan masyarakat yang memperoleh pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik juga belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sumberdaya yang kompeten dan keterbatasan anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan.

7) Unsur Kewilayahan

a) Kecamatan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada kecamatan tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.174.**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pada Kecamatan**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	RKPD 2024				RPJMD 2021-2026		
				Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian s.d Akhir RPJMD	Status Capaian s.d Akhir RPJMD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	99,59	99,59	◆	100	99,59	◆
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	94,44	100	93,97	93,97	◆	100	93,97	◆
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	98,23	98,23	◆	100	98,23	◆
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	88,89	100	99,32	99,32	◆	100	99,32	◆
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	61,11	100	27,78	27,78	▼	100	27,78	▼
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	98,61	100	99,80	99,80	◆	100	99,80	◆
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>										
7	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,15	3,1 - 5,00	4,66	93,22	◆	3,1 - 5,00	93,22	◆
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>										
8	Persentase keaktifan lembaga desa	persen	90,86	100	97,12	97,12	◆	100	97,12	◆
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>										
9	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	10	12	12	100	◆	12	100	◆
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>										
10	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	85,89	100	100	100	◆	100	100	◆
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										
11	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	72,91	49 - 51	85,61	155,65	◆	55-58	174,70	◆

Ket: ◆ : Tercapai (Sangat Tinggi); ● : Tercapai (Tinggi); ► : Akan Tercapai (Sedang); ▼ : Tidak Tercapai (Rendah, Sangat Rendah)

Sumber : Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, 2023 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kecamatan tahun 2024 di atas terdapat 6 program dengan 11 indikator. Status capaian dari 11 indikator tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 10 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Beberapa indikator yang telah tercapai namun tetap membutuhkan intervensi ke depannya yaitu: Nilai evaluasi pelayanan publik dan Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan. Nilai evaluasi pelayanan publik dengan realisasi rata-rata 4,66 yang merupakan kategori Baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di kecamatan sudah mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Namun permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan yaitu: pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat dalam Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum sepenuhnya didukung dengan peraturan yang bersifat teknis operasional sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan, kuantitas SDM pelaksanaan PATEN yang masih terbatas serta kondisi ruang pelayanan yang belum representatif.

Kemudian untuk Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dengan realisasi rata-rata 12 dokumen. Dokumen laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan dokumen yang harus dibuat setiap bulannya dalam 1 tahun (12 bulan). Dokumen ini tetap dibuat walaupun tidak ada kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di dalam bulan itu. Walaupun sudah mencapai target tahun 2023 namun masih ada permasalahan yang terjadi terkait dengan Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan yaitu tidak tersusunnya dokumen laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum secara optimal karena tidak adanya pencatatan dengan baik. Hal tersebut perlu diperhatikan ke depannya agar pencapaian target mempunyai kualitas yang baik pula.

Dari keseluruhan 337 indikator program di atas, rekapitulasi capaian indikator program tercapai cukup baik dimana dari 337 indikator sebanyak 91,99 persen sudah tercapai. Rekapitulasi capaian indikator kinerja program Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.175. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Capaian Indikator	Jumlah	Persentase
1	Tercapai (Sangat Tinggi, $91 \leq 100$ )	299	88,72 %
2	Tercapai (Tinggi, $76 \leq 90$ )	14	4,15 %
3	Akan Tercapai (Sedang, $66 \leq 75$ )	2	0,59 %
4	Tidak Tercapai (Rendah, $51 \leq 65$ ) dan Sangat Rendah ( $\leq 50$ )	19	5,64 %
5	NA	3	0,89 %
<b>Total</b>		<b>337</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2024, terdapat beberapa implikasi yang timbul yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah tahun 2026. Dari implikasi tersebut dibutuhkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor yang menjadi penyebabnya. Secara lebih jelasnya telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.1.**  
**Telaahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2024**

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,03 tahun dan laju peningkatan yang sangat kecil yaitu dengan rata-rata 0,01 setiap tahunnya, menunjukkan harapan anak usia 7 tahun di Kabupaten Purbalingga saat ini hanya dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SMA saja.</li> <li>• Kurangnya pemerataan guru di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga menjadikan persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20 masih besar dan belum dalam kondisi yang ideal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan bersekolah ke jenjang pendidikan tinggi masih kecil</li> <li>• Belum tercukupinya tenaga pendidikan yang ada pada fasilitas pendidikan (khususnya SD dan SMP) dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan/ Vokasi</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan renovasi bangunan sekolah yang belum layak untuk mendukung proses pembelajaran</li> </ul>
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walaupun Kabupaten Purbalingga telah berada pada UHC (<i>Universal Health Coverage</i>), namun masih adanya angka AKI, AKB dan AKABA menunjukkan perlunya penguatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk tindakan awal sebagai upaya preventif baik dengan penguatan SDM maupun sarpras</li> <li>• Belum terdatanya PIRT yang dilakukan pembinaan dan pengawasan walaupun ada kemudahan dalam proses perijinannya</li> <li>• Masih dibutuhkan bimbingan dan dukungan dari tenaga kesehatan yang kontinyu, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mau ikut serta dalam pelaksanaan program kesehatan dan pengelolaan sumber daya kesehatan di tingkat desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tenaga kesehatan tercukupi akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada faskes 1</li> <li>• Apabila tidak dilakukan pengawasan maka tidak akan terwujud prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam menerapkan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang baik untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen</li> <li>• Pengelolaan sumber daya kesehatan di tingkat desa akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa sehingga dapat mengelola dan memenuhi kebutuhan kesehatan mereka sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan tenaga kesehatan</li> <li>• Peningkatan kelas layanan puskesmas</li> <li>• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk penguatan sistem rujukan</li> <li>• Pengawasan hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Pemberian kesejahteraan kader posyandu)</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sinergitas pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau</li> </ul>
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada kerusakan jalan kabupaten dimana penanganan jalan yang telah dilakukan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi sehingga membutuhkan ketersediaan anggaran yang mencukupi dan sumber daya manusia dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi jalan yang rusak tidak dapat memberikan aksesibilitas yang nyaman dan aman bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pembangunan infrastruktur jalan</li> <li>• Peningkatan dan rehabilitasi bangunan pemerintah</li> <li>• Revitalisasi program infrastruktur yang mangkrak melalui kolaborasi dengan seluruh <i>stakeholders</i></li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
		<p>pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik dapat terlaksana sesuai target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perawatan dan pemeliharaan karena tidak ada prioritas anggaran untuk memfasilitasi perbaikan/renovasi bangunan pemerintah yang ada</li> <li>• Dinamika perkembangan kawasan peruntukan budidaya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perencanaannya sehingga terdapat kesesuaian terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruangnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila kondisi bangunan pemerintah kurang baik akan mempengaruhi stigma negatif masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal</li> <li>• Ketidakesesuaian ruang akan mempengaruhi kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan yang dapat mempengaruhi degradasi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana tata ruang yang mengakomodir dinamika dan perubahan perkembangan kawasan dan dapat digunakan secara operasional dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang</li> </ul>
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan akan air minum bagi masyarakat harus tercukupi setiap tahunnya karena menjadi kebutuhan dasar dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>• Kurangnya teknologi inovasi dan dukungan kemampuan finansial dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi</li> <li>• Residu sampah rumah tangga dapat dikurangi terlebih dahulu melalui pengolahan dalam TPS 3R sebelum masuk ke TPA</li> <li>• Proporsi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh yang terbatas sehingga hanya beberapa luasan kawasan kumuh saja yang dapat tertangani</li> <li>• Masih terdapat rumah yang tidak layak huni wilayah pedesaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kuantitas dan kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum</li> <li>• Akses sanitasi yang kurang memadai akan mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat</li> <li>• Penanganan sampah akan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memperpanjang umur TPA dan menghindari adanya kondisi darurat sampah</li> <li>• Apabila tidak ada penanganan terhadap kawasan kumuh perkotaan maka akan mempengaruhi image perkotaan yang kumuh dan kurang baik</li> <li>• Peningkatan penanganan Rumah Layak Huni (RTLH) dapat mempengaruhi keseluruhan jumlah total rumah yang ada dapat menjadi rumah yang layak dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses air bersih</li> <li>• Peningkatan akses sanitasi masyarakat</li> <li>• Integrasi program antar instansi dalam pengelolaan air limbah</li> <li>• Optimalisasi pembangunan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST</li> <li>• Dukungan armada persampahan dan sarana pengelolaan sampah yang memadai</li> <li>• Keterlibatan stakeholder di luar pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh</li> <li>• Komitmen dan integrasi antar instansi yang terkait dalam penanganan kumuh</li> <li>• Penyediaan Rumah Layak Huni (RTLH)</li> </ul>
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih diperlukannya penyelesaian pelanggaran K3 khususnya yang terkait dengan penjarangan PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar), penjarangan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, razia anak sekolah, penjarangan minuman keras, penjarangan penggunaan rokok illegal dan razia reklame</li> <li>• Ketersediaan SDM yang kompatibel dan memiliki sertifikasi bencana kebakaran, keterbatasan sarana prasarana penanganan kebakaran serta ketersediaan PMK (Pos Melayani Kebakaran) yang hanya berjumlah 3 pos untuk melayani bencana kebakaran di 18 kecamatan yang ada</li> <li>• Ketersediaan sarana prasarana pelayanan penanggulangan bencana untuk mendukung tanggap bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan angka kriminalitas sehingga kehidupan menjadi tertib, aman dan nyaman</li> <li>• Penegakan perda akan dapat dilakukan secara keseluruhan</li> <li>• Tingkat waktu tanggap (<i>respons time rate</i>) penanganan kebakaran akan meningkat sehingga pemenuhan SPM bidang tantribum dapat terpenuhi dengan optimal</li> <li>• Penanganan terhadap bencana tidak tertangani dengan cepat untuk meminimalisir korban dan dampak yang terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan aparat Trantibum</li> <li>• Tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman dan keamanan</li> <li>• Penguatan aparat penanganan kebakaran</li> <li>• Mobilisasi sarana prasarana kebakaran dan SDM yang memadai dalam menjangkau pelayanan kebakaran di seluruh wilayah</li> <li>• Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana</li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada keterbatasan kemampuan dalam memberikan pendampingan sosial sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Masalah Keajahteraan Sosial (PPKS) yang ditanganinya baik dari segi SDM maupun finansial</li> <li>Keterbatasan SDM dan kurangnya peran penyedia layanan sosial dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan pelayanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis</li> <li>Belum tercukupinya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikarenakan kurangnya peran dan kepedulian stakeholders (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penanganannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan PPKS yang tidak optimal akan berdampak pada masalah kemiskinan yang semakin kompleks</li> <li>Pemenuhan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas, anak dan lansia yang masih belum optimal akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin timpang</li> <li>Korban bencana yang menerima bantuan sosial yang tertangani akan berdampak positif pada erpenuhinya kuantitas dan kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kapasitas PSKS</li> <li>Fasilitasi dan bantuan kepada PPKS</li> <li>Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis</li> <li>Pemenuhan kebutuhan untuk korban bencana</li> </ul>
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme layanan antarkerja lintas daerah masih belum maksimal</li> <li>Jumlah lowongan kerja masih belum dapat mawadahi jumlah pencari kerja yang ada</li> <li>Belum semua pencari kerja mendapatkan pelatihan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencari kerja tidak dapat memasuki lowongan pekerjaan karena kemampuan dan ketrampilan yang terbatas</li> <li>Penduduk usia produktif yang akan meningkat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif</li> <li>Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja</li> <li>Peningkatan Program Kartu Pra Kerja Purbalingga</li> <li>Sinergitas pelatihan ketrampilan produktif dan pendirian pusat kreatif (<i>creative center</i>) dan <i>startup center</i></li> </ul>
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realita budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</li> <li>Kondisi internal orangtua/keluarga, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau masyarakat serta pengaruh nilai sosial kebudayaan dalam lingkup masyarakat sangat mempengaruhi adanya kekerasan terhadap anak</li> <li>Pengelolaan data gender dan anak belum didukung dengan sarpras dan SDM yang handal sehingga masih belum terlaksana dengan baik</li> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan desa/kelurahan layak anak dan belum maksimalnya petugas pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi tentang kebijakan desa layak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekerasan bersifat hidden crime, apabila semakin banyak kekerasan terhadap perempuan maka akan menunjukkan kualitas pembangunan keluarga yang masih rendah</li> <li>Belum optimalnya upaya secara preventif dan represif untuk melindungi anak</li> <li>Data gender dan anak apabila dapat tersedia dengan informatif dan tersaji dengan baik akan dapat memudahkan dalam upaya pencegahan/mitigasi serta pengawasan terhadap kekerasan perempuan maupun anak</li> <li>Desa/kelurahan yang tidak layak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan</li> <li>Peningkatan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan</li> <li>Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>Peningkatan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap anak</li> <li>Peningkatan komitmen kepala daerah dan organisasi perangkat daerah yang terlibat untuk dapat mengembangkan kabupaten layak anak</li> <li>Pembentukan Desa Ramah Anak</li> </ul>
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lumbung pangan sebagai tempat untuk lokasi penyimpanan hasil pertanian akan menjadi banyak yang mangkrak apabila tidak dikelola dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan</li> <li>Penetapan lahan pangan lestari/ abadi yang tidak boleh dialih fungsi pada kawasan budidaya, sedangkan</li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam menghitung sampel untuk perhitungan angka konsumsi pangan dan perhitungan PSAT aman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan konsumsi pangan yang belum sesuai dengan AKG akan mempengaruhi kurangnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat</li> <li>Tidak akan terbentuk desa rentan pangan yang dapat menyediakan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana</li> </ul>	pada kawasan non budidaya adalah memperketat perijinan alih fungsi lahan
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan appraisal sehingga permasalahan bidang tanah belum terselesaikan</li> <li>Masih ada beberapa masyarakat yang enggan memanfaatkan tanah Pemda dengan alasan kurang menguntungkan secara ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pertanahan terkait dengan sengketa tanah, proses ganti rugi, maupun pemanfaatan tanah pemda apabila tidak dapat tertangani akan berdampak pada masalah yang berkepanjangan sehingga tidak dapat tertuntaskan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan fasilitasi mediasi sengketa tanah agar dapat tertangani</li> <li>Peningkatan upaya secara persuasi dan teknis untuk dapat membuka akses jalan tanah Pemda sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang memanfaatkannya</li> </ul>
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas air dan udara mempunyai hasil pengukuran yang dinamis setiap saat, sehingga pemantauan air dan udara perlu diakumulasi dan dirata-ratakan di akhir tahun agar kualitasnya dapat dihitung secara keseluruhan</li> <li>Prioritasi anggaran terhadap peningkatan RTH belum maksimal dan belum adanya upaya melibatkan stakeholder lain dalam upaya penanganan RTH khususnya di kawasan perkotaan</li> <li>Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes</li> <li>Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal rutin setiap tahunnya</li> <li>Faktor internal seperti: belum jelasnya desain pengelolaan sampah maupun desain Standar Operasional Prosedur (SOP) pendirian bank sampah serta kurangnya sarana prasarana bank sampah. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena keterbatasan kompetensi pengelola bank sampah, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan dan masih kurangnya partisipasi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya pemantauan akan dapat mengantisipasi pencemaran udara dan air yang mengganggu kualitas lingkungan hidup</li> <li>Kebutuhan RTH di kawasan perkotaan yang belum sesuai standar berdampak pada kondisi penghijauan lingkungan menjadi kurang seimbang</li> <li>Masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah padahal limbah medis penting untuk dikelola karena terkait dengan dampak lingkungan dan kesehatan</li> <li>Apabila tidak terdapat pengawasan maka antisipasi adanya dampak lingkungan hidup tidak dapat terkendali</li> <li>Apabila volume sampah khususnya rumah tangga dapat berkurang sebelum menuju pada TPA, maka akan dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan kualitas air dan udara secara kontinyu</li> <li>Pengawasan terhadap pencemaran air dan udara</li> <li>Kepemilikan lahan milik pemkab yang dapat dialih fungsi menjadi RTH untuk mencukupi kebutuhan luasan RTH</li> <li>Pembangunan RTH untuk meningkatkan persentase RTH Publik</li> <li>Manajemen pengelolaan limbah B3</li> <li>Pengawasan kontinyu terhadap izin lingkungan</li> <li>Manajemen pengelolaan sampah yang optimal</li> </ul>
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum semua lapisan masyarakat memahami penggunaan teknologi informasi khususnya dalam layanan administrasi kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya optimalisasi kualitas layanan administrasi kependudukan dengan inovasi pelayanan dan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) sehingga belum dapat dikembangkan secara massif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui manajemen digitalisasi sistem layanan administrasi kependudukan</li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sumber daya manusia yang akan berpartisipasi dalam pembangunan desa serta sarana dan prasarana infrastruktur publik maupun pemerintahan desa yang belum memadai</li> <li>Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam memfasilitasi kerjasama desa, kurangnya koordinasi dalam pemenuhan administrasi pemerintahan desa, serta kurangnya inovasi dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan penataan desa belum optimal</li> <li>Desa menjadi kurang berkembang dan minim informasi mengenai sharing knowledge dengan desa lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi potensi desa melalui pengembangan desa tematik</li> <li>Peningkatan peran serta masyarakat melalui penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah</li> <li>Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana desa</li> <li>Digitalisasi desa</li> </ul>
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda memiliki anak</li> <li>Kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping</li> <li>Akses tempat pelayanan KB yang belum menjangkau ke seluruh peserta KB dan kualitas pelayanannya yang belum sesuai dengan harapan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan ber-KB akan dapat menurunkan angka kematian ibu dan permasalahan kesehatan perempuan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan cakupan pelayanan KB</li> <li>Penguatan program ber-KB</li> <li>Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi ber-KB secara kontinyu</li> </ul>
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya struktur jaringan trayek menyebabkan frekuensi perpindahan moda yang tinggi sehingga masyarakat merasa belum ada <i>feeder service</i> yang memadai untuk menghantarkan mereka ke titik tujuan akhir</li> <li>Perlunya pemerataan perlengkapan jalan kondisi baik pada seluruh ruas jalan kabupaten yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angkutan yang ada saat ini belum bisa diandalkan dan kurang tepat waktu sehingga belum memberikan faktor kenyamanan dan kemudahan</li> <li>Kelengkapan jalan yang belum memadai akan menimbulkan kesemrawutan jalan baik karena kemacetan ataupun gangguan keselamatan pengendara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi terminal</li> <li>Penentuan trayek angkutan yang lebih efektif dan efisien</li> <li>Peningkatan fasilitas kelengkapan jalan</li> </ul>
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan pada OPD yang memiliki website aktif belum keseluruhan dilakukan.</li> <li>Kurangnya inovasi dan keterbatasan SDM aparatur yang dapat mengembangkan aplikasi informatika untuk pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi aplikasi informatika baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan SDM yang menguasai teknologi informasi</li> <li>Peningkatan digitalisasi pelayanan publik dalam sistem teknologi informasi yang terintegrasi</li> <li>Peningkatan inovasi pelayanan publik</li> </ul>
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya prioritas anggaran untuk pelatihan SDM koperasi</li> <li>Kurang optimalnya upaya untuk melakukan proses sertifikasi/perizinan</li> <li>Masih rendahnya tingkat literasi para pelaku UMKM dengan digitalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SDM koperasi yang kurang berkualitas akan mempengaruhi kemampuan memahami jati diri dan menerapkan pelatihan SDM koperasi yang telah dilakukan</li> <li>Tanpa adanya sertifikasi maka identitas usaha akan kesulitan untuk mengurus perizinan lanjutan, sertifikasi, fasilitasi pendampingan, serta akses pembiayaan dan pasar</li> <li>Kemudahan akses permodalan UMKM tidak dapat terpenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi SDM koperasi</li> <li>Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan</li> <li>Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru</li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung pada kawasan peruntukan industri</li> <li>• Proses updating data dan informasi perizinan dan non perizinan membutuhkan SDM yang berkualitas dan sistem informasi yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kepedulian investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Proses perizinan dapat terhambat yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan kemudahan berusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan realisasi investasi dengan melakukan kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur</li> <li>• Penyediaan SDM berkualitas dan peningkatan sistem inovasi pelayanan publik</li> </ul>
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya dukungan anggaran dan fasilitas olahraga bagi para atlet, kurangnya minat masyarakat terhadap cabang tertentu sehingga membuat sponsor sulit untuk terlibat dalam mendukung olahraga secara keseluruhan, serta lemahnya sistem pengembangan atlet muda</li> <li>• Kurangnya kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan aktivitas pemuda dalam organisasi kepemudaan yang dapat memberikan kesempatan pemuda dalam melakukan kepemimpinan individu, domestik, dan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestasi olahraga dengan sumber daya manusia terlatih semakin berkurang</li> <li>• Partisipasi aktif para pemuda dalam organisasi semakin minim sehingga regenerasi para pemuda dapat terhambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fasilitasi keikutsertaan prestasi olahraga baik tingkat regional maupun nasional</li> <li>• Peningkatan fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi</li> </ul>
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan pelestarian budaya</li> <li>• Kurangnya even kebudayaan yang dapat mengaktualisasi tradisi ataupun seni yang ada; serta</li> <li>• Kurangnya sarana perlengkapan pendukung yang dapat mendorong kegiatan seni</li> <li>• Penetapan status kawasan cagar budaya yang belum jelas serta terbatasnya kemampuan daerah terhadap pemeliharaan cagar budaya yang mempunyai biaya konservasi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat untuk pelestarian budaya semakin tergerus perkembangan jaman</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan kawasan cagar budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan sarana perlengkapan kesenian</li> <li>• Peningkatan kerjasama multisektoral dengan pelaku seni budaya</li> </ul>
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya jumlah pustakawan, minimnya pengadaan bahan pustaka, serta minimnya minat baca masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka literasi yang masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana perpustakaan untuk mendukung kegiatan literasi</li> </ul>
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya manajemen kualitas air dalam pengelolaan budidaya perikanan dan terbatasnya teknologi untuk pengolahan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangbiakan dan budidaya perikanan air tawar menjadi kurang maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster perikanan budidaya</li> </ul>
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya promosi dan kelengkapan sarana dan prasarana wisata, kurangnya SDM yang berkualitas untuk pendampingan masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta masih kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup di daerah wisata yang ada</li> <li>• Perlunya penerapan yang aplikatif sesuai dengan pelatihan yang telah diperoleh serta komitmen dan konsistensi untuk pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan wisata menjadi tidak menarik bagi wisatawan</li> <li>• Dengan adanya komitmen terhadap pengembangan pariwisata maka pariwisata yang berbasis potensi lokal akan lebih berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata</li> <li>• Dukungan penyelenggaraan event nasional dan Internasional</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelaku wisata dan ekonomi kreatif</li> <li>• Optimalisasi <i>Tourism Information Center</i> (TIC)</li> <li>• Penguatan dan pengembangan desa wisata</li> </ul>

No.	Urusan yang Membutuhkan Intervensi	Faktor Penyebab	Implikasi yang Timbul	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran
24.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan air dan infrastruktur pertanian yang belum memadai, SDM dan kelembagaan pertanian yang masih lemah serta akses petani terhadap modal dan pasar lemah</li> <li>Total penyakit hewan yg didata oleh dinas maupun yg praktek mandiri perlu dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat kelancaran usaha tani</li> <li>Penyakit hewan dan penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dapat terkendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan sarpras pertanian dan jaringan irigasi teknis saluran sekunder, tersier dan non teknis</li> <li>Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan</li> </ul>
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya sarana prasarana kelengkapan pasar, manajemen pengelolaan pasar yang belum terkelola dengan baik dan terbatasnya SDM pengelola pasar</li> <li>Penurunan permintaan dan kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan pasar rakyat menjadi tidak layak usaha apabila tidak ditangani lebih lanjut</li> <li>Berkurangnya nilai ekspor yang akan mempengaruhi berkurangnya operasional perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi pasar rakyat dan desa</li> <li>Peningkatan produk ekspor yang lebih berdaya saing dengan memanfaatkan industri kecil yang ada</li> </ul>
26.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya kebutuhan penyertaan modal Pemkab Purbalingga kepada BUMD</li> <li>Minimnya SDM yang paham terhadap proses pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum sesuai rasio kecukupan modal sesuai ketentuan OJK</li> <li>Maturitas kelembagaan UKPBJ belum tercapai secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan deviden dari sektor BUMD</li> <li>Peningkatan kemampuan SDM dalam hal pengadaan barang dan jasa</li> </ul>
27.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya konsistensi dan komitmen OPD dalam melakukan inputing data</li> <li>Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan</li> <li>Kelemahan regulasi di bidang perpajakan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk taat pajak, database perpajakan yang belum lengkap dan akurat, serta lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas</li> <li>Keterbatasan kemampuan finansial dan SDM untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam lingkungan ASN</li> <li>Pengawasan belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data menjadi kurang berkualitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya</li> <li>Kurang optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>Pertumbuhan pajak daerah menjadi belum optimal</li> <li>Penerapan Sistem Merit ASN belum optimal</li> <li>Pengawasan yang belum mengarah pada poses digitalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan komitmen OPD dalam mengupdate data</li> <li>Peningkatan intensitas sosialisasi mengenai perencanaan, monitoring dan evaluasi</li> <li>Peningkatan intensitas sosialisasi mengenai perpajakan</li> <li>Peningkatan implementasi unit kerja untuk mewujudkan akuntabilitas</li> <li>Digitalisasi layanan publik serta dukungan penciptaan lingkungan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan berbasis teknologi informasi</li> </ul>
28.	Unsur Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sumberdaya yang kompeten dalam melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dan keterbatasan anggaran dalam proses pelaksanaan sosialisasi tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawasan kebangsaan tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan secara kontinyu</li> </ul>
29.	Unsur Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat dalam Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum sepenuhnya didukung dengan peraturan yang bersifat teknis operasional sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan publik menjadi tidak optimal sehingga masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pelayanan di kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan komitmen pimpinan dan organisasi</li> <li>Optimalisasi pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT</li> </ul>

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai atau kondisi riil yang terjadi saat ini dengan rencana atau standar yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kesenjangan atau gap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mencakup kondisi urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen dimana ini adalah angka penurunan tertinggi di Jawa Tengah yang membuat angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga keluar dari 5 besar termiskin. Namun, masih ada 1,17 persen kemiskinan ekstrem yang perlu diselesaikan agar mendekati target 0 persen. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SMP dan penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Disamping fokus terhadap pengentasan kemiskinan, lebih lanjut ialah berkaitan dengan bagaimana menciptakan masyarakat yang resilience terhadap kemiskinan.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan parameter yang menunjukkan akses Pendidikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Capaian RLS dan HLS masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Disamping itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga masih kecil persentasenya. Bahkan masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) pada anak umur 13-15 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan.
3. Disamping itu, RLS dan HLS Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan disetiap tahun, hanya hanya pertumbuhan nilai tersebut memiliki nilai pertumbuhan yang menurun, yang berarti bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dikhawatirkan akan terus mengalami penurunan.
4. Walaupun nilai IPM Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan namun laju pertumbuhannya kecil. Apabila dilihat dari komposisinya, Usia Harapan Hidup (UHH) masih berada pada angka 74,19 tahun dimana posisi relatif di Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-3 terbawah. Disamping itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada pada 7,36 tahun yang menunjukkan bahwa penduduk bersekolah di

Kabupaten Purbalingga rata-rata mencapai tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP dimana posisi relatif RLS tersebut menempati peringkat ke-9 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada pada 12,03 tahun yang menunjukkan bahwa warga Purbalingga berpeluang untuk melanjutkan sekolahnya hingga 12 tahun lamanya atau sampai lulus SMA dan lanjut ke Diploma 1. RLS tersebut menempati peringkat ke-4 terbawah di Provinsi Jawa Tengah. Dari posisi komposit IPM tersebut menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia yang disebabkan belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 dan usia 13-15 tahun hampir memenuhi capaian SPM (100 persen), namun APS usia 16-18 tahun masih menunjukkan perkembangan yang masih sangat rendah. Masih ada penduduk di Kabupaten Purbalingga yang belum/tidak bersekolah khususnya pada jenjang usia 16-18 tahun. Faktor penyebabnya dilihat dari *supply-demand side* yaitu kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan.
6. Kualitas pendidikan yang dilihat dari skor kemampuan literasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kondisi baik. Sementara itu skor kemampuan numerasi pada jenjang SD dan SMP tersebut termasuk dalam kategori sedang. Belum optimalnya kemampuan literasi numerasi tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah dan kemajuan teknologi informasi
7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purbalingga berada pada angka 7 dimana predikat tersebut termasuk kategori rendah sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan literasi masyarakat. Perlu adanya pengaktifan kembali perpustakaan-perpustakaan desa maupun kelurahan. Jika memungkinkan untuk dikikutsertakannya pemuda sebagai agen literasi.
8. Masih terdapat kasus kematian ibu yang ditunjukkan dari Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 sebesar 95,28. Sementara itu jumlah kematian ibu berada pada kisaran 11 kasus yang sebagian besar terjadi akibat adanya pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil. Disamping itu, kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kondisi ibu belum siap untuk memiliki anak.
9. Masih adanya permasalahan stunting yang terjadi karena malnutrisi pada ibu dan anak. Penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting yaitu rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan. Disamping itu, stunting juga dapat disebabkan karena literasi masyarakat akan pola hidup dan asuh anak yang kurang sehingga menganggap bahwa stunting terjadi hanya karena Kesehatan saja.
10. Masih adanya kasus penyakit menular dan tidak menular yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Purbalingga. Adapun untuk Kasus penyakit menular ialah kasus tuberkulosis (TBC). Walaupun treatment coverage TB meningkat, namun pengobatan secara tuntas sampai sembuh sangat diperlukan untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Hal tersebut juga perlu didukung oleh perilaku hidup

bersih dan sehat dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penyakit tidak menular yang memerlukan perhatian ialah terkait kasus Hipertensi, dimana kasus ini merupakan penyakit tidak menular yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Purbalingga dan terus mengalami peningkatan.

11. Persentase kepesertaan JKN sudah mencapai 100% dimana seluruh penduduk sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun permasalahan dan tantangan ke depannya yaitu kepesertaan aktif yang masih berada pada angka 78% (di bawah 80%). Kepesertaan aktif yang rendah dapat menghambat pembangunan dan kemajuan daerah. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan aktif, peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan fasilitas kesehatan terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu saja akan menambah biaya masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
12. Risiko bencana di Kabupaten Purbalingga berupa ancaman bencana tanah longsor, gempa, angin dan kebakaran. Diantara beberapa kabupaten sekitar yang ada di kawasan Barlingmacakeb, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Banyumas dimana secara lokasi berada pada lereng Gunung Slamet. Adanya risiko bencana tersebut juga belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.
13. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan masih ditemukannya kondisi jalan yang rusak dan rusak berat. Penanganan terhadap kondisi jalan baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa sangat berkaitan juga dengan fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan. Lambat laun, kondisi jalan yang rusak secara langsung dapat berpengaruh pada aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
14. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi aman. Belum semua desa/kelurahan mendapatkan alokasi air minum perpipaan dan non perpipaan yang aman dan dilakukan pengujian. Begitu pula dengan kondisi sanitasi, belum terdapat IPLT untuk memwadahi pengolahan lumpur tinja saat ini, sehingga kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil.

#### **B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya:

1. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Peran sektor Pendidikan dalam menyiapkan anak didiknya agar sesuai dengan kebutuhan industri semakin penting dan perlu sinergitas diantara keduanya. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan

penilaian hasil kerja siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi perlu didorong kembali dan disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Lahan sawah mengalami penurunan secara luasan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana ada beberapa lahan sawah yang telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan. Sementara itu luasan bukan lahan sawah (kebun campur maupun tegalan) dan lahan bukan pertanian (perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan) mengalami kenaikan. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan berkurangnya lahan produktif pertanian.
3. Masih adanya pencemaran air yang ditunjukkan pada Indeks Kualitas Air baik pada kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia) yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar ringan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga serta pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai. Kondisi tersebut akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak untuk kehidupan serta penurunan kualitas lingkungan.
4. Sebesar 8,63 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat karena belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal.
5. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tren emisi GRK naik sebesar 6% dimana salah satu sektor yang berkontribusi menghasilkan emisi paling tinggi yaitu sektor energi yang didominasi dari kegiatan transportasi, industri manufaktur dan residential. Peningkatan emisi GRK tersebut akan berdampak pada perubahan iklim seiring dengan belum diimbangi dengan upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK.
6. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan, sementara itu laju kenaikan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan volume timbulan sampah yg ditangani baik itu yang berasal dari TPA, Bank Sampah, TPS 3R, KSM dan Pengepul Rosok, masih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Kondisi tersebut terjadi karena masih belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, apabila tidak ditangani secara inklusif permasalahan sampah lambat laun dapat menjadikan penurunan kualitas lingkungan.
7. Masih terdapat 11 desa dengan status desa berkembang dengan potensi dan sumber daya yang ada dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi belum mencapai desa maju dan mandiri. Hal tersebut disebabkan kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergali.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari predikat cukup menjadi sangat baik. Namun terdapat tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi ke depannya, yaitu masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi dengan menuntaskan draft perbup tentang SMKI serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM.
9. Kualitas pelayanan transportasi perlu ditingkatkan. Terdapat penurunan rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa titik ruas jalan karena tingginya volume kendaraan yang melintas pada waktu tertentu.
10. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Purbalingga semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Salah satu dimensi IKG ialah keterwakilan perempuan di parlemen masih kecil sehingga peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang.
11. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pasca covid-19 masih mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menurun dari 5,41 di tahun 2022 menjadi 4,51. Walaupun di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,55 namun laju pertumbuhannya masih tergolong kecil. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran.
12. Jumlah total UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun, beberapa kesulitan yang menjadi kendala bagi UMKM adalah kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM. Pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Purbalingga juga menjadi permasalahan dimana rasio kewirausahaan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.
13. Perlu adanya peningkatan pembinaan dan pendampingan atlet berpotensi sejak dini. Disamping itu juga perlu didukung dengan sarana infrastruktur olahraga yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan atlet tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Purbalingga.
14. Apabila dilihat dari kondisi kebudayaan yang ditunjukkan pada beberapa komponen yang ada, menunjukkan bahwa adanya penurunan kondisi budaya di Kabupaten Purbalingga dilihat dari masih kecilnya persentase penetapan cagar budaya yang ada dan objek pokok kebudayaan daerah yang dilestarikan, berkurangnya minat masyarakat terhadap museum, serta masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan dan taman baca masyarakat. Kondisi tersebut juga dikarenakan semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang

terhadap pelestarian budaya dan kesenian, serta pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal.

### C. Urusan Pemerintah Pilihan

Beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan pilihan diantaranya:

1. Sektor pertanian merupakan salah satu kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun secara laju pertumbuhannya cenderung stabil, beberapa permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan pupuk dan hama tanaman serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian. Permasalahan dan tantangan lain yang terjadi yaitu masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil serta semakin menurunnya keikutsertaan generasi muda untuk menjadi petani.
2. Walaupun bukan merupakan sektor basis, namun sektor industri pengolahan memberikan *share* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Namun terdapat tantangan yang terjadi pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga. Industri yang ada saat ini sebagian besar merupakan industri padat karya yang kondisinya sangat terpengaruh oleh perekonomian global apabila terjadi penurunan ekspor dan pasar domestik dikuasai oleh barang impor. Hal tersebut akan mengakibatkan kinerja yang melambat. Bahkan efek dari pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Disamping itu, permasalahan sektor industri juga terjadi karena belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri juga menjadi permasalahan tersendiri yang akan mempengaruhi perkembangan sektor industri ke depannya.
3. Sektor perdagangan di Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga dimana sektor perdagangan juga menempati urutan ketiga dalam PDRB setelah lapangan usaha industri dan pertanian. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan yaitu belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan.
4. Pada dasarnya Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa kawasan wisata yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan destinasi tujuan wisata. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (pariwisata) di Kabupaten Purbalingga cenderung stabil dan meningkat, namun persentasenya kecil. Beberapa permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

#### **D. Unsur Penunjang**

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Purbalingga dinilai cukup baik dimana ada peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Masih terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depannya yaitu belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

#### **2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada urusan-urusan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Purbalingga yaitu :

##### **A. Kualitas Manusia yang Belum Optimal**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan terkait dengan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal terkait dengan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang berpendidikan dan sehat yang akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesejahteraan. Kualitas hidup tersebut dapat dilihat dari peningkatan penghasilan, kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Kualitas hidup yang tinggi juga akan mempengaruhi kualitas manusia.

Perwujudan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan pendidikan ditunjukkan dengan adanya permasalahan belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar berupa pendidikan secara merata dan inklusif. Kondisi tersebut ditunjukkan pada pencapaian RLS dan HLS yang belum maksimal dan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih rendah. Bahkan masih terdapat Anak tidak Sekolah (ATS) yang menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata. Disamping itu, penduduk dengan pendidikan rendah merupakan penduduk rentan miskin di Kabupaten Purbalingga. Literasi juga menjadi permasalahan kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya re-aktivasi terhadap perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kecamatan, sehingga minat membaca masyarakat meningkat.

Sementara itu kualitas manusia di Kabupaten Purbalingga juga menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik yaitu masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita, masih tingginya kasus stunting serta masih terdapat penemuan penyakit menular dan tidak menular. Disamping itu akses fasilitas kesehatan juga masih terbatas sarana prasarannya dan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan mempunyai prioritas layanan unggulan.

Demikian juga halnya perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini juga masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi masih adanya kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran. Selain kehidupan sosial, kehidupan budaya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami pergeseran dimana semakin berkurangnya regenerasi budaya dan

pelestariannya yang lambat laun dapat mengikis nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

#### **B. Pembangunan Ekonomi yang Belum Merata dan Optimal**

Pembangunan ekonomi yang belum merata dan optimal merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan yang ada antara lain pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi, daya saing angkatan kerja masih rendah, penurunan kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri yang kurang kondusif, kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal, kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing. Pemanfaatan terkait data produk unggulan daerah dapat menjadi daya dongkrak untuk meningkatkan *bargaining power* Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi penting agar dapat meningkatkan citra diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Purbalingga perlu didorong tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang masih mengalami fluktuasi pasca covid-19 juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi global yang menyebabkan pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Diperlukan pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah yang menjadi daya, kekuatan dan kemampuan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dilihat dari kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didorong dan dioptimalisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah.

#### **C. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien sehingga reformasi birokrasi belum terselenggarakan dengan optimal. Upaya reformasi birokrasi ditujukan untuk memungkinkan pemerintah dalam berkerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat.

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sebagai perangkat pemerintah yang belum sesuai juga menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola pemerintahan. Minimnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan penggunaan teknologi, merupakan faktor lain yang perlu diperhatikan di seluruh perangkat daerah. Perlunya sumber daya aparatur yang kompatibel serta transformasi digital tata kelola pemerintahan yang diterapkan melalui inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan memadai, ke depannya akan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

#### **D. Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengalami Degradasi**

Permasalahan kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi merupakan permasalahan utama dari berbagai permasalahan: daya dukung lingkungan masih rendah, penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon. Kualitas lingkungan hidup menjadi tolok ukur untuk keberlanjutan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak didukung dengan kesadaran dan edukasi akan lingkungan serta perilaku hidup bersih akan sangat mempengaruhi degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Disamping itu, tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya, akan mempengaruhi daya dukung serta daya tampung air dan pangan. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin dirasakan ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sebagai dampak dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

#### **E. Pengembangan Wilayah yang Belum Optimal**

Pengembangan wilayah yang belum optimal merupakan permasalahan utama dari infrastruktur pengembangan wilayah belum merata dan penataan ruang yang belum optimal. Kedua hal tersebut merupakan hasil pembangunan yang harus diperhatikan permasalahannya untuk keberlanjutan pembangunan ke depannya. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan pada dasarnya menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Disamping itu, kualitas pelayanan transportasi juga perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kondisi jaringan jalan dan transportasi yang merata secara kuantitas dan kualitas akan menciptakan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Permasalahan infrastruktur lain yaitu terkait dengan pemenuhan sarpras air bersih, sanitasi dan hunian yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan sarpras tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah juga disebabkan oleh kondisi penataan ruang, dimana penataan ruang yang belum optimal baik dalam pemanfaatan maupun pengendalian ruang akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti misalnya dalam pemanfaatan lahan pertanian dan non pertanian maupun optimalisasi kawasan peruntukan industri yang ada di Kabupaten Purbalingga. Semua permasalahan terkait penataan ruang terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.

Secara lebih rinci permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada pemetaan tabel berikut ini.

**Tabel II.176. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga**

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	Rendahnya tingkat pendidikan dari kelompok rentan miskin	Pendidikan berkualitas yang belum merata	Kualitas manusia yang belum optimal
2	Belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan sehingga capaian RLS dan HLS belum maksimal serta persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih kecil		
3	Kurangnya penyediaan layanan pendidikan, terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan perkembangan teknologi serta kurangnya keinginan/kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan		
4	Kurangnya pembiasaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal literasi numerasi, kurangnya pembiasaan membaca baik di sekolah maupun di rumah, perlunya re-aktivasi perpustakaan desa maupun kecamatan, dan kemajuan teknologi informasi sehingga kemampuan literasi numerasi belum optimal		
5	Masih terdapat jumlah kasus kematian ibu yang disebabkan jumlah kelahiran hidup yang menurun, kasus pendarahan dan eklamsia serta penyakit degeneratif jantung pada ibu hamil	Derajat kesehatan yang masih rendah	
6	Terjadinya stunting karena malnutrisi pada ibu dan anak, rumah tangga rawan pangan, pola asuh tidak tepat serta akses pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak adekuat		
7	Masih adanya kasus penyakit menular yaitu tuberkulosis (TBC) dan penyakit tidak menular yaitu hipertensi yang belum tuntas penanganannya		
8	Belum meratanya fasilitas kesehatan yang memadai terutama di pelosok desa, dimana masyarakat harus menuju ke faskes yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan terlebih dahulu dalam memanfaatkan layanan JKN yang dimiliki	Perlindungan sosial yang belum optimal	
9	Masih adanya kantong-kantong kemiskinan yang belum terselesaikan penanganannya		
10	Pemberian jaminan sosial yang belum tepat sasaran, tata kelola kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat yang belum efektif	Pergeseran nilai-nilai sosial budaya	
11	Semakin berkurangnya regenerasi budayawan dan seniman penggiat pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya tak benda perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian		
12	Pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal		
13	Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi masih kurang	Pelambatan dan penurunan aktivitas ekonomi	
14	Pengurangan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran		
15	Belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja yang ada karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan penyerapan tenaga kerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki		
16	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian baik dikarenakan permasalahan pupuk dan hama tanaman, serta integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian.		Penurunan kontribusi sektor pertanian
17	Masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian karena banyak yang hanya menjadi buruh tani dengan kepemilikan lahan yang kecil. Generasi muda enggan untuk terlibat dalam sektor pertanian, dan lebih memilih sektor lainnya		

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
18	Pengaruh perekonomian global menyebabkan sektor ekspor menurun mengakibatkan kinerja industri pengolahan melambat	Kontribusi sektor industri yang kurang kondusif	
19	Belum optimalnya ekspor unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, serta sistem distribusi produk perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan yang belum optimal	
20	Belum optimalnya promosi pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan aksesibilitas pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik pariwisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata yang masih renda serta belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal	
21	Kurangnya pemodal, akses pasar dan distribusi pemasaran serta digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM	Pengembangan sektor ekonomi kreatif yang belum berdaya saing	
22	Belum optimalnya pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing.		
23	Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan dinamis, masih lemahnya kapasitas sumber daya aparatur dan belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, serta pola kolaborasi dimana pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
24	Masih rendahnya penyusunan kebijakan terhadap keamanan informasi serta lemahnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM	Kurangnya inovasi pelayanan publik	
25	Bencana terjadi karena belum didukung oleh pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di wilayah rawan bencana, edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana	Daya dukung lingkungan masih rendah	Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi
26	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dalam rumah tangga	Penurunan kualitas lingkungan	
27	Pemakaian pupuk kimia yang tinggi pada lahan pertanian dimana muara residu pupuk tersebut menuju ke sungai		
28	Belum optimalnya manajemen penanganan sampah, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah		
29	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang belum optimal	Berkurangnya akses pangan dan ketahanan pangan masyarakat	
30	Belum adanya upaya yang optimal untuk menurunkan emisi GRK	Terjadinya perubahan iklim dan emisi karbon	Pengembangan wilayah yang belum optimal
31	Fluktuasi anggaran dana alokasi penanganan jalan	Infrastruktur pengembangan wilayah belum merata	
32	Menurunnya tingkat ketersediaan moda transportasi khususnya angkutan umum, sementara jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat		
33	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.		
34	Kemampuan desa dalam mengelola potensi untuk kemajuan desa dalam ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan belum tergal		
35	Perubahan tata guna lahan dimana beberapa lahan sawah telah dijadikan kawasan terbangun ataupun diurug menjadi tanah pekarangan	Penataan ruang yang belum optimal	
36	Belum optimalnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri. Disamping itu juga terjadi karena implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang belum optimal.		

## 2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan beberapa pertimbangan dari hasil analisis kondisi umum yang memunculkan beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

### A. Transformasi Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Manusia menjadi modal dalam pembangunan karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi utama pembangunan. Manusia yang berkualitas dapat memegang peran utama dalam proses transformasi suatu wilayah karena dapat membawa implikasi yang sangat penting dalam beberapa aspek yang menopang pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2030 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 65 tahun) menjadi yang terbesar. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengoptimalkan potensi manusia atau penduduk tersebut melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penting dilakukan investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan sosial budaya terhadap manusia yang menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar diperlukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam konteks kesehatan masyarakat, perwujudan tingkat harapan hidup yang tinggi baik untuk laki-laki dan perempuan menjadi dampak keberhasilan bagi pembangunan. Tentu saja hal tersebut perlu ditopang dengan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Dalam hal perlindungan sosial, tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing. Apabila kebutuhan dasar terlayani dengan baik didukung dengan perlindungan sosial yang merata maka angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dapat teratasi. Demikian juga, pembangunan social budaya melalui ketahanan sosial kebudayaan dan kerukunan umat beragama juga didasari oleh edukasi dan literasi keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal tersebut karena pengaruh globalisasi dan modernisasi ke depannya dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang perlu diantisipasi dengan membangun ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Purbalingga.

### B. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Purbalingga perlu didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah dengan mengedepankan potensi sumberdaya lokal. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dalam PDRB ADHK, sektor primer berupa pertanian

cenderung mengalami kenaikan namun dengan peningkatan yang kecil. Sementara itu, sektor sekunder berupa industri pengolahan ketika pandemi covid-19 mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan kemudian dapat merangkak naik. Sementara itu, sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran serta jasa cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan sangat signifikan terjadi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan, seiring dengan meningkatnya distribusi maupun ekspedisi barang antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga saat ini berada pada pemulihan kinerja ekonomi pasca pandemi covid-19. Pembangunan ekonomi inklusif merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi inklusif ke depannya diperlukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Disamping itu juga tidak mengesampingkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau dan ramah lingkungan sebagai upaya menerapkan ekonomi hijau.

#### **C. Transformasi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan merupakan pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tata kelola pemerintah menjadi isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah yang belum optimal dapat menjadi kendala utama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang responsive, maka diperlukan kolaborasi dan partisipasi dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Transformasi tata kelola birokrasi ini menjadi penting guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Guna mewujudkan transformasi tersebut, birokrasi yang agile yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat serta didukung keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga mendatang, mengingat penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga pada saat ini bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

#### **D. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Optimalisasi Ketahanan Pangan**

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga selanjutnya yang membutuhkan perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih

mengedepankan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan akan meningkat khususnya untuk kawasan hunian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga terdapat kenaikan pada lahan terbangun baik itu untuk perumahan permukiman (perkampungan), fasilitas perkantoran maupun perdagangan, sementara lahan sawah semakin menurun luasannya. Apabila dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Disamping itu juga, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah dan emisi gas rumah kaca. Kedua dampak lingkungan tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Disamping itu, pendidikan kesadaran berupa literasi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga tentang alternatif pelestarian lingkungan dengan melakukan aktivitas yang lebih ramah lingkungan khususnya terkait dengan ketahanan air, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau juga menjadi daya dukung terhadap keberlanjutan lingkungan. Lebih lanjut dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana alam dan perubahan iklim.

#### **E. Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan**

Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan tantangan penting yang harus diatasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purbalingga membutuhkan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur untuk transportasi guna meningkatkan keterhubungannya antara Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta interaksi dengan kabupaten sekitar. Konektivitas wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga baik dari sektor primer berupa pertanian, sektor sekunder berupa industri pengolahan maupun sektor tersier berupa perdagangan dan jasa. Makin meningkatnya ketersediaan jalan dan sistem transportasi umum akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Purbalingga.

Disamping itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga ketersediaan air bersih, sanitasi dan jaringan listrik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Purbalingga yang masih kesulitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga mempengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga perlu dipastikan terkait pemerataan akses dan kualitas infrastruktur, peningkatan sarana prasarana air bersih, sanitasi, listrik, serta koordinasi yang lebih baik antar pemerintah adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan

Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang juga akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan

dengan kelengkapan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Pemanfaatan ruang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Tantangan ke depannya adalah upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut sangat relevan dan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga 20 tahun mendatang, mengingat implementasi dan konsistensi penerapan kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga memiliki rencana pola ruang wilayah yang beragam dan cukup strategis.

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2025 termasuk di dalamnya perkiraan potensi dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Perekonomian nasional tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Selama tahun 2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92 persen

Laju perekonomian tahun 2025 diharapkan tumbuh 5,2 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Program Makan Bergizi Gratis akan memiliki Efek Pengganda antara lain : Alokasi belanja program MBG dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja. MBG yang terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah agar mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.

Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Laju inflasi pada tahun 2024 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2024 pada rentang 2,26 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,30 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.000 per USD.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 yang ditetapkan dalam APBN 2025 hasil pembahasan dengan DPR RI, antara lain, Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp16.000,00/US\$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen dan lifting minyak 605 (ribu bph). Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US\$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.

Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2026 dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan local taxing power untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.
4. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antar daerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
5. Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Postur Makro Fiskal 2025 dan 2026, masih dibayangi ketidakpastian global. Kebijakan fiskal 2025 merupakan masa transisi dari Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan baru. Substansi kebijakan fiskal 2025, menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Agar APBN tetap sehat dan kredibel, defisit dikendalikan  $2,45\% - 2,82\% \text{ PDB} \leq \text{APBN}$  yang sehat, menjadi jangkar untuk mendukung “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2026**

Indikator	Realisasi 2024	APBN 2025	PROYEKSI 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,2	5,5-6,5
Inflasi	2,26	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp. /US\$)	15.847	16.000	14.500-14.900
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	7,1	7	6,27-8,29
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	71,61	82	70-90

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2025

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.817.776,96 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp1.157.025,94 miliar. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,95 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 4,97 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,03 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 16,38 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 8,87 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 12,10 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2024 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 7,44 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 55,29 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 33,84 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Agustus 2024 sebesar 4,78persen. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 21,91 juta orang, bertambah 839,71 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2023. Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat meningkat sebesar 2,02 persen poin, menjadi 73,74 persen pada Agustus 2024. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 20,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Sementara itu, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 19,99 juta orang penduduk bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Artinya terdapat kenaikan angkatan kerja sebanyak 839.71 juta orang, kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 872,52 juta orang dan penurunan pengangguran sebanyak 32,81 juta orang pada periode tersebut.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja serta penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan lain-lain 25,54 persen; Industri Pengolahan sebesar 20,90 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,05 persen. Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2023 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (444,90 ribu orang); Industri Pengolahan (176,26 ribu orang); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (103,66 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Jasa Pendidikan sebesar 33,75 ribu orang.

Selanjutnya dalam proses pembangunan berkelanjutan dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Arah Kebijakan masih ditujukan pada “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”, dengan prioritas daerah diarahkan pada : a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas; b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,

berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dari uraian kondisi perekonomian makro di tingkat nasional dan regional Jawa Tengah tersebut, maka dapat dilakukan analisa perbandingan dan proyeksi kinerja makro Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir berfluktuasi antara-1,23 persen hingga 5,37 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Purbalingga turun drastis mencapai minus 1,23 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 3,19 %. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 5,41 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi sebesar 4,51 persen. Meskipun demikian, di tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan ke 4,55 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga cukup rendah, tingkat inflasi tahun ke tahun 2024 tercatat 1,51 persen(mengacu kota Purwokerto). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer yang menjadi andalan Kabupaten Purbalingga.

Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat berjalan selaras dan sinergis. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 bertujuan untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian, dengan fokus pada : Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:

- a. Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
- b. Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
- c. Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
- d. Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
- e. Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.
- f. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui: Pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup center untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) dan wirausaha muda

**Tabel III.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan 2026**

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Asumsi 2026
1	PDRB (HK)	Rp. Juta	19.533	22.979	24.127
2	PDRB perkapita (HB)	Rp. Ribu	32.090	35.000-36.000	36.000-38.000

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Asumsi 2026
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 – 5,3	5,3- 5,7
4	Tingkat Inflasi	Persen	1,51	1-3	1-3
5	Penduduk Miskin	Persen	14,18	14,06-12,86	12,86-11,86
6	Tingkat Pengangguran	Persen	4,96	4,96-4,79	4,79 – 4,5
7	IPM	Angka	70,97	71,63	71,96

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow programme priority* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah. Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR). Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penataan database subyek dan obyek pajak - retribusi daerah, serta perbaikan sistem pemungutan pendapatan.
2. Pengalokasian belanja secara efektif dan efisien serta peningkatan kualitas belanja pelayanan publik;
3. Menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian SPM dan Prioritas Nasional.
4. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan. Data pertumbuhan pendapatan tahun 2020-2024 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III.3. Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024**

Realisasi Pendapatan Daerah				Rata-rata Pertumbuhan
2021	2022	2023	2024	
1.957.400.419.000	2,022,884,629,933	2.066.961.116.999,77	2.107.508.275.112	1,98 %

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang harus diterapkan paling lambat Tahun 2024. Penerapan UU HKPD di Tahun 2024 berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah karena terdapat beberapa obyek pajak yang tarifnya menurun dan obyek retribusi yang sudah tidak diizinkan untuk dipungut pendapatannya.

Rasio kapasitas fiskal pemerintah daerah tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk kapaitas fiskal Kabupaten Purbalingga. Hal ini diakarenakan adanya perubahan formula dalam penentuan rasio kapasitas fikal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan membagi antara kapasitas fiskal daerah dengan total belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuagnan Nomor 65-2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 0,792 termasuk dalam kategori Sangat Rendah.

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya dianggarkan sebesar seluruh hak yang seharusnya diterima tanpa dikurangi biaya dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari bersumber potensi daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di daerah.

Sedangkan pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, dan ii) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari pendapatan hibah yang merupakan penerimaan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti hibah air minum, upland dan lain-lain. Selengkapnya perkembangan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.4. Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 s.d Tahun 2024**

KODE	URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>306.197.569.020</b>	<b>341.080.114.455</b>	<b>353.388.335.105</b>
4.1.01	Pajak Daerah	73.252.952.786	79.870.598.081	86.005.311.246
4.1.02	Retribusi Daerah	14.737.903.034	18.477.793.831	184.531.795.419
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.664.097.904	20.501.788.972	21.449.060.132
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	198.542.615.296	222.229.933.571	61.402.168.308
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.701.873.475.073</b>	<b>1.715.757.338.360</b>	<b>1.754.027.191.497</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.556.922.664.870	1.568.882.001.491	1.609.358.984.005
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144,950,810,203	146.875.336.869	144.668.207.492
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.813.585.840</b>	<b>10.123.664.184</b>	<b>810.506.807</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.813.585.840	10.123.664.184	810.506.807
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.022.884.629.933</b>	<b>2.066.961.116.999</b>	<b>2.108.226.033.409</b>

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD. Sementara itu, Dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat diproyeksikan masih sama dengan Tahun 2024. Sedangkan dana transfer dari Pemerintah Provinsi khususnya dana bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan turun dibandingkan Tahun 2024 disesuaikan dengan kebijakan terkait opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui :**

- a. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan Penyiapan penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berkonsekuensi terhadap pajak dan retribusi daerah
- b. *Updating data base* wajib dan obyek pajak/ retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi;
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;
- d. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- e. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;
- f. Optimalisasi manajemen kas daerah.

**2. Peningkatan pendapatan transfer melalui :**

- a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Penyiapan readiness criteria sesuai persyaratan yang dibutuhkan dana alokasi khusus
- d. Peningkatan tatakelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.

**3. Mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat.**

Dalam upaya mendapatkan alokasi hibah pemerintah dengan melakukan

1. sinkronisasi potensi daerah dengan program dan prioritas nasional.
2. Menyiapkan Readiness criteria (RC) untuk program-program pusat

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang ditetapkan, Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp. 2.169.185.841.000,00- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 452.320.999.000,00 atau sekitar 20,85% dari total target pendapatan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari dari Pajak Daerah Rp. 165.326.186.000,00, Retribusi Daerah Rp. 207.044.528.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 23.129.554.000,00, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp. 56.820.731.000,00.
- b. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.703.949.842.000,00 atau 78,55% dari total pendapatan. Pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.598.123.539.000,- dengan komponen :
  - Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.356.306.514.000,00, terdiri dari : Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 35.709.859.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 937.485.047.000,00, dan Dana Transfer Khusus / Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 383.111.608.000,00
  - Dana Desa sebesar Rp. 241.817.025.000,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar Rp. 105.826.303.000,00.

- c. Pendapatan Hibah, ditargetkan sebesar Rp. 12.915.000.000,- . Hibah pada tahun 2026 merupakan kegiatan penerusan hibah pusat untuk program Upland selama 2 tahun yakni tahun 2025 dan 2026.

**Tabel III.5. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026**

KODE	URAIAN	2025	2026	2027
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.096.465.786.000</b>	<b>2.169.185.841.000</b>	<b>2.204.523.247.000</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>400.401.594.000</b>	<b>452.320.999.000</b>	<b>478.916.575.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	158.837.000.000	165.326.186.000	172.401.729.000
4.1.02	Retribusi Daerah	165.519,199.000	207.044.528.000	223.563.312.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.847,965.000	23.129.554.000	25.356.778.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.197,430.000	56.820.731.000	57.594.756.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.682.609.692.000</b>	<b>1.703.949.842.000</b>	<b>1.725.606.672.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.870.655.000	1.598.123.539.000	1.619.693.011.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.739.037.000	105.826.303.000	105.913.661.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.454.500.000</b>	<b>12.915.000.000</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.454.500.000	12.915.000.000	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.096.465.786.000</b>	<b>2.169.185.841.000</b>	<b>2.204.523.247.000</b>

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur rencana belanja daerah tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka mewujudkan sekolah murah bagi siswa SD dan SMP; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan

program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.

- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan hibah pendidikan tingkat dasar untuk sekolah swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Pramuka, PMI, organisasi olahraga, organisasi Masyarakat, Lembaga swadaya Masyarakat, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin, pemenuhan kebutuhan pokok dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk pembangunan/rehabilitasi jalan jembatan, jaringan irigasi, belanja modal peralatan dan mesin lainnya.
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
    - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; Belanja Bagi hasil diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui otonomi desa dan yang bersifat spesifik untuk meningkatkan sinergitas dukungan desa terhadap prioritas daerah sesuai kewenangannya.
    - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa bersifat umum dan bersifat khusus antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, TMMD dan pengembangan kawasan pedesaan, serta bantuan keuangan khusus dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah, sampai saat ini belanja pegawai pemerintah kabupaten purbalingga masih diatas 30 %. Kebutuhan pendanaan baik yang rutin dan wajib serta prioritas diatas kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (*creative financing*) agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi.

Belanja Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

KODE	URAIAN	2021	2022	2023	2024
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	2.005.085.839.686	2.232.953.832.000	2.069.051.293.426	2.164.267.388.304
<b>5.1</b>	Belanja Operasi	1.404.432.290.502	1.543.411.856.932	1.508.049.203.836	1.637.045.212.580
<b>5.2</b>	Belanja Modal	202.145.903.338	271.144.255.068	139.110.836.234	104.346.734.234
5.4	Belanja Tidak Terduga	5.181.009.694	9.351.830.000	423.658.756	355.255.690
5.5	Belanja Transfer	393.326.636.152	409.045.890.000	421.467.594.600	422.520.185.800

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2026 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;

Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2.182.585.841.000,00. Belanja ini terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 1,712,915,208,000,00. Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 54.318.965.000,00. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,00. Belanja Tidak terduga disiapkan untuk penanganan bencana serta bantuan sosial yang tidak terencana.
- d. Belanja Transfer sebesar Rp. 413.351.668.000,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

**Tabel III.7. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026**

KODE	URAIAN	2025	2026	2027
5	BELANJA DAERAH	2.110.403.286.000	2.182.585.841.000	2.214.523.247.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.575.463.172.000	1.712.915.208.000	1.643.389.645.000
5.2	BELANJA MODAL	118.716.328.000	54.318.965.000	153.204.303.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	414.223.786.000	413.351.668.000	415.929.299.000

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya merupakan istilah dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih (defisit) antara Pendapatan dan Belanja Daerah maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SiLPA merupakan pemanfaatan utama dalam perhitungan anggaran. Besar

kecilnya SiLPA, di satu sisi merupakan wujud kurang maksimalnya pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi di sisi lain merupakan peluang akan adanya tambahan anggaran bagi tahun berikutnya untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Defisit anggaran tentu berimplikasi pada keharusan untuk berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga mampu menutup defisit belanja daerah. Defisit belanja daerah dapat ditutup dengan SiLPA, namun SiLPA yang kecil justru menjadi salah satu indikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akurat atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terwujud secara optimal.

Strategi pembiayaan daerah tahun 2026, antara lain: 1. Optimalisasi jenis-jenis pendapatan asli daerah dan melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan merupakan SiLPA murni, 2. Pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dalam rangka penghematan/efisiensi, 3. Memperhitungkan kembali penyertaan modal untuk alokasi APBD murni dan perubahan APBD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, diarahkan pada : 1. Penerimaan pembiayaan daerah terutama berasal dari SiLPA tahun sebelumnya direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terintegrasi. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja dan pelampauan pendapatan. 2. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu penyertaan modal kepada BUMD sepanjang keputusan belanja wajib, belanja pelayanan dasar, pemenuhan SPM dan prioritas daerah telah tercukupi. Berikut secara rinci sajian realisasi pembiayaan daerah dari tahun 2021 sampai dengan 2024:

**Tabel III.8. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2024**

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Pembiayaan daerah				
Penerimaan pembiayaan	179.575.632.000	224.246.511.000	113.064.503.748	106.667.059.579
Pengeluaran pembiayaan	12.067.426.000	11.862.500.000	4.375.482.849	1.036.945.391,00

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2026 diarahkan untuk pemanfaatan SiLPA Tahun sebelumnya. SiLPA ini berasal dari perkiraan efisiensi belanja. **SILPA APBD Tahun 2025 yang diproyeksikan dan dianggarkan pada Tahun 2026 sebesar Rp. 15.000.000.000,-**. SiLPA tersebut bersumber dari Kasda Rp. 15.000.000.000,-. Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp 1.600.000.000,- sehingga pembiayaan neto pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.13.400.000.000,-

Secara umum target dan proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.9. Postur Anggaran Tahun 2025 dan 2026 Serta Proyeksi 2027 Kabupaten Purbalingga

NO	URAIAN	2025	2026	2027
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>400.401.594.000</b>	452.320.999.000	<b>478.916.575.000</b>
	Pajak Daerah	158.837.000.000	165.326.186.000	172.401.729.000
	Retribusi Daerah	165.519.199.000	207.044.528.000	223.563.312.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.847.965.000	23.129.554.000	25.356.778.000
	Lain-lain PAD yang Sah	53.197.430.000	56.820.731.000	57.594.756.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.682.609.692.000</b>	<b>1.703.949.842.000</b>	<b>1.725.606.672.000</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.870.655.000	1.598.123.539.000	1.619.693.011.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.739.037.000	105.826.303.000	105.913.661.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.454.500.000</b>	12.915.000.000	-
	Pendapatan Hibah	13.454.500.000	12.915.000.000	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.096.465.786.000</b>	<b>2.169.185.841.000</b>	<b>2.204.523.247.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	Belanja Operasi	1.575.463.172.000	1.712.915.208.000	1.643.389.645.000
5.2	Belanja Modal	118.716.328.000	54.318.965.000	153.204.303.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	414.223.786.000	413.351.668.000	415.929.299.000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.110.430.286.000</b>	<b>2.182.585.841.000</b>	<b>2.214.523.247.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000	1.600.000.000	5.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>13.937.500.000</b>	<b>13.400.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>

### 3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Dana Desa, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta Dana Lainnya. Utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut ini disajikan alokasi dana pada program percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia:

Tabel III.10. Sumber Pendanaan Lainnya di Kabupaten Purbalingga pada Program Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2023-2024

No.	Sumber Dana	2023		2024	
		Kuantitas	Jumlah Anggaran (Rp)	Kuantitas	Jumlah Anggaran (Rp)
<b>A. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</b>					
1.	APBN	633 Unit	12.600.000.000,-		NA
2.	APBD Provinsi	746 Unit	14.900.000.000,-	496	11.140.000.000
3.	Dana Desa	838 Unit	8.700.000.000,-		NA
4.	TJSL	155 Unit	3.070.000.000,-	208	3.419.298.000
5.	Dana Lainnya	55 Unit	1.100.000.000,-		NA
<b>B. Penanganan AUSTS</b>					
1	TJSL	81 Anak	121.000.000.000,-		NA

Kebijakan pendanaan pembangunan tahun 2026 yang berasal dari sumber pendanaan lainnya diarahkan untuk mendukung tema pembangunan “Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif” serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul
4. Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2026 berada pada masa transisi dari dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang berakhir bersamaan dengan segera berakhirnya masa jabatan Bupati-Wakil Bupati, ke RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang sedang tersusun. Namun dalam prosesnya, tidak terlepas dari hasil pembangunan tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen, serta kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dilakukan dengan mendasarkan pada: a). RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 untuk periode tahap I (tahun 2025-2029); b). Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, c). Naskah Persetujuan Bersama antara Bupati Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 188.3/1 Tahun 2025 dan Nomor 170/04 Tahun 2025 tentang Raperda RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, d). Hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024 sebagai dasar identifikasi permasalahan pembangunan daerah; e). Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah tahun 2026 termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta f). Mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 “AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada pembangunan ekonomi, diharapkan agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan;

perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas. Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

- c. **Purbalingga Kolaboratif** adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat dengan melakukan *collaborative government hexahelix* antara pemerintah daerah, sektor swasta/pelaku usaha, organisasi non pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media massa. Kolaboratif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat mewujudkan tujuan Purbalingga yang Mandiri dan Sejahtera. Kolaboratif dilakukan agar pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu kolaboratif dilakukan secara inovatif dengan memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. **Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat**

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing *small scale enterprise* melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga dapat menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

- b. **Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**

Dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur yang implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis

kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

Peningkatan daya saing infrastruktur juga diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim yang implementasinya diwujudkan dengan upaya konservasi, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan.

**c. Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

**d. Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM**

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “MEWUJUDKAN PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Purbalingga yang Mandiri dapat diartikan bahwa Kabupaten Purbalingga mampu sejajar dengan daerah lain mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga dapat bersaing dengan sehat melalui optimalisasi potensi unggulan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah dan didukung dengan infrastruktur pembangunan yang memadai.

Sedangkan Purbalingga yang Sejahtera diarahkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat; ketahanan sosial budaya serta keluarga yang layak dan berkualitas. Dukungan pelayanan dasar yang memadai serta adanya internalisasi nilai-nilai luhur dan nilai-nilai keagamaan, akan mendukung penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif dan harmonis (*creating persistence life situation*) yang menciptakan rasa aman, nyaman dan berkualitas. Hasil pembangunan tentunya akan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan, sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu Pendapatan Perkapita (ADHB), Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dan Penurunan Emisi GRK Kumulatif. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata**

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah perekonomian yang maju dan merata sebagai bagian dari misi Bangkitkan Ekonomi Rakyat yang diukur dengan Indikator kinerja: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan.

**Sasaran 2: Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas**

Pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan diarahkan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

**Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman**

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta tata kelola sampah. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini ditandai dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas**

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan Indikator Kinerja; Nilai SAKIP dan Indeks Integritas Nasional.

**Sasaran 5: Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Sasaran desa yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang ditujukan untuk kemandirian desa dengan tolak ukur keberhasilan Indeks Desa.

**Sasaran 6: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif**

Sasaran ini merupakan langkah krusial dalam upaya perwujudan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ketahanan sosial. Tolak ukur keberhasilan sasaran pembangunan ini adalah Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten, Usia Harapan Hidup, serta Indeks Pembangunan Keluarga.

**Sasaran 7: Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis**

Pada sasaran pembangunan ini, pembangunan diarahkan pada penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran pembangunan ini dilihat dari kinerja Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas.

Adapun indikator dan target kinerja tujuan serta sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 secara lengkap terdapat pada tabel berikut.

**Tabel IV.1.**  
**Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2026**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN
				2024	2025	2026
<b>TUJUAN DAERAH</b>						
	<b>Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera</b>	<b>Pendapatan Perkapita (ADHB)</b>	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000
		<b>Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB</b>	Persen	1,06	1,07	1,13
		<b>Angka Kemiskinan</b>	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86
		<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Angka	70,97	71,63	71,96
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Angka	81,96	82,5	83
		<b>Penurunan Emisi GRK Kumulatif</b>	tonCO <sup>2</sup> eq	448.472,89	522.952,69	609.801,67
<b>SASARAN DAERAH</b>						
1.	Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Merata	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5,3	5,3 - 5,7
		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,31	0,35
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5
		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32	80,7
2.	Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	64,66	66,09	68,32
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,28	77,05	77,22
4.	Terwujudnya Birokrasi yang Inovatif, Prima dan Berintegritas	Nilai SAKIP	Angka	68,1	70,01	70,5
		Indeks Integritas Nasional	Angka	77,18	78	78,5
5.	Terwujudnya Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Desa	Angka	76,24	78,84	79,12
6.	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	84,04	86,01	88,02
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,05	62,43 - 63,94	63,19 - 64,7
7.	Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis	Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 10.000 penduduk	0,78	0,75	0,72

#### 4.2. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Berkaitan dengan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, telah disediakan kamus usulan yang diarahkan sebagaimana prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Purbalingga serta disampaikan 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan.

Dari hasil analisis atas penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan, ada sejumlah 2.251 usulan yang kemudian ditelaah menjadi 2.227 usulan. Hasil telaahan tersebut diperoleh dari adanya usulan yang dikembalikan, ditolak dan usulan yang tidak menyertakan OPD tujuan/ pelaksana urusan. Dari 2.227 usulan tersebut kemudian dirumuskan kedalam 89 (delapan puluh sembilan) jenis usulan pada 16 (enam belas) OPD.

Adapun 3 (tiga) jenis kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD terbesar adalah: 1) Bantuan modal UMKM dan Koperasi dengan jumlah 247 usulan; 2) Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa dengan jumlah 234 usulan; dan 3) Pembangunan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan dengan jumlah 200 usulan. Selanjutnya rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel IV.2.  
Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan	Jumlah Usulan
<b>Prioritas 1 : Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi</b>	<b>194</b>
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>91</b>
Pelebaran jalan kabupaten	2
Pembangunan Bendung Irigasi	2
Pembangunan drainase jalan kabupaten	9
Pembangunan jalan kabupaten	9
Pembangunan jaringan irigasi kabupaten	5
Pembangunan talud jalan kabupaten	7
Pembangunan/rekonstruksi kantor kecamatan/kelurahan	2
Pemeliharaan jalan kabupaten	50
Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	3
Pemeliharaan jembatan kabupaten	1
Peningkatan Bendung Irigasi	1
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>6</b>
Pembuatan sumur resapan	1
Penanganan persampahan	5
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>12</b>
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	8
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	3
Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan desa	1
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>85</b>
Pembangunan bronjong	3
Pembangunan jalan/drainase lingkungan kelurahan	4

Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan	Jumlah Usulan
Pembangunan jaringan air bersih	9
Peningkatan jaringan air bersih	3
Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	7
Rehabilitasi rumah tidak layak huni	53
Togor dan Jaringan Listrik Desa	6
<b>Prioritas 2 : Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian</b>	<b>575</b>
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>	<b>40</b>
Bantuan fasilitasi bibit ikan	4
Bantuan permodalan kelompok budidaya ikan/perikanan tangkap	27
Pelatihan bidang perikanan	1
Penguatan ketahanan pangan desa (pelatihan pangan lokal, bantuan pangan, dll)	8
<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>253</b>
Bantuan modal UMKM dan Koperasi	247
Bantuan peralatan kepada koperasi	1
Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	2
Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM (manajemen, kewirausahaan, packaging, pemasaran)	3
<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>279</b>
Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	116
Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	16
Bantuan modal pertanian/ peternakan	87
Bantuan perlindungan tanaman (obat-obatan tanaman, penanggulangan OPT, kekeringan, dll)	1
Pelatihan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	2
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	42
Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	13
Pembangunan sumur pantek irigasi	1
Penyuluhan bidang pertanian	1
<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>3</b>
Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	1
Pelatihan ketrampilan di BLK	2
<b>Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul</b>	<b>613</b>
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>244</b>
Pembangunan Gedung PAUD	24
Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SMP/MTs	9
Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	23
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran di SD/MI	15
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran di SMP/Mts	4
Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	91
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14
Rehabilitasi Gedung PAUD	16
Rehabilitasi ruang kelas SD/MI	46
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/Mts	2
<b>DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>40</b>
Bantuan kepada kelompok Olahraga	19
Pengadaan peralatan dan pembangunan/rehab sarpras olahraga	17
Penyuluhan/Pelatihan Kepemudaan	4
<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>2</b>
Jambanisasi / ODF	1

Prioritas Kabupaten / OPD Pengampu / Jenis Usulan	Jumlah Usulan
Pengadaan alat kesehatan	1
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>287</b>
Belanja Hibah kepada Org. Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	55
Pembangunan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	200
Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	70
Pengadaan sarpras kelembagaan sosial/mardilayon di desa	2
<b>DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>49</b>
Bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)	1
Pengadaan sarpras kelembagaan sosial/mardilayon di desa	46
Penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak perempuan	1
Sarpras LKSA / Panti Asuhan / Panti Rehabilitasi	1
<b>Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi</b>	<b>816</b>
<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>3</b>
Pembinaan perpustakaan desa	1
Pengadaan buku perpustakaan desa	2
<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>710</b>
Bantuan Transfer Keuangan Desa	1
Pembangunan dan /Perbaikan drainase jalan desa	29
Pembangunan dan perbaikan lapangan sepakbola desa	13
Pembangunan dan Rehab Balai Desa	29
Pembangunan dan/ Pelebaran jalan dan jembatan desa	44
Pembangunan Gedung Posyandu, PKK, Bumdes	4
Pembangunan gedung serbaguna desa	10
Pembangunan Pasar Desa	1
Pembangunan talud jalan desa	30
Pembangunan taman desa	1
Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	13
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	2
Pemeliharaan Jalan / Drainase / Jembatan Desa	148
Pengadaan alat olahraga	44
Pengadaan mobil operasional desa	1
Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	12
Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan desa	93
Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	235
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>103</b>
Pelatihan kelembagaan desa	2
Pembangunan gedung serbaguna desa	2
Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	98
Pengelolaan batas desa	1
<b>DIKEMBALIKAN</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.227</b>

### 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2026 tidak terlepas dari hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah, serta berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah

#### 4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Misi tersebut juga ditetapkan menjadi prioritas nasional, yang terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang harus dicapai antara lain:

1. Pendapatan Per kapita setara negara maju
  - GNI Per kapita
  - Kontribusi PDB Maritim
  - Kontribusi PDB Manufaktur

2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
  - Angka Kemiskinan
  - Rasio Gini
  - Kontribusi PDRB KTI
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
  - Global Power Indeks
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
  - Indeks Modal Manusia (IMM)
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission
  - Penurunan Intensitas Emisi GRK
  - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



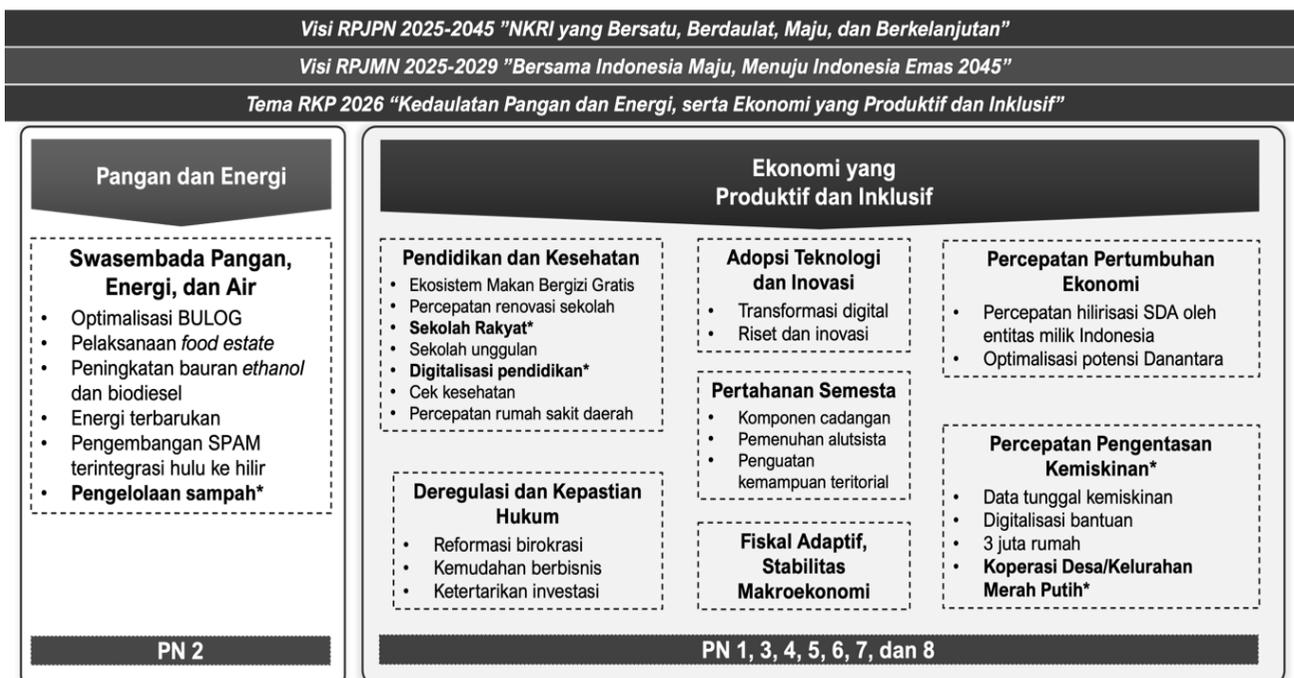
Sumber : PermenPPN No.3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

Gambar 4. 1. Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengadopsi tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Bada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPB untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*). Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai

jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/ sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.



Sumber : PermenPPN No.3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

Gambar 4. 2. Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

#### 4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Visi dan misi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "NGOPENI, NGLAKONI Jateng". Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah: "**Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045**". Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan beberapa indikator antara lain:

1. Angka Kemiskinan
2. PDRB Per Kapita
3. Indek Reformasi Birokrasi
4. Indeks Integritas Nasional
5. Indeks Demokrasi Indonesia
6. Otonomi Fiskal Daerah
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Inflasi
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10. Indeks Modal Manusia
11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya, pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada kebijakan **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**. Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:

#### **4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026**

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2026 dilaksanakan dengan tema **“Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Inklusif”**. Secara holistik pembangunan Kabupaten Purbalingga, untuk mendukung tema pembangunan tersebut didukung oleh perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir yang diawali dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
  - a. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, melalui:
    - Menciptakan proyek berbasis kemitraan publik-swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas ekonomi;
    - Revitalisasi dan realisasi program infrastruktur yang mangkrak melalui kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* di tingkat nasional, provinsi dan lintas daerah.

- b. Pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan hidup sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya masalah sampah, tatakelola lingkungan masyarakat marginal di bantaran sungai dan wilayah pinggiran.
  2. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
    - a. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, melalui:
      - Kolaborasi investasi dan peningkatan infrastruktur
    - b. Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:
      - Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
      - Fasilitasi *link and match* untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
      - Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
    - c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui:
      - Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
      - Membangun kolaborasi *job-fair* bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja.
    - d. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui:
      - Pendirian pusat kreatif (*creative center*) dan *startup center* di setiap kecamatan untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) dan wirausaha muda;
  3. **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:
    - a. Peningkatan layanan pendidikan, melalui:
      - Pemberian beasiswa untuk pelajar hingga jenjang vokasi;
      - Renovasi sekolah SD dan SMP;
      - Penghargaan tahunan bagi guru kreatif dan inovatif melalui Bupati Award.
    - b. Peningkatan layanan kesehatan, melalui:
      - Peningkatan kelas layanan puskesmas;
      - Pemberian kesejahteraan kader posyandu;
      - Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
    - c. Pembinaan olahraga terpadu untuk generasi muda yang mencakup pelatihan intensif, peningkatan fasilitas olahraga, dan dukungan kompetensi untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter sampai tingkat kecamatan dan desa.
  4. **Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi**, tertuang dalam program utama sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui:
  - Program *Open-House* Bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
  - Pelibatan kontribusi para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh agama, teknokrat dan birokrat untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
- b. Reformasi birokrasi dan struktur pemerintahan dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan reformasi struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT yang inovatif, melalui:
  - Peningkatan dana operasional RT dan penghargaan RT berprestasi;
  - Pemberian dana bergulir dan mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektifitas layanan dan kegiatan di desa.
- c. Pelayanan pemerintah dan pembangunan yang kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi, melalui:
  - Digitalisasi layanan publik dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga inovasi nasional guna meningkatkan efisisensi dan aksibilitas pelayanan pemerintah.

#### **4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah**

Dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2026 disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026 merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh daerah provinsi dan kabupaten. Prioritas Kabupaten Purbalingga tahun 2026 harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional karena keberhasilan pembangunan nasional akan menjadi cerminan keberhasilan dari pencapaian pembangunan daerah. Secara lengkap sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel IV.3.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Selaras dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras dengan Prioritas Nasional
Prioritas 1 : Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi	Prioritas 2 : Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Prioritas 2 : Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	Prioritas 2 : Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	<p>Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.</p> <p>Prioritas 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.</p> <p>Prioritas 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.</p>
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Prioritas 3: Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	<p>Prioritas 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.</p> <p>Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.</p>
Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Prioritas 1 : Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	<p>Prioritas 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).</p> <p>Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.</p> <p>Prioritas 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.</p> <p>Prioritas 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.</p>

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Pada tahun 2026 pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan sebesar Rp. 2.169.185.841.000 yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 452.320.999.000 dan Dana Transfer sebesar Rp. 1.703.949.842.000. Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 2.182.585.841.000 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pembiayaan daerah untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja diproyeksikan sebesar Rp. 15.000.000.000. Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2026.

Belanja daerah tahun 2026 digunakan untuk: 1) Belanja Operasi, di antaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah dan DPRD; belanja barang/jasa, antara lain untuk operasional kegiatan rutin kantor; belanja hibah, antara lain digunakan untuk pembiayaan hibah pendidikan tingkat dasar untuk sekolah swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Pramuka, PMI, organisasi olahraga, organisasi Masyarakat, Lembaga swadaya Masyarakat, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik; dan belanja bantuan sosial berupa bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin, pemenuhan kebutuhan pokok dan perbaikan rumah tidak layak huni; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi hasil pajak serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel V.1.      Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah  
Tahun 2026**

NO	URAIAN	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	452.320.999.000
	Pajak Daerah	165.326.186.000
	Retribusi Daerah	207.044.528.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.129.554.000
	Lain-lain PAD yang Sah	56.820.731.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.703.949.842.000</b>

NO	URAIAN	2026
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.598.123.539.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.826.303.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	12.915.000.000
	Pendapatan Hibah	12.915.000.000
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.169.185.841.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5.1	Belanja Operasi	1.712.915.208.000
5.2	Belanja Modal	54.318.965.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	413.351.668.000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.182.585.841.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.600.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>13.400.000.000</b>

Proyeksi belanja daerah tahun 2026 selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan dengan pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel V.2. Pagu Indikatif per OPD Tahun 2026**

NO	SATUAN KERJA	PAGU INDIKATIF 2026
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN	737.798.577.000
2	SEKOLAH (SMP & TK)	37.170.285.000
3	DINAS KESEHATAN	172.409.736.000
4	PUSKESMAS & UPTD LABKES	97.911.222.000
5	RSUD GOETENG T	133.672.329.000
6	RSUD PANTINUGRAHA	52.565.496.000
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	98.339.483.000
8	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7.550.059.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.641.915.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.860.346.000
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA	29.259.487.000
9	DINAS TENAGA KERJA	6.770.622.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	5.724.816.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.049.188.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.999.691.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.272.941.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	19.865.162.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.478.472.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.421.437.000

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA</b>	<b>PAGU INDIKATIF 2026</b>
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	4.466.017.000
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	10.449.376.000
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.299.139.000
20	DINAS PERTANIAN	44.064.178.000
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.643.513.000
22	SEKRETARIAT DAERAH	53.120.199.000
23	SEKRETARIAT DPRD	60.442.841.000
24	KECAMATAN KEMANGKON	1.692.149.000
25	KECAMATAN BUKATEJA	2.220.378.000
26	KECAMATAN KEJOBONG	1.794.169.000
27	KECAMATAN KALIGONDANG	2.092.442.000
28	KECAMATAN PURBALINGGA	15.407.019.000
29	KECAMATAN KALIMANAH	5.497.138.000
30	KECAMATAN KUTASARI	1.808.762.000
31	KECAMATAN MREBET	2.040.325.000
32	KECAMATAN BOBOTSARI	1.831.673.000
33	KECAMATAN KARANGREJA	1.809.397.000
34	KECAMATAN KARANGANYAR	1.618.995.000
35	KECAMATAN KARANGMONCOL	1.770.282.000
36	KECAMATAN REMBANG	1.943.799.000
37	KECAMATAN BOJONGSARI	1.837.151.000
38	KECAMATAN PADAMARA	2.961.539.000
39	KECAMATAN PENGADEGAN	2.116.795.000
40	KECAMATAN KARANGJAMBU	1.876.074.000
41	KECAMATAN KERTANEGARA	1.559.323.000
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.145.983.000
43	INSPEKTORAT DAERAH	12.133.976.000
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	6.453.428.000
45	BADAN KEUANGAN DAERAH	436.350.630.000
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	7.377.887.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.182.585.841.000</b>

## 5.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (6 Urusan Bidang)**

### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1) Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini dilaksanakan dalam rangka serta untuk mencapai target indikator program pada tahun 2026 yaitu: 1) APS 7-15 Tahun; 2) APS 5-6 Tahun; 3) APS Kesetaraan.

#### **2) Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2026, yaitu: Nilai Pengelolaan Kurikulum SD dan SMP.

#### **3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2026, yaitu: Indeks Distribusi Guru (SD dan SMP).

### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Faskes Primer (FKTP) dan FKRTL milik pemerintah daerah dengan SPA kesehatan sesuai Standar; 2) Persentase Rumah Sakit Kab/Kota dengan CFR Direct Obstetric (eklamsi & Perdarahan Postpartum) < 1% RIBK; 3) Angka Kematian Bayi (AKB); 4) Cakupan penerima kesehatan gratis; 5) Prevalensi Stunting; 6) Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; 7) Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana; 8) Persentase desa/kelurahan memenuhi kualitas kesehatan lingkungan; 9) Persentase fasyankes yang terintegrasi SIKN; 10) Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal utama.

#### **2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan.

#### **3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

#### **4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan.

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (7 Program)**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Luas Oncoran Air Irigasi.

**2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten; 2) Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.

**3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak; 2) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.

**4) Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Tertib Administrasi dan Layak.

**5) Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik; 2) Persentase Jalan Jabupaten dalam Kondisi Sedang.

**6) Program Pengembangan Jasa Kontruksi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina.

**7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengembangan Perumahan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni; 2) Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni.

**2) Program Kawasan Permukiman**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Luas Kawasan Kumuh Ditangani.

**3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani.

**4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU layak.

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Pelanggaran Trantibum; dan 2) Persentase Penegakkan Perda.

**2) Program Penanggulangan Bencana**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan.

**3) Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 2) Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (5 Program)**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial.

**2) Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti.

**3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial.

**4) Program Penanganan Bencana**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat.

**5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase TMP dan Makam Leluhur yang Difasilitasi Pengelolaannya.

**5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (18 Urusan Bidang)**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja.

**2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja.

**3) Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah.

**4) Program Hubungan Industrial**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (5 Program)**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah.

**2) Program Perlindungan Perempuan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA.

**3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Keterisian Data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

**4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pembentukan Forum Anak.

**5) Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Laporan Kekerasan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA.

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kondisi Baik.

**2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Skor PPH Konsumsi.

**3) Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Desa Rentan Pangan.

**4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi.

**2) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria.

**3) Program Penatagunaan Tanah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pemanfaatan Tanah Pemda (Eks-Bengkok).

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (8 Program)**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup.

**2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara.

**3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Luas RTH Perkotaan.

**4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Perusahaan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3.

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH.

**6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Bank Sampah yang Beroperasi.

**7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Ditangani oleh Pemerintah Daerah.

**8) Pengelolaan Persampahan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Cakupan Pengurangan Sampah; 2) Cakupan Penanganan Sampah.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

**2) Program Pencatatan Sipil**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil.

**3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

**7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Kewenangan Desa.

**2) Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)

**3) Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.

**4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif.

**8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengendalian Penduduk**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun.

**2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak

Terpenuhi (Unmet Need KB); dan 2) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

**3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Cakupan Keluarga yang Mengikuti Kelompok UPPKS; dan 2) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB.

**9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (1 Program)**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif; 2) Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik.

**10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika (2 Program)**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara *up to date* di Portal Daerah.

**2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola.

**11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (6 Program)**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Koperasi Aktif.

**2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penilaian Kondisi Koperasi.

**3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase SDM Koperasi Memiliki Kompetensi Bidang Perkoperasian.

**4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.

- 5) **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Bersertifikat/Berijin.
- 6) **Program Pengembangan UMKM**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase UMKM yang difasilitasi.

## **12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (5 Program)**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase LOI yang ditindaklanjuti.
- 2) **Program Promosi Penanaman Modal**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kepeminatan Investasi.
- 3) **Program Pelayanan Penanaman Modal**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.
- 4) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha.
- 5) **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.

## **13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Tingkat Daya Saing Kepemudaan.
- 2) **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Tingkat Daya Saing Keolahragaan
- 3) **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kepramukaan Aktif.

## **14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik (1 Program)**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Satu Data Indonesia dan Indeks Bhumandala.

**15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (1 Program)**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (PAMINFO).

**16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan).

**2) Program Pembinaan Sejarah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan.

**3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan.

**4) Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Benda Koleksi Museum yang Dikelola.

**17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan (2 Program)**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Perpustakaan Aktif.

**2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Menemukan, Merawat dan Mengalihmediakan) yang ada di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

**18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengelolaan Arsip**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip.

**2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip.

**5.2.3 Urusan Pilihan (6 Urusan Bidang)**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Produksi Perikanan Tangkap.

**2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Produksi Perikanan Budidaya.

**3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Produksi Olahan Ikan.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata (4 Program)**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan.

**2) Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Daya Tarik Wisata yang Meningkatkan Angka Kunjungan Wisatanya.

**3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.

**4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Jumlah Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat.

### 3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (5 Program)**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1) **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Rata-Rata (Persentase) Ketersediaan Sarana Pertanian (Traktor, Pompa Air, Combine Harvester, Power Thresher, Benih Padi).

#### 2) **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan.

#### 3) **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Prevalensi Penyakit Hewan; 2) Persentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

#### 4) **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian.

#### 5) **Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama).

### 4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (6 Program)**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1) **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan.

#### 2) **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pasar Rakyat ber SNI.

#### 3) **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Disparitas harga.

#### 4) **Program Pengembangan Ekspor**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Nilai Ekspor.

#### 5) **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

#### 6) **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri.

**2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri.

**3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Kenaikan Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

**6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi (1 Program)**

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Jumlah Transmigran yang Ditempatkan.

**5.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (2 Unsur Pendukung)**

**1. Sekretariat Daerah (3 Program)**

Rencana program prioritas urusan pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah; 2) Persentase Pemenuhan Layanan Operasional dan Kerumahtangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3) Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Sesuai Ketentuan; 4) Nilai SAKIP Setda; 5) Nilai Kematangan Organisasi Daerah.

**2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Indeks Reformasi Hukum; 2) Persentase Capaian Kinerja Utama Rumpun Urusan Pemerintahan dan Kesra.

**3) Program Perekonomian dan Pembangunan (4 kegiatan)**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Capaian Kinerja Utama Rumpun Urusan Ekonomi

dan Pembangunan; 2) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Strategis yang Selesai Tepat Waktu; 3) Tingkat Maturitas BPBJ.

## **2. Sekretariat DPRD (2 Program)**

Rencana program prioritas urusan pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah; 2) Cakupan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD.

### **2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Cakupan Fasilitasi Pelayanan Persidangan dan Perundang-Undangan; 2) Cakupan Fasilitasi Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan.

## **5.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Unsur Pendukung)**

### **1. Perencanaan (2 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Tingkat Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur Dokumen Perencanaan; 2) Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan; 3) Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas).

#### **2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi; 3) Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

### **2. Keuangan (3 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; 2) Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan; 3) Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda; 4) Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur.

**2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu.

**3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah; 2) Jumlah Objek Pajak.

**3. Kepegawaian (1 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Kepegawaian Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi; 2) Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi; 3) Indeks Kinerja dan Disiplin Indeks Kinerja dan Disiplin Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan; 4) Indeks Kompetensi Aspek Pengembangan Karir.

**4. Pendidikan dan Pelatihan (1 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM.

**5. Penelitian dan Pengembangan (2 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.

**2) Program Riset dan Inovasi Daerah**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah.

**5.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (2 Program)**

**1. Inspektorat Daerah (5 Program)**

Rencana program prioritas unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 2) Persentase Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan.

**2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: 1) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkatkan Setelah Pendampingan; 2) Persentase Unit Kerja yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK.

**5.2.7 Unsur Kewilayahan (1 Urusan)**

**1. Kewilayahan (5 Program)**

Rencana program prioritas unsur kewilayahan pada urusan kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan.

**2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Keaktifan Lembaga Desa/Kel.

**3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas.

**4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan.

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi.

**5.2.8 Urusan Pemerintahan Umum (1 Urusan)**

**1. Kesatuan Bangsa dan Politik (5 Program)**

Rencana program prioritas urusan pemerintahan umum pada kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

**2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Politik.

**3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Persentase Ormas yang Melaporkan Kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Cakupan Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya.

**5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2026, yaitu: Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terpantau.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. PURBALINGGA  
TAHUN 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						<b>737.798.577.000,00</b>							<b>709.410.231.150,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>736.302.495.000,00</b>							<b>707.719.149.150,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>736.302.495.000,00</b>							<b>707.719.149.150,00</b>	
1	1	01	01					621.461.570.000,00							592.491.539.000,00	
			2.01					8.124.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		8.124.000,00	
1	01	01	2.01	0001									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
								8 Dokumen	7.128.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		7.128.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0007									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
								2 Laporan	996.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		996.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02						620.221.324.000,00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		591.251.293.000,00	
1	01	01	2.02	0001									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
								5668 Orang/bulan	620.010.220.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		591.060.929.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0002									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
								2 Dokumen	68.549.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		47.809.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0004									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
								2000 Dokumen	142.555.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		142.555.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-					150.330.000,00					150.330.000,00				
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan			150.330.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			150.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					52.932.000,00					52.932.000,00				
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang			1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang			51.932.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			51.932.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					44.579.000,00					44.579.000,00				
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket			1.824.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket			20.749.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.749.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen			1.560.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan			3.237.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.237.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	10.009.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.009.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			7.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	82.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	82.000.000,00	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	82.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			82.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	594.605.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	594.605.000,00	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	640.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	175.404.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			175.404.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.785.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.785.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	412.776.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			412.776.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	307.676.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	307.676.000,00	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	168.033.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			168.033.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				65 Unit	9.623.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			9.623.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	14.194.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			14.194.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	115.826.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			115.826.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						114.221.987.000,00							114.608.672.150,00	
1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						78.048.482.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			78.020.567.000,00	
1	01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	1.270.134.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.270.134.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1056 Peserta Didik	275.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1259 Orang	9.545.196.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			9.545.196.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	224.531.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			224.531.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				461 Satuan Pendidikan	593.665.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			593.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				470 Satuan Pendidikan	61.416.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			61.511.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.01 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1377 Orang	1.705.791.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.705.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				18 Konten Digital	18.130.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	25.882.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			25.882.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	6.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	115.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				471 Orang	82.164.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			82.164.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				120 Satuan Pendidikan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	547.517.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			425.002.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1746 Peserta Didik	1.857.964.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.857.964.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	345.708.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			345.708.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	8.451.044.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	8.451.044.000,00	
1	01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	502.502.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		502.502.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	400.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				22936 Peserta Didik	55.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3000 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				553 Orang	3.105.180.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		3.105.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				154 Orang	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				78 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				24 Satuan Pendidikan	3.419.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.419.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				234 Orang	30.988.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			30.988.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				78 Orang	22.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				24 Konten Digital	18.250.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				234 Orang	6.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	22.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			22.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	7.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			7.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	16.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				60 Satuan Pendidikan	242.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			242.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				135 Orang	48.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	256.224.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			256.224.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
								21.925.436.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			22.340.035.800,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				13 Unit	495.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			712.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1543 Orang	8.831.928.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.831.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	63.759.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			63.759.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				36 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				672 Satuan Pendidikan	10.691.853.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.889.452.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				36 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				72 Orang	29.170.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			29.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Unit	320.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD											
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				27 Paket	1.465.438.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.465.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD											
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	6.588.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.588.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
			-				-	5.797.025.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.797.025.350,00	
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				25 Peserta Didik	95.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			95.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan												
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	19.204.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			19.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan												
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				17 Satuan Pendidikan	5.616.109.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.616.109.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan												
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				21 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	3.606.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.606.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan												
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				255 Peserta Didik	52.606.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			52.606.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	240.400.000,00						-	240.400.000,00		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	240.400.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	240.400.000,00	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar												
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar												
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	40.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			40.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4	1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	378.538.000,00						-	378.538.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	378.538.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	378.538.000,00		
1	01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Laporan	378.538.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	378.538.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.496.082.000,00</b>							<b>1.691.082.000,00</b>	
2	22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>1.496.082.000,00</b>							<b>1.691.082.000,00</b>	
5	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	639.783.000,00			-		-	-	834.783.000,00		
2	22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	130.518.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	325.518.000,00		
2	22 02 2.01 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan															
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				375 Orang	130.518.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	325.518.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	500.965.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	500.965.000,00		
2	22 02 2.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya															
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	500.965.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	500.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	8.300.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	8.300.000,00		
2	22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat															
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	8.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	8.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-	-	-	12.326.000,00			-		-	-	12.326.000,00		
2	22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	12.326.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	12.326.000,00		
2	22 04 2.01 0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota															
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	12.326.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	12.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	215.050.000,00					-	-	215.050.000,00	
	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	30.129.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	30.129.000,00	
	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	30.129.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	30.129.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	184.921.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	184.921.000,00	
	2 22 05 2.02 0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				45 Objek	162.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	162.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 05 2.02 0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	22.921.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	22.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-			-	628.923.000,00					-	-	628.923.000,00	
	2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	628.923.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	628.923.000,00	
	2 22 06 2.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				100 Unit	178.324.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	178.324.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	388.358.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	388.358.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2 22 06 2.01 0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	62.241.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	62.241.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
								163.600.000,00							163.600.000,00	
								163.600.000,00							163.600.000,00	
								163.600.000,00							163.600.000,00	
								163.600.000,00							163.600.000,00	
9	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	163.600.000,00					-	-	163.600.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-				163.600.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			163.600.000,00	
1	01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	93.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			93.600.000,00	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
1	01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA
								128.200.000,00							128.200.000,00	
1		TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI							128.200.000,00						128.200.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							128.200.000,00						128.200.000,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							128.200.000,00						128.200.000,00	
10	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-				128.200.000,00							128.200.000,00	
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-				128.200.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			128.200.000,00	
1	01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	58.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			58.200.000,00	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
1	01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI
								147.535.000,00							147.535.000,00	
1		TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI							147.535.000,00						147.535.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							147.535.000,00						147.535.000,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							147.535.000,00						147.535.000,00	
11	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-				147.535.000,00							147.535.000,00	
1	01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-				147.535.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			147.535.000,00	
1	01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	78.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			78.000.000,00	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
1	01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	69.535.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			69.535.000,00	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI
								130.450.000,00							130.450.000,00	
1		TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA							130.450.000,00						130.450.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.450.000,00						130.450.000,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							130.450.000,00						130.450.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	130.450.000,00					-	-	130.450.000,00	
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	130.450.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	130.450.000,00	
1	01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	62.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		62.400.000,00	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
1	01 02 2.03 0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					1 Satuan Pendidikan	68.050.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		68.050.000,00	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA
		<b>SMP NEGERI 1 PURBALINGGA</b>							<b>1.015.900.000,00</b>						<b>1.015.900.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
13	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	1.015.900.000,00					-	-	1.015.900.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.015.900.000,00					-	-	1.015.900.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	955.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-		-		955.900.000,00	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA
		<b>SMP NEGERI 2 PURBALINGGA</b>							<b>927.900.000,00</b>						<b>927.900.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
14	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	927.900.000,00					-	-	927.900.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	927.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	927.900.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	867.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		867.900.000,00	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA
		<b>SMP NEGERI 3 PURBALINGGA</b>							<b>907.000.000,00</b>						<b>907.000.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
15	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	907.000.000,00					-	-	907.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	907.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	907.000.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	847.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		847.000.000,00	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	
<b>SMP NEGERI 4 PURBALINGGA</b>								<b>890.500.000,00</b>								<b>890.500.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>890.500.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>890.500.000,00</b>
16	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	890.500.000,00			-		-	-	890.500.000,00		
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	890.500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	890.500.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	830.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		830.500.000,00	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	
<b>SMP NEGERI 5 PURBALINGGA</b>								<b>966.400.000,00</b>								<b>966.400.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>966.400.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>966.400.000,00</b>
17	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	966.400.000,00			-		-	-	966.400.000,00		
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	966.400.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	966.400.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	906.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		906.400.000,00	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	
<b>SMP NEGERI 1 KALIMANAH</b>								<b>1.004.900.000,00</b>								<b>1.004.900.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>1.004.900.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>1.004.900.000,00</b>

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	1.004.900.000,00					-	-	1.004.900.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	1.004.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	1.004.900.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	944.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		944.900.000,00	SMP NEGERI 1 KALIMANAH
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KALIMANAH
		<b>SMP NEGERI 2 KALIMANAH</b>							<b>909.500.000,00</b>						<b>909.500.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
19	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	909.500.000,00					-	-	909.500.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	909.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	909.500.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	874.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		874.500.000,00	SMP NEGERI 2 KALIMANAH
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		35.000.000,00	SMP NEGERI 2 KALIMANAH
		<b>SMP NEGERI 3 KALIMANAH</b>							<b>550.500.000,00</b>						<b>550.500.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
20	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	550.500.000,00					-	-	550.500.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	550.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	550.500.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	500.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		500.500.000,00	SMP NEGERI 3 KALIMANAH
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 3 KALIMANAH
		<b>SMP NEGERI 1 PADAMARA</b>							<b>896.000.000,00</b>						<b>896.000.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						896.000.000,00								896.000.000,00		
	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						896.000.000,00								896.000.000,00		
21	1	01	02				-	896.000.000,00						-		896.000.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							896.000.000,00						-		896.000.000,00	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS							836.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER					836.000.000,00	SMP NEGERI 1 PADAMARA	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar							60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					60.000.000,00	SMP NEGERI 1 PADAMARA	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
		<b>SMP NEGERI 2 PADAMARA</b>						751.100.000,00								751.100.000,00		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						751.100.000,00								751.100.000,00		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						751.100.000,00								751.100.000,00		
22	1	01	02				-	751.100.000,00						-		751.100.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							751.100.000,00						-		751.100.000,00	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS							716.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER					716.100.000,00	SMP NEGERI 2 PADAMARA	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar							35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					35.000.000,00	SMP NEGERI 2 PADAMARA	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
		<b>SMP NEGERI 1 KUTASARI</b>						925.700.000,00								925.700.000,00		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						925.700.000,00								925.700.000,00		
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						925.700.000,00								925.700.000,00		
23	1	01	02				-	925.700.000,00						-		925.700.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							925.700.000,00						-		925.700.000,00	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS							865.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER					865.700.000,00	SMP NEGERI 1 KUTASARI	
		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul																
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KUTASARI	
								695.000.000,00						695.000.000,00			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						695.000.000,00							695.000.000,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						695.000.000,00							695.000.000,00	
24	1	01	02					695.000.000,00							695.000.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					695.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			695.000.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	660.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			660.000.000,00	SMP NEGERI 2 KUTASARI	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 2 KUTASARI	
								491.100.000,00						491.100.000,00			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						491.100.000,00							491.100.000,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						491.100.000,00							491.100.000,00	
25	1	01	02					491.100.000,00							491.100.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					491.100.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			491.100.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	441.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			441.100.000,00	SMP NEGERI 3 KUTASARI	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 3 KUTASARI	
								715.900.000,00						715.900.000,00			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						715.900.000,00							715.900.000,00	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						715.900.000,00							715.900.000,00	
26	1	01	02					715.900.000,00							715.900.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					715.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			715.900.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	680.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			680.900.000,00	SMP NEGERI 4 KUTASARI	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 4 KUTASARI	
<b>SMP NEGERI 1 KARANGREJA</b>								<b>757.400.000,00</b>								<b>757.400.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>757.400.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>757.400.000,00</b>
27	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.400.000,00	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					757.400.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			757.400.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	697.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			697.400.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGREJA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGREJA	
<b>SMP NEGERI 2 KARANGREJA</b>								<b>633.000.000,00</b>								<b>633.000.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>633.000.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>633.000.000,00</b>
28	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.000.000,00	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					633.000.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			633.000.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	583.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			583.000.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGREJA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGREJA	
<b>SMP NEGERI 3 KARANGREJA</b>								<b>483.400.000,00</b>								<b>483.400.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>483.400.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>483.400.000,00</b>
29	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.400.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	483.400.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	483.400.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	433.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		433.400.000,00	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0				10	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	
<b>SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU</b>								<b>473.200.000,00</b>								<b>473.200.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>473.200.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>473.200.000,00</b>
30	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	473.200.000,00			-		-		473.200.000,00		
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	473.200.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	473.200.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	398.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		398.200.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		75.000.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	
<b>SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU</b>								<b>209.700.000,00</b>								<b>209.700.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>209.700.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>209.700.000,00</b>
31	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	209.700.000,00			-		-		209.700.000,00		
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	209.700.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	209.700.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	139.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		139.700.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		70.000.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU	
<b>SMP NEGERI 1 KEMANGKON</b>								<b>892.700.000,00</b>								<b>892.700.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>892.700.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>892.700.000,00</b>

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPd Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
32	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	892.700.000,00					-	-	892.700.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	892.700.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	892.700.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	832.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		832.700.000,00	SMP NEGERI 1 KEMANGKON	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KEMANGKON	
<b>SMP NEGERI 2 KEMANGKON</b>								<b>499.000.000,00</b>								<b>499.000.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>499.000.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>499.000.000,00</b>
33	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	499.000.000,00					-	-	499.000.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	499.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	499.000.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	429.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		429.000.000,00	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		70.000.000,00	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	
<b>SMP NEGERI 3 KEMANGKON</b>								<b>394.500.000,00</b>								<b>394.500.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>394.500.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>394.500.000,00</b>
34	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	394.500.000,00					-	-	394.500.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	394.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	394.500.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	324.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		324.500.000,00	SMP NEGERI 3 KEMANGKON	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		70.000.000,00	SMP NEGERI 3 KEMANGKON	
<b>SMP NEGERI 4 KEMANGKON</b>								<b>375.800.000,00</b>								<b>375.800.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						375.800.000,00								375.800.000,00	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						375.800.000,00								375.800.000,00	
35	1	01	02					375.800.000,00							375.800.000,00		
1	01	02	2.02					375.800.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.800.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	305.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			305.800.000,00	SMP NEGERI 4 KEMANGKON
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	SMP NEGERI 4 KEMANGKON
									953.200.000,00							953.200.000,00	
1		<b>SMP NEGERI 1 BUKATEJA</b>						953.200.000,00								953.200.000,00	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						953.200.000,00								953.200.000,00	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						953.200.000,00								953.200.000,00	
36	1	01	02					953.200.000,00							953.200.000,00		
1	01	02	2.02					953.200.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			953.200.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	893.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			893.200.000,00	SMP NEGERI 1 BUKATEJA
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 BUKATEJA
									918.300.000,00							918.300.000,00	
1		<b>SMP NEGERI 2 BUKATEJA</b>						918.300.000,00								918.300.000,00	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						918.300.000,00								918.300.000,00	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						918.300.000,00								918.300.000,00	
37	1	01	02					918.300.000,00							918.300.000,00		
1	01	02	2.02					918.300.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			918.300.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	883.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			883.300.000,00	SMP NEGERI 2 BUKATEJA
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	
<b>SMP NEGERI 3 BUKATEJA</b>								<b>711.500.000,00</b>								<b>711.500.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>711.500.000,00</b>								<b>711.500.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>711.500.000,00</b>								<b>711.500.000,00</b>
38	1	01	02					711.500.000,00							711.500.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					711.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			711.500.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	676.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			676.500.000,00	SMP NEGERI 3 BUKATEJA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 3 BUKATEJA	
<b>SMP NEGERI 1 KEJOBONG</b>								<b>817.900.000,00</b>								<b>817.900.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>817.900.000,00</b>								<b>817.900.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>817.900.000,00</b>								<b>817.900.000,00</b>
39	1	01	02					817.900.000,00							817.900.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					817.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			817.900.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	757.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			757.900.000,00	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	
<b>SMP NEGERI 2 KEJOBONG</b>								<b>371.200.000,00</b>								<b>371.200.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>371.200.000,00</b>								<b>371.200.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>371.200.000,00</b>								<b>371.200.000,00</b>
40	1	01	02					371.200.000,00							371.200.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					371.200.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			371.200.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	321.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			321.200.000,00	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	
<b>SMP NEGERI 1 KALIGONDANG</b>								<b>996.100.000,00</b>								<b>996.100.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>996.100.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>996.100.000,00</b>
41	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996.100.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					996.100.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			996.100.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	936.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			936.100.000,00	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	
<b>SMP NEGERI 2 KALIGONDANG</b>								<b>625.300.000,00</b>								<b>625.300.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>625.300.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>625.300.000,00</b>
42	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.300.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					625.300.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			625.300.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	575.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			575.300.000,00	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	
<b>SMP NEGERI 1 PENGADEGAN</b>								<b>833.300.000,00</b>								<b>833.300.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>833.300.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>833.300.000,00</b>
43	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.300.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	833.300.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	833.300.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	773.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		773.300.000,00	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN
								492.200.000,00							492.200.000,00	
1								492.200.000,00							492.200.000,00	
1	01							492.200.000,00							492.200.000,00	
44	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	492.200.000,00			-			-	492.200.000,00	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	492.200.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	492.200.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	442.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		442.200.000,00	SMP NEGERI 2 PENGADEGAN
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 2 PENGADEGAN
								370.300.000,00							370.300.000,00	
1								370.300.000,00							370.300.000,00	
1	01							370.300.000,00							370.300.000,00	
45	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	370.300.000,00			-			-	370.300.000,00	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	370.300.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	370.300.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	300.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		300.300.000,00	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		70.000.000,00	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN
								858.900.000,00							858.900.000,00	
1								858.900.000,00							858.900.000,00	
1	01							858.900.000,00							858.900.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
46	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	858.900.000,00					-	-	858.900.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	858.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	858.900.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	823.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		823.900.000,00	SMP NEGERI 1 REMBANG	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		35.000.000,00	SMP NEGERI 1 REMBANG	
		<b>SMP NEGERI 2 REMBANG</b>							<b>723.600.000,00</b>							<b>723.600.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															
47	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	723.600.000,00					-	-	723.600.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	723.600.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	723.600.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	688.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		688.600.000,00	SMP NEGERI 2 REMBANG	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		35.000.000,00	SMP NEGERI 2 REMBANG	
		<b>SMP NEGERI 4 REMBANG</b>							<b>299.900.000,00</b>							<b>299.900.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															
48	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	299.900.000,00					-	-	299.900.000,00		
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	299.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	299.900.000,00		
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	229.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		229.900.000,00	SMP NEGERI 4 REMBANG	
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		70.000.000,00	SMP NEGERI 4 REMBANG	
		<b>SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL</b>							<b>921.300.000,00</b>							<b>921.300.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						921.300.000,00								921.300.000,00	
	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						921.300.000,00								921.300.000,00	
49	1	01	02					921.300.000,00							921.300.000,00		
	1	01	02	2.02				921.300.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		921.300.000,00		
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	861.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		861.300.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL
						<b>SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL</b>											
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						406.600.000,00								406.600.000,00	
	1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										406.600.000,00	
50	1	01	02					406.600.000,00							406.600.000,00		
	1	01	02	2.02				406.600.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		406.600.000,00		
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	336.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		336.600.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		70.000.000,00	SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL
						<b>SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL</b>											
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						213.000.000,00								213.000.000,00	
	1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										213.000.000,00	
51	1	01	02					213.000.000,00							213.000.000,00		
	1	01	02	2.02				213.000.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		213.000.000,00		
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	143.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		143.000.000,00	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	
<b>SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL</b>								<b>305.400.000,00</b>								<b>305.400.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>305.400.000,00</b>								<b>305.400.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>305.400.000,00</b>								<b>305.400.000,00</b>
52	1	01	02					305.400.000,00							305.400.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			305.400.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			305.400.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	235.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			235.400.000,00	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	
<b>SMP NEGERI 1 KARANGANYAR</b>								<b>894.900.000,00</b>								<b>894.900.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>894.900.000,00</b>								<b>894.900.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>894.900.000,00</b>								<b>894.900.000,00</b>
53	1	01	02					894.900.000,00							894.900.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			894.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			894.900.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	834.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			834.900.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	
<b>SMP NEGERI 1 KERTANEGARA</b>								<b>713.700.000,00</b>								<b>713.700.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>713.700.000,00</b>								<b>713.700.000,00</b>
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>713.700.000,00</b>								<b>713.700.000,00</b>
54	1	01	02					713.700.000,00							713.700.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			713.700.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			713.700.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	678.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			678.700.000,00	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	
<b>SMP NEGERI 2 KERTANEGARA</b>								<b>416.300.000,00</b>								<b>416.300.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>416.300.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>416.300.000,00</b>
55	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.300.000,00	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					416.300.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			416.300.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	366.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			366.300.000,00	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	
<b>SMP NEGERI 1 BOJONGSARI</b>								<b>1.000.500.000,00</b>								<b>1.000.500.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>1.000.500.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>1.000.500.000,00</b>
56	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.500.000,00	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.000.500.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.500.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	940.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			940.500.000,00	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	
<b>SMP NEGERI 2 BOJONGSARI</b>								<b>805.000.000,00</b>								<b>805.000.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>805.000.000,00</b>	
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															<b>805.000.000,00</b>
57	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	805.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	805.000.000,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	770.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		770.000.000,00	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		35.000.000,00	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI
								891.600.000,00							891.600.000,00	
								891.600.000,00							891.600.000,00	
								891.600.000,00							891.600.000,00	
58	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	891.600.000,00			-			-	891.600.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	891.600.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	891.600.000,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	831.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		831.600.000,00	SMP NEGERI 1 MREBET
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	SMP NEGERI 1 MREBET
								699.400.000,00							699.400.000,00	
								699.400.000,00							699.400.000,00	
								699.400.000,00							699.400.000,00	
59	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	699.400.000,00			-			-	699.400.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	699.400.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	699.400.000,00	
	1 01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	664.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		664.400.000,00	SMP NEGERI 2 MREBET
	1 01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		35.000.000,00	SMP NEGERI 2 MREBET
								484.500.000,00							484.500.000,00	
								484.500.000,00							484.500.000,00	
								484.500.000,00							484.500.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	484.500.000,00					-	-	484.500.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	484.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	484.500.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	434.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		434.500.000,00	SMP NEGERI 3 MREBET
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 3 MREBET
		<b>SMP NEGERI 4 MREBET</b>														
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
61	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	396.500.000,00					-	-	396.500.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	396.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	396.500.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	346.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		346.500.000,00	SMP NEGERI 4 MREBET
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 4 MREBET
		<b>SMP NEGERI 5 MREBET</b>														
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
62	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	553.800.000,00					-	-	553.800.000,00	
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	553.800.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	553.800.000,00	
1	01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	503.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		503.800.000,00	SMP NEGERI 5 MREBET
1	01 02 2.02 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		50.000.000,00	SMP NEGERI 5 MREBET
		<b>SMP NEGERI 1 BOBOTSARI</b>														
		<b>898.200.000,00</b>														
		<b>898.200.000,00</b>														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						898.200.000,00								898.200.000,00	
	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						898.200.000,00								898.200.000,00	
63	1	01	02					898.200.000,00							898.200.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							898.200.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			898.200.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	838.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			838.200.000,00	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						1 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.000.000,00	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI
		<b>SMP NEGERI 2 BOBOTSARI</b>							814.900.000,00							814.900.000,00	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							814.900.000,00							814.900.000,00	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							814.900.000,00							814.900.000,00	
64	1	01	02					814.900.000,00							814.900.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							814.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			814.900.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	779.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			779.900.000,00	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						1 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI
		<b>SMP NEGERI 3 BOBOTSARI</b>							549.400.000,00							549.400.000,00	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							549.400.000,00							549.400.000,00	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							549.400.000,00							549.400.000,00	
65	1	01	02					549.400.000,00							549.400.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							549.400.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			549.400.000,00	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	499.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			499.400.000,00	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	
			<b>SMP NEGERI 4 BOBOTSARI</b>						<b>297.700.000,00</b>							<b>297.700.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>297.700.000,00</b>							<b>297.700.000,00</b>	
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>297.700.000,00</b>							<b>297.700.000,00</b>	
66	1	01	02					297.700.000,00							297.700.000,00		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					297.700.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			297.700.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	227.700.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Limbasari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			227.700.000,00	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			70.000.000,00	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	
			<b>DINAS KESEHATAN</b>						<b>172.409.736.000,00</b>							<b>167.447.752.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>172.409.736.000,00</b>							<b>167.447.752.000,00</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>172.409.736.000,00</b>							<b>167.447.752.000,00</b>	
67	1	02	01					126.861.608.000,00							121.378.752.000,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.500.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			12.000.000,00		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.02					125.724.525.864,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			120.174.252.000,00		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1640 Orang/bulan	125.564.600.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			120.029.252.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54 Dokumen	67.377.864,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	92.548.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
							-	4.800.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
							-	6.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			9.000.000,00	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			0				1 0	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
							-	88.950.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			62.500.000,00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	54.450.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				22 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	11.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				9 Dokumen	8.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-	-	-	-	31.500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	35.000.000,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	31.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-	-	-	-	579.981.136,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	696.000.000,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	311.604.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.973.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			0				10	255.604.136,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			388.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-	-	-	-	417.351.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	385.000.000,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				40 0	347.351.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	45.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			0				2 0	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
68	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-								44.930.000.000,00	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	13.500.251.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.758.000.000,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
			0				0 0	1.669.710.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Bukateja Kab. Purbalingga, Kertanegara, Karangtengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	693.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karanggambas	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-				700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	952.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkön, Gambarsari	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
			0				2 0	135.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	10.044.040.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga											
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				250000 Keluarga	5.210.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				24 Paket	1.291.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02					30.888.959.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			31.113.000.000,00	
1	02	02	2.02	0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12.144 Orang	97.217.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16214 Orang	121.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14589 Orang	12.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58681 Orang	18.215.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141976 Orang	43.035.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				604136 Orang	18.150.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114718 Orang	11.240.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				268926 Orang	8.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				268926 Orang	8.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2471 Orang	5.116.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14.086 Orang	93.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15.076 Orang	182.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			185.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	213.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	49.964.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	172.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	267.211.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				23 Dokumen	215.985.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				138 Orang	7.495.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA											
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				890 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	261.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	26.926.989.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-				27.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional											
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	424.763.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			425.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	4.608.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	991.347.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkong, Gambarsari, Purbalingga, Bancar	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				26 Dokumen	51.485.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				15 Laporan	5.180.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				23 Unit	253.929.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	396.630.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CIJAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			340.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji											
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi											
								45.210.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			45.000.000,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	45.210.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
								11.925.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			14.000.000,00	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya											
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	3.750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			0				10 0	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				54 Unit	3.175.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
69	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
								768.106.000,00			-				792.000.000,00	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											
								5.710.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			9.000.000,00	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				150 Dokumen	3.700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				50 Dokumen	2.010.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02				-	81.906.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	83.000.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	6.795.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200 Dokumen	75.111.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03				-	680.490.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	700.000.000,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				189 Orang	680.490.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
70	1	02	04				-	196.858.500,00			-		-	-	202.000.000,00	
1	02	04	2.01				-	6.182.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	7.000.000,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				39 Dokumen	6.182.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03				-	4.350.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	5.000.000,00	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				62 Dokumen	4.350.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	186.326.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	190.000.000,00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		154 Unit	186.326.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
71	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	136.818.000,00			-		-	-	145.000.000,00	
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	33.040.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	35.000.000,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Dokumen	33.040.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	35.048.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	40.000.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		5 Dokumen	35.048.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	68.730.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	70.000.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen	68.730.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
								1.100.000.000,00							0,00	
1								1.100.000.000,00							0,00	
1	02							1.100.000.000,00							0,00	
72	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.100.000.000,00			-		-	-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	01	2.10					1.100.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	01	2.10	0001								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	UPD LABKES
								3.411.038.000,00								0,00
								3.411.038.000,00								0,00
								3.411.038.000,00								0,00
73	1	02	01					2.245.648.000,00							0,00	
1	02	01	2.10					2.245.648.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	01	2.10	0001								Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
								2.245.648.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
74	1	02	02					1.161.423.000,00							0,00	
1	02	02	2.02					1.161.423.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	02	2.02	0001								Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0005								Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0010								Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0011								Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0015												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	191.330.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	20.731.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	153.794.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	669.310.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	50.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	478.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA	
75	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	3.967.000,00							0,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.967.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.967.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PURBALINGGA	
								2.071.231.000,00								0,00	
								2.071.231.000,00								0,00	
								2.071.231.000,00								0,00	
76	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.133.814.000,00							0,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.133.814.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.133.814.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
77	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	932.487.000,00							0,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	932.487.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				224 Orang	27.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3258 Orang	4.750.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				257 Orang	1.475.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	137.045.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2.975.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.275.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	75.110.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	654.184.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria												
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	6.250.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	348.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	7.700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
78	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.930.000,00							0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.930.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.930.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS BOJONG	
					PUSKESMAS KUTASARI			5.244.724.000,00								0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.244.724.000,00								0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.244.724.000,00								0,00	
79	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.157.817.000,00							0,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.157.817.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	4.157.817.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI	
80	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.081.428.000,00							0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.081.428.000,00							0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	66.780.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KUTASARI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	3.150.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				50 Dokumen	467.151.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	36.990.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	203.833.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	261.443.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				500 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KUTASARI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak											
							500 Dokumen	606.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
							200 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KUTASARI
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
							1000 Dokumen	25.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KUTASARI
81	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.479.000,00							0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.479.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							0 Dokumen	5.479.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KUTASARI
					<b>PUSKESMAS BOJONGSARI</b>			<b>4.552.237.000,00</b>							<b>4.256.223.000,00</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
82	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.597.263.000,00							3.300.000.000,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.597.263.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		3.300.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							3 Unit Kerja	3.597.263.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		3.300.000.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
83	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	950.438.000,00							951.687.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	950.438.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		951.687.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
							406 Orang	43.875.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		43.875.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				995 Orang	13.800.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			14.900.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				56 Orang	600.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			750.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				56 Orang	2.800.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.800.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	469.248.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			469.247.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.200.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	30.214.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			30.214.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				82 Orang	1.300.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.300.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	127.420.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			127.220.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	232.003.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			232.003.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	853.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			853.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			600.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	18.850.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.850.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI		
84	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.536.000,00							4.536.000,00			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.536.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.536.000,00			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.536.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.536.000,00	PUSKESMAS BOJONGSARI		
			<b>PUSKESMAS KALIMANAH</b>						<b>4.662.038.000,00</b>							<b>0,00</b>		
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.662.038.000,00</b>								<b>0,00</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4.662.038.000,00</b>								<b>0,00</b>	
85	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.128.508.000,00							0,00			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.128.508.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.128.508.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH		
86	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.532.030.000,00							0,00			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.532.030.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100 Orang	93.925.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					40 Orang	7.175.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					100 Orang	5.625.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					50 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					10 Dokumen	410.617.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					10 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					10 Dokumen	28.687.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					20 Orang	850.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					10 Dokumen	213.815.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KALIMANAH	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen	733.186.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	850.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				2 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				17 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
87	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
							-	1.500.000,00			-				0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							-	1.500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
							10 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KALIMANAH
					<b>PUSKESMAS PADAMARA</b>											
								<b>4.404.307.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
								<b>4.404.307.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
								<b>4.404.307.000,00</b>							<b>0,00</b>	
88	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
							-	3.237.071.000,00			-				0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
							-	3.237.071.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.237.071.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
89	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	1.164.731.000,00							0,00	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.164.731.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				546 Orang	89.040.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	5.075.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				124 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				390 Orang	6.250.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				160 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	332.251.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	750.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2.750.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	35.980.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				124 Orang	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	85.557.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	571.925.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				360 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				35 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	328.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	PUSKESMAS PADAMARA	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	16.525.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	PUSKESMAS PADAMARA	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA	
90	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			2.505.000,00							0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.505.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2.505.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS PADAMARA	
			<b>PUSKESMAS KEMANGKON</b>						<b>4.964.797.000,00</b>							<b>4.101.097.000,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.964.797.000,00</b>							<b>4.101.097.000,00</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>4.964.797.000,00</b>							<b>4.101.097.000,00</b>	
91	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.827.149.000,00							3.827.150.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			3.827.149.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.827.150.000,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.827.149.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.827.150.000,00	PUSKESMAS KEMANGKON	
92	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.133.188.000,00							273.947.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.133.188.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			273.947.000,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	228.950.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	7.650.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	2.700.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	7.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	474.735.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.850.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	45.959.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	49.322.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KEMANGKON
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	273.947.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		273.947.000,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		0,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		0,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		0,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	23.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		0,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
93	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	4.460.000,00					-	-	0,00			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.460.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	0,00			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.460.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		0,00	PUSKESMAS KEMANGKON			
					<b>PUSKESMAS KALIGONDANG</b>							<b>4.021.110.000,00</b>						<b>4.021.111.000,00</b>				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												<b>4.021.110.000,00</b>				<b>4.021.111.000,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>4.021.110.000,00</b>				<b>4.021.111.000,00</b>	
94	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	2.902.225.000,00						-	-	2.902.226.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	2.902.225.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	2.902.226.000,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.902.225.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		2.902.226.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG			
95	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	1.114.321.000,00						-	1.114.321.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				1.114.321.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	1.114.321.000,00	
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	101.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		101.250.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	15.550.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		15.550.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		6.000.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		4.500.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	350.868.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		350.868.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		375.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.050.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.050.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	28.175.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		28.175.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0				100 0	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		375.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG
1	02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	104.764.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			104.764.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	474.964.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			474.964.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria												
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	100.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			100.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.000.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			600.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	18.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.250.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
96	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.564.000,00							4.564.000,00		
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.564.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.564.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.564.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.564.000,00	PUSKESMAS KALIGONDANG	
					<b>PUSKESMAS KALIKAJAR</b>												
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												
97	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.593.723.000,00							1.593.723.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	02	01	2.10					1.593.723.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.593.723.000,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1.593.723.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.593.723.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
98	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.168.970.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.168.970.000,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	30.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			30.200.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1260 Orang	8.025.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.025.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat												
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			100 Orang	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.900.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			91 Orang	1.700.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.700.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			48 Dokumen	203.717.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			203.717.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			53 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.600.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan				11 Dokumen	13.640.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.640.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	5.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.400.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				15 Dokumen	91.188.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			91.188.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	790.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			790.250.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	150.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			150.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				9 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				24 Dokumen	800.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			800.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			600.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	11.925.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			11.925.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR
99	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	2.536.000,00							2.536.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.536.000,00							2.536.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	2.536.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		2.536.000,00	PUSKESMAS KALIKAJAR	
			<b>PUSKESMAS KEJOBONG</b>					<b>5.755.368.000,00</b>						<b>5.755.369.000,00</b>		
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>5.755.368.000,00</b>						<b>5.755.369.000,00</b>		
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>5.755.368.000,00</b>						<b>5.755.369.000,00</b>		
100	1	02	01					4.660.065.000,00						4.660.066.000,00		
1	02	01	2.10					4.660.065.000,00						4.660.066.000,00		
1	02	01	2.10	0001										4.660.066.000,00		
							1 Unit Kerja	4.660.065.000,00		PENDAPATAN DARI BLUD	-			4.660.066.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
101	1	02	02					1.090.283.000,00						1.090.283.000,00		
1	02	02	2.02					1.090.283.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		1.090.283.000,00		
1	02	02	2.02	0001												
							415 Orang	192.660.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		192.660.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0005												
							0	14.300.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		14.300.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0010												
							211 Orang	8.750.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		8.750.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0011												
							320 Orang	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		6.000.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0015												
							1 Dokumen	449.891.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		449.891.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0016												
							1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		375.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG	
1	02	02	2.02	0017												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.850.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.850.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0										
			0				0 0	18.371.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.371.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		211 Orang	800.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			800.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	106.450.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				106.450.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	258.208.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			258.208.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
					-		-	853.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			853.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 Dokumen	1.800.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.800.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 Dokumen	20.475.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.475.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
102	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	5.020.000,00							5.020.000,00	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.020.000,00							5.020.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen	5.020.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				5.020.000,00	PUSKESMAS KEJOBONG
<b>PUSKESMAS PENGADEGAN</b>								<b>4.213.935.000,00</b>					<b>4.203.211.597,68</b>			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.213.935.000,00							4.203.211.597,68		
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4.213.935.000,00							4.203.211.597,68		
103	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-						-		3.346.746.597,68		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-						-		3.346.746.597,68		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.346.746.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		3.346.746.597,68	PUSKESMAS PENGADEGAN
104	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			861.205.000,00					766.465.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			861.205.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		753.145.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	97.200.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		30.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		17.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	9.100.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		5.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		1.500.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	2.250.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		3.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		2.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	278.545.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			151.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.175.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	14.405.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			55.375.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	800.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			800.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	75.281.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			39.570.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	352.158.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			450.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.700.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.800.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	150.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			150.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.900.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			30.600.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	591.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			12.800.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				10 Dokumen	1.150.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.150.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				10 Dokumen	19.700.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			19.700.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi											
			-				-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.320.000,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.320.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
105	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
			-				-	5.984.000,00			-				90.000.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			-				-	5.984.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			90.000.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.984.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			90.000.000,00	PUSKESMAS PENGADEGAN
					PUSKESMAS BUKATEJA											
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
106	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			-				-	3.570.129.000,00			-				0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			-				-	3.570.129.000,00			-				0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.570.129.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
107	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	888.006.000,00						-	0,00	
	1 02 02	2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	888.006.000,00						-	0,00	
	1 02 02	2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	65.450.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10178 Orang	14.725.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				558 Orang	12.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	358.823.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	28.725.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	111.937.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	262.515.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
	1 02 02	2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	656.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
108	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
			-	-			-	5.334.000,00			-	-	-		0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			-	-			-	5.334.000,00			-	-	-		0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.334.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS BUKATEJA
					<b>PUSKESMAS KUTAWIS</b>											
								<b>3.475.148.000,00</b>							<b>1.112.440.000,00</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
								<b>3.475.148.000,00</b>							<b>1.112.440.000,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
								<b>3.475.148.000,00</b>							<b>1.112.440.000,00</b>	
109	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			-	-			-	2.362.708.000,00			-	-	-		0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
			-	-			-	2.362.708.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.362.708.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Majasari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KUTAWIS
110	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			-	-			-	1.107.870.000,00			-	-	-		1.107.870.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			-	-			-	1.107.870.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		1.107.870.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				384 Orang	66.150.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Majasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		66.150.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5210 Orang	7.025.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		7.025.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.350.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				457 Orang	6.600.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.600.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				26 Dokumen	344.703.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			344.703.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6.350.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.350.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				43 Dokumen	12.494.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			12.494.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				91 Orang	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.600.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	100.360.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			100.360.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	550.457.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			550.457.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				7 Orang	100.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			100.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	656.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			656.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			600.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	6.550.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.550.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS	
111	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.570.000,00							4.570.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.570.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.570.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	4.570.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.570.000,00	PUSKESMAS KUTAWIS	
					<b>PUSKESMAS REMBANG</b>			<b>6.789.775.000,00</b>							<b>0,00</b>		
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												
112	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.792.160.000,00							0,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	5.792.160.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	5.792.160.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG	
113	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	991.965.000,00							0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	991.965.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				910 Orang	113.400.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				975 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8598 Orang	29.350.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				120 Orang	4.200.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				539 Orang	9.600.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	348.678.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				45 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	38.800.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	400.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	152.550.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	247.552.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				906 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1195 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	600.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	860.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.500.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS REMBANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00		
1	02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS REMBANG	
114	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	5.650.000,00			-		-	-	0,00		
1	02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	5.650.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00		
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.650.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS REMBANG	
								4.829.038.000,00									0,00
								4.829.038.000,00									0,00
								4.829.038.000,00									0,00
115	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	4.117.446.000,00			-		-	-	0,00		
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	4.117.446.000,00			-		-	-	0,00		
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.117.446.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	
116	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	706.284.000,00			-		-	-	0,00		
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	706.284.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00		
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	103.350.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	5.200.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									-		-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7 Orang	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	1.850.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	193.476.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	6.050.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	18.300.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				7 Orang	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	98.069.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	248.636.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	50.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	328.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi											
								0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
117	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
								5.308.000,00			-				0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
								5.308.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.308.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
			<b>PUSKESMAS KARANGMONCOL</b>					<b>6.021.646.000,00</b>							<b>6.021.647.022,41</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>6.021.646.000,00</b>							<b>6.021.647.022,41</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>6.021.646.000,00</b>							<b>6.021.647.022,41</b>	
118	1	02	01					4.932.625.000,00							4.932.626.022,41	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	1	02	01	2.10				4.932.625.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.932.626.022,41
			Peningkatan Pelayanan BLUD													
1	02	01	2.10	0001												
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.932.625.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.932.626.022,41	PUSKESMAS KARANGMONCOL
119	1	02	02					1.081.931.000,00							1.081.881.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
	1	02	02	2.02				1.081.931.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.081.881.000,00
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1	02	02	2.02	0001												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1050 Orang	115.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			115.500.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0005												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4100 Orang	10.725.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.725.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0010												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0011												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	1.625.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.625.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0015												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	511.595.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			511.595.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0016												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.000.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				9 Dokumen	16.070.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			16.070.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			950.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	103.341.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			103.341.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	280.757.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			280.757.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	25.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			25.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			15.000.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	1.218.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.218.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			600.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	16.600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			16.600.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL	
120	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	7.090.000,00						-	7.140.000,00		
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.090.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	7.140.000,00		
1	02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	7.090.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			7.140.000,00	PUSKESMAS KARANGMONCOL	
			<b>PUSKESMAS KARANGTENGGAH</b>													<b>0,00</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													<b>0,00</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													<b>0,00</b>	
121	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.681.730.000,00						-	0,00		
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.681.730.000,00						-	0,00		
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.681.730.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
122	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	842.323.000,00						-	0,00		
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	842.323.000,00						-	0,00		
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				342 Orang	28.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3863 Orang	11.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3143 Orang	3.550.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				53 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH	
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3024 Dokumen	303.852.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				222 Dokumen	4.625.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				143 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				454 Dokumen	15.165.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				232 Dokumen	60.379.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	377.702.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				435 Laporan	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				434 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				344 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	50.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				645 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				988 Dokumen	300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				12 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KARANGTENGGAH
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGTENGAH	
1	02	02	2.03					0,00			-	-	-	-	0,00		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-						-	-	-	-			
1	02	02	2.03	0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				54 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGTENGAH	
123	1	02	05					3.250.000,00			-	-	-	-	0,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-						-	-	-	-			
1	02	05	2.03					3.250.000,00			-	-	-	-	0,00		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-						-	-	-	-			
1	02	05	2.03	0001			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				222 Dokumen	3.250.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGTENGAH	
			<b>PUSKESMAS BOBOTSARI</b>						<b>5.877.415.000,00</b>							<b>5.877.414.890,32</b>	
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>5.877.415.000,00</b>							<b>5.877.414.890,32</b>	
1	02		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>5.877.415.000,00</b>							<b>5.877.414.890,32</b>	
124	1	02	01					4.945.471.000,00			-	-	-	-	4.945.470.890,32		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-						-	-	-	-			
1	02	01	2.10					4.945.471.000,00			-	-	-	-	4.945.470.890,32		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-						-	-	-	-			
			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-						-	-	-	-			
1	02	01	2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.945.471.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	-	4.945.470.890,32	PUSKESMAS BOBOTSARI	
125	1	02	02					927.744.000,00			-	-	-	-	927.744.000,00		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-						-	-	-	-			
1	02	02	2.02					927.744.000,00			-	-	-	-	927.744.000,00		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-						-	-	-	-			
			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-						-	-	-	-			
1	02	02	2.02	0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				587 Orang	116.800.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	116.800.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-						-	-	-	-			
1	02	02	2.02	0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4571 Orang	6.450.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	6.450.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-						-	-	-	-			
1	02	02	2.02	0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				132 Orang	2.250.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.250.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				582 Orang	5.175.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.175.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	388.063.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			388.063.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.000.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	46.725.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			46.725.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				782 Orang	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.000.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	87.175.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			87.175.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	236.063.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			236.063.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.968.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.968.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.200.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			26.000.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
126	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	4.200.000,00							4.200.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.200.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.200.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.200.000,00	PUSKESMAS BOBOTSARI	
								<b>3.638.753.000,00</b>								<b>3.238.690.000,00</b>	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															<b>3.638.753.000,00</b>	
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>															<b>3.638.753.000,00</b>
127	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.817.741.000,00							2.421.878.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.817.741.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.421.878.000,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.817.741.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.421.878.000,00	PUSKESMAS MREBET	
128	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	816.476.000,00							812.276.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	816.476.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			812.276.000,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	80.750.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			80.750.000,00	PUSKESMAS MREBET	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6320 Orang	6.875.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.875.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				300 Orang	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				429 Orang	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.500.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	243.859.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			243.859.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			375.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	6.100.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.100.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.500.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.000.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25 Dokumen	68.875.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			68.875.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	360.892.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			360.892.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.500.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			500.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				3 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.000.000,00	PUSKESMAS MREBET
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				3 Dokumen	16.550.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			16.550.000,00	PUSKESMAS MREBET
129	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
								4.536.000,00							4.536.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	4.536.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.536.000,00	PUSKESMAS MREBET
					<b>PUSKESMAS SERAYU LARANGAN</b>											
								<b>3.979.023.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
								<b>3.979.023.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
								<b>3.979.023.000,00</b>							<b>0,00</b>	
130	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
								2.962.823.000,00							0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.962.823.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
131	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
								1.014.720.000,00							0,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				604 Orang	24.322.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4563 Orang	9.275.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	6.900.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				485 Orang	8.350.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	268.638.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	3.575.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	8.925.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	300.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	72.891.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	599.791.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAIAK ROKOK	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	328.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	5.450.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-				0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
132	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
							-	1.480.000,00							0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							-	1.480.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1.480.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
								4.787.192.000,00								0,00
								4.787.192.000,00								0,00
								4.787.192.000,00								0,00
133	1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	4.044.700.000,00					-		0,00	
	1 02 01 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	4.044.700.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	
								1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.044.700.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
134	1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	739.442.000,00					-		0,00	
	1 02 02 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	739.442.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	
								1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1050 Orang	127.925.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2230 Orang	6.300.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	2.100.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	4.025.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				178 Dokumen	277.608.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
								1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				62 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		84 Dokumen	23.775.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		100 Orang	700.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	78.924.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		2 Dokumen	191.254.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		1 Dokumen	556.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
135	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	3.050.000,00			-		-		0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.050.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen	3.050.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	PUSKESMAS KARANGREJA
					<b>PUSKESMAS KARANGREJA</b>			<b>3.356.446.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>3.356.446.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>3.356.446.000,00</b>							<b>0,00</b>	
136	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.398.895.000,00			-		-		0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	2.398.895.000,00	-	-	-	-	-	0,00			
1	02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.398.895.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
137	02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	955.623.000,00	-	-	-	-	-	0,00			
1	02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	955.623.000,00	-	-	-	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00		
1	02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				452 Orang	52.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3765 Orang	9.575.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	289.435.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	375.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	3.550.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			0				00	12.100.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS					0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	50.651.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	524.242.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	395.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan												
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				2 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi												
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				2 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
138	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
			-				-	1.928.000,00							0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
			-				-	1.928.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	1.928.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	PUSKESMAS KARANGJAMBU	
								133.672.329.000,00									133.672.330.000,00
								133.672.329.000,00									133.672.330.000,00
								133.672.329.000,00									133.672.330.000,00
139	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			-				-	133.672.329.000,00							133.672.330.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	01	2.10					133.672.329.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			133.672.330.000,00	
1	02	01	2.10	0001												
								100 Unit Kerja	133.672.329.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		133.672.330.000,00	RSUD GOETENG TAROENADIBRATA
									52.565.496.000,00						87.664.000.000,00	
1									52.565.496.000,00						87.664.000.000,00	
1	02								52.565.496.000,00						87.664.000.000,00	
140	1	02	01					35.200.000.000,00							37.664.000.000,00	
1	02	01	2.10					35.200.000.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		37.664.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001												
								1 Unit Kerja	35.200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		37.664.000.000,00	RSUD PANTI NUGROHO
141	1	02	02					17.365.496.000,00							50.000.000.000,00	
1	02	02	2.01					17.365.496.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		50.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0022												
								1 Unit	17.365.496.000,00		DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		50.000.000.000,00	RSUD PANTI NUGROHO
									98.339.483.000,00						140.747.917.584,75	
1									98.339.483.000,00						140.747.917.584,75	
1	03								98.339.483.000,00						140.747.917.584,75	
142	1	03	01					100 persen	11.374.826.000,00						11.487.616.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	-				100 persen	4.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	4.500.000,00		
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		2.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	-				100 persen	9.904.108.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	10.016.898.000,00		
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	9.737.911.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		9.850.701.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	89.397.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		89.397.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	76.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		76.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				100 persen	45.300.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	45.300.000,00	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	45.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		45.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jam latihan pegawai				100 persen	5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	5.000.000,00	
1	03 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum penunjang operasional kantor				100 persen	55.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	55.900.000,00	
1	03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		3.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		9.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		7.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		9.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah yang disediakan untuk penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 persen	30.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	30.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa kantor yang tersedia	-				100 persen	777.961.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	777.961.000,00		
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1.925.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		1.925.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	163.736.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		163.736.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	610.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		610.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09				100 persen	552.057.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga	-	552.057.000,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	542.057.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		542.057.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	ASN DPUPR Kabupaten Purbalingga		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
143	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					-	7.772.201.000,00						-	8.254.382.000,00	
	1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	44.000.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial		164.600.000,00	
	1 03 02 2.01 0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.01 0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				20 Lembaga	34.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			92.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik				49 persen	7.728.201.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		8.089.782.000,00	
	1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,2 KM	6.049.185.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		5.760.766.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.65 KM	900.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi											
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				64 Lembaga	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air											
			Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi				1 Dokumen	61.395.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		61.395.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi											
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 UNIT	717.621.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		717.621.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
144	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	-	79 Angka	3.146.622.000,00					-	10.758.781.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	-			53,02 persen	3.146.622.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	10.758.781.000,00	
1	03 08 2.01 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2.889.185.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		10.501.344.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	257.437.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		257.437.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
145	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	-			1,62 persen	75.019.571.000,00						-	109.784.905.584,75	
	1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang	-			666821 meter	75.019.571.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	109.784.905.584,75	
1	03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10 2.01 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				952602 KM	1.029.457.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		2.170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan											
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				220 KM	12.080.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		12.080.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan											
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				2985 KM	8.750.499.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Masyarakat Purbalingga		1.507.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan											
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				19 KM	49.863.521.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		70.645.699.584,75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				50 Meter	1.912.094.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan											
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				40 Meter	400.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan											
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				80 Jembatan	884.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		884.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan											
			Panjang jembatan yang dibangun				40 Meter	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga		19.397.506.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
146	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terbina	79 persen	96.263.000,00						-	96.263.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	03	11	2.01	0016	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih	-				39.58 Persentase SDM Jasa	52.408.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	52.408.000,00	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis															
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					30 Orang	52.408.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	52.408.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0013	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi undefined	-				2 kali 77.78 Persentase ketersedi	28.855.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	28.855.000,00	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan					2 Dokumen	28.855.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	28.855.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang diawasi	-				72.5 Persentase pengawasa	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	15.000.000,00		
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota															
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan					20 Paket Pekerjaan	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
147	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	-				3 kawasan	930.000.000,00						-	365.970.000,00		
	1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan	-				3 dokumen	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	215.970.000,00		
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota															
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	35.970.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang					1 Publikasi	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi					1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.					2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	760.000.000,00	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	0,00	-	
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar					1 Peta	325.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota					2 Dokumen	435.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	03	12	2.03				94,49 persen	135.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	135.000.000,00				
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	Masyarakat Purbalingga	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.04				-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	15.000.000,00				
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		24 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
					<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>							7.550.059.000,00					0,00		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							7.243.262.000,00						0,00	
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							857.055.000,00						0,00	
148	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	822.655.000,00								0,00			
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	822.655.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00			
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		0 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		0 Liter/Detik	428.605.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0 Liter/Detik	354.050.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				5 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan											
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0 SR	40.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Lembaga	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
149	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	34.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	
1	03	05	2.01		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat											
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M <sup>3</sup> /Hari	34.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja											
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				10 Rumah Tangga	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)											
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				0 M <sup>3</sup> /Hari	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat											
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				0 Rumah Tangga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
150	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan											
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan											
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														
								6.386.207.000,00								0,00
151	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	4.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				-	-		-	3.529.299.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	3.436.067.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75 Dokumen	36.748.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	56.484.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				-	-		-	14.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				-	-		-	4.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				-	-		-	27.892.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-		0,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	681.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.642.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3.469.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
								2.485.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.485.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								437.563.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.866.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	539.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	417.108.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								141.425.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	130.456.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5.969.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
152	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
								282.564.000,00			-		-		0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				10.348.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.01 0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.348.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				7.700.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				40 Orang	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.02 0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				40 Orang	3.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				88.905.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	38.783.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	50.122.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-				172.571.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 02 2.05 0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	172.571.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-				3.040.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 02 2.06 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	3.040.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
153	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-				975.434.500,00					-	-	0,00	
1	04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				975.434.500,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
1	04 03 2.03 0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					0 Dokumen	975.434.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
154	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-			115.664.000,00								0,00		
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			115.664.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					0 Unit Rumah	115.664.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
155	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-			850.979.000,00									0,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-			850.979.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00		
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					0 Laporan	7.237.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																	
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					0 Lokasi	843.742.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
156	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-			5.108.000,00									0,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			5.108.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00		
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0 Berita Acara	5.108.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
157	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-			17.549.000,00									0,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			17.549.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00		
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0 Dokumen	17.549.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
158	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	-			0,00									0,00	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			0,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-			0,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 10 06 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
159	2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-			-	284.140.000,00			-		-		0,00	
	2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	284.140.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	
	2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	284.140.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						<b>8.641.915.000,00</b>							<b>8.820.385.000,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>8.641.915.000,00</b>							<b>8.820.385.000,00</b>	
1	05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>8.641.915.000,00</b>							<b>8.820.385.000,00</b>	
160	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 Persen	7.358.005.000,00							7.680.485.000,00	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan yang Disusun	-			100 Persen	5.000.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	5.000.000,00	
	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokuman Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	-				100 Persen	5.376.406.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	5.698.886.000,00	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					39 Orang/bulan	5.270.406.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	5.592.886.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	76.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	-				6 Laporan	6.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	6.500.000,00	
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian SKP	-			39 Angka	15.000.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	15.000.000,00		
1	05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	-			12 Laporan	44.190.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	44.190.000,00		
1	05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.150.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		2.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		1.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		3.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Ketantuan	-				4 Unit	22.308.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	22.308.000,00		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	22.308.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		22.308.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Bulan	1.341.408.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	1.341.408.000,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	45.045.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		45.045.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	3.225.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		3.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.293.138.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		1.293.138.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setiap Tahunnya	-	12 Bulan	547.193.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	547.193.000,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			43 Unit	531.893.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		531.893.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	10.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		10.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
161	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda Persentase Pelanggaran Trantibum	-	10,91 Persen 16,00 Persen	1.010.700.000,00					-	854.900.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	-			100 Orang	977.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	821.400.000,00	
1	05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				8 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 2.01 0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	639.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		639.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 2.01 0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				100 Orang	9.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		9.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				4400 laporan	300.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		145.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4400 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	2.02		Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda / Perkada yang Mengandung Sanksi ditegakkan	-		100 Persen	26.000.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	26.000.000,00		
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				30 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-			2 Kegiatan	7.500.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	7.500.000,00		
1	05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						30 Laporan	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
162	1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-			75,76 Persen	273.210.000,00						-	285.000.000,00		
1	05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-			100 Persen	263.210.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	275.000.000,00		
1	05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						60 Dokumen	81.462.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						6 Unit	181.748.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	-				2 Kegiatan	10.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	10.000.000,00		
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				72 Orang	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					<b>BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>										<b>0,00</b>						
	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												<b>0,00</b>				
	1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>												<b>0,00</b>				
163	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	3.435.514.000,00						-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	1.826.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	996.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	830.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	2.425.486.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2.355.620.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	33.921.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35.945.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				3.900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				16.604.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	16.604.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				21.630.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	966.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.240.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.324.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				0,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	702.744.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49.604.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.050.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.890.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	263.324.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	244.433.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	8.891.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
164	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	424.832.000,00			-		-	-	0,00	
1	05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	34.558.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	34.558.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
			-	-			-	223.149.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				7 Unit	4.959.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				25 Orang	18.894.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				35 Orang	12.364.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana											
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	18.270.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05 03 2.02 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0				0,0	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				6 Kawasan	168.662.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	152.125.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	8.228.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	58.935.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	69.862.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
1	05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04 0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
<b>DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								<b>29.259.487.000,00</b>						<b>31.303.906.000,00</b>		
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>15.182.533.000,00</b>							<b>16.306.742.000,00</b>	
1	06		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>15.182.533.000,00</b>							<b>16.306.742.000,00</b>	
165	1	06	01					5.457.427.000,00							5.848.795.000,00	
								4.904.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.365.000,00	
1	06	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.652.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.713.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.335.250.000,00	
								4.124.083.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul				
1	06	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.226.053.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			48.807.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02	0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.390.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4.290.000,00	
								3.900.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul				
1	06	01	2.03	0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.290.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.05					4.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.400.000,00	
1	06	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.400.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06					31.996.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			43.802.000,00	
1	06	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.650.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.558.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			17.992.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			880.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu												
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	4.429.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.620.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	7.109.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			14.700.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.960.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.07					33.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			47.418.000,00	
1	06	01	2.07	0006												
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			67 Unit	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			47.418.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.07	0010												
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	32.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08					943.064.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			976.162.000,00	
1	06	01	2.08	0001												
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	332.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			365.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0002												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	193.858.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			208.590.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0003												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Laporan	1.250.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.362.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	0004												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	747.624.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			764.845.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09					312.480.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			431.108.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			51 Unit	258.280.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		284.108.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		10.500.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	49.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		136.500.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
166	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	845.251.000,00					-	930.733.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	845.251.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	930.733.000,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Lembaga	456.820.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		502.502.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)											
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Orang	1.846.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		2.988.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya			496 Orang	386.585.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		425.243.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
167	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	6.319.228.000,00					-	6.663.027.000,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	-	-	-	6.319.228.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	6.663.027.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang											
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	7.178.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		7.896.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	48.787.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			74.497.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1.660.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.793.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial											
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				1606 Orang	6.177.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.481.493.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	79.953.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			87.948.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.100.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.100.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.100.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan											
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.100.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
168	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
								2.287.411.000,00								
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
								2.287.411.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.516.151.000,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				136700 Orang	56.746.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			62.420.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1806 Orang	2.230.665.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		2.453.731.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
169	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	150.172.000,00					-	-	165.188.000,00		
	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	137.011.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	150.711.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang	99.597.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		109.556.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		55 Orang	10.062.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		11.068.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	27.352.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		30.087.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	13.161.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	14.477.000,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		52 Orang	13.161.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		14.477.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
170	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	123.044.000,00					-	-	182.848.000,00		
	1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	123.044.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	182.848.000,00	
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			157.500.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota												
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				5 Makam	23.044.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			25.348.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>14.076.954.000,00</b>							<b>14.997.164.000,00</b>	
2	08		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>701.189.000,00</b>							<b>766.826.000,00</b>	
171	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	108.288.000,00		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	8.846.000,00		
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				2 Laporan	8.042.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.846.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	84.504.000,00		
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
			Jumlah organisasi masyarakat/profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	92.088.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			81.754.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				50 orang	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.750.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	14.938.000,00		
2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				2 dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			14.938.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
172	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	237.566.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-				74.446.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			81.890.000,00	
	2 08 03 2.01 0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12.196.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			13.415.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.01 0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KTP Kewenangan Provinsi				20 orang	38.550.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			42.405.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.01 0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPD kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				3 Lembaga	23.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			26.070.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				60.634.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			66.697.000,00	
	2 08 03 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang	13.884.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			15.272.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.02 0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				12 orang	46.750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			51.425.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				80.890.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			88.979.000,00	
	2 08 03 2.03 0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				3 Lembaga	5.890.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			6.479.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 03 2.03 0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	82.500.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
173	2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-			-	2.158.000,00						-	2.790.000,00	
	2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	2.158.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	2.790.000,00	
2	08	05	2.01	0003			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.158.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		2.790.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
174	2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-			-	19.691.000,00						-	21.369.000,00	
	2	08	06	2.01			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-			-	11.399.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	12.249.000,00	
2	08	06	2.01	0003			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	5.789.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		6.078.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.01	0006			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	5.610.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		6.171.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			-	8.292.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	9.120.000,00	
2	08	06	2.02	0006			penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	4.045.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		4.449.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	0007			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	4.247.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		4.671.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
175	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	-	-	360.740.000,00					-	-	396.813.000,00	
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	144.222.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	158.644.000,00	
	2 08 07 2.01 0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				2 Dokumen	2.050.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	2.255.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 07 2.01 0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Kegiatan	135.031.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	148.534.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 07 2.01 0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan kTA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan kTA Kewenangan Kab/Kota				30 Orang	7.141.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	7.855.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	186.048.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	204.652.000,00	
	2 08 07 2.02 0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					15 Orang	2.658.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	2.923.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 07 2.02 0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					20 Orang	183.390.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	201.729.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	30.470.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	33.517.000,00	
	2 08 07 2.03 0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5 Orang	30.470.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	33.517.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						13.375.765.000,00							14.230.338.000,00	
176	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	-	500.594.000,00					-	-	551.072.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	9.429.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	10.791.000,00	
	2 14 02 2.01 0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
		Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan					1 Kegiatan	3.957.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		4.352.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.01 0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					1 Kegiatan	1.909.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		2.520.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.01 0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana														
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					4 Kegiatan	3.563.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		3.919.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
								491.165.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		540.281.000,00	
	2 14 02 2.02 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					3 Laporan	62.094.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		68.303.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					18 Laporan	223.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		245.520.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					18 Dokumen	198.691.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		218.560.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 14 02 2.02 0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					2 Dokumen	7.180.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		7.898.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
177	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
								7.619.075.000,00			-		-		7.897.088.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-								1.296.193.000,00				
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		673.200.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		267.300.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		143.462.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		17.696.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		194.535.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-								1.407.840.000,00				
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-		1.407.840.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-								4.899.025.000,00				
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				49 Laporan	30.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			33.660.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4387 Orang	4.597.066.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.826.919.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP											
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				3 Laporan	3.320.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.652.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	31.631.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			34.794.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
								267.300.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			294.030.000,00	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				36 Kampung	267.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			294.030.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
178	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
								5.256.096.000,00							5.782.178.000,00	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
								159.408.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			175.822.000,00	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	4.113.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.998.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			165.000.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	5.295.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.824.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						5.096.688.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			5.606.356.000,00		
2	14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2304 laporan	2.304.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.534.400.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				769 laporan	2.768.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.045.240.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14 04 2.02 0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga															
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				3 Laporan	7.538.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.291.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14 04 2.02 0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga															
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	16.750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			18.425.000,00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			<b>DINAS TENAGA KERJA</b>													<b>5.761.596.000,00</b>	
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													<b>6.767.622.000,00</b>	
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>													<b>6.767.622.000,00</b>	
179	2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.027.366.000,00							4.031.105.000,00		
2	07 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.568.000,00							2.568.000,00		
2	07 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	1.430.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				1.430.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	1.138.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			1.138.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.736.457.000,00							3.736.457.000,00		
2	07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3.677.093.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		3.728.981.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	17.684.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		17.684.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	41.680.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		40.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	6.900.000,00	
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	6.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		6.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	5.000.000,00	
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	41.788.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	32.108.000,00	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	22.139.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		19.139.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		2.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.680.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4.569.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		4.569.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	1.000.000,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			862.976.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	196.184.000,00	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	194.584.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		194.584.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	666.792.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			346.677.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	0,00	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	151.677.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	185.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
180	2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	3.510.000,00					-	-	3.510.000,00	
	2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	3.510.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	3.510.000,00	
2	07 02 2.01 0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				2 Orang	3.510.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		3.510.000,00	DINAS TENAGA KERJA
181	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	903.470.000,00					-	-	903.470.000,00	
	2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	900.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	900.500.000,00	
2	07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				200 Orang	900.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07 03 2.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4 Lembaga	500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	2.970.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	2.970.000,00	
2	07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				8 Lembaga	2.970.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		2.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA
182	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	358.638.000,00					-	-	358.638.000,00	
	2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58.638.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	58.638.000,00	
2	07 04 2.01 0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				200 Orang	58.638.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		58.638.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	300.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	300.000.000,00	
2	07 04 2.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				500 Orang	300.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
183	2	07	05					474.638.000,00							461.873.000,00	
	2	07	05	2.02				474.638.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			461.873.000,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkar	18.375.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perkar Perselisihan yang Tersesalkan	5 Perkar	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			10.610.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2164 Orang	451.263.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			451.263.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
	3	32				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>										
	3	32				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>										
184	3	32	03					3.000.000,00							3.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			3.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3 Kepala Keluarga	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
						<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>										
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
	2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										
185	2	09	01					5.230.216.000,00							5.478.600.000,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			10.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.571.459.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.625.000.000,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.499.459.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			-	-			-	3.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.000.000,00	
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			-				-	3.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			-	-			-	4.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00	
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			-	-			-	44.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	78.000.000,00	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.000.000,00	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	432.557.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	475.600.000,00	
2	09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	168.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	260.157.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	159.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	260.000.000,00	
2	09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	150.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
186	2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	-	-	2.000.000,00			-		-	-	5.000.000,00	
2	09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	5.000.000,00	
2	09 02 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
187	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	86.000.000,00			-		-	-	125.000.000,00	
2	09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	-	-	10.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	15.000.000,00	
2	09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				5 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
			-	-			-	75.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			110.000.000,00	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
188	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
			-	-			-	50.000.000,00			-				75.000.000,00	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			75.000.000,00	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
189	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
			-	-			-	16.000.000,00			-				35.000.000,00	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											
			-	-			-	16.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			35.000.000,00	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>337.000.000,00</b>						<b>575.000.000,00</b>		
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>337.000.000,00</b>						<b>575.000.000,00</b>		
190	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						23.000.000,00						55.000.000,00		
	3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						3.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	5.000.000,00		
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	50.000.000,00		
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			10 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
191	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						191.000.000,00						385.000.000,00		
	3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						60.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	75.000.000,00		
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			10 Kelompok	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						131.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	310.000.000,00		
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20 Unit	125.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
192	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						123.000.000,00						135.000.000,00		
	3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						3.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	10.000.000,00		
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengoahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	120.000.000,00				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	125.000.000,00		
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	120.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
X					<b>NON URUSAN</b>						3.600.000,00					5.000.000,00			
X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>						3.600.000,00						5.000.000,00		
193	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	3.600.000,00							5.000.000,00		
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.600.000,00				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	5.000.000,00		
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
					<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						18.049.188.000,00					18.173.565.000,00			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						18.049.188.000,00						18.173.565.000,00		
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						18.049.188.000,00						18.173.565.000,00		
194	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	9.637.904.000,00							10.496.725.000,00		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	5.887.000,00				-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	6.181.000,00		
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.120.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	5.376.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	767.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	805.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9.134.090.000,00				-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	9.971.508.000,00		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	9.064.691.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	9.907.428.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0				0 0	29.533.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	31.010.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	39.866.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	33.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				1.946.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	2.043.000,00	
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													2.043.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan		1.946.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		2.043.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				4.000.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	4.200.000,00	
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													4.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang		4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		4.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				27.175.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	24.750.000,00	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													368.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		351.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		368.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													15.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		18.039.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		15.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen		797.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													1.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan		1.673.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		1.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													2.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		2.324.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		2.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													4.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen		3.991.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		4.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				3.420.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	3.591.000,00	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													3.591.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		3.420.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		3.591.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				271.620.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	285.198.000,00	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													297.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan		283.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		297.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													147.142.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		140.136.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		147.142.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	809.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			849.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	130.392.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			136.910.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.766.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			199.254.000,00	
2	11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	177.441.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			186.313.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.325.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			7.691.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
195	2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	-			100 persen	45.893.000,00							48.187.000,00	
2	11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen RPPLH yang tersusun tepat waktu	-			100 Persen	21.003.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait		22.052.000,00	
2	11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	694.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait		728.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 02 2.01 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	20.309.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait		21.324.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen KLHS yang tersusun tepat waktu	-			100 Persen	24.890.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait	-	26.135.000,00	
2	11 02 2.02 0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	24.890.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait	-	26.135.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
196	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	-			100 persen	232.915.000,00						-	244.560.000,00	
	11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kualitas Air dan Udara	-			100 Persen	232.915.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD terkait dan Masyarakat	-	244.560.000,00	
2	11 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	222.540.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD terkait dan Masyarakat	-	233.667.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	10.375.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD terkait dan Masyarakat	-	10.893.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
197	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH perkotaan	-			4,298 persen	1.270.821.000,00						-	914.361.000,00	
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luas RTH	-			0,001 persen	1.270.821.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	914.361.000,00	
2	11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				13,852 Ha	1.246.542.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat		888.869.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 04 2.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				2 Orang	4.239.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat		4.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11 04 2.01 0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola				800 Unit	20.040.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat		21.042.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
198	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3	-			100 persen	11.995.000,00						-	12.593.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	11	05	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan Industri yang Memiliki TPS B3	-			100 Persen	11.995.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat	-	12.593.000,00	
2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				8 Dokumen	6.637.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat		6.968.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				10 Usaha	5.358.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat		5.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
199	2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	-			100 persen	60.127.000,00						-	63.132.000,00	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	-			100 Persen	60.127.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat	-	63.132.000,00	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				12 Dokumen	52.668.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat		55.301.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		50 Badan Usaha	7.459.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Badan Usaha dan Masyarakat		7.831.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
200	2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase bank sampah sampah yang beroperasi	-							-	37.272.000,00	
	2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pendampingan	-								37.272.000,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan										
							3 Dokumen	19.919.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat		20.915.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH										
							15 Lembaga	15.579.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat		16.357.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	0,00					-	-	0,00	
	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-	-	0,00	
2	11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
202	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh pemerintah daerah	-			100 persen	5.579.000,00					-	-	5.857.000,00	
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	-			100 persen	5.579.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	5.857.000,00	
2	11 10 2.01 0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				4 Pengaduan	5.579.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	5.857.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
203	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengurangan sampah	-			15,79 persen	6.748.456.000,00					-	-	6.350.878.000,00	
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Cakupan area pelayanan sampah	-			22,03 persen	6.748.456.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait	-	6.350.878.000,00	
2	11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	244.901.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait	-	257.146.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				39000 Ton	6.503.555.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	OPD dan Stakeholder terkait		6.093.732.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>6.999.691.000,00</b>								<b>0,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>6.999.691.000,00</b>								<b>0,00</b>	
	2 12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>6.999.691.000,00</b>								<b>0,00</b>	
204	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				5.679.009.000,00						-	0,00		
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				2.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				3.489.552.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
	2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.447.016.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	11.653.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	30.883.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				5.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
	2 12 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				2.554.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
	2 12 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	2.554.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	41.275.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
2	12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.175.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	695.101.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
2	12 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	695.101.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.220.752.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
2	12 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	520.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125.300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.089.932.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	221.775.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
2	12 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	157.375.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	49.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
205	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	-								0,00	
							87.78 Persen	1.012.841.000,00								
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	-							Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00
							100 Persen	1.012.841.000,00								
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk								Masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00
							191200 Dokumen	1.012.841.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
206	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	-								0,00	
							99.42 Persen	66.042.000,00								
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	-							Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00
							100 Persen	66.042.000,00								
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil											
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil								Masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00
							25.020 Laporan	66.042.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
207	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-								0,00	
							-	241.799.000,00								
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-								0,00	
							-	241.799.000,00								
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								Masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00
							17 Laporan	230.799.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan											
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							17 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
								16.272.941.000,00							16.533.001.000,00	
2					<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
								16.272.941.000,00							16.533.001.000,00	
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
								16.272.941.000,00							16.533.001.000,00	
208	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-								3.684.382.000,00	
							100 persen	3.721.342.000,00								
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersedia	-								4.013.000,00	
							100 persen	4.013.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			ASN Dinpermasdes	-	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.429.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		1.429.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	2.584.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		2.584.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan Yang tersedia	100 persen	3.204.934.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes	-	3.167.974.000,00	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/bulan	3.151.909.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		3.114.949.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	29.265.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		29.265.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50 dokumen Dokumen	23.760.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		23.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	1.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes	-	1.800.000,00	
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang tersedia	-			100 persen	4.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		4.000.000,00		
2	13 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Umum yang sesuai SOP	-			100 persen	22.143.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		22.143.000,00		
2	13 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi						6 Paket	1.240.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		1.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6 Paket	13.163.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		13.163.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.670.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		2.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	2.670.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		2.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	-				100 persen	2.000.000,00				
											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes	-	2.000.000,00	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 persen	249.436.000,00				
											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes	-	249.436.000,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 dokumen Laporan	300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.320.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		55.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.826.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		3.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	189.990.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		189.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	233.016.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes	-	233.016.000,00	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				18 Unit	139.550.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		139.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6.842.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		6.842.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	86.624.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Dinpermasdes		86.624.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
209	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA											
			prosentase desa yang difasilitasi terkait penyelenggaraan penataan desa	-			100 persen	3.314.470.000,00							3.314.470.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	-			100 persen	3.314.470.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	3.314.470.000,00	
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-			1 Desa	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-			1 Desa	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-			200 Unit	3.306.470.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	3.306.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
210	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	prosentase desa yang melaksanakan kerja sama aktif	-			75 persen	48.544.000,00						-	48.544.000,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerja sama desanya	-			1 Desa	48.544.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	48.544.000,00	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	5.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	5.083.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	-			4 0	43.461.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	43.461.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
211	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	prosentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desanya	-			100 persen	3.766.782.000,00						-	3.766.100.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	cakupan desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	-				100 persen	3.506.782.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	3.766.100.000,00		
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2 Dokumen	77.064.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		147.005.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	2.767.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		1.767.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				224 Dokumen	5.264.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		5.264.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	3.156.745.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		3.156.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				224 Orang	31.521.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		131.521.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0				1 0	3.052.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		2.408.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	10.134.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		10.134.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	173.620.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		173.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	10.008.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		10.008.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				224 Dokumen	3.068.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		4.089.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa											
			0				0 0	4.569.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		94.569.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	3.068.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		3.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD											
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				18 Orang	11.020.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		11.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	14.882.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		14.882.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
212	2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	-		80,50 persen	5.681.803.000,00						-	5.719.505.000,00		
	2	13	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang dibina ditingkat kabupaten	-		80,50 persen	5.681.803.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga	-	5.719.505.000,00		
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6920 Lembaga	5.255.088.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		5.255.088.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				6 Unit	40.767.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		40.767.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				5 Dokumen	3.781.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		3.781.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	15.291.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		15.291.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	45.805.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		83.507.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2 13 05 2.01 0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				239 Dokumen	321.071.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Semua Desa di Kabupaten Purbalingga		321.071.000,00	DINAS PERHUBUNGAN MASYARAKAT DAN DESA	
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						<b>19.865.162.000,00</b>							<b>19.310.379.400,00</b>		
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>19.865.162.000,00</b>							<b>19.310.379.400,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>19.865.162.000,00</b>							<b>19.310.379.400,00</b>	
213	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.119.630.000,00						-	6.264.417.400,00		
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.500.000,00						-	4.500.000,00		
	2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.560.596.000,00						-	4.694.722.000,00		
	2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.460.913.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.562.533.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	49.179.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					80.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	50.504.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					52.029.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.011.000,00						-	4.000.000,00		
	2 15 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0				12 Laporan 0	5.011.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000,00						-	4.000.000,00		
	2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	32.031.000,00						-	34.729.400,00		
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.041.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					2.041.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	19.747.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					22.445.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 15 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			0				0 0	4.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4.243.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	4.243.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-				-	18.675.000,00			-	-	-	-	20.884.000,00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	18.675.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	20.884.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-				-	1.316.762.000,00			-	-	-	-	1.325.647.000,00	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	368.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	368.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	136.551.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	126.551.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.660.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.178.183.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.197.068.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-				-	178.055.000,00			-	-	-	-	175.935.000,00	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	155.655.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	155.655.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.560.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	15.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	11.840.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
214	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			-				-	13.745.532.000,00			-	-	-	-	13.045.962.000,00	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
			-				-	13.016.411.000,00			-	-	-	-	12.194.751.000,00	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	676.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	-	-	-	676.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	938.932.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1129 Unit	11.922.387.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.985.675.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan														
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				25 Unit	154.416.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-	-		158.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C														
			-	-			-	16.219.000,00			-	-	-	-	17.600.000,00	
2	15 02 2.03 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				3 Unit	16.219.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-	-		17.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir														
			-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	92.648.000,00	
2	15 02 2.04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				385 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			-	-			-	287.896.000,00			-	-	-	-	193.896.000,00	
2	15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	287.896.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		193.896.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			-	-			-	110.959.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	
2	15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			0				4 Laporan 0	110.959.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			-	-			-	10.806.000,00			-	-	-	-	10.956.000,00	
2	15 02 2.07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	10.806.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.956.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan														
			-	-			-	8.061.000,00			-	-	-	-	8.061.000,00	
2	15 02 2.08 0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				6 Laporan	8.061.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.061.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			-	-			-	174.900.000,00			-	-	-	-	174.900.000,00	
2	15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	174.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-	-		174.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	15	02	2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100.280.000,00	-	-	-	-	203.150.000,00				
	2	15	02	2.11	0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.280.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	203.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
					<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>8.478.472.000,00</b>					<b>9.146.876.000,00</b>				
	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>8.478.472.000,00</b>					<b>9.146.876.000,00</b>				
	2	16			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>8.399.793.000,00</b>					<b>9.060.328.000,00</b>				
215	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	6.461.303.000,00				-	6.832.987.000,00				
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	21 Dokumen 15 Laporan	2.601.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.859.000,00		
	2	16	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21 Dokumen	1.356.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.492.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	1.245.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.367.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	16	01	2.02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			6 Dokumen 70 Dokumen 40 Orang	5.348.075.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Dinkominfo	-	5.882.883.000,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5.285.499.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Dinkominfo		5.814.049.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0004	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	28.453.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Dinkominfo		31.299.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	34.123.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Dinkominfo		37.535.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			4 Laporan	1.972.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Asset SKPD Dinkominfo	-	2.167.000,00	
2	16 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.972.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Asset SKPD Dinkominfo		2.167.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			24 Dokumen 2 Orang	93.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	102.850.000,00	
2	16 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	90.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			99.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-				24.598.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	27.059.000,00	
2	16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.643.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			12.808.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.380.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			7.018.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	2.690.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.959.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	1.885.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-				104.497.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	60.500.000,00	
2	16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	104.497.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-				554.377.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	609.816.000,00	
2	16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	323.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			356.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.374.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		60.912.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	497.680.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		547.448.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	331.683.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	144.853.000,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	126.192.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		138.812.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.491.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.841.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	202.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
216	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
			-	-			-	801.172.000,00			-		-		936.291.000,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				23 Orang 14 Komunitas 153 Media 19 Permohonan	801.172.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	936.291.000,00	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				14 Komunitas	22.037.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.241.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				19 Permohonan	306.845.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		392.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				7 Media	460.135.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		506.149.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				5 Orang	12.155.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.371.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
217	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	-	1.137.318.000,00					1.291.050.000,00				
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa yang terkelola	-			487 domain	17.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Domain	-	19.360.000,00	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	17.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Domain	-	19.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-			12 sistem elektronik 30 skpd	1.119.718.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Aplikasi, SKPD	-	1.271.690.000,00	
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				28 Perangkat Daerah	967.964.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Aplikasi, SKPD	-	1.108.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	00032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				12 Aplikasi	111.754.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Aplikasi, SKPD		122.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Aplikasi, SKPD		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas											
			0				0 0	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Aplikasi, SKPD		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														
218	2	20	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>												
			-				-	47.225.000,00							51.947.000,00	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	47.225.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	51.947.000,00	
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar											
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	15.290.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		16.819.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				12 Laporan	31.935.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		35.128.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
219	2	21	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>												
			-				-	31.454.000,00							34.601.000,00	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	31.454.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	34.601.000,00	
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	10.720.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.792.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan											
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	10.332.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	10.402.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			11.443.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					<b>6.421.437.000,00</b>							<b>6.229.364.000,00</b>	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>6.421.437.000,00</b>							<b>6.229.364.000,00</b>	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					<b>6.421.437.000,00</b>							<b>6.229.364.000,00</b>	
220	2	17	01					3.209.112.000,00							3.091.860.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	2	17	01	2.01				5.929.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			5.929.000,00	
	2	17	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							0								3.429.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.476.434.000,00	
	2	17	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2.354.135.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								27.299.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1.200.000,00	
	2	17	01	2.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								1.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.150.000,00	
	2	17	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1			0				00	3.150.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		3.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.887.000,00			-	-		43.287.000,00		
2	17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Selabaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0 Paket	1.664.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.664.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
2	17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12 Paket	24.023.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Selabaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		24.023.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
2	17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													
2	17 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu													
2	17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	6.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		6.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
2	17 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		3.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
2	17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	-		1.000.000,00		
2	17 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													
2	17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	452.050.000,00			-	-		436.325.000,00		
2	17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		49.075.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	386.750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		386.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	217.010.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	124.535.000,00	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	176.810.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		112.535.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
221	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
			-	-			-	83.800.000,00			-		-	-	83.800.000,00	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											
			-	-			-	83.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	83.800.000,00	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota											
			0				0 0	73.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		73.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
222	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
			-	-			-	10.000.000,00			-		-	-	10.000.000,00	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	10.000.000,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
223	2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	-	-	24.960.000,00					-	-	24.960.000,00	
	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	24.960.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	24.960.000,00	
	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					100 Orang	24.960.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	24.960.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
224	2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	-	-	-	507.642.000,00					-	-	210.000.000,00	
	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	507.642.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	210.000.000,00	
	2 17 06 2.01 0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan					10 Kelompok Masyarakat	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 06 2.01 0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya					20 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 06 2.01 0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					100 Unit Usaha	457.642.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
225	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	-	-	1.146.629.000,00					-	-	1.294.450.000,00	
	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	-	-	1.146.629.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	1.294.450.000,00	
	2 17 07 2.01 0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					26 Unit Usaha	13.360.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	13.360.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					18 Unit Usaha	702.679.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	850.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2 17 07 2.01 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				200 Orang	420.590.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		420.590.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
226	2	17	08				-	1.439.294.000,00					-	-	1.514.294.000,00	
	2	17	08	2.01			-	1.439.294.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	1.514.294.000,00	
	2	17	08	2.01	0002		Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		1.464.294.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0005		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
							<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>								<b>4.073.086.000,00</b>	
	2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								<b>4.073.086.000,00</b>	
	2	18					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								<b>4.073.086.000,00</b>	
227	2	18	01				-	4.092.825.000,00					-	-	3.786.534.000,00	
	2	18	01	2.01			-	976.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	976.000,00	
	2	18	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		576.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02			-	3.121.160.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	2.814.869.000,00	
	2	18	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		2.730.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		51.339.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		32.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				4.800.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	4.800.000,00	
	2 18 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		4.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				4.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	4.000.000,00	
	2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				69.332.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	69.332.000,00	
	2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.022.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		2.022.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	47.958.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		47.958.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.152.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		1.152.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		9.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		3.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				46.192.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	46.192.000,00	
	2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	46.192.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		46.192.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	681.795.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	681.795.000,00	
2	18 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	360.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	201.435.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		201.435.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		13.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	466.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		466.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	164.570.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	164.570.000,00	
2	18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	128.952.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		128.952.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	10.618.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		10.618.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
228	2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	-	-			-	80.480.000,00			-		-	-	30.480.000,00	
2	18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	11.000.000,00	
2	18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	69.480.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	19.480.000,00	
2	18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	57.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		12.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
229	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	76.236.000,00			-		-	-	39.596.000,00	
2	18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	76.236.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	39.596.000,00	
2	18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	69.236.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		32.596.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
230	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	83.264.000,00			-		-	-	83.264.000,00	
2	18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	83.264.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	83.264.000,00	
2	18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1700 Pelaku Usaha	72.392.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		72.392.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	10.872.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		10.872.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
231	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	120.292.000,00			-		-	-	120.292.000,00	
2	18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.292.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	120.292.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya															
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					7 Kegiatan Usaha.	30.292.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		30.292.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					216 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal															
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					13 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
232	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	12.920.000,00			-		-	-	12.920.000,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	12.920.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	12.920.000,00		
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan						43 Dokumen	12.920.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		12.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						<b>DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>						<b>10.449.376.000,00</b>							<b>10.382.128.000,00</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>9.411.432.000,00</b>							<b>9.818.184.000,00</b>		
	2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>9.411.432.000,00</b>							<b>9.818.184.000,00</b>		
233	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	3.805.910.500,00			-		-	-	3.772.662.500,00		
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.920.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	1.920.000,00		
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokumen	960.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		960.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5 Laporan	960.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		960.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2.742.530.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	2.709.282.000,00		
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.670.566.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.637.318.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	39.594.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			39.594.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	32.370.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			32.370.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.900.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	3.900.000,00	
2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.900.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	52.100.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	52.100.000,00	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	2.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.100.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.972.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	18.972.500,00	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			800.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.432.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.432.500,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	19 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	960.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter			960.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.450.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.450.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2.330.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.330.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.800.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.800.000,00	
2	19 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.800.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	862.923.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			862.923.000,00	
2	19 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	154.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			154.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47.753.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			47.753.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	815.016.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			815.016.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	118.765.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			118.765.000,00	
2	19 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	111.860.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			111.860.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	1.910.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.910.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.995.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			4.995.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
234	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	704.868.500,00							744.868.500,00	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-		654.868.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			654.868.500,00	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota											
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	8.795.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.795.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota											
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				8 Orang	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota											
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	203.220.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			203.220.500,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota											
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				38 Orang	379.940.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			379.940.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				25 Orang	52.913.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			52.913.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			90.000.000,00	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			90.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
235	2	19	03				-	4.550.653.000,00						-	4.950.653.000,00	
	2	19	03	2.01			-	798.004.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	798.004.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota										
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		3 Unit	798.004.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			798.004.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02			-	875.605.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	1.275.605.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota										
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	93.125.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			493.125.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga										
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		1500 Orang	782.480.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			782.480.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03			-	57.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	57.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga										
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga		30 Orang	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota										
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		50 Orang	7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04			-	2.705.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul		-	2.705.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				5 Dokumen	2.705.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			2.705.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	115.044.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	115.044.000,00	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional											
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			15 Lembaga	115.044.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		115.044.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
236	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	350.000.000,00			-		-	-	350.000.000,00	
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	350.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	350.000.000,00	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah											
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			2 Laporan	350.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>1.037.944.000,00</b>							<b>563.944.000,00</b>	
3	26			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>1.037.944.000,00</b>							<b>563.944.000,00</b>	
237	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	311.724.000,00			-		-	-	411.724.000,00	
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-	8.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	108.200.000,00	
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota											
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			1 Lokasi	2.760.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		52.760.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			10 Laporan	5.440.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		55.440.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	282.936.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	282.936.000,00	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			4 Unit	69.199.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		69.199.500,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			6 Laporan	213.736.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		213.736.500,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.588.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	20.588.000,00	
	3 26 02 2.04 0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota					2 Usaha	20.588.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		20.588.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
238	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	665.810.000,00			-		-	-	91.810.000,00	
	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	665.810.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	91.810.000,00	
	3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					6 Kegiatan	201.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		42.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3 26 03 2.01 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					5 Promosi	464.310.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		49.310.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
239	3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	60.410.000,00			-		-	-	60.410.000,00	
	3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	60.410.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	60.410.000,00	
	3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					128 Orang	60.410.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		60.410.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>						<b>4.299.139.000,00</b>							<b>4.594.314.000,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.299.139.000,00</b>							<b>4.594.314.000,00</b>	
	2 23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>892.329.000,00</b>							<b>953.000.000,00</b>	
240	2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	848.915.000,00			-		-	-	900.124.000,00	
	2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	364.418.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	390.217.000,00	
	2 23 02 2.01 0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1 Perpustakaan	98.470.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		112.044.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 23 02 2.01 0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					130 Perpustakaan	230.173.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		235.173.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 23 02 2.01 0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				200 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	10.275.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan											
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				700 Eksemplar	5.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
								484.497.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			509.907.000,00	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	313.377.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			321.532.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				15 Orang	139.860.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			143.375.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat											
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				260 Lokus	31.260.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
241	2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											
								43.414.000,00							52.876.000,00	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota											
								43.414.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			52.876.000,00	
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan											
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	43.414.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			52.876.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
								3.406.810.000,00							3.641.314.000,00	
242	2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
								3.353.636.000,00							3.534.878.000,00	
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								4.100.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			8.800.000,00	
2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.438.409.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.598.452.000,00	
2	24 01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.387.149.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.521.041.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		52.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	25.260.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		25.411.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.190.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.880.000,00	
2	24 01 2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.190.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.880.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.925.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.000.000,00	
2	24 01 2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	1.925.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	25.650.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	39.384.000,00	
2	24 01 2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi				2 Paket	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5 Paket	12.930.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.584.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.920.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.880.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	798.632.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	798.632.000,00	
2	24 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	432.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		432.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 Laporan	184.395.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		184.395.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4 Laporan	613.805.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		613.805.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.730.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	82.730.000,00	
2	24 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					19 Unit	77.650.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		77.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	1.080.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.080.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
243	2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	35.124.000,00			-		-	-	72.436.000,00	
2	24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.324.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	50.836.000,00	
2	24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					1000 Berkas	12.324.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		30.836.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	9.600.000,00	
2	24 02 2.02 0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					1000 Arsip	4.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		9.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	12.000.000,00	
2	24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					-				-		-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24 02 2.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
244	2 24 03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	-	18.050.000,00					-	-	34.000.000,00		
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	-	7.200.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	20.400.000,00		
2	24 03 2.01 0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun															
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				5000 Arsip	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.850.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.600.000,00		
2	24 03 2.02 0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana															
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				10 Arsip	5.425.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24 03 2.02 0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana															
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				5 Arsip	5.425.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
								<b>44.064.178.000,00</b>								<b>28.314.983.000,00</b>	
<b>DINAS PERTANIAN</b>																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	<b>28.314.983.000,00</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																	<b>28.314.983.000,00</b>
245	3 27 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	25.828.890.000,00					-	-	27.426.642.000,00		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.600.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00		
3	27 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN	
3	27 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.350.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	24.876.554.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	27.426.642.000,00		
3	27 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bulan	24.797.731.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		27.426.642.000,00	DINAS PERTANIAN	
3	27 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0									
							0 0	48.823.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	8.600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	8.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	2.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	54.118.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							-	8.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	21.783.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							-	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	6.135.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	14.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.800.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							-	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	603.472.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	600.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	126.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	3.652.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	473.220.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	280.046.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
				0			0 0	255.546.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	19.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
				0			0 0	5.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
246	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	858.543.000,00						-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	182.341.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
	3 27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	155.862.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	26.479.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	267.420.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	267.420.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	408.782.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
	3 27 02 2.05 0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	0				0 0	408.782.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
247	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	14.231.185.000,00			-		-		0,00	
	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	569.019.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
	3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0				0 0	569.019.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	2.262.166.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
	3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0				0 0	1.580.650.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				5 Unit	618.831.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	62.685.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian		0,00	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-			11.400.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0				0 0	11.400.000.000,00		PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN-THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
248	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-			141.381.000,00							0,00	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			94.190.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	04	2.01	0008	Perbantaran Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0				0 0	94.190.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			26.703.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	26.703.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-			20.488.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0				0 0	20.488.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
249	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-			288.451.000,00							888.341.000,00	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-			288.451.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	888.341.000,00	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	88.341.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	888.341.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				75 Ha	200.110.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
250	3	27	07					2.715.728.000,00							0,00	
	3	27	07	2.01				2.715.728.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	24.865.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
						0	0	2.319.379.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18 Unit	363.574.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota										
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	7.910.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN
						<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										
251	3	30	02					5.466.000,00							9.992.000,00	
	3	30	02	2.01				2.733.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			4.996.000,00	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
						Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	2.733.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			4.996.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02				2.733.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			4.996.000,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
						Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	2.733.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			4.996.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
252	3	30	03					3.368.720.000,00							2.147.649.000,00	
	3	30	03	2.01				3.285.717.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian			2.098.480.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 30 03 2.01 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1.942.430.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		720.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.01 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				21 Unit	1.343.287.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		1.378.480.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	83.003.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	49.169.000,00	
	3 30 03 2.02 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	83.003.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		49.169.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
253	3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	527.753.000,00			-		-	-	2.342.047.000,00	
	3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	512.194.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	2.321.568.000,00	
	3 30 04 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	6.804.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		11.288.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.01 0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	505.390.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		2.310.280.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	11.982.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	14.485.000,00	
	3 30 04 2.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	11.982.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		14.485.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.577.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	5.994.000,00	
	3 30 04 2.03 0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi				12 Laporan	3.577.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		5.994.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
254	3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	29.030.000,00			-		-	-	39.960.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	29.030.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	39.960.000,00	
	3 30 05 2.01 0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	29.030.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	39.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
255	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	-	-	-	147.561.000,00			-		-	-	184.152.000,00	
	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	-	-	-	147.561.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	184.152.000,00	
	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				28000 Unit	135.561.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	172.152.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				3700 Orang	12.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
256	3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	3.000.000,00			-		-	-	6.000.000,00	
	3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	6.000.000,00	
	3 30 07 2.01 0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				100 UMKM	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>														
								<b>12.561.983.000,00</b>							<b>12.807.644.000,00</b>	
257	3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	11.230.063.000,00			-		-	-	11.492.102.000,00	
	3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.650.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	3.300.000,00	
	3 31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	1.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 31 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	750.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	7.931.657.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	8.163.469.000,00	
	3 31 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7.871.857.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		8.073.478.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	24.449.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		54.640.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	35.351.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		35.351.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.315.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-	-	2.331.000,00	
3	31	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.315.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		2.331.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-	-	4.000.000,00	
3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	26.186.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-	-	45.732.000,00	
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.332.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		1.332.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.392.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.662.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DAN MODERNISASI SEKTOR PERTANIAN	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		3.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.07					4.353.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	10.000.000,00	
3	31	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.353.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08					3.139.842.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	3.140.842.000,00	
3	31	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	165.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		1.165.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	242.564.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		242.564.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.897.113.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		2.897.113.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09					122.060.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	122.428.000,00	
3	31	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	110.768.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		110.768.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10.292.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		6.660.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
258	3	31	02					1.326.234.000,00			-		-	-	1.307.542.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
3	31	02	2.01					1.326.234.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pembedayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	1.307.542.000,00	
3	31	02	2.01	0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	999.295.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		333.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	326.939.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		274.242.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
259	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	2.860.000,00			-		-	-	4.000.000,00		
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.860.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	4.000.000,00		
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	2.860.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
260	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	2.826.000,00			-		-	-	4.000.000,00		
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.826.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-	-	4.000.000,00		
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	2.826.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian	-		4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>21.281.953.000,00</b>							<b>21.322.943.000,00</b>		
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>21.281.953.000,00</b>								<b>21.322.943.000,00</b>	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>21.281.953.000,00</b>								<b>21.322.943.000,00</b>	
261	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	21.281.953.000,00			-		-	-	21.322.943.000,00		
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	21.281.953.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	21.322.943.000,00		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-				-		-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	21.281.953.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			21.322.943.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
			<b>BAGIAN UMUM</b>					<b>17.540.299.000,00</b>							<b>0,00</b>					
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>17.540.299.000,00</b>							<b>0,00</b>					
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>17.540.299.000,00</b>							<b>0,00</b>					
262	4	01	01					17.540.299.000,00							0,00					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	4	01	01	2.02				527.753.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00				
	4	01	01	2.02	0002								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300 Dokumen	404.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.02	0004								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2 Dokumen	123.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03				12.400.000,00					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00				
	4	01	01	2.03	0006								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	12.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.05				17.637.000,00					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00				
	4	01	01	2.05	0009								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	17.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06				2.800.717.000,00					Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00				
	4	01	01	2.06	0001								Penyediaan Komponen Instalasi			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					30 Paket	40.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0004								Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					350 Paket	417.040.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			0,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	0006								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0008								Fasilitasi Kunjungan Tamu			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					360 Laporan	2.260.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	BAGIAN UMUM			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40 Laporan	56.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0011								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00	BAGIAN UMUM			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	21.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	154.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
4	01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	154.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.208.950.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
4	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	2.781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				50 Laporan	1.211.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				180 Laporan	881.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	1.113.916.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.159.910.000,00			-	-	-	-	0,00	
4	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			0				0 0	460.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				110 Unit	1.075.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				225 Unit	166.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	458.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	822.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
4	01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	222.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	7.836.132.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
4	01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				180 Paket	4.981.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
4	01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				150 Paket	2.854.621.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN UMUM
		<b>BAGIAN ORGANISASI</b>						<b>211.470.000,00</b>							<b>292.860.000,00</b>	
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>211.470.000,00</b>							<b>292.860.000,00</b>	
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>211.470.000,00</b>							<b>292.860.000,00</b>	
263	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	211.470.000,00							292.860.000,00	
4	01 01 2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	-	-	211.470.000,00							292.860.000,00	
4	01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	26.683.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		47.367.000,00	BAGIAN ORGANISASI
4	01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	29.372.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		51.841.000,00	BAGIAN ORGANISASI
4	01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	155.414.500,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		193.652.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		<b>BAGIAN HUKUM</b>						<b>300.134.000,00</b>							<b>528.232.000,00</b>	
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>300.134.000,00</b>							<b>528.232.000,00</b>	
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>300.134.000,00</b>							<b>528.232.000,00</b>	
264	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	300.134.000,00							528.232.000,00	
4	01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	-	-	300.134.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat	-	528.232.000,00	
4	01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				512 Dokumen	40.155.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat		78.110.000,00	BAGIAN HUKUM
4	01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	164.520.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat		250.122.000,00	BAGIAN HUKUM
4	01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				512 Dokumen	95.459.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat		200.000.000,00	BAGIAN HUKUM	
<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>								<b>227.226.000,00</b>								<b>0,00</b>	
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>227.226.000,00</b>								<b>0,00</b>	
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>227.226.000,00</b>								<b>0,00</b>	
265	4	01	02					227.226.000,00							0,00		
	4	01	02	2.01				167.115.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat Kabupaten Purbalingga			0,00	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan												
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		3 Dokumen	26.761.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat Kabupaten Purbalingga			0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		5 Dokumen	20.423.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Masyarakat Kabupaten Purbalingga			0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			0				50	119.931.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4	01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase kerjasama yang terimplementasi secara efektif	-			100 persen	60.111.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00		
4	01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				50 Dokumen	60.111.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN	
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>								<b>716.676.000,00</b>								<b>0,00</b>	
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>716.676.000,00</b>								<b>0,00</b>
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>716.676.000,00</b>								<b>0,00</b>
266	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	716.676.000,00						-	0,00		
4	01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	244.183.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
4	01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				14 Dokumen	26.685.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4	01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
								6.656.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4	01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	210.842.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4	01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	472.493.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
4	01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen	466.493.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4	01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4	01 03 2.04 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								<b>11.853.552.000,00</b>							<b>11.853.552.000,00</b>		
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>11.853.552.000,00</b>								<b>11.853.552.000,00</b>	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>11.853.552.000,00</b>								<b>11.853.552.000,00</b>	
267	4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	11.853.552.000,00						-	11.853.552.000,00		
4	01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	11.853.552.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	11.853.552.000,00		
4	01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	11.828.032.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.828.032.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				15 Dokumen	13.945.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.945.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas				10 Dokumen	11.575.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.575.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>								<b>82.120.000,00</b>							<b>82.120.000,00</b>		
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>82.120.000,00</b>								<b>82.120.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>82.120.000,00</b>							<b>97.192.000,00</b>	
268	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.800.000,00					-	-	5.800.000,00	
	4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.800.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.800.000,00	
	4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.700.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.100.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
269	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Strategis yang Selesai Tepat Waktu	-			100 persen	76.320.000,00					-	-	91.392.000,00	
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan administrasi pembangunan	-			100 persen	76.320.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	91.392.000,00	
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	1.897.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	16.969.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	25.219.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	25.219.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	49.204.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	49.204.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						<b>380.481.000,00</b>							<b>562.581.000,00</b>	
		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>380.481.000,00</b>							<b>562.581.000,00</b>	
	4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>380.481.000,00</b>							<b>562.581.000,00</b>	
270	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	380.481.000,00					-	-	562.581.000,00	
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	380.481.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	562.581.000,00	
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0				0 0	170.256.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	252.256.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	15.575.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	65.675.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	194.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	244.650.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>						<b>526.288.000,00</b>							<b>807.522.000,00</b>	
		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>526.288.000,00</b>							<b>807.522.000,00</b>	
	4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>526.288.000,00</b>							<b>807.522.000,00</b>	
271	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	526.288.000,00					-	-	807.522.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	526.288.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	807.522.000,00	
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	212.560.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		332.560.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	75.427.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		174.962.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	238.301.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		300.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>60.442.841.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>60.442.841.000,00</b>							<b>0,00</b>	
	4 02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>60.442.841.000,00</b>							<b>0,00</b>	
272	4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	39.588.689.000,00						-	0,00	
	4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	-			100 Persen	5.985.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00	
	4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	3.485.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	-			100 Persen	4.694.175.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00	
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.691.786.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	1.928.940.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	73.449.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	-			100 Persen	2.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah/Rata-rata capaian SKP	-			100 Persen	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	-			100 Persen	756.613.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00	
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	21.850.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	302.534.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	403.634.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	24.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.945.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	1.672.268.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00	
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	170.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	264.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	12.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.394.698.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	-									
							100 Persen	658.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47.960.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					17 Unit	265.560.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					72 Unit	150.310.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	194.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang disusun sesuai ketentuan					100 Persen	30.935.852.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					50 Orang/Bulan	30.535.852.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					3 Paket	400.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPDP Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					50 Orang	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Layanan Administrasi DPRD Yang disusun sesuai ketentuan	-			100 Persen	827.416.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00			
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD					8 Laporan	66.170.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					8 Laporan	161.246.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					8 Paket	600.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
273	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	20.854.152.000,00										
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disusun	-			100 Persen	3.964.283.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-	0,00			
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	303.020.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	1.954.143.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				7 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				5400 Orang	807.120.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran											
			Jumlah dokumen anggaran yang disetujui				11 dokumen	1.587.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	350.888.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	350.888.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	320.532.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan												
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 Dokumen	320.532.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester												
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			2 Dokumen	1.139.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD												
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	243.377.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	-										
								100 Persen	2.451.012.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			4 Laporan	402.702.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			4 Laporan	402.702.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			4 Laporan	480.892.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian												
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			4 Laporan	476.392.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	688.324.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis DPRD	-			250 Dokumen	3.961.349.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-		0,00
4	02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				200 Dokumen	2.331.846.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				16 Orang	52.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	180.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				40 Dokumen	536.979.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				3 Dokumen	539.156.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				48 Dokumen	321.368.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	-			100 Persen	8.079.355.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga	-		0,00
4	02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	15.595.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				100 Dokumen	4.225.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				47700 Orang	3.727.860.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-									
			100 Persen				100 Persen	104.272.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD											
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	104.272.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Pimpinan DPRD yang difasilitasi	-									
			100 Persen				100 Persen	706.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				8 Dokumen	704.248.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD											
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				15 Laporan	2.277.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Purbalingga		0,00	SEKRETARIAT DPRD
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>								<b>6.453.428.000,00</b>							<b>6.453.428.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.453.428.000,00							6.453.428.000,00	
5	01	PERENCANAAN						6.126.670.000,00							6.126.670.000,00	
274	5	01	01					5.358.915.000,00							5.258.915.000,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	5	01	01	2.01				110.656.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			10.656.000,00	
	5	01	01	2.01	0001											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007											
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	106.656.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			6.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02				4.436.466.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.436.466.000,00	
	5	01	01	2.02	0001											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0				00	4.287.266.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.287.266.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0002											
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90 Dokumen	102.880.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			102.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0004											
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				600 Dokumen	46.320.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			46.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03				3.900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.900.000,00	
	5	01	01	2.03	0006											
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05				60.880.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			60.880.000,00	
	5	01	01	2.05	0009											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011											
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45.880.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			45.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06				56.858.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			56.858.000,00	
	5	01	01	2.06	0001											
		Penyediaan Komponen Instalasi						8.800.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004											
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	16.221.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.221.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	11.297.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			11.297.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			14.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								405.988.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			405.988.000,00	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	300.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.640.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			70.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	10.622.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			10.622.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	324.426.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			324.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								284.167.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			284.167.000,00	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	251.167.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			251.167.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	13.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
275	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
								397.977.000,00			-				397.977.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	01	02	2.01					303.417.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			193.417.000,00	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya											
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			45 Dokumen	32.515.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			32.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	123.350.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			73.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
					0			2 0	147.552.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			87.552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				33.662.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			33.662.000,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	33.662.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			33.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				30.898.000,00						170.898.000,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			5 Laporan	12.193.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				142.193.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
					0			4 0	18.705.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			28.705.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
276	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				399.778.000,00						469.778.000,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				169.511.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			189.511.000,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)			2 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			39.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			28 Laporan	55.781.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			55.781.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)			3 Dokumen	30.681.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			40.681.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			5 Laporan	54.049.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			54.049.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-				102.448.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			132.448.000,00			
5	01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	24.889.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			34.889.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					4 Laporan	46.874.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			56.874.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01 03 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					2 Laporan	30.685.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			40.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-				127.819.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			147.819.000,00			
5	01 03 2.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	60.991.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			60.991.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01 03 2.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					3 Laporan	33.673.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			43.673.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					3 Laporan	33.155.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			43.155.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																
277	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-				326.758.000,00							326.758.000,00			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-				156.758.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			156.758.000,00			
5	05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					1 Dokumen	55.322.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			55.322.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					2 Laporan	101.436.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			101.436.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
278	5 05 03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-				170.000.000,00							170.000.000,00			
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-				170.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			170.000.000,00			
5	05 03 2.01 0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																
		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2 Laporan	170.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
								<b>436.350.630.000,00</b>									<b>456.064.822.000,00</b>	
								<b>436.350.630.000,00</b>									<b>456.064.822.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02							436.350.630.000,00							456.064.822.000,00	
279	5 02 01		KEUANGAN					18.012.045.000,00							17.943.215.400,00	
	5 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	5 02 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.826.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.008.600,00	
	5 02 01	2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	996.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.095.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	830.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			913.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.764.230.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.575.018.900,00	
	5 02 01	2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	16.613.265.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.414.897.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	61.385.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			67.523.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	89.580.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			92.598.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.820.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.302.000,00	
	5 02 01	2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	14.820.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.302.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.400.000,00	
	5 02 01	2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.405.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			315.045.500,00	
	5 02 01	2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.660.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.826.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	116.355.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			127.990.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01	2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.640.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.304.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	21.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		23.815.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	140.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		154.110.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.380.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.078.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3.380.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.078.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	654.903.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	726.333.300,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	572.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		629.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	307.675.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		344.382.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	346.656.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		381.321.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	282.481.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	303.029.100,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	218.704.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		240.574.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	19.376.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.613.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	44.401.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		48.841.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
280	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	416.009.686.500,00			-		-	-	435.549.478.250,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	503.813.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	520.093.500,00	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	70.150.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		70.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	65.481.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		65.481.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	205.377.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		205.377.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	162.805.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		179.085.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	67.594.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	74.353.400,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				17 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				10000 Dokumen	17.872.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.659.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				27 Dokumen	8.460.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		9.306.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	4.510.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.961.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				151 Orang	29.552.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		32.507.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	56.856.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	62.541.600,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	56.856.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		62.541.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	415.381.423.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	434.892.489.750,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan											
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	402.374.755.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		413.678.914.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak												
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota												
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		2 Laporan	11.006.668.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.013.574.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
281	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
					-	-	-	453.652.500,00						-	484.827.750,00		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah												
					-	-	-	453.652.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	484.827.750,00		
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga												
					Jumlah Standar Harga yang Disusun		3 Dokumen	156.730.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		172.403.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah												
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		181 Laporan	30.422.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.274.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah												
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan	222.466.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		244.712.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		12 Dokumen	28.028.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		30.830.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		175 Orang	16.006.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		17.607.150,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
282	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
					-	-	-	1.875.246.000,00						-	2.087.300.600,00		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
					-	-	-	1.875.246.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.087.300.600,00		
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		12 Laporan	114.589.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		150.577.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		640000 Laporan	289.214.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		324.657.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah												
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		637000 Dokumen	159.579.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		169.015.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		18 Layanan	28.997.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		31.896.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				14 Dokumen	1.073.745.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.181.119.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	159.158.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			175.073.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				26 Laporan	36.783.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			40.461.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah												
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	13.181.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			14.499.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>7.377.887.000,00</b>								<b>7.770.806.000,00</b>	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												<b>7.377.887.000,00</b>	<b>7.770.806.000,00</b>			
5	03	<b>KEPEGAWAIAN</b>												<b>7.130.457.000,00</b>	<b>7.728.533.000,00</b>		
283	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.945.834.000,00							6.431.077.000,00		
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.750.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.925.000,00		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	490.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			539.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.260.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.386.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.581.549.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			6.030.368.000,00		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	5.522.289.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.965.182.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			24.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	36.760.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			40.436.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.145.000,00		
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			0				0 0	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.145.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			11.000.000,00		
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	13.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06				-	27.144.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	27.958.000,00	
5	03	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.627.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.789.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	14.158.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.215.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			0				00	3.250.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			-				-	3.309.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.639.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			0				00	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07				-	1.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.100.000,00	
5	03	01	2.07	0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08				-	174.471.000,00			-	-	-		230.189.000,00	
5	03	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	415.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		456.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	104.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		153.398.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	70.056.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		76.335.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09				-	143.020.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	126.392.000,00	
5	03	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	131.020.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		115.392.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
284	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.184.623.000,00							1.297.456.000,00	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				5 Dokumen	56.263.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			56.263.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK											
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				50 Dokumen	130.810.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			143.891.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi											
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				341 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	3.830.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.213.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					411.974.000,00							453.171.000,00	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	146.974.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			161.671.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			13.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				30 Dokumen	252.500.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			277.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					479.419.000,00							527.359.000,00	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN											
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	23.630.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			25.993.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center											
			0				0 0	29.025.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			64.927.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	42.481.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			46.729.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				10 Dokumen	345.201.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			379.721.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	487.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			535.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN											
			0				0 0	38.595.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			9.454.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
															108.159.000,00	
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				10 Dokumen	15.020.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.522.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai											
								69.865.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			76.851.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN											
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	10.582.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				11.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai											
								2.860.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.146.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
								<b>247.430.000,00</b>							<b>42.273.000,00</b>	
285	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
								247.430.000,00							42.273.000,00	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											
								247.430.000,00							42.273.000,00	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				39 Laporan	247.430.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			42.273.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											
					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>											
					<b>12.133.976.000,00</b>											
					<b>12.133.976.000,00</b>											
					<b>12.133.976.000,00</b>											
286	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
								10.434.124.000,00							10.711.413.000,00	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								10.629.000,00							10.629.000,00	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.110.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			7.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10 Laporan	3.519.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.519.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.752.155.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	8.029.444.000,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48 Orang/bulan	7.525.647.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.802.936.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	26.508.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		26.508.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	3.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.900.000,00	
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	668.462.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	668.462.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			48 Orang	456.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		456.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			48 Orang	211.962.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		211.962.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	130.030.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	130.030.000,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	91.030.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		91.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	932.100.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	932.100.000,00	
6	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	332.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		332.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	348.092.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	348.092.000,00	
6	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	275.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		275.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	16.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		16.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	55.992.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		55.992.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	588.756.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	588.756.000,00	
6	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	350.136.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		350.136.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	38.620.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		38.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
287	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	1.220.588.000,00			-		-	-	1.220.588.000,00	
6	01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	1.051.878.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.051.878.000,00	
6	01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				43 Laporan	143.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		143.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				42 Laporan	201.026.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			201.026.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja											
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				132 Laporan	162.988.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			162.988.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan											
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	16.774.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			16.774.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa											
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				23 Laporan	161.553.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			161.553.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				33 Dokumen	366.537.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			366.537.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
								168.710.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			168.710.000,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian											
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	36.978.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			36.978.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				17 Laporan	131.732.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			131.732.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
288	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
								479.264.000,00			-				479.264.000,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											
								73.106.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			73.106.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	73.106.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			73.106.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi											
								406.158.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			406.158.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	128.123.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			128.123.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				21 perangkat daerah	13.034.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			13.034.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	141.607.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			141.607.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				8 perangkat daerah	123.394.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		123.394.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
			<b>KECAMATAN KEMANGKON</b>					<b>1.692.149.000,00</b>							<b>1.657.269.000,00</b>	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>1.692.149.000,00</b>							<b>1.657.269.000,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN</b>					<b>1.692.149.000,00</b>							<b>1.657.269.000,00</b>	
289	7	01	01					1.562.800.000,00							1.547.950.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2.01					6.358.000,00							6.358.000,00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	0001												
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.118.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.118.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.01	0007												
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	3.240.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.240.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.02					1.314.743.000,00							1.314.743.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	0001												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	1.293.763.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.293.763.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.02	0002												
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	6.580.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.580.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.02	0004												
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		14.400.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.03					1.150.000,00							1.150.000,00	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
7	01	01	2.03	0006												
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.150.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.150.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.06					18.575.000,00							18.575.000,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	0001												
			Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.600.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.06	0004												
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.955.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.955.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.06	0006												
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.020.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.06	0009												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	9.900.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			9.900.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.100.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-				-	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			25.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			25.000.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-				-	93.158.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			93.308.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	50.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			200.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.712.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			29.712.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			600.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	62.796.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			62.796.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-				-	103.816.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			88.816.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	85.816.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			85.816.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.000.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KEMANGKON
290	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			-				-	24.840.000,00			-				24.840.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			-				-	24.010.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			24.010.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	24.010.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.010.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		-	830.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		830.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	830.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		830.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
291	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	29.901.000,00			-		-		29.901.000,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	29.901.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		29.901.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	12.094.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		12.094.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	17.807.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		17.807.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
292	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		-	32.000.000,00			-		-		32.000.000,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	32.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		32.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		22.200.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			0				0 0	9.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		9.800.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
293	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		-	13.211.000,00			-		-		13.211.000,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		-	13.211.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.211.000,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	13.211.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.211.000,00	KECAMATAN KEMANGKON
294	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		-	29.397.000,00			-		-		9.367.000,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	29.397.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		9.367.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	9.267.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			9.267.000,00	KECAMATAN KEMANGKON	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				12 Dokumen	20.130.000,00	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			100.000,00	KECAMATAN KEMANGKON	
								<b>2.220.378.000,00</b>									<b>0,00</b>
								<b>2.220.378.000,00</b>									<b>0,00</b>
								<b>2.220.378.000,00</b>									<b>0,00</b>
295	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.070.711.000,00							0,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.745.183.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.727.513.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12.670.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00		
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	46.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	119.528.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	35.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.528.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	137.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	93.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	34.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
296	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			-	-			-	53.095.000,00			-				0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			-	-			-	50.095.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	50.095.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN BUKATEJA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
			-	-			-	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
297	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	49.275.000,00					-		0,00				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	49.275.000,00					-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							7 Lembaga Kemasyarakatan	9.275.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
298	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	10.520.000,00					-		0,00				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	10.520.000,00					-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							12 Laporan	520.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
299	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	14.927.000,00					-		0,00				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	14.927.000,00					-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
							150 Orang	14.927.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
300	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	21.850.000,00					-		0,00				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	21.850.000,00					-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							2 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
							2 Dokumen	21.350.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN BUKATEJA			
								<b>1.794.169.000,00</b>									<b>1.794.169.000,00</b>		
<b>KECAMATAN KEJOBONG</b>								<b>1.794.169.000,00</b>									<b>1.794.169.000,00</b>		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>1.794.169.000,00</b>									<b>1.794.169.000,00</b>		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>KECAMATAN</b>						<b>1.794.169.000,00</b>							<b>1.794.169.000,00</b>	
301	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.671.786.000,00					-	-	1.671.786.000,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.000.000,00	
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.397.153.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.397.153.000,00	
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.383.313.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.383.313.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	500.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13.340.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.340.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.150.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.150.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.150.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.150.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.813.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	18.813.000,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.473.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	9.473.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.590.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.590.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
	7 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.250.000,00	KECAMATAN KEJOBONG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	56.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	56.000.000,00	
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	56.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	56.000.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	118.260.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	118.260.000,00	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	9.600.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.660.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	108.660.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	75.410.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	75.410.000,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	70.306.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	70.306.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.104.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.104.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
302	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Kejobong	-	-	-	4,0 angka	21.226.000,00			-		-	-	21.226.000,00	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	-	-	-	12 kegiatan	19.383.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	19.383.500,00	
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	19.383.500,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	19.383.500,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	1.842.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	1.842.500,00	
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.842.500,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	1.842.500,00	KECAMATAN KEJOBONG
303	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	34.457.000,00			-		-	-	34.457.000,00	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	34.457.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	34.457.000,00	
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		8.800.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	25.657.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		25.657.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
304	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	23.885.000,00					-	-	23.885.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	23.885.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	23.885.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	21.925.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		21.925.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	1.960.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.960.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
305	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	20.125.000,00					-	-	20.125.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	20.125.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	20.125.000,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	20.125.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.125.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
306	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	22.690.000,00					-	-	22.690.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	22.690.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	22.690.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	18.690.000,00	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		18.690.000,00	KECAMATAN KEJOBONG
				<b>KECAMATAN KALIGONDANG</b>				<b>2.092.442.000,00</b>							<b>0,00</b>	
				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>2.092.442.000,00</b>							<b>0,00</b>	
				<b>KECAMATAN</b>				<b>2.092.442.000,00</b>							<b>0,00</b>	
307	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.921.922.000,00					-	-	0,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.492.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.718.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	1.774.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.705.719.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			9 Orang/bulan	1.690.009.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	3.230.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12.480.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	22.889.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	1.188.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	15.621.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	800.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	5.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	83.249.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.632.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65.617.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97.673.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	64.516.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.157.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
308	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	22.999.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			21.499.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	21.499.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
309	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	55.250.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55.250.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	14.193.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	41.057.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIGONDANG
310	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	24.630.000,00			-		-	-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	24.630.000,00	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	-	
7	01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	19.630.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KECAMATAN KALIGONDANG	
7	01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KECAMATAN KALIGONDANG	
311	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	35.328.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	35.328.000,00	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	-	
7	01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	35.328.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KECAMATAN KALIGONDANG	
312	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	32.313.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	32.313.000,00	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	-	
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	9.243.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KECAMATAN KALIGONDANG	
7	01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	23.070.000,00	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KECAMATAN KALIGONDANG	
<b>KECAMATAN PURBALINGGA</b>								<b>10.612.947.000,00</b>							<b>10.598.717.000,00</b>		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>10.612.947.000,00</b>								<b>10.598.717.000,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>								<b>10.612.947.000,00</b>							<b>10.598.717.000,00</b>		
313	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	10.471.543.000,00	-	-	-	-	-	-	10.471.543.000,00	-	
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4.662.000,00	-	-	-	-	-	-	4.662.000,00	-	
7	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.872.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	2.872.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.790.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.790.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10.203.120.000,00	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.203.120.000,00	-	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	10.175.549.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.175.549.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	671.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		671.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.02	0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	26.900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		26.900.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.03					900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00	
7	01	01	2.03	0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.06					15.611.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.611.000,00	
7	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	966.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		966.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.310.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		8.310.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.06	0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.400.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.06	0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	2.935.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.935.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.07					4.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.08					155.770.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		155.770.000,00	
7	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46.110.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		46.110.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.08	0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.660.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		108.660.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.09				-	87.480.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		87.480.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	71.480.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		71.480.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.000.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
314	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	30.830.000,00			-		-		30.830.000,00	
7	01	02	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	29.900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		29.900.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				-	930.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		930.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	930.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		930.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
315	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	35.640.000,00			-		-		35.640.000,00	
7	01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	13.181.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.181.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.459.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		22.459.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
316	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	36.410.000,00			-		-		36.410.000,00	
7	01	04	2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	36.410.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		36.410.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	23.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		23.500.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12.910.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		12.910.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
317	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	23.294.000,00					-	-	23.294.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	23.294.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	23.294.000,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	23.294.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		23.294.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
318	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	15.230.000,00					-	-	1.000.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	15.230.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	14.230.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	KECAMATAN PURBALINGGA
<b>KELURAHAN BOJONG</b>								<b>389.214.000,00</b>							<b>389.214.000,00</b>	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>389.214.000,00</b>							<b>389.214.000,00</b>	
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>389.214.000,00</b>							<b>389.214.000,00</b>	
319	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	91.864.000,00					-	-	91.864.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	17.300.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	17.300.000,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		9.300.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	900.000,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.800.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	16.800.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	9.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	9.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	3.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	3.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.800.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	1.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	36.528.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	36.528.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	15.996.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	15.996.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	20.532.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	20.532.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	19.336.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	19.336.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0					0 0	16.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	16.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	2.336.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	2.336.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-				-	1.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1.000.000,00	KELURAHAN BOJONG
320	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				-	297.350.000,00			-		-	297.350.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-				-	297.350.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	297.350.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	141.100.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	141.100.000,00	KELURAHAN BOJONG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										-		-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	155.250.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-	155.250.000,00	KELURAHAN BOJONG			
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KELURAHAN BOJONG		
			<b>KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN</b>						<b>380.609.000,00</b>								<b>0,00</b>	
			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>380.609.000,00</b>									<b>0,00</b>
			<b>KECAMATAN</b>						<b>380.609.000,00</b>									<b>0,00</b>
321	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	96.474.000,00						-	0,00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.175.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00			
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				99 Dokumen	2.475.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	900.000,00						-	0,00			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	13.135.000,00						-	0,00			
			Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.835.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	8.000.000,00						-	0,00			
												Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	34.632.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	14.100.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	20.532.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	25.632.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	18.667.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	965.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
322	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	284.135.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	284.135.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	115.495.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas / Ormas	168.640.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN
					<b>KELURAHAN BANCAR</b>				<b>387.283.000,00</b>							<b>0,00</b>	
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>387.283.000,00</b>							<b>0,00</b>	
					<b>KECAMATAN</b>				<b>387.283.000,00</b>							<b>0,00</b>	
323	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	99.573.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11.950.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			59 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	13.265.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.995.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.170.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	38.232.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.732.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	35.226.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				5 Unit	21.356.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.870.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN BANCAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
324	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	287.710.000,00						-	-	0,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	287.710.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	135.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN BANCAR	
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	150.210.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN BANCAR	
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN BANCAR	
		<b>KELURAHAN PURBALINGGA WETAN</b>						<b>404.044.000,00</b>							<b>588.649.000,00</b>		
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>404.044.000,00</b>							<b>588.649.000,00</b>		
		<b>KECAMATAN</b>						<b>404.044.000,00</b>							<b>588.649.000,00</b>		
325	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	100.899.000,00						-	-	133.649.000,00	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	14.705.000,00						-	-	27.685.000,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				161 Dokumen	5.405.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			-	-	9.085.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	18.600.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	900.000,00						-	-	1.800.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.800.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	11.232.000,00						-	-	24.040.000,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	738.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.204.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	12.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.140.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-						-	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.800.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							-	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.400.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							18 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.700.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
							-	48.564.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	51.064.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							12 Laporan	35.064.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		35.064.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
							-	25.498.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	-	29.060.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							4 Unit	16.491.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	-	20.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							6 Unit	4.060.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	-	4.060.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.947.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan		5.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
326	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	303.145.000,00						-	455.000.000,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	303.145.000,00					Warga Kelurahan Purbalingga Wetan	-	455.000.000,00		
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	120.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Warga Kelurahan Purbalingga Wetan		200.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			0				0 0	181.945.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Warga Kelurahan Purbalingga Wetan		250.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
7	01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Warga Kelurahan Purbalingga Wetan		5.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	
			<b>KELURAHAN PURBALINGGA KULON</b>													<b>0,00</b>	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													<b>0,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN</b>													<b>0,00</b>	
327	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	252.134.000,00						-	0,00		
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.800.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.904.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
			0				0 0	1.500.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.604.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	5.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 Unit	50.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	70.604.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	25.940.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	44.664.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	60.926.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 Unit	15.540.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	4.840.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	40.546.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
328	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	344.802.000,00			-		-		0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	344.802.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Unit	155.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	186.802.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
7	01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN PURBALINGGA KULON
		<b>KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL</b>						<b>437.790.000,00</b>							<b>437.810.000,00</b>	
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>437.790.000,00</b>							<b>437.810.000,00</b>	
		<b>KECAMATAN</b>						<b>437.790.000,00</b>							<b>437.810.000,00</b>	
329	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	176.790.000,00						-	177.510.000,00	
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	15.840.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.840.000,00	
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	5.640.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.640.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.200.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	900.000,00	
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	52.550.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	52.570.000,00	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.108.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.108.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.342.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		43.342.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.320.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			2 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.800.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.07					10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.08					60.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		60.700.000,00	
7	01	01	2.08	0002												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.08	0004												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		45.700.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.09					37.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		37.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-			4 Unit	17.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		17.500.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.09	0006												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			4 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	01	2.09	0009												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	-			1 Unit	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
330	7	01	03					261.000.000,00							260.300.000,00	
7	01	03	2.02					261.000.000,00							260.300.000,00	
7	01	03	2.02	0002												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-			4 Unit	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		100.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	03	2.02	0003												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			7 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		160.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
7	01	03	2.02	0004												
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		300.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
			<b>KELURAHAN PURBALINGGA LOR</b>					<b>382.555.000,00</b>							<b>382.555.000,00</b>	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>382.555.000,00</b>							<b>382.555.000,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN</b>					<b>382.555.000,00</b>							<b>382.555.000,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
331	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	103.872.000,00					-	-	103.872.000,00	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	13.050.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.050.000,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	3.750.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.750.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	9.300.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	900.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	900.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	23.238.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	23.238.000,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.122.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.122.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	11.596.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	11.596.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.300.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.420.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.420.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.800.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	32.232.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	32.232.000,00	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.500.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.732.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	21.732.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	34.452.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	34.452.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	18.452.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	18.452.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	6.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	10.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
332	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	278.683.000,00					-	278.683.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	278.683.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	278.683.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	100.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 Pokmas / Ormas	175.683.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	175.683.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	3.000.000,00	KELURAHAN PURBALINGGA LOR
					<b>KELURAHAN PENAMBONGAN</b>				<b>617.747.000,00</b>						<b>617.747.000,00</b>	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>492.764.000,00</b>						<b>492.764.000,00</b>	
7	01				<b>KECAMATAN</b>				<b>492.764.000,00</b>						<b>492.764.000,00</b>	
333	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	492.764.000,00					-	492.764.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	492.764.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	492.764.000,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 Unit	319.684.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	319.684.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas / Ormas	172.080.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	172.080.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.000.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X					<b>NON URUSAN</b>				<b>124.983.000,00</b>						<b>124.983.000,00</b>	
X	XX				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>				<b>124.983.000,00</b>						<b>124.983.000,00</b>	
334	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	124.983.000,00					-	124.983.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					17.300.000,00			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-	-	17.300.000,00				
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							12 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		5.600.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							12 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.700.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-					900.000,00										
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							4 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					14.035.000,00										
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.200.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1 Paket	7.085.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.085.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.400.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							3 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							6 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.350.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					4.803.000,00										
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							1 Unit	4.803.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.803.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					52.808.000,00										
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	115.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			115.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	10.440.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			10.440.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.141.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.141.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	41.112.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			41.112.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	22.887.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			22.887.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.000.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.250.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			7.250.000,00	KELURAHAN PENAMBONGAN	
							<b>KELURAHAN KANDANGGAMPANG</b>								<b>0,00</b>		
							<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>0,00</b>		
							<b>KECAMATAN</b>								<b>0,00</b>		
335	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
								107.561.000,00								0,00	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
								18.350.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
			2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
							25 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandangampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	
			2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
							12 Dokumen	10.350.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandangampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	
			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
								900.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
			2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							12 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandangampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
								29.725.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
			2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	17.985.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
								6.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								30.732.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.532.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								21.854.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	12.854.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
336	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	282.000.000,00						-	-	0,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	282.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	-	0,00		
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG		
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					12 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG		
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan																
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	KELURAHAN KANDANGGAMPANG		
		<b>KELURAHAN KEMBARAN KULON</b>						<b>392.564.000,00</b>								<b>0,00</b>		
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>392.564.000,00</b>								<b>0,00</b>		
		<b>KECAMATAN</b>						<b>392.564.000,00</b>								<b>0,00</b>		
337	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 Persen	113.046.000,00						-	-	0,00		
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	-	-	-	100 Persen	12.510.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Kelurahan Kembaran Kulon	-	-	0,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					50 Dokumen	2.310.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Kelurahan Kembaran Kulon	-	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					20 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Pegawai Kelurahan Kembaran Kulon	-	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	4 Laporan	900.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	-	0,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	12.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	0,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.158.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.247.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	1.780.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	58.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.780.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	44.660.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	SKPD Kelurahan Kembaran Kulon		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Bulan	28.911.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	0,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15.726.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.185.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Barang Milik Daerah pada SKPD Kelurahan Kembaran Kulon	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
338	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Purbalingga	-				100 Persen	279.518.000,00						-	0,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan sesuai aspirasi	-				100 Persen	279.518.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Lembaga Kelurahan dan Masyarakat	-	0,00		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	130.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Lembaga Kelurahan dan Masyarakat	-	0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	148.118.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Lembaga Kelurahan dan Masyarakat		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan		6 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembran Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Lembaga Kelurahan dan Masyarakat		0,00	KELURAHAN KEMBARAN KULON
					<b>KELURAHAN WIRASANA</b>			<b>415.769.000,00</b>							<b>0,00</b>	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>415.769.000,00</b>							<b>0,00</b>	
7	01				<b>KECAMATAN</b>			<b>415.769.000,00</b>							<b>0,00</b>	
339	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	110.489.000,00						-	0,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	10.900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	0,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		25 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	0,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	22.183.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi		-	0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi		6 Paket	2.185.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17 Paket	11.113.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3 Laporan	6.185.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN WIRASANA
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	01	2.08				-	51.718.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.206.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.512.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	01	2.09				-	24.788.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	12.178.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.610.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
340	7	01	03				-	305.280.000,00			-		-		0,00		
7	01	03	2.02				-	305.280.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00		
7	01	03	2.02	0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	140.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	03	2.02	0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	163.780.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
7	01	03	2.02	0004			Evaluasi Kelurahan										
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN WIRASANA	
			<b>KECAMATAN KALIMANAH</b>						<b>4.287.605.000,00</b>							<b>0,00</b>	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>4.287.605.000,00</b>							<b>0,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN</b>						<b>4.287.605.000,00</b>							<b>0,00</b>	
341	7	01	01				-	4.127.988.000,00			-		-		0,00		
7	01	01	2.01				-	11.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00		
7	01	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.855.790.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	3.844.590.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.844.590.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan	750.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	750.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.620.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi		4 Paket	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Paket	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6.320.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.320.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.828.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	24.448.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.448.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-		-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	109.980.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	91.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
342	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4,5 angka	28.720.000,00							0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			28.120.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	28.120.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
343	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 persen	55.988.000,00							0,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55.988.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.732.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	35.256.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
344	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12 dokumen	34.380.000,00							0,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			34.380.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.220.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	4.160.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH	
345	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 persen	19.179.000,00			-		-		0,00		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		12 Dokumen	19.179.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00		
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		12 Orang	19.179.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
346	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		90 persen	21.350.000,00			-		-		0,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi		100 Persen	21.350.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00		
	7	01	06	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-		-				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		6 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		14 Dokumen	20.850.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KALIMANAH
					<b>KELURAHAN MEWEK</b>			<b>395.405.000,00</b>							<b>395.405.000,00</b>		
	7				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			<b>395.405.000,00</b>							<b>395.405.000,00</b>		
	7	01			<b>KECAMATAN</b>			<b>395.405.000,00</b>							<b>395.405.000,00</b>		
347	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			126.179.000,00			-		-		126.179.000,00		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.170.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.170.000,00		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		130 Dokumen	7.220.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	7.220.000,00	KELURAHAN MEWEK	
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	7.950.000,00	KELURAHAN MEWEK	
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		900.000,00		
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	900.000,00	KELURAHAN MEWEK	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.120.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		22.120.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi					-		-				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.360.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.360.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	7.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.800.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	960.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		960.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	5.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.250.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.500.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.250.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	500.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	58.214.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	58.214.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		12.300.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2.450.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.450.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	43.464.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		43.464.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	29.275.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	29.275.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	18.750.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		18.750.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	KELURAHAN MEWEK
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.525.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.525.000,00	KELURAHAN MEWEK
348	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	269.226.000,00					-		269.226.000,00	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	269.226.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	269.226.000,00	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		100.000.000,00	KELURAHAN MEWEK
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	167.226.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		167.226.000,00	KELURAHAN MEWEK
	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Rabak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.000.000,00	KELURAHAN MEWEK
		<b>KELURAHAN KARANGMANYAR</b>						<b>419.991.000,00</b>							<b>0,00</b>	
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>419.991.000,00</b>							<b>0,00</b>	
		<b>KECAMATAN</b>						<b>419.991.000,00</b>							<b>0,00</b>	
349	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	127.911.000,00					-		0,00	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.728.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30 Dokumen	8.228.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.836.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20 Laporan	1.836.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	27.312.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	688.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.224.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	PAJAK DAERAH	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	3.728.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.728.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	59.314.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.464.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	26.993.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	16.993.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
350	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			-	-			-	292.080.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
			-	-			-	292.080.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	140.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	150.080.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KELURAHAN KARANGMANYAR
		<b>KELURAHAN KALIKABONG</b>						<b>394.137.000,00</b>							<b>0,00</b>	
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>394.137.000,00</b>							<b>0,00</b>	
		<b>KECAMATAN</b>						<b>394.137.000,00</b>							<b>0,00</b>	
351	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	94.137.000,00					-	-	0,00	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	900.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	16.805.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.005.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0				0 0	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KELURAHAN KALIKABONG
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	34.932.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	22.932.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	19.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
352	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			300.000.000,00							0,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			300.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Kelurahan Kalikabong		0,00		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Kelurahan Kalikabong		0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	198.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Kelurahan Kalikabong		0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan												
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Kelurahan Kalikabong		0,00	KELURAHAN KALIKABONG	
			<b>KECAMATAN KUTASARI</b>						<b>1.808.762.000,00</b>							<b>1.932.264.000,00</b>	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>1.806.762.000,00</b>							<b>1.928.264.000,00</b>	
7	01		<b>KECAMATAN</b>						<b>1.806.762.000,00</b>							<b>1.928.264.000,00</b>	
353	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100 persen	1.677.644.000,00							1.754.264.000,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100 persen	2.656.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		6.000.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.656.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		6.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.02					1.383.440.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.430.000.000,00	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.351.240.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.400.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			8.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	23.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			22.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		2.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.848.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		15.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.848.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		15.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	900.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		2.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
								3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		10.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		10.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
							100 persen	165.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		167.264.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.264.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		30.264.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		2.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	134.136.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		135.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								102.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			112.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	92.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			100.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
354	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Kutasari				4,5 angka	7.888.000,00							16.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 persen	7.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		15.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 dokumen Dokumen	7.388.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		15.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	-	100 persen	500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari	-	1.000.000,00		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		5 dokumen Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		1.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
355	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	34.450.000,00						-	68.000.000,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah keaktifan lembaga desa	-	7 Lembaga Masyarakat	34.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari	-	68.000.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 Lembaga Masyarakat	12.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		18.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	22.150.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		50.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
356	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Laporan	31.700.000,00					-	38.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-			12 kegiatan	31.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari	-	38.000.000,00	
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	23.700.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		28.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	8.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		10.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
357	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penanganan potensi konflik di wilayah Kecamatan	-			100 persen	24.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang ditangani	-			12 Laporan	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari	-	30.000.000,00	
	7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				60 Orang	24.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		30.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
358	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya desa yang melaksanakan tertib administrasi	-			100 persen	31.080.000,00						-	22.000.000,00	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meningkat	-			100 persen	31.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari	-	22.000.000,00	
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	10.950.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		17.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				14 Dokumen	20.130.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Masyarakat Kecamatan Kutasari		5.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
X					NON URUSAN			2.000.000,00							4.000.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.000.000,00							4.000.000,00	
359	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	100 persen	2.000.000,00					-	4.000.000,00	
	X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	-	100 persen	2.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.000.000,00	
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN KUTASARI
					KECAMATAN MREBET			2.040.325.000,00							2.254.696.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.040.325.000,00							2.254.696.000,00	
7	01				KECAMATAN			2.040.325.000,00							2.254.696.000,00	
360	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.912.521.800,00						-	2.095.788.000,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.999.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.999.800,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.605.416.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.722.170.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.589.246.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.701.170.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	15.670.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			-	-			-	600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.200.000,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	600.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.200.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			-	-			-	12.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	25.500.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.462.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	432.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.406.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	10.760.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	30.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.600.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.160.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	KECAMATAN MREBET

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.218.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	166.918.000,00	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.338.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	49.338.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.420.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	107.460.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	107.580.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.778.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	140.000.000,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	103.000.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5.018.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.760.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN MREBET
361	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	5.688.000,00			-		-	-	7.808.000,00	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.880.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	7.000.000,00	
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	4.880.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	808.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	808.000,00	
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	808.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa		-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	808.000,00	KECAMATAN MREBET
362	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	41.508.000,00			-		-	-	65.000.000,00	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	41.508.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	65.000.000,00	
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0				7 0	9.801.500,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN MREBET
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			0				12 0	31.706.500,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		50.000.000,00	KECAMATAN MREBET		
363	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	34.870.000,00					-		45.000.000,00			
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	34.870.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	45.000.000,00			
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	24.370.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		30.000.000,00	KECAMATAN MREBET		
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KECAMATAN MREBET		
364	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	18.467.000,00					-		26.000.000,00			
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	18.467.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	26.000.000,00			
	7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					25 Orang	18.467.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		26.000.000,00	KECAMATAN MREBET		
365	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	27.270.200,00					-		15.100.000,00			
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	27.270.200,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.100.000,00			
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					19 Dokumen	5.700.200,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KECAMATAN MREBET		
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					14 Dokumen	21.570.000,00	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		100.000,00	KECAMATAN MREBET		
		<b>KECAMATAN BOBOTSARI</b>																
									<b>1.831.673.000,00</b>								<b>3.720.000,00</b>	
	7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
									<b>1.831.673.000,00</b>								<b>3.720.000,00</b>	
	7 01	<b>KECAMATAN</b>																
									<b>1.831.673.000,00</b>								<b>3.720.000,00</b>	
366	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.659.815.000,00					-		0,00			
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.300.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00			
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen	800.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI		
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.375.834.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.356.474.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	6.014.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13.346.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						821.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	821.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.321.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	500.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.045.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.950.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.826.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	159.267.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.475.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	138.492.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	105.472.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	82.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.472.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
367	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	-	65.558.000,00			-	-	0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	-	-	65.219.000,00			-	-	0,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	65.219.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	-	-	339.000,00			-	-	0,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				16 Dokumen	339.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
368	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	-	40.230.000,00			-	-	0,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	-	40.230.000,00			-	-	0,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi dan Sosial	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	34.230.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
369	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	-	26.200.000,00			-	-	0,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	-	26.200.000,00			-	-	0,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
370	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.140.000,00			-		-		0,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.140.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	0,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				16 Orang	13.140.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
371	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	26.730.000,00			-		-		3.720.000,00	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	26.730.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	3.720.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			3.720.000,00	KECAMATAN BOBOTSARI
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				16 Dokumen	23.010.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			0,00	KECAMATAN BOBOTSARI
					<b>KECAMATAN KARANGREJA</b>											
					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>											
					<b>KECAMATAN</b>											
								<b>1.809.397.000,00</b>							<b>1.809.397.000,00</b>	
372	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.693.247.000,00			-		-		1.693.247.000,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.500.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.431.143.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.431.143.000,00		
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0				0 0	1.415.693.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.415.693.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	1.500.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13.950.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.950.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.175.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.175.000,00		
7	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.175.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.175.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	26.817.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	26.817.000,00		
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.500.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.317.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.317.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.200.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.000.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	3.300.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.300.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	31.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	31.500.000,00		
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	10.500.000,00		Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	21.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		21.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.08					65.112.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		65.112.000,00	
7	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		16.800.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.312.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		48.312.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.09					132.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		132.000.000,00	
7	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	85.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		85.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	40.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		40.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
373	7	01	02					7.640.000,00							7.640.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
7	01	02	2.01					7.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.000.000,00	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
7	01	02	2.01	0002			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peringkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	02	2.04					640.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		640.000,00	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
7	01	02	2.04	0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				17 Dokumen	640.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		640.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
374	7	01	03					26.500.000,00							26.500.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7	01	03	2.01					26.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		26.500.000,00	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
7	01	03	2.01	0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		8.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA
7	01	03	2.01	0003			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	18.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		18.500.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
375	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	32.200.000,00					-	-	32.200.000,00		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	32.200.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	32.200.000,00		
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		22.200.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
376	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	30.000.000,00					-	-	30.000.000,00		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	30.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	30.000.000,00		
	7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				350 Orang	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		30.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
377	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	19.810.000,00					-	-	19.810.000,00		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	19.810.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	19.810.000,00		
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.000.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	15.810.000,00	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.810.000,00	KECAMATAN KARANGREJA	
			<b>KECAMATAN KARANGANYAR</b>													<b>0,00</b>	
			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													<b>0,00</b>	
			<b>KECAMATAN</b>													<b>0,00</b>	
378	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.492.000.000,00					-	-	0,00		
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.302.000,00					-	-	0,00		
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.712.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR	
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan Laporan	2.590.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.238.737.000,00					-	-	0,00		
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.210.092.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	725.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	27.920.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			-	-			-	900.000,00			-	-	-		0,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			-	-			-	23.931.000,00			-	-	-		0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.431.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			-	-			-	2.500.000,00			-	-	-		0,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	135.630.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	50.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	107.580.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			-	-			-	83.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	74.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
379	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	21.080.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	21.005.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	-	75.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	75.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
380	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	37.850.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	-	37.850.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	32.850.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
381	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	24.820.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	24.820.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	2.620.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
382	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	24.975.000,00			-		-	-	0,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	-	-	24.975.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			30 Orang	24.975.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
383	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	18.270.000,00					-	0,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	18.270.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	0,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen	175.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			13 Dokumen	18.095.000,00	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR
									1.770.282.000,00						1.412.833.000,00	
7					KECAMATAN KARANGMONCOL				1.770.282.000,00						1.412.833.000,00	
7	01				KECAMATAN				1.770.282.000,00						1.412.833.000,00	
384	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.617.204.000,00					-	1.326.105.000,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.954.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	2.154.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan	800.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.399.053.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.321.255.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/bulan	1.375.243.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.321.255.000,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	11.540.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen	12.270.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	1.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1.800.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	13.105.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1.056.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	6.149.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						27.112.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	27.112.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.960.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	27.292.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	67.668.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.220.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.850.000,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	73.370.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4.850.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.850.000,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
385	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						61.828.000,00							61.828.000,00	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						61.688.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			61.688.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
							0 Dokumen	61.688.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		61.688.000,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	140.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	140.000,00		
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
							0 Laporan	140.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		140.000,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
386	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	32.540.000,00			-		-	24.900.000,00			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	24.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	24.900.000,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							0 Laporan	24.900.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.900.000,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.640.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
							0 Lembaga Kemasyarakatan	7.640.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
387	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	20.300.000,00			-		-	0,00			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	20.300.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
							0 Laporan	17.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
							0 Laporan	2.800.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
388	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 persen	20.440.000,00			-		-	0,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	12 dokumen	20.440.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	0,00		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												
							0 Orang	20.440.000,00	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL	
389	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	17.970.000,00			-		-	0,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	06	2.01					17.970.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	
7	01	06	2.01	0006								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			0,00	KECAMATAN KARANGMONCOL
								1.943.799.000,00							5.516.234.000,00	
7								1.943.799.000,00							5.516.234.000,00	
7	01							1.943.799.000,00							5.516.234.000,00	
390	7	01	01					1.817.889.000,00							5.368.734.000,00	
7	01	01	2.01					5.050.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			9.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
								3.050.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.01	0007								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
								2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.02					1.510.371.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.633.134.000,00	
7	01	01	2.02	0001								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.605.134.000,00	KECAMATAN REMBANG
								1.492.171.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.02	0002								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			13.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
								7.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.02	0004								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			15.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
								11.200.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.03					1.440.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.700.000.000,00	
7	01	01	2.03	0006								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.700.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
								1.440.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
7	01	01	2.06					37.528.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.736.600.000,00	
7	01	01	2.06	0001								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				
								1.800.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.06	0004								Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.128.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		17.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.700.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	18.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.600.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
								18.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.500.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	18.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								134.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		150.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		25.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		120.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								111.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		120.500.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	93.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		95.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			0				3 0	7.500.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		10.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
391	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
								23.000.000,00							30.500.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.01					18.750.000,00							25.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										25.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
							0									
7	01	02	2.04					4.250.000,00							5.500.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										5.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
							0									
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha										5.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
							0									
392	7	01	03					19.800.000,00							27.500.000,00	
7	01	03	2.01					19.800.000,00							27.500.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										13.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
							7 Lembaga Masyarakat	10.100.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										14.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
							4 Laporan	9.700.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
393	7	01	04					34.700.000,00							39.000.000,00	
7	01	04	2.01					34.700.000,00							39.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										25.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
							4 Laporan	23.700.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										14.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
							12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
394	7	01	05					14.000.000,00							18.000.000,00	
7	01	05	2.01					14.000.000,00							18.000.000,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										18.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
							150 Orang	14.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
395	7	01	06					34.410.000,00							32.500.000,00	
7	01	06	2.01					34.410.000,00							32.500.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										32.500.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			15.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	20.410.000,00	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			17.500.000,00	KECAMATAN REMBANG
								<b>1.837.151.000,00</b>								<b>2.113.986.500,00</b>
<b>KECAMATAN BOJONGSARI</b>								<b>1.837.151.000,00</b>								<b>2.113.986.500,00</b>
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>1.837.151.000,00</b>								<b>2.113.986.500,00</b>
<b>KECAMATAN</b>								<b>1.837.151.000,00</b>								<b>2.113.986.500,00</b>
396	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.700.751.500,00							1.700.751.500,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif			5.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif			3.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.349.172.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.349.172.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			0				0	1.328.232.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.328.232.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.500.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	18.440.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			18.440.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	660.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			660.000,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	660.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			660.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.478.500,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			19.478.500,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.232.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			9.232.500,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.500.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.396.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.396.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	2.350.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.350.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	36.840.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			36.840.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.056.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			181.056.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	86.545.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			86.545.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.09	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				10.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	12.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			12.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
397	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	11.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			11.600.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
398	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
398	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
398	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI
398	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.000.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	34.360.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	34.360.000,00		
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					7 Lembaga Kemasyarakatan	13.280.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.280.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	21.080.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		21.080.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
399	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	32.750.000,00			-		-	-	32.750.000,00		
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	32.750.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	32.750.000,00		
7	01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	18.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		18.500.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
7	01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	14.250.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		14.250.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
400	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	30.759.500,00			-		-	-	307.595.000,00		
7	01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	30.759.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	307.595.000,00		
7	01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					150 Orang	30.759.500,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		307.595.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
401	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	25.930.000,00			-		-	-	25.930.000,00		
7	01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	25.930.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	25.930.000,00		
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					2 Dokumen	7.140.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.140.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
7	01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					13 Dokumen	18.790.000,00	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		18.790.000,00	KECAMATAN BOJONGSARI	
<b>KECAMATAN PADAMARA</b>								<b>2.595.490.000,00</b>								<b>2.776.708.000,00</b>	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								<b>2.595.490.000,00</b>								<b>2.776.708.000,00</b>	
<b>KECAMATAN</b>								<b>2.595.490.000,00</b>								<b>2.776.708.000,00</b>	
402	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	2.424.922.000,00			-		-	-	2.560.446.000,00		
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	9.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	6.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	4.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.120.906.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	2.215.669.000,00		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.101.561.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	2.195.919.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	18.745.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	18.750.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.140.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.500.000,00		
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.140.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.952.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	19.950.000,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	1.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.368.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	0,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	450.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	450.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	7.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	5.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA	
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									-		-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 Dokumen	2.634.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		5.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.07					5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.500.000,00	
7	01	01	2.07	0006												
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.08					169.577.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		170.327.000,00	
7	01	01	2.08	0001												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		12 Laporan	300.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		300.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.08	0002												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		1 Laporan	28.350.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		28.100.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.08	0003												
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.08	0004												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		1 Laporan	139.927.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		139.927.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.09					98.147.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		141.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		9 Unit	91.647.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.09	0006												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		4 Unit	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	01	2.09	0009												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		40.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA
403	7	01	02					58.729.000,00			-		-		95.112.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Padamara	-		4,2 angka									
7	01	02	2.01					57.729.000,00			-		-		94.100.000,00	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		100 %									
7	01	02	2.01	0002												
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		4 Dokumen	57.729.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		94.100.000,00	KECAMATAN PADAMARA
7	01	02	2.04					1.000.000,00			-		-		1.012.000,00	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
							1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.012.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
404	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	41.549.000,00					-	-	46.000.000,00			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	41.549.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	46.000.000,00			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
							7 Lembaga Kemasyarakatan	19.024.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		23.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							1 Laporan	22.525.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		23.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
405	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	23.950.000,00					-	-	30.500.000,00			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	23.950.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	30.500.000,00			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
							1 Laporan	22.950.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
							1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
406	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	25.000.000,00					-	-	43.000.000,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	25.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	43.000.000,00			
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
							70 Orang	25.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		43.000.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
407	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	21.340.000,00					-	-	1.650.000,00			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	21.340.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.650.000,00			
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
							1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.500.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
							1 Dokumen	19.840.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		150.000,00	KECAMATAN PADAMARA		
								<b>366.049.000,00</b>									<b>14.225.708.800,00</b>	
7								<b>360.749.000,00</b>									<b>14.220.408.800,00</b>	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>KECAMATAN</b>						<b>360.749.000,00</b>							<b>14.220.408.800,00</b>	
408	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	67.949.000,00					-	-	67.608.800,00	
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.500.000,00	
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.500.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	600.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	600.000,00	
	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	600.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	600.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	11.910.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	11.569.800,00	
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	378.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	37.800,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.032.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	6.032.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.500.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	38.076.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	38.076.000,00	
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.520.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	16.520.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.556.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	20.556.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	15.863.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.863.000,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					10.400.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	10.400.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2.463.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.463.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
409	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	292.800.000,00			-		-	-	14.152.800.000,00	
7	01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	292.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	14.152.800.000,00	
7	01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					140.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	14.000.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
7	01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					150.800.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	150.800.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
7	01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.000.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
X		NON URUSAN						5.300.000,00							5.300.000,00	
X	XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.300.000,00							5.300.000,00	
410	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	5.300.000,00			-		-	-	5.300.000,00	
X	XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5.300.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.300.000,00	
X	XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.300.000,00	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.300.000,00	KELURAHAN KARANGSENTUL
		KECAMATAN PENGADEGAN						2.116.795.000,00							408.817.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.116.795.000,00							408.817.000,00	
7	01	KECAMATAN						2.116.795.000,00							408.817.000,00	
411	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	1.983.114.000,00			-		-	-	292.386.000,00	
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	6.533.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	12.101.000,00	
7	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.698.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	6.726.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-				-		-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.835.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.375.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.02				-	1.712.808.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	15.999.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.698.876.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	1.907.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.974.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12.025.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		12.025.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.800.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.800.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.284.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.284.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7.210.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		7.210.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.000.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	437.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		500.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.800.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.800.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.715.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.715.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.800.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1.350.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.800.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20.700.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		20.700.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.08				-	130.092.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		130.092.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.032.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		19.032.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	111.060.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		111.060.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.09				-	94.185.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		94.185.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	76.648.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		76.648.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.500.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.037.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.037.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN
412	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	-	4,2 angka	49.467.000,00					-	49.467.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	12 dokumen	48.652.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kecamatan Pengadegan / masyarakat	-	48.652.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	48.652.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kecamatan Pengadegan / masyarakat	-	48.652.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Laporan	815.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		815.000,00	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	815.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		815.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
413	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Pengadegan	-			100 persen	29.328.000,00					-		29.328.000,00		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	29.328.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	29.328.000,00		
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	13.493.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		13.493.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15.835.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		15.835.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
414	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	26.936.000,00					-		26.936.000,00		
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	26.936.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	26.936.000,00		
7	01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.050.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		22.050.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
7	01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4.886.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.886.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
415	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	4.550.000,00					-		4.550.000,00		
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	-	-			-	4.550.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	4.550.000,00		
7	01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	4.550.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.550.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
416	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	23.400.000,00					-		6.150.000,00		
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	23.400.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	6.150.000,00		
7	01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	6.150.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		6.150.000,00	KECAMATAN PENGADEGAN	
7	01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				8 Dokumen	17.250.000,00	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		0,00	KECAMATAN PENGADEGAN			
		<b>KECAMATAN KARANGJAMBU</b>							<b>1.876.074.000,00</b>								<b>5.700.455.000,00</b>		
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>1.876.074.000,00</b>									<b>5.700.455.000,00</b>	
7	01	<b>KECAMATAN</b>							<b>1.876.074.000,00</b>									<b>5.700.455.000,00</b>	
417	7	01	01					1.732.916.000,00									5.536.157.000,00		
								2.030.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				2.030.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				1.130.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				900.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
								1.499.689.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				5.300.630.000,00		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				5.282.150.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				900.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				17.580.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
								900.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				900.000,00		
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				900.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
								33.240.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				33.340.000,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				1.500.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				24.640.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi				200.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3.700.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.700.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			3.300.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
								500.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			700.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			700.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								123.760.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			123.760.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			11.500.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	112.260.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			112.260.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
								72.797.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			74.797.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	65.429.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			67.429.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2.100.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			2.100.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.268.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.268.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
418	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
								31.638.000,00							61.638.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
								30.993.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			60.993.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	30.993.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			60.993.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
								645.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			645.000,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	645.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			645.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
419	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	40.450.000,00					-	-	44.860.000,00			
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	40.450.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	44.860.000,00			
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	13.260.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.260.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	27.190.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-	-	31.600.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
420	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	24.800.000,00					-	-	24.800.000,00			
	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	24.800.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	24.800.000,00			
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	22.200.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	2.600.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	2.600.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
421	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	32.000.000,00					-	-	32.000.000,00			
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	32.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	32.000.000,00			
	7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	32.000.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
422	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	14.270.000,00					-	-	1.000.000,00			
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	14.270.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.000.000,00			
	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	14.270.000,00	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN KARANGJAMBU		
		<b>KECAMATAN KERTANEGARA</b>							<b>1.559.323.000,00</b>							<b>1.667.204.000,00</b>		
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>1.559.323.000,00</b>								<b>1.667.204.000,00</b>	
		<b>KECAMATAN</b>							<b>1.559.323.000,00</b>								<b>1.667.204.000,00</b>	
423	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	1.425.218.000,00					-	-	1.540.039.000,00			
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentasi ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	-	100 persen	8.200.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	9.020.000,00			
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.620.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.400.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.210.232.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	1.302.924.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.183.882.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.273.939.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.400.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				70 Dokumen	22.350.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		24.585.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	990.000,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	900.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		990.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	24.750.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		4.400.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		11.000.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		1.320.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.200.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		2.200.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-		3.630.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.250.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.770.000,00	
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.250.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.770.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88.696.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	97.585.000,00	
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.300.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	21.250.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69.396.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	76.335.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.440.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	99.000.000,00	
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	88.000.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.440.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
424	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai evaluasi pelayanan publik	-			4,5 angka	12.495.000,00			-		-	-	13.745.000,00	
7	01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-			12 dokumen	12.050.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.255.000,00	
7	01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0				12 0	12.050.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	13.255.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	-			16 jenis	445.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	490.000,00	
7	01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	445.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	490.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
425	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	-			100 Persen	45.000.000,00			-		-	-	49.500.000,00	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan	-			11 kegiatan	45.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	-	-	49.500.000,00	
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									-		-	-		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			5.500.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			44.000.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
426	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan									28.820.000,00	
							12 dokumen	26.200.000,00								
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum									28.820.000,00	
							12 kegiatan	26.200.000,00								
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							12 Laporan	22.200.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			24.420.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
							2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			4.400.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
427	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan									34.000.000,00	
							100 Persen	31.000.000,00								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik									34.000.000,00	
							12 dokumen	31.000.000,00								
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa											
							200 Orang	31.000.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			34.000.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
428	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melakukan tertib administrasi									1.100.000,00	
							81 Persen	19.410.000,00								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang dibina oleh kecamatan									1.100.000,00	
							100 persen	19.410.000,00								
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
							11 Dokumen	19.410.000,00	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi			1.100.000,00	KECAMATAN KERTANEGARA
								7.145.983.000,00							7.387.987.000,00	
8								7.145.983.000,00							7.387.987.000,00	
8	01							7.145.983.000,00							7.387.987.000,00	
429	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.640.899.000,00							2.819.311.000,00	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.245.000,00							3.245.000,00	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							2 Dokumen	1.417.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			1.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.828.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		1.828.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.065.242.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	2.065.242.000,00	
8	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.975.642.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		1.975.642.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		53.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	36.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		36.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	3.900.000,00	
8	01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	3.900.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		3.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.787.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	15.000.000,00	
8	01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	5.787.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	62.057.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	87.900.000,00	
8	01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.200.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.657.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	8.100.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	8.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	42.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	100.000.000,00		
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	42.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	275.668.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	274.024.000,00		
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	55.120.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	51.120.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	208.548.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	210.904.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	183.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	270.000.000,00		
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Unit	170.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
430	8	01	02			PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-		527.641.000,00			-		851.900.000,00			
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-		527.641.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	851.900.000,00		
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3600 Orang	80.460.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	181.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka														
						Jumlah Paskibraka				31 Orang	447.181.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
431	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-		2.327.336.000,00			-		2.187.370.000,00			
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-		2.327.336.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	2.187.370.000,00		
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	2.285.286.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	2.085.286.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1134 Orang	42.050.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	102.084.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
432	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-		683.022.000,00			-		212.766.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	683.022.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	212.766.000,00	
8	01 04 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Dokumen	678.322.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		207.766.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	4.700.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
433	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	-	-	161.365.000,00			-		-	-	168.650.000,00	
8	01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	161.365.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	168.650.000,00	
8	01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1134 Orang	159.040.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		163.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	2.325.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
434	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	-	-	805.720.000,00			-		-	-	1.147.990.000,00	
8	01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	805.720.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-	-	1.147.990.000,00	
8	01 06 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Dokumen	359.400.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul	-		414.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3000 Orang	372.670.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			423.930.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	58.650.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			60.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul			249.390.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>J U M L A H</b>								<b>2.182.585.841.000,00</b>							<b>2.086.181.323.945,16</b>	

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 sebagai berikut.

**Tabel VI. 1. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
1.	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000
2.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah terhadap APBD	persen	1,06	1,07	1,13
3.	Angka Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,97	71,63	71,96
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,96	82,5	83
6.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO <sup>2</sup> eq	448.472,89	522.952,69	609.801,67
7.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5,3	5,3 - 5,7
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,314	0,31	0,35
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	78,47	80,32	80,7
10.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5
11.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	67,04	68,58	71,37
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,28	77,05	77,22
13.	Nilai SAKIP	Angka	68,1	70,01	70,5
14.	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,18	78	78,5
15.	Indeks Desa	Angka	NA	0,7891	0,8177
16.	Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten	Persen	84,04	86,01	88,02
17.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61
18.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,05	62,43 - 63,94	63,19 - 64,7
19.	Angka Konflik Sosial dan Kriminalitas	per 100.000 penduduk	7,85	7,5	7,2

## 6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel VI. 2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
<b>A</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI</b>				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,47	80,32	80,7
2	<i>Prevalence of Undernourishment</i> /PoU	Persen	8,63	8	7,53
3	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	35,08	40,48	44,2
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	75,28	77,05	77,22
5	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	15,59	16,1	20,7
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,01	1,5	3,15
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO <sup>2</sup> eq	448.472,89	522.952,69	609.801,67
8	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	120,19	118	116
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	55,96	80	84,5
<b>B</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 - 5,3	5,3 - 5,7
2	PDRB per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	32.090	35.000 - 36.000	36.000 - 38.000
3	Laju Inflasi	Persen	1,51	1-3	1-3
4	Indeks Gini	Angka	0,314	0,31	0,35
5	Angka Kemiskinan	Persen	14,18	14,06 – 12,86	12,86 - 11,86
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,97	71,63	71,96
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61
9	Prevalensi Stunting	Persen	22,3	24,22	23,1
10	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	11	10	10
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB	Persen	91,32	90	90,63
12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90,92	91,51	91,72
13	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,36	7,56	7,76
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,03	12,56	12,71
15	Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 Tahun	Persen	86,71	89,05	89,73
16	Angka Literasi dan Numerasi				
	a.Kemampuan Literasi SD	Persen	68,77	71,27	73,77
	b.Kemampuan Literasi SMP	Persen	77,92	79,02	80,12
	c. Kemampuan Numerasi SD	Persen	57,68	60,58	63,48
	d. Kemampuan Numerasi SMP	Persen	67,15	68,65	70,15
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	4,93	5,44	5,59
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	88,37	89	89,48
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100,66	100	100
20	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	Persen	20	21	27,34
21	Jumlah Total Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	12.244	25.669	26.512

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET
			2024	2025	TAHUN 2026
22	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	40,98	43,16	44,52
23	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	45,51	18,81	18,95
24	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,11	0,11	0,22
25	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,05	62,43 - 63,94	63,19 - 64,7
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,381	0,36 - 0,35	0,35 - 0,34
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	28,27	28,95	29,37
2	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	7.747,27	8.105,64	8.661,76
3	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,62	2,7	2,92
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	25	23	28
5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	0,791	1,63	2,03
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,26	3,85	4,25
7	<i>Return On Asset</i> (ROA) BUMD	Persen	2,96	2,14	2,49
8	Disparitas Harga	Persen	± 10	± 10	± 10
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	62,25	65,41	66,4
10	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,38	2,4	2,56
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	12,62	20,38	20,73
12	Indeks Jalan Mantap	Persen	68,38	72	81
13	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	72,50	73,75	75,00
14	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70,73	70,73	73,17
15	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan	Persen	31,12	33,05	35,19
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	NA	43,30	44,20
17	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	91,09	91,49	91,90
18	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,26	0,48	0,485
19	Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB	Persen	4,75	4,8	6,06
20	Total Kredit Terhadap PDRB	Persen	6,13	6,5	7,66
21	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	21,86	20,58 - 20,78	20,83 - 21,05
22	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	4,28	4,34	4,36
<b>D</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,93	3,94	3,95
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,44	4,45	4,46
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	68,10	70,01	70,50
4	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	81,96	82,5	83
5	Indeks Integritas Nasional (IIN)	Angka	77,18	78	78,5
6	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	97,14	97,5	98
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0
<b>E</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD</b>				
<b>1)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1	<b>Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten</b>	Persen	84,04	86,01	88,02
	a. Kemampuan Literasi SD	Persen	68,77	71,27	73,77
	b. Kemampuan Literasi SMP	Persen	77,92	79,02	80,12
	c. Kemampuan Numerasi SD	Persen	57,68	60,58	63,48

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET
			2024	2025	TAHUN 2026
	d. Kemampuan Numerasi SMP	Persen	67,15	68,65	70,15
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,36	7,56	7,76
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,03	12,56	12,71
<b>2)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,62	0,65	0,7
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	95,28	80	80
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000	15,76	15,3	14,8
<b>3)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) PUPR	Angka	62,55	65,62	70,96
2	Indeks Jalan Mantap	Persen	68,38	72,00	81,00
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	72,50	73,75	75,00
4	Persentase Bangunan Gedung yang Tertib Administrasi dan Layak	Persen	45,30	47,23	49,10
5	Persentase SDM Jasa Konstruksi Tersertifikasi	Persen	48,57	57,14	71,43
6	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	77,99	78,00	78,25
<b>4)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	91,09	91,49	91,90
2	Cakupan Kawasan Permukiman Tidak Kumuh	Persen	95,83	97,69	97,76
<b>5)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,13*	67,14	67,15
2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,85*	85,86	85,87
3	Indeks Satlinmas	Angka	50,04*	50,05	50,06
4	Indeks Kebakaran	Angka	50,04*	50,05	50,06
5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	120,19	118	116
6	Indek Ketahanan Daerah ( IKD )	Angka	0,54	0,57	0,6
<b>6)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	3,55	3,00	6,00
2	Cakupan PAS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen	93,81	85,70	86,20
<b>7)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,96	4,96 - 4,79	4,79 - 4,5
2	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,04	95,17	95,4
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak		89,93	91,72	93,51
<b>8)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,381	0,36 - 0,35	0,35 - 0,34
2	Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Kategori	Pratama	Madya	Madya
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,2	62,3	62,5
4	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732,65*	732,65	742,50

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
9)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
1	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	Angka	78,47	80,32	80,7
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	8,63	8	7,53
10)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	<b>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah</b>	Angka	32,71	35,16	36,21
2	Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	38,06	38,35	38,65
3	<b>IKLH</b>	Angka	75,28	77,05	77,22
4	Indeks Kualitas Air dan Udara	Angka	57,55	63,77	63,93
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	9,55	13,27	13,29
11)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	93,15	93,55	93,94
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	89,64	90,00	91,00
12)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	<b>Persentase Desa Mandiri</b>	Persen	NA	43,30	44,20
2	Jumlah Desa yang Naik Status Mandiri	Desa	NA	NA	2
13)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	58,4	59,6	60,7
2	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,1	2,17 - 2,1	2,16 - 2,09
14)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
1	<b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan</b>	Angka	50,92	51,89	54,18
2	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	70,73	70,73	73,17
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persen	31,12	33,05	35,19
15)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	<b>Indeks Pemerintah Digital</b>	Angka	NA	2	2
2	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	17,86	18,27	18,69
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,19	96,2	96,21
16)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
1	<b>Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB</b>	Persen	0,791	1,63	2,03
2	Persentase Koperasi Sehat	Persen	64,46	65,66	66,87
3	<b>Rasio Kewirausahaan Daerah</b>	Persen	3,26	3,85	4,25
4	Persentase Usaha Mikro Binaan yang menjadi Wirausaha	Persen	1,02	1,15	1,28
17)	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
1	Persentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	100	100
2	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	95,51	96,68	97,00

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
<b>18)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	NA	52	54
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0,312	0,317	0,324
3	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	51,04	53,715	56,11
<b>19)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
1	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	3	3	3
<b>20)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	376	376	378
<b>21)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
1	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)	Persen	72,73	81,82	81,82
2	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup no.430/400 Tahun 2018 yang Dilestarikan atau Dikembangkan	Persen	70,00	80,00	80,00
3	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	18,83	19,48	20,13
<b>22)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,33	70,4	70,5
2	Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Angka	62,66	66	67
<b>23)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
1	Indeks Kearsipan	Angka	85,23	85,25	86,00
2	Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Internal Kearsipan	Persen	88,28	88,50	88,75
<b>24)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4,17	4,2 - 4,7	4,7 - 5,7
2	PDRB Sub Sektor Perikanan	Milyar Rupiah	532,43	585,60	613,62
<b>25)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				
1	PDRB Sektor Pariwisata	Milyar Rupiah	3.050.492,60	3.086.991,00	3.162.804,00
2	Persentase Capaian Kunjungan Wisatawan	Persen	115,06	96,67	96,84
3	Persentase Capaian Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100,00	98,73	98,75
<b>26)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Persen	1,71	1,75 - 1,85	1,76 - 1,86
2	PDRB Sub Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	7.747,27	8.105,64	8.661,76
<b>27)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,35	5,35 - 6,00	5,45 - 6,1
2	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	4.218,88	4.429,82	4.651,32

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
<b>28)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,25	4,25 - 4,55	4,55 - 4,85
2	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	9.430,94	9.713,87	10.005,28
<b>29)</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	68,10	70,01	70,50
2	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Angka	3,31	3,31	3,32
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tingkat	Angka	76,98	77,00	80,00
<b>30)</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD</b>				
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	80,03	81	82
2	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	99,52	100	100
<b>31)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN</b>				
1	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah)	Angka	58,3	65	70
2	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Persen	98,74	100	100
3	Nilai MRI Kabupaten	Angka	2,878	2,978	2,998
<b>32)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,38	2,4	2,56
<b>33)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN</b>				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	63,72	66,90	70,25
2	Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	4,08	7,58	7,67
3	Status Opini BPK terhadap LKPD	Level	WTP	WTP	WTP
<b>34)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN</b>				
1	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	79,38	81	81,5
2	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Angka	0,63	0,64	0,65
<b>35)</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH</b>				
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,067	3,08	3,15
2	Kapabilitas APIP	Angka	3,00	3,04	3,10
3	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,91	2,95	3,00
<b>36)</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	98,31	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
2	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	Angka	4,66	4,7	4,75
<b>37)</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				
1	Indeks Harmoni	Angka	NA	6,75	6,75 - 7
2	Persentase Potensi Konflik yang Diredam Tidak Menjadi Konflik	Persen	97,37	97,5	98
<b>38)</b>	<b>NON URUSAN</b>				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	61,11 - 76,96	67 - 77	68,5 - 78,5
<b>F</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>				
<b>1)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	103,73	100	100
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	100,43	100	100
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	94,35	100	100
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	100	100	100
<b>2)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1	1	1
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	100	100	100
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
8	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
9	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
10	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
11	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	100	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	100	100	100
14	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100
<b>3)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	68,38	72,00	81,00
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	0	0
3	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengamanan Pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	0	0
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persen	96,52	96,53	96,58
5	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	95,37	95,39	95,41
6	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	98,58	100	100
7	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	Persen	100	100	100
8	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	73,00	74	75
9	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	100	100	100
<b>4)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen	55,14	57,62	60,11
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,49	1,45	1,41
5	Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100
<b>5)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	75	100	100
7	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	12,68	12,68	12,68
<b>6)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
<b>7)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	46,15	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	46,66	100	100
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	50	89,93	91,72
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	53,76	58,83	63,91
<b>8)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	39,57	50	50
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	Persen	100	100	100
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	6,57	6	5
<b>9)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	121,04	100	100
<b>10)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	95,75	100	100
2	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal.	Persen	95,67	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	0
5	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Persen	0	0	0
6	Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100	100	100
<b>11)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Angka	75,28	77,05	77,22
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	88,05	100	100
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	2,52	100	100
<b>12)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII</b>				
1	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	97,84	98,3	98,5
2	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,51	99,53	99,55
3	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	62,25	64,25	66,25
4	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persen	100	100	100
<b>13)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	54,17	43,30	44,20
<b>14)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1	2,17 - 2,1	2,16 - 2,09
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	34,76	34,85	34,95
3	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	7,60	7,50	7,30
<b>15)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Angka	70,73	70,73	73,17
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (VC Rasio)	Angka	0,45	0,45	0,45
<b>16)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	100
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100
<b>17)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	18,82	20,00	21,18
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirasausaha	Persen	1,02	1,15	1,28
<b>18)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	-34,78		
<b>19)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA</b>				
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	1,86		
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	Persen	7,18		
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	23		
<b>20)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
2	Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100
<b>21)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	58,29	58,29	58,60
<b>22)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100
<b>23)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	62,66	66	67
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,33	70,4	70,5
<b>24)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Ps 40 dan 59 UU 43/2009)	Persen	100	100	100
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara,	Persen	83,34	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
	Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat				
<b>25)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Persen	96,47	100	100
<b>26)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	Persen	150	100	100
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang	Persen	10,91		
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	23,54		
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PDRB	Persen	2,62		
5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PAD	Persen	3,58		
<b>27)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				
1	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Persen	734,77		
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-4,62		
<b>28)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100
2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	58,51	100	100
3	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	75,43	77,34	89,84
<b>29)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	Persen	43,74	28,67	20,43
2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	100	100
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100
5	Persentase jmlh hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Persen	0	100	100

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100
<b>30)</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				
1	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Pembinaannya	Persen	100	100	100
<b>31)</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	Persen	0		
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	89,28	100	100
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	73,29		
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	-15,27	100	100
<b>32)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN</b>				
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	10,22		
2	Rasio PAD	Persen	16,72		
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	71,86		
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	Persen	-2,66		
6	Manajemen Aset	Persen	Ya (4x)		
7	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	2,67		
8	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	15,84		
9	Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan	Persen	97,38	100	100
10	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	100	100	100
<b>33)</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN</b>				
1	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65,57	67	68
2	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	24,33	24,5	25
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	75,35	75,5	75,75
<b>34)</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH</b>				

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,067	3,08	3,15
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,04	3,1

## BAB VII PENUTUP

Pada dasarnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berada pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD baru tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penetapan. Dalam proses penyusunannya, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 tidak terlepas dari hasil evaluasi target dan capaian pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045, RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2045 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029.

Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta pendekatan *top down* dan *bottom up*. Selain itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026 yang akan diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 juga akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 untuk mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Kabupaten Purbalingga yaitu “Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”.

BUPATI PURBALINGGA

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF